



D A S A R - D A S A R

# TEORI SOSIAL DAN

# PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA



Selamat Riadi, S.Sos., M.A.P.  
Barkatullah, S.Sos., M.A.

**DASAR-DASAR TEORI SOSIAL  
DAN PERKEMBANGANNYA DI  
INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**HAK CIPTA**  
**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1 Ayat 1 :**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 114**

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selamat Riadi, S.Sos., M.A.P.  
Barkatullah, S.Sos., M.A.

# **DASAR-DASAR TEORI SOSIAL DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA**

Diterbitkan Oleh



# DASAR-DASAR TEORI SOSIAL DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Penulis : Selamat Riadi, S.Sos., M.A.P.  
Barkatullah, S.Sos., M.A.  
Penata Letak : Irfan W. Wicaksono  
Perancang Sampul : Ridwan Nur M

## **Penerbit:**

### **CV Bintang Semesta Media**

Anggota IKAPI Nomor 147/DIY/2021  
Jl. Maredan No. F01, Maredan, RT.06/RW.41,  
Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 55573  
Telp: (0274)2254549. Hp: 085865342317  
Facebook: Penerbit Bintang Madani  
Instagram: @bintangsemestamedia  
Website: [www.bintangpustaka.com](http://www.bintangpustaka.com)  
Email: [bintangsemestamedia@gmail.com](mailto:bintangsemestamedia@gmail.com)  
[redaksibintangpustaka@gmail.com](mailto:redaksibintangpustaka@gmail.com)

Cetakan Pertama, Desember 2025  
Bintang Semesta Media Yogyakarta  
xxii + 259 hal : 15 x 23 cm  
ISBN Cetak: 978-623-129-819-5  
ISBN Digital: 978-623-129-818-8 (PDF)

Dicetak Oleh:  
Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All right reserved*  
Isi di luar tanggung jawab percetakan

## **PRAKATA**

Buku ajar ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan sebuah panduan komprehensif yang mampu menjembatani khazanah pemikiran sosial global dengan konteks partikular Indonesia. Dalam era disrupsi informasi dan percepatan perubahan sosial, kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkritisi realitas sosial dengan kerangka teoretis yang kokoh menjadi sebuah kompetensi krusial bagi para mahasiswa ilmu sosial. Urgensi buku ini terletak pada upayanya untuk tidak hanya menyajikan parade teori-teori besar secara deskriptif, tetapi juga mendorong pembaca untuk secara aktif mengungkapkannya dengan fenomena-fenomena sosial yang mereka amati dan alami sehari-hari di Indonesia. Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menyediakan fondasi teoretis yang solid, memantik daya analisis kritis, serta menginspirasi lahirnya pemikiran-pemikiran sosial baru yang berakar pada realitas keindonesiaan.

## **KATA PENGANTAR**

Kehadiran buku ajar ini di hadapan para pembaca, khususnya mahasiswa, merupakan sebuah undangan untuk memasuki sebuah dialog intelektual yang panjang dan kaya mengenai cara kita memahami masyarakat. Harapan penulis adalah agar buku ini tidak diperlakukan sebagai kumpulan dogma yang harus dihafal, melainkan sebagai sebuah peta konseptual yang dinamis, yang dapat digunakan untuk menavigasi kompleksitas lanskap sosial. Semoga setiap babnya mampu memprovokasi pertanyaan, bukan hanya memberikan jawaban. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual selama proses penulisan. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada para pemikir dan peneliti sosial di Indonesia yang karyanya menjadi inspirasi, serta kepada para mahasiswa yang dengan antusiasme dan daya kritisnya selalu menjadi sumber energi utama dalam setiap diskursus akademik. Semoga buku ini bermanfaat sebagai pemantik api intelektual bagi generasi penerus ilmuwan sosial Indonesia.

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN: HAKIKAT DAN PERAN TEORI SOSIAL</b> .....	<b>1</b>
Tujuan Pembelajaran.....	1
1.1 Definisi dan Batasan Konseptual Teori Sosial	3
1.1.1 Perbedaan Teori Sosial dan Teori Sosiologi.....	5
1.1.2 Fungsi Teori Sosial dalam Ilmu-Ilmu Sosial .....	7
1.1.3 Elemen Dasar Pembentuk Teori Sosial .	8
1.1.4 Level Analisis Teori Sosial (Mikro, Meso, Makro).....	9
1.1.5 Hubungan antara Teori Sosial dan Realitas Sosial .....	10
1.2 Sejarah Perkembangan Awal Pemikiran Sosial.....	11
1.2.1 Masa Pencerahan (Enlightenment) dan Rasionalitas .....	13
1.2.2 Revolusi Industri dan Lahirnya Masalah Sosial .....	14

1.2.3 Pengaruh Filsafat Klasik (Plato, Aristoteles) .....	15
1.2.4 Reaksi Konservatif terhadap Perubahan Sosial .....	16
1.2.5 Kontribusi Tokoh Pra-Sosiologi .....	17
1.3 Epistemologi dan Metodologi dalam Teori Sosial .....	18
1.3.1 Perdebatan Positivisme dan Anti-Positivisme .....	21
1.3.2 Pendekatan Kuantitatif vs Kualitatif .....	22
1.3.3 Isu Objektivitas dan Subjektivitas dalam Penelitian .....	23
1.3.4 Hermeneutika dan Interpretasi Makna Sosial .....	24
1.3.5 Kritik terhadap Metodologi Dominan ..	25
1.4 Klasifikasi Utama dalam Teori Sosial .....	26
1.4.1 Pembagian Berdasarkan Orientasi (Konflik, Konsensus) .....	28
1.4.2 Pembagian Berdasarkan Fokus (Struktur, Aktor) .....	29
1.4.3 Pembagian Berdasarkan Periodisasi Waktu .....	31
1.4.4 Teori Kritis vs Teori Fungsional .....	32
1.4.5 Relevansi Klasifikasi untuk Analisis .....	33
1.5 Posisi Teori Sosial di Indonesia .....	34
1.5.1 Sejarah Masuknya Ilmu Sosial ke Indonesia .....	36
1.5.2 Tantangan Penerjemahan Konsep Barat .....	37

1.5.3	Awal Mula Kajian Sosiologi di Perguruan Tinggi .....	38
1.5.4	Peran Teori Sosial dalam Pembangunan Nasional.....	39
1.5.5	Relevansi Konsep Lokal dan Kearifan Budaya .....	40
	Rangkuman Bab .....	41
	Latihan Mahasiswa .....	42
	Glosarium Bab .....	46
	Daftar Pustaka Bab .....	47
<b>BAB 2</b>	<b>KLASIK 1: TEORI KARL MARX (KONFLIK DAN STRUKTUR) .....</b>	<b>51</b>
	Tujuan Pembelajaran.....	51
2.1	Konsep Materialisme Historis dan Dialektika	53
2.1.1	Basis dan Superstruktur Masyarakat ....	56
2.1.2	Tahapan Perkembangan Masyarakat dalam Sejarah.....	57
2.1.3	Peran Konflik Kelas sebagai Penggerak Sejarah.....	58
2.1.4	Dialektika: Tesis, Anti-Tesis, Sintesis ....	59
2.1.5	Kritik terhadap Idealisme Hegel.....	60
2.2	Kapitalisme dan Analisis Kelas .....	61
2.2.1	Konsep Kelas Borjuis dan Proletariat....	63
2.2.2	Eksplotasi dan Nilai Lebih (Surplus Value).....	64
2.2.3	Komodifikasi dan Fetisisme Komoditas .....	65
2.2.4	Kontradiksi Internal Sistem Kapitalis ...	66

2.2.5 Masa Depan Masyarakat Komunis .....	67
2.3 Konsep Alienasi (Keterasingan) .....	68
2.3.1 Alienasi dari Produk Kerja .....	70
2.3.2 Alienasi dari Proses Produksi .....	71
2.3.3 Alienasi dari Sesama Manusia .....	72
2.3.4 Alienasi dari Hakikat Diri (Species Being) .....	73
2.3.5 Relevansi Konsep Alienasi di Era Digital.....	73
2.4 Ideologi dan Kesadaran Palsu (False Consciousness).....	74
2.4.1 Ideologi sebagai Alat Dominasi Kelas Berkuasa .....	76
2.4.2 Fungsi Ideologi dalam Melegitimasi Ketidaksetaraan.....	77
2.4.3 Konsep Hegemoni Gramsci (Pengembangan Marxis) .....	78
2.4.4 Peran Intelektual dalam Perjuangan Kelas .....	79
2.4.5 Konsep Kesadaran Kelas Sejati .....	79
2.5 Pengaruh Marxisme dan Kritik di Indonesia .	80
2.5.1 Peran Pemikiran Kiri dalam Pergerakan Nasional.....	82
2.5.2 Interpretasi Struktural terhadap Kemiskinan di Indonesia .....	83
2.5.3 Penerapan Analisis Kelas terhadap Struktur Agraria .....	83
2.5.4 Larangan Formal dan Pengaruh Bawah Tanah.....	84

2.5.5 Teori Ketergantungan (Dependensi Theory) sebagai Turunan.....	84
Rangkuman Bab .....	85
Latihan Mahasiswa.....	85
Glosarium Bab .....	89
Daftar Pustaka Bab .....	90
<b>BAB 3    KLASIK 2: TEORI EMILE DURKHEIM (FUNGSIONALISME DAN KONSENSUS) .....</b>	<b>93</b>
Tujuan Pembelajaran.....	93
3.1 Konsep Fakta Sosial (Social Facts).....	95
3.1.1 Definisi dan Karakteristik Fakta Sosial.	97
3.1.2 Eksternalitas dan Koersivitas Fakta Sosial .....	98
3.1.3 Fakta Sosial Material dan Non-Material	98
3.1.4 Metodologi Studi Fakta Sosial.....	99
3.1.5 Penerapan Konsep dalam Analisis Budaya .....	99
3.2 Solidaritas Sosial dan Pembagian Kerja .....	100
3.2.1 Solidaritas Mekanik (Masyarakat Sederhana).....	102
3.2.2 Solidaritas Organik (Masyarakat Kompleks) .....	102
3.2.3 Peran Pembagian Kerja dalam Integrasi Masyarakat.....	103
3.2.4 Transisi dari Mekanik ke Organik.....	103
3.2.5 Patologi Pembagian Kerja (Anomie).....	104
3.3 Teori Anomie (Ketiadaan Norma) .....	104
3.3.1 Anomie sebagai Kondisi Tanpa Regulasi Moral .....	107

3.3.2	Anomie dalam Konteks Ekonomi dan Keluarga.....	107
3.3.3	Analisis Kasus Bunuh Diri (Suicide) Durkheim .....	107
3.3.4	Tipe-Tipe Bunuh Diri (Egoistik, Altruistik, Anomik, Fatalistik).....	108
3.3.5	Relevansi Konsep Anomie di Tengah Modernisasi.....	109
3.4	Agama sebagai Fakta Sosial Non-Material .....	109
3.4.1	Konsep Sakral dan Profan.....	111
3.4.2	Ritual dan Upacara sebagai Perikat Sosial .....	112
3.4.3	Agama sebagai Cerminan Masyarakat (Totemisme) .....	112
3.4.4	Fungsi Sosial Agama (Kohesi dan Kontrol).....	112
3.4.5	Kritik terhadap Pendekatan Durkheim tentang Agama .....	113
3.5	Pengaruh Fungsionalisme dan Kritik di Indonesia.....	113
3.5.1	Penerapan Konsep Solidaritas dalam Masyarakat Gotong Royong.....	115
3.5.2	Analisis Struktur dan Fungsi Institusi Pembangunan.....	116
3.5.3	Kritik terhadap Bias Konsensus dalam Kebijakan Orde Baru.....	116
3.5.4	Kontribusi terhadap Kajian Keteraturan Sosial .....	117
3.5.5	Teori Fungsionalisme Struktural (Parsons, Merton).....	117

Rangkuman Bab .....	118
Latihan Mahasiswa.....	118
Glosarium Bab .....	121
Daftar Pustaka Bab .....	122
<b>BAB 4 KLASIK 3: TEORI MAX WEBER (TINDAKAN DAN RASIONALITAS) .....</b>	<b>125</b>
Tujuan Pembelajaran.....	125
4.1 Metodologi: Verstehen dan Tipologi Ideal .....	127
4.1.1 Konsep Verstehen (Pemahaman Interpretatif).....	130
4.1.2 Tipologi Ideal sebagai Alat Analisis Murni .....	130
4.1.3 Isu Kausalitas dan Probabilitas dalam Sosiologi.....	131
4.1.4 Netralitas Nilai (Value Neutrality) dalam Ilmu Sosial.....	131
4.1.5 Kritik terhadap Metodologi Weberian..	132
4.2 Tipologi Tindakan Sosial .....	132
4.2.1 Tindakan Rasional Instrumental (Zweckrational) .....	135
4.2.2 Tindakan Rasional Nilai (Wertrational)	135
4.2.3 Tindakan Afektif (Emosional) .....	135
4.2.4 Tindakan Tradisional (Kebiasaan).....	136
4.2.5 Fleksibilitas Tipologi dalam Realitas.....	136
4.3 Rasionalitas dan Birokrasi Modern.....	137
4.3.1 Proses Rasionalisasi Barat dan Dunia Modern .....	139
4.3.2 Tipologi Ideal Birokrasi (Hierarki, Aturan, Impersonal) .....	139

4.3.3 Keunggulan Teknis Birokrasi.....	140
4.3.4 Jerat Besi Rasionalitas (Iron Cage of Rationality).....	140
4.3.5 Kritik terhadap Konsep Birokrasi Weber.....	141
4.4 Agama dan Etika Kapitalisme.....	141
4.4.1 Hubungan Etika Protestan (Kalvinisme) dan Semangat Kapitalisme.....	144
4.4.2 Konsep Panggilan Kerja (Calling) dan Predestinasi.....	144
4.4.3 Spirit Kapitalisme sebagai Timbunan Kekayaan.....	145
4.4.4 Studi Perbandingan Agama (Konfusianisme, Hinduisme).....	145
4.4.5 Kritik terhadap Argumentasi Kausalitas Weber.....	146
4.5 Pengaruh Weberian dan Aplikasinya di Indonesia.....	146
4.5.1 Analisis Tipe Otoritas dalam Kepemimpinan Tradisional dan Modern.....	148
4.5.2 Kajian Etos Kerja dan Budaya Lokal.....	149
4.5.3 Kritik terhadap Birokrasi Pembangunan di Indonesia.....	149
4.5.4 Pengaruh Rasionalitas terhadap Institusi Pendidikan.....	150
4.5.5 Kajian Fenomena Politik Partisan dan Karisma.....	150
Rangkuman Bab.....	151

Latihan Mahasiswa .....	152
Glosarium Bab .....	155
Daftar Pustaka Bab .....	156
<b>BAB 5 TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK (MIKRO).....</b>	<b>159</b>
Tujuan Pembelajaran.....	159
5.1 Asumsi Dasar Interaksionisme Simbolik (IS) .	161
5.1.1 Peran Makna dalam Tindakan Manusia (Herbert Blumer) .....	164
5.1.2 Makna Dibentuk Melalui Interaksi Sosial .....	164
5.1.3 Manusia Berinteraksi dengan Diri Sendiri (Refleksi).....	165
5.1.4 Kritik terhadap Determinisme Struktural.....	165
5.1.5 IS sebagai Pendekatan Fenomenologis .	166
5.2 Konsep Mind, Self, and Society George H. Mead .....	166
5.2.1 Perkembangan Diri (Self) melalui Interaksi .....	169
5.2.2 Konsep I (Respon Spontan) dan Me (Diri Sosial) .....	169
5.2.3 Tahap Bermain (Play) dan Permainan (Game).....	169
5.2.4 Generalized Other (Sudut Pandang Masyarakat).....	170
5.2.5 Hubungan Bahasa dan Pemikiran (Mind) .....	170
5.3 Dramaturgi Erving Goffman.....	171

5.3.1 Kehidupan Sosial sebagai Panggung Pertunjukan.....	173
5.3.2 Wilayah Depan (Front Stage) dan Belakang (Back Stage).....	173
5.3.3 Manajemen Kesan (Impression Management).....	174
5.3.4 Peran dan Jarak Peran (Role Distance) .	174
5.3.5 Analisis Stigma dan Identitas Tercela...	175
5.4 Pendekatan Etnometodologi Harold Garfinkel.....	175
5.4.1 Fokus pada Metode yang Digunakan Orang Sehari-hari.....	177
5.4.2 Indeksikalitas dan Refleksivitas.....	178
5.4.3 Breaching Experiments (Eksperimen Pelanggaran).....	178
5.4.4 Konsep Akuntabilitas Tindakan.....	179
5.4.5 Kritik terhadap Fungsionalisme (Asumsi Norma).....	179
5.5 Aplikasi IS di Indonesia.....	180
5.5.1 Kajian Komunikasi Antar Budaya dan Simbol Lokal.....	182
5.5.2 Analisis Interaksi dalam Ruang Publik dan Media Sosial.....	182
5.5.3 Studi tentang Pembentukan Identitas Remaja Kota.....	183
5.5.4 Penerapan Konsep Face (Muka) dalam Interaksi Budaya Jawa/Sunda.....	183
5.5.5 Analisis Ritual dan Makna Simbolik Upacara Adat.....	184

Rangkuman Bab .....	184
Latihan Mahasiswa.....	185
Glosarium Bab .....	188
Daftar Pustaka Bab .....	190
<b>BAB 6 TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL (MAKRO) .....</b>	<b>193</b>
Tujuan Pembelajaran.....	193
6.1 Asumsi Dasar Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons).....	196
6.1.1 Masyarakat sebagai Sistem yang Terintegrasi .....	198
6.1.2 Keteraturan dan Keseimbangan (Equilibrium).....	198
6.1.3 Peran Institusi dalam Mempertahankan Stabilitas.....	199
6.1.4 Kritik terhadap Konsep Perubahan dan Konflik .....	199
6.1.5 Teori Sistem Sosial (Social System Theory).....	200
6.2 Skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) .....	200
6.2.1 Fungsi Adaptasi (Hubungan dengan Lingkungan).....	203
6.2.2 Fungsi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment) .....	204
6.2.3 Fungsi Integrasi (Kohesi Internal) .....	204
6.2.4 Fungsi Latensi/Pemeliharaan Pola (Motivasi Nilai).....	204
6.2.5 Penerapan AGIL pada Institusi Sosial ..	205

6.3 Variabel Pola (Pattern Variables) Parsons.....	205
6.3.1 Orientasi Afektivitas vs Netralitas Afektif .....	208
6.3.2 Orientasi Diri vs Orientasi Kolektif .....	208
6.3.3 Partikularisme vs Universalisme .....	209
6.3.4 Kualitas vs Kinerja (Ascription vs Achievement).....	209
6.3.5 Kekhususan vs Difusivitas.....	210
6.4 Teori Fungsi Menengah Robert K. Merton .....	210
6.4.1 Kritik terhadap Postulat Fungsionalisme Parsons.....	212
6.4.2 Konsep Fungsi Manifes dan Fungsi Laten.....	213
6.4.3 Konsep Disfungsi (Dysfunction).....	213
6.4.4 Teori Ketegangan (Strain Theory) dan Deviasi .....	213
6.4.5 Relevansi Model Merton dalam Analisis Sosial .....	214
6.5 Penerapan Fungsionalisme di Indonesia .....	214
6.5.1 Analisis Peran Institusi Negara dalam Pembangunan.....	217
6.5.2 Kajian Stabilitas Politik dan Integrasi Sosial .....	217
6.5.3 Kritik terhadap Model Pembangunan Orde Baru .....	218
6.5.4 Penerapan Konsep Deviasi dan Ketidaksesuaian Norma.....	218
6.5.5 Kajian Sistem Pendidikan sebagai Alat Sosialisasi.....	218

Rangkuman Bab .....	219
Latihan Mahasiswa .....	220
Glosarium Bab .....	223
Daftar Pustaka Bab .....	224
<b>BAB 7 TEORI KONFLIK KONTEMPORER (RALF DAHRENDORF &amp; COSER).....</b>	<b>227</b>
Tujuan Pembelajaran.....	227
7.1 Konsep Konflik Fungsional Lewis Coser .....	229
7.1.1 Konflik sebagai Mekanisme Regulasi dan Inovasi.....	232
7.1.2 Perbedaan antara Konflik Realistis dan Non-Realistis.....	232
7.1.3 Konflik dengan Kelompok Luar Meningkatkan Kohesi Dalam.....	233
7.1.4 Konflik sebagai Katup Pengaman Sosial .....	233
7.1.5 Batasan Fungsionalisme Konflik.....	233
7.2 Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Otoritas Struktural).....	234
7.2.1 Kritik terhadap Fokus Kelas Marxis yang Terbatas.....	236
7.2.2 Otoritas sebagai Basis Utama Konflik Sosial .....	237
7.2.3 Konsep Kelompok Kuasi, Kepentingan Laten, dan Nyata .....	237
7.2.4 Konflik antara yang Menguasai dan yang Dikuasai.....	237
7.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Konflik .....	238

7.3 Teori Konflik Ekonomi Randall Collins .....	238
7.3.1 Fokus pada Kepentingan Individu dan Persaingan .....	240
7.3.2 Konflik dalam Interaksi Tatap Muka ...	241
7.3.3 Hierarki Status dan Kompetisi Pendidikan .....	241
7.3.4 Penggunaan Sumber Daya dan Jaringan Sosial .....	241
7.3.5 Kritik terhadap Pendekatan Ekonomi ..	242
7.4 Teori Konflik Internasional (Immanuel Wallerstein).....	242
7.4.1 Sistem Dunia (World System Theory)...	244
7.4.2 Pembagian Negara Inti, Semiperiferi, dan Periferi.....	244
7.4.3 Eksploitasi Antar-Sistem Negara.....	245
7.4.4 Kritik terhadap Pendekatan Eurosentris .....	245
7.4.5 Peran Negara Semiperiferi (Indonesia).	246
7.5 Kajian Konflik di Indonesia dalam Perspektif Teori Sosial.....	246
7.5.1 Penerapan Teori Konflik terhadap Isu Separatisme .....	248
7.5.2 Analisis Konflik Sumber Daya Alam (Agraria) .....	249
7.5.3 Konflik Etnis dan Agama (Coserian) ...	249
7.5.4 Konflik Kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .....	250
7.5.5 Resolusi Konflik Struktural vs Instrumental.....	250

Rangkuman Bab .....	250
Latihan Mahasiswa .....	251
Glosarium Bab .....	254
Daftar Pustaka Bab .....	256
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>258</b>



## BAB 1

# PENDAHULUAN: HAKIKAT DAN PERAN TEORI SOSIAL

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendefinisikan teori sosial dan membedakannya secara konseptual dari teori sosiologi.
2. Menjelaskan fungsi-fungsi fundamental teori sosial dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial.
3. Mengidentifikasi elemen-elemen dasar yang membentuk sebuah teori sosial yang koheren.
4. Menganalisis perbedaan antara level analisis mikro, meso, dan makro dalam teori sosial.
5. Mengevaluasi hubungan dialektis antara teori sosial sebagai abstraksi dan realitas sosial sebagai objek kajian.
6. Melacak akar historis pemikiran sosial dari era Pencerahan hingga kemunculan sosiologi formal.
7. Memahami posisi dan tantangan pengembangan teori sosial dalam konteks akademik dan pembangunan di Indonesia.

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa masyarakat terstruktur dalam cara-cara tertentu, mengapa ketimpangan ekonomi terus bertahan lintas generasi, atau bagaimana interaksi tatap muka sederhana di sebuah warung kopi dapat merefleksikan dinamika kekuasaan yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukanlah sekadar renungan sambil lalu, melainkan inti dari penyelidikan yang sistematis dan mendalam yang disebut sebagai teori sosial. Teori sosial adalah perangkat konseptual yang memungkinkan kita untuk bergerak melampaui observasi permukaan dan mulai membongkar mekanisme tersembunyi yang membentuk, mempertahankan, dan mengubah tatanan sosial. Tanpa teori, pengamatan kita terhadap dunia sosial hanyalah kumpulan fakta yang acak dan tidak bermakna.

Memasuki ranah teori sosial seringkali diibaratkan seperti mendapatkan kacamata baru dengan lensa yang berbeda-beda. Satu lensa mungkin membuat kita fokus pada konflik dan perebutan kekuasaan, sementara lensa lain menyoroti fungsi dan keteraturan. Lensa lainnya mungkin memperbesar detail interaksi simbolik antarindividu yang seringkali luput dari perhatian. Setiap lensa menawarkan perspektif yang unik, menyingkap aspek realitas yang sebelumnya tidak terlihat, namun juga berpotensi mengaburkan aspek lainnya. Oleh karena itu, mempelajari teori sosial bukanlah tentang menemukan satu “kebenaran” tunggal, melainkan tentang menguasai berbagai perangkat analisis untuk memahami kompleksitas dunia sosial yang multifaset.

Buku ini akan memandu Anda dalam perjalanan intelektual melintasi lanskap pemikiran sosial, dari para pemikir klasik yang meletakkan fondasi disiplin ini hingga para teoretikus kontemporer yang merespons tantangan-tantangan era globalisasi dan digital. Perjalanan ini menuntut kesediaan untuk bergulat dengan konsep-konsep abstrak, menantang asumsi-asumsi yang selama ini kita terima begitu saja, dan secara kritis merefleksikan posisi kita

sendiri di dalam struktur sosial yang kita kaji. Memahami teori sosial bukan hanya sebuah latihan akademis, melainkan sebuah tindakan emansipatoris yang membekali kita dengan kesadaran kritis.

Upaya ini menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks Indonesia. Sebagai sebuah masyarakat yang terus menerus bernegosiasi dengan warisan kolonial, modernitas, tradisi, dan dinamika global, Indonesia merupakan laboratorium sosial yang sangat kaya. Namun, kekayaan fenomena ini tidak akan dapat dipahami secara mendalam tanpa kerangka kerja teoretis yang memadai. Tantangannya adalah bagaimana menerapkan, mengadaptasi, dan bahkan mengkritik teori-teori yang sebagian besar lahir dari konteks Barat, agar relevan untuk membaca realitas keindonesiaan.

Bab ini berfungsi sebagai gerbang utama. Di sini, kita akan mendefinisikan batasan konseptual teori sosial, menelusuri jejak kelahirannya dalam gejolak sejarah Eropa, serta memetakan berbagai pendekatan epistemologis dan metodologis yang mendasarinya. Kita juga akan mulai mengeksplorasi bagaimana ilmu sosial dan teori-teorinya pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia, serta tantangan-tantangan khas yang dihadapinya. Memahami fondasi ini adalah langkah pertama yang esensial sebelum kita menyelami pemikiran para teoretikus besar di bab-bab selanjutnya.

## **1.1 Definisi dan Batasan Konseptual Teori Sosial**

Mendefinisikan teori sosial merupakan langkah awal yang krusial, namun sekaligus menantang karena sifatnya yang cair dan diperdebatkan. Secara mendasar, teori sosial dapat dipahami sebagai serangkaian konsep, proposisi, dan argumen yang saling terkait secara logis, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menginterpretasikan cara kerja masyarakat atau aspek-aspek

tertentu dari kehidupan sosial (Okoli, 2021). Teori tidak sekadar mendeskripsikan apa yang terjadi, melainkan berupaya menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” suatu fenomena sosial muncul, bertahan, atau berubah. Ia menyediakan sebuah kerangka kerja sistematis untuk melampaui pemahaman akal sehat (*common sense*) yang seringkali bersifat parsial, bias, dan tidak teruji. Teori sosial berfungsi sebagai jembatan antara pengamatan empiris yang spesifik dan abstraksi yang lebih umum tentang pola-pola sosial (Fuhse, 2022). Dengan demikian, ia memberikan kita bahasa dan alat untuk menganalisis struktur, institusi, tindakan, dan makna dalam dunia sosial.

Teori sosial seringkali memiliki cakupan yang luas, melintasi batas-batas disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan bahkan filsafat. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi fundamental dari eksistensi sosial itu sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar tentang modernitas, kekuasaan, identitas, dan tatanan sosial (Roth et al., 2025). Berbeda dengan hukum ilmiah dalam ilmu alam yang mencari keteraturan universal, teori sosial lebih sering berurusan dengan tendensi, probabilitas, dan penjelasan yang peka terhadap konteks historis dan budaya. Ia mengakui bahwa objek studinya, yaitu manusia dan masyarakat, memiliki kesadaran, kehendak, dan kemampuan untuk menafsirkan dunianya sendiri, sehingga membuat prediksi yang pasti menjadi sulit, bahkan tidak mungkin.

Sebuah teori sosial yang baik harus memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, ia harus logis dan koheren secara internal, artinya konsep-konsep dan argumen yang dibangun tidak saling bertentangan. Kedua, ia harus memiliki daya jelas (*explanatory power*), yaitu mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai fenomena sosial. Ketiga, ia harus dapat diuji, setidaknya secara prinsip, baik melalui verifikasi data

empiris maupun melalui kritik logis. Keempat, ia harus memiliki cakupan yang jelas, menunjukkan fenomena apa yang bisa dan tidak bisa dijelaskannya. Terakhir, sebuah teori yang kuat seringkali bersifat parsimonius, artinya ia mampu menjelaskan banyak hal dengan sesedikit mungkin konsep.

Penting untuk dipahami bahwa teori sosial tidak bersifat statis. Ia terus-menerus berkembang, direvisi, dan bahkan ditinggalkan seiring dengan munculnya bukti-bukti baru, pergeseran paradigma, dan perubahan dalam realitas sosial itu sendiri. Teori-teori klasik dari Marx, Weber, dan Durkheim, misalnya, tetap relevan bukan karena mereka memberikan jawaban final, melainkan karena mereka terus memprovokasi pertanyaan-pertanyaan penting dan menyediakan fondasi bagi pengembangan teori-teori selanjutnya. Oleh karena itu, mempelajari teori sosial adalah sebuah proses dialog berkelanjutan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan pemikiran tentang masyarakat.

**Analogi:** Teori sosial dapat diibaratkan sebagai sebuah kotak peralatan (*toolbox*) bagi seorang analis sosial. Di dalam kotak tersebut terdapat berbagai macam alat, seperti palu (teori konflik), obeng (teori interaksionisme simbolik), dan meteran (analisis fungsional). Seorang analis yang terampil tidak akan menggunakan palu untuk semua pekerjaan. Sebaliknya, ia akan memilih alat yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi. Mempelajari teori sosial berarti mengisi kotak peralatan tersebut dan belajar kapan serta bagaimana menggunakan setiap alat dengan efektif untuk membongkar dan memahami cara kerja mesin masyarakat yang kompleks.

### 1.1.1 Perbedaan Teori Sosial dan Teori Sosiologi

Meskipun sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan nuansa yang penting antara “teori sosial” dan “teori

sosiologi". Teori sosial merupakan istilah payung yang lebih luas dan bersifat interdisipliner (Giordano, 2025). Ia mencakup pemikiran-pemikiran fundamental tentang masyarakat yang berasal tidak hanya dari sosiologi, tetapi juga dari filsafat, ilmu politik, antropologi, ekonomi, psikoanalisis, dan studi budaya. Pemikir seperti Michel Foucault, yang sering dianggap sebagai filsuf atau sejarawan, memberikan kontribusi monumental pada teori sosial dengan analisisnya tentang kekuasaan dan pengetahuan, meskipun ia tidak secara formal mengidentifikasi dirinya sebagai sosiolog. Teori sosial dengan demikian lebih berfokus pada pertanyaan-pertanyaan ontologis dan epistemologis mendasar tentang hakikat kehidupan kolektif.

Teori sosiologi, di sisi lain, merupakan sub-himpunan dari teori sosial yang secara spesifik dikembangkan di dalam atau untuk disiplin sosiologi. Ia cenderung lebih terfokus pada perumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris mengenai fenomena-fenomena yang menjadi perhatian utama sosiologi, seperti stratifikasi sosial, institusi, sosialisasi, dan perubahan sosial (Bingham et al., 2024). Teori sosiologi berusaha membangun penjelasan yang sistematis dan berbasis bukti tentang pola-pola interaksi dan struktur sosial. Walaupun ia juga bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan besar, orientasinya seringkali lebih dekat pada penelitian empiris dan metodologi yang terdefinisi secara lebih ketat.

Perbedaan lainnya terletak pada derajat abstraksi dan fokus. Teori sosial seringkali beroperasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, menginterogasi asumsi-asumsi dasar yang menopang pemahaman kita tentang realitas. Ia bisa bersifat spekulatif dan kritis, bahkan terkadang normatif, dengan tujuan tidak hanya menjelaskan dunia tetapi juga mengubahnya. Sebaliknya, teori sosiologi, terutama dalam tradisi Amerika, seringkali lebih berorientasi pada pengembangan "teori-teori rentang menengah"

(*middle-range theories*) sebagaimana diusulkan oleh Robert K. Merton, yang fokus pada penjelasan aspek-aspek terbatas dari realitas sosial dan dapat dihubungkan langsung dengan penelitian lapangan.

### 1.1.2 Fungsi Teori Sosial dalam Ilmu-Ilmu Sosial

Teori sosial menjalankan beberapa fungsi vital yang membuatnya menjadi tulang punggung bagi ilmu-ilmu sosial. Fungsi utamanya adalah sebagai kerangka penjelas (*explanatory framework*). Ia menyediakan lensa konseptual yang memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi data yang tampak acak menjadi pola yang bermakna dan untuk memahami hubungan sebab-akibat di antara berbagai fenomena sosial (Fuhse, 2022). Tanpa teori, penelitian hanya akan menjadi kumpulan deskripsi yang tidak terhubung satu sama lain. Teori memberikan koherensi dan kedalaman pada analisis, mengubah “apa” menjadi “mengapa” dan “bagaimana”.

Fungsi kedua adalah sebagai panduan penelitian (*research guide*). Teori membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, membentuk hipotesis yang dapat diuji, dan mengarahkan peneliti pada data apa yang perlu dikumpulkan. Sebuah teori tentang konflik kelas, misalnya, akan mengarahkan peneliti untuk mencari data tentang distribusi kekayaan, kepemilikan alat produksi, dan bentuk-bentuk perlawanan pekerja. Dengan demikian, teori membantu memfokuskan upaya penelitian agar lebih efisien dan terarah, mencegah peneliti tersesat dalam lautan data empiris yang tak terbatas (Bingham et al., 2024).

Fungsi ketiga adalah fungsi kritis (*critical function*). Teori sosial, khususnya dalam tradisi Teori Kritis, tidak hanya bertujuan untuk memahami masyarakat apa adanya, tetapi juga untuk mengkritik struktur-struktur dominasi, ketidakadilan, dan ideologi yang tersembunyi (Reynolds, 2021). Ia membongkar asumsi-asumsi

yang diterima begitu saja (*taken-for-granted*) dan menantang status quo. Dengan demikian, teori sosial memiliki potensi emansipatoris, yaitu memberdayakan individu dan kelompok untuk memahami kondisi mereka dan memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

### 1.1.3 Elemen Dasar Pembentuk Teori Sosial

Setiap teori sosial, terlepas dari kompleksitasnya, dibangun dari beberapa elemen dasar yang fundamental. Elemen pertama adalah konsep (*concepts*), yang merupakan blok bangunan abstrak dari teori. Konsep adalah label yang diberikan pada fenomena sosial, seperti “kelas sosial”, “anomie”, “birokrasi”, atau “habitus”. Konsep berfungsi untuk menyederhanakan realitas yang kompleks dan memungkinkan kita untuk berpikir dan berkomunikasi tentangnya secara sistematis (Okoli, 2021). Definisi yang jelas dan operasionalisasi konsep adalah langkah krusial dalam membangun teori yang kuat dan dapat diuji.

Elemen kedua adalah proposisi (*propositions*), yaitu pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Proposisi inilah yang membentuk inti argumen dari sebuah teori. Sebagai contoh, proposisi Karl Marx menyatakan bahwa “konflik kelas (konsep 1) adalah penggerak utama perubahan sejarah (konsep 2)”. Proposisi dapat berupa hubungan kausal (A menyebabkan B), korelasional (A dan B bergerak bersama), atau definisi. Kumpulan proposisi yang saling terkait secara logis membentuk sebuah model teoretis yang koheren (Fuhse, 2022).

Elemen ketiga adalah asumsi dasar (*basic assumptions*). Ini adalah keyakinan-keyakinan fundamental tentang hakikat manusia dan masyarakat yang mendasari sebuah teori, namun seringkali tidak dinyatakan secara eksplisit. Misalnya, beberapa teori berasumsi bahwa manusia adalah aktor rasional yang memaksimalkan kepentingannya, sementara teori lain berasumsi bahwa tindakan

manusia dibentuk oleh norma dan nilai-nilai yang diinternalisasi. Mengidentifikasi dan mengkritik asumsi-asumsi dasar ini adalah bagian penting dari analisis teoretis, karena asumsi tersebut sangat mempengaruhi arah dan kesimpulan dari sebuah teori (Ahmad et al., 2023).

#### 1.1.4 Level Analisis Teori Sosial (Mikro, Meso, Makro)

Teori sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan level analisisnya, yaitu tingkatan skala fenomena sosial yang menjadi fokus utamanya. Level makro berurusan dengan struktur, institusi, dan proses sosial skala besar yang mencakup seluruh masyarakat, bahkan sistem global. Teori-teori seperti fungsionalisme struktural Talcott Parsons atau teori sistem dunia Immanuel Wallerstein adalah contoh utama dari analisis level makro (Roth et al., 2025). Fokusnya adalah pada bagaimana sistem sosial secara keseluruhan berfungsi, bertahan, dan berubah, seringkali dengan penekanan pada kekuatan-kekuatan yang berada di luar kendali individu.

Level mikro, sebaliknya, memfokuskan analisisnya pada interaksi sosial tatap muka dalam skala kecil dan kehidupan sehari-hari. Teori-teori seperti interaksionisme simbolik dan etnometodologi adalah contoh klasik dari level mikro. Pendekatan ini menekankan bagaimana individu secara aktif menciptakan dan menafsirkan makna sosial melalui interaksi, bagaimana identitas diri (*self*) dibentuk, dan bagaimana tatanan sosial dinegosiasikan dari bawah ke atas (*bottom-up*) (Ahmad et al., 2023). Realitas sosial dalam perspektif ini dipandang sebagai sesuatu yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi melalui tindakan individu.

Di antara kedua ekstrem tersebut terdapat level meso. Level analisis ini menjembatani mikro dan makro dengan berfokus pada unit-unit sosial perantara seperti organisasi, komunitas, jaringan sosial, dan gerakan sosial. Teori-teori tentang birokrasi, modal sosial, atau mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial berada

pada level meso. Pendekatan ini penting karena memungkinkan analisis untuk melihat bagaimana struktur makro mempengaruhi interaksi mikro, dan sebaliknya, bagaimana tindakan-tindakan pada level mikro dapat beragregasi untuk membentuk atau mengubah institusi pada level makro.

### 1.1.5 Hubungan antara Teori Sosial dan Realitas Sosial

Hubungan antara teori sosial dan realitas sosial bersifat dialektis dan kompleks, bukan hubungan satu arah yang sederhana. Di satu sisi, teori sosial berupaya untuk merepresentasikan dan menjelaskan realitas sosial (Fuhse, 2022). Ia harus berakar pada pengamatan empiris dan terus-menerus diuji terhadap bukti-bukti dari dunia nyata. Sebuah teori yang sepenuhnya terlepas dari realitas sosial akan kehilangan relevansinya dan menjadi sekadar spekulasi filosofis. Dengan demikian, realitas sosial berfungsi sebagai sumber data, inspirasi, sekaligus sebagai hakim akhir bagi validitas sebuah teori.

Di sisi lain, teori sosial juga secara aktif membentuk cara kita melihat dan bahkan mengkonstruksi realitas sosial itu sendiri. Konsep-konsep teoretis seperti “PDB”, “kelas menengah”, atau “risiko” tidak hanya mendeskripsikan dunia, tetapi juga menjadi kategori yang digunakan oleh para pembuat kebijakan, media, dan masyarakat umum untuk memahami dan bertindak di dunia. Dalam hal ini, teori memiliki efek performatif, ia dapat mengubah realitas yang coba dijelaskannya. Gagasan Karl Marx tentang kesadaran kelas, misalnya, tidak hanya mendeskripsikan sebuah fenomena, tetapi juga berpotensi membangkitkan kesadaran tersebut di kalangan pekerja.

Hubungan ini sering disebut sebagai “hermeneutika ganda” (*double hermeneutic*) oleh Anthony Giddens. Ilmuwan sosial mempelajari dunia yang sudah diinterpretasikan oleh para aktor di dalamnya, dan kemudian konsep-konsep yang dihasilkan oleh

ilmuwan sosial tersebut dapat diserap kembali oleh para aktor, yang pada gilirannya dapat mengubah perilaku mereka dan realitas sosial itu sendiri. Ini adalah perbedaan fundamental antara ilmu sosial dan ilmu alam, di mana molekul atau planet tidak membaca teori-teori tentang mereka dan mengubah perilakunya (Roth et al., 2025). Oleh karena itu, teori sosial selalu berada dalam dialog yang dinamis dengan objek studinya.

## 1.2 Sejarah Perkembangan Awal Pemikiran Sosial

Jauh sebelum sosiologi lahir sebagai disiplin ilmu formal, pemikiran tentang hakikat masyarakat, tatanan, dan perubahan telah menjadi pusat perhatian para filsuf, sejarawan, dan teolog selama berabad-abad. Namun, fondasi bagi teori sosial modern secara khusus diletakkan pada periode pergolakan intelektual dan sosial yang dahsyat di Eropa. Periode ini ditandai oleh transisi dari masyarakat feodal yang agraris dan religius menuju masyarakat industri yang urban dan sekuler. Pemikiran sosial modern lahir dari upaya untuk memahami dan merespons transformasi radikal ini. Ia tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan sebagai produk dari kondisi historis yang spesifik, terutama Masa Pencerahan dan Revolusi Industri, yang secara fundamental mengubah cara manusia memandang diri mereka sendiri dan dunia di sekitarnya.

Masa Pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18 menjadi titik tolak intelektual yang krusial. Para pemikir Pencerahan seperti John Locke, Voltaire, dan Jean-Jacques Rousseau menantang otoritas tradisi, agama, dan monarki absolut. Mereka mengagungkan akal budi (*reason*) dan observasi empiris sebagai sumber pengetahuan yang sah. Keyakinan mereka pada kemajuan, hak-hak individu, dan kemungkinan untuk merekayasa masyarakat yang lebih adil dan rasional memberikan landasan filosofis bagi ilmu sosial (Çolak & Mumcu, 2023). Mereka mulai melihat masyarakat bukan sebagai tatanan ilahi yang tak terubahkan, melainkan sebagai konstruksi

manusia yang dapat dipelajari, dipahami, dan diperbaiki secara sistematis.

Secara bersamaan, Revolusi Industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 memicu perubahan sosial dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Urbanisasi massal, munculnya pabrik-pabrik, pembentukan kelas pekerja baru, serta masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, dan kondisi kerja yang buruk menjadi realitas yang mendesak untuk dijelaskan (James, 2022). Masalah-masalah konkret inilah yang menjadi objek kajian awal bagi para pemikir sosial. Mereka terdorong untuk menganalisis dampak dari sistem ekonomi baru, yaitu kapitalisme, terhadap struktur sosial, komunitas, dan individu. Perubahan ini menciptakan sebuah “laboratorium sosial” raksasa yang menuntut adanya cara-cara baru untuk berpikir tentang kohesi dan konflik sosial.

Reaksi terhadap kedua revolusi ini, baik Pencerahan maupun Revolusi Industri, juga memainkan peran penting. Sebagian pemikir, yang dikenal sebagai kelompok reaksioner atau konservatif, merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat sebagai kekacauan dan disintegrasi tatanan moral akibat individualisme dan industrialisme. Tokoh-tokoh seperti Edmund Burke dan Joseph de Maistre menekankan pentingnya tradisi, komunitas, dan institusi seperti keluarga dan agama sebagai fondasi stabilitas sosial. Meskipun seringkali bersikap anti-Pencerahan, kritik mereka terhadap modernitas justru memperkaya analisis sosial dengan menyoroti aspek-aspek non-rasional dan komunal dari kehidupan manusia yang diabaikan oleh para pemikir liberal. Dari tegangan antara kekuatan pencerahan, perubahan industri, dan reaksi konservatif inilah sosiologi klasik akhirnya lahir.

**Analogi/Contoh Kasus:** Bayangkan sebuah desa nelayan kecil yang selama berabad-abad hidup dengan ritme yang stabil, diatur

oleh adat, kepercayaan, dan hubungan kekerabatan. Tiba-tiba, sebuah perusahaan besar membangun pelabuhan modern dan pabrik pengalengan ikan di desa tersebut. Sebagian penduduk menyambutnya sebagai jalan menuju kemajuan (*spirit Pencerahan/ Industri*), melihat peluang kerja dan peningkatan pendapatan. Namun, perubahan ini juga membawa masalah baru: nelayan tradisional tersingkir, limbah pabrik mencemari laut, dan hubungan sosial yang tadinya erat menjadi transaksional. Para tetua desa mengeluh bahwa nilai-nilai luhur telah hilang (*reaksi konservatif*). Upaya untuk memahami secara sistematis mengapa perubahan ini terjadi, apa dampaknya bagi struktur keluarga, kekuasaan, dan nilai-nilai, serta bagaimana cara mengelola konflik yang muncul, adalah cikal bakal dari pemikiran sosial modern. Desa nelayan tersebut adalah mikrokosmos dari transformasi masyarakat Eropa yang melahirkan teori sosial.

### 1.2.1 Masa Pencerahan (*Enlightenment*) dan Rasionalitas

Masa Pencerahan, atau *Aufklärung* dalam bahasa Jerman, merupakan gerakan intelektual abad ke-18 yang menekankan supremasi akal budi (*reason*) sebagai alat utama untuk memahami dunia dan memperbaiki kondisi manusia. Para filsuf Pencerahan, yang dikenal sebagai *philosophes*, melancarkan kritik tajam terhadap dogma agama, takhayul, dan kekuasaan absolut yang mereka anggap sebagai belenggu bagi kemajuan manusia (Çolak & Mumcu, 2023). Mereka percaya bahwa dengan menerapkan metode ilmiah yang telah terbukti sukses dalam ilmu alam pada studi tentang masyarakat, manusia dapat menemukan “hukum-hukum sosial” yang universal. Keyakinan ini menjadi fondasi epistemologis bagi positivisme di kemudian hari.

Kontribusi utama Pencerahan bagi teori sosial adalah pergeseran fokus dari penjelasan teologis ke penjelasan sekuler dan ilmiah. Montesquieu, dalam karyanya *The Spirit of the Laws*,

mencoba menjelaskan perbedaan sistem hukum dan pemerintahan di berbagai masyarakat dengan merujuk pada faktor-faktor seperti iklim, geografi, dan adat istiadat, bukan lagi kehendak Tuhan. Demikian pula, Adam Smith menganalisis pasar sebagai sebuah sistem yang memiliki mekanisme internalnya sendiri (“tangan tak terlihat”) (James, 2022). Pendekatan ini membuka jalan bagi konsepsi masyarakat sebagai sebuah entitas yang dapat dianalisis secara objektif, terpisah dari individu-individu yang menyusunnya.

Namun, rasionalisme Pencerahan juga dikritik karena kecenderungannya yang terlalu abstrak dan universalis, seringkali mengabaikan partikularitas budaya dan sejarah. Konsep “manusia universal” yang mereka ajukan pada dasarnya adalah model manusia Eropa kelas menengah, sebuah bias yang kemudian menjadi target kritik dari teori postkolonial. Meskipun demikian, warisan Pencerahan dalam bentuk komitmen terhadap rasionalitas, empirisme, dan kritik terhadap otoritas yang tidak adil tetap menjadi inti dari proyek ilmu sosial hingga hari ini (Kow, 2021).

### **1.2.2 Revolusi Industri dan Lahirnya Masalah Sosial**

Jika Pencerahan menyediakan kerangka intelektual, maka Revolusi Industri menyediakan materi empiris bagi kelahiran teori sosial. Transformasi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri membawa serta serangkaian masalah sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan intensitasnya. Kota-kota seperti Manchester dan London tumbuh pesat tanpa perencanaan, menciptakan kawasan kumuh yang padat, tidak sehat, dan penuh kejahatan (James, 2022). Pabrik-pabrik mempekerjakan laki-laki, perempuan, dan anak-anak dalam kondisi yang berbahaya dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah.

Fenomena-fenomena ini memaksa para pemikir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sosiologis yang fundamental. Bagaimana mungkin kemajuan teknologi dan peningkatan

kekayaan yang luar biasa justru menghasilkan kemiskinan dan penderitaan yang meluas? Apa yang terjadi pada ikatan komunitas dan keluarga ketika orang-orang tercerabut dari desa mereka dan dilemparkan ke dalam lingkungan urban yang anonim? Bagaimana tatanan sosial baru ini dapat dipertahankan di tengah ketegangan antara kelas pemilik pabrik yang kaya dan kelas pekerja yang miskin? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang secara langsung menginspirasi karya-karya pemikir seperti Karl Marx, Friedrich Engels, dan kemudian Emile Durkheim.

Revolusi Industri dengan demikian mengubah fokus pemikiran sosial dari spekulasi filosofis tentang “masyarakat yang baik” menjadi analisis empiris tentang “masyarakat sebagaimana adanya”. Ia menjadikan isu-isu seperti kelas, kapitalisme, urbanisasi, dan pembagian kerja sebagai agenda utama dalam teori sosial. Lahirnya “masalah sosial” sebagai sebuah kategori pemikiran adalah produk langsung dari era ini, yang mendorong perlunya sebuah ilmu baru, yaitu sosiologi, yang dapat mendiagnosis dan mungkin menawarkan solusi atas penyakit-penyakit masyarakat modern (Çolak & Mumcu, 2023).

### 1.2.3 Pengaruh Filsafat Klasik (Plato, Aristoteles)

Meskipun teori sosial modern lahir dari konteks Pencerahan dan Revolusi Industri, akarnya dapat dilacak jauh ke belakang hingga filsafat Yunani klasik. Plato dan Aristoteles, meskipun bukan sosiolog dalam pengertian modern, adalah pemikir pertama yang secara sistematis menganalisis berbagai bentuk tatanan politik dan sosial. Dalam karyanya *Republik*, Plato tidak hanya membayangkan sebuah negara ideal, tetapi juga menganalisis bagaimana berbagai tipe pemerintahan (aristokrasi, demokrasi, tirani) cenderung muncul dan merosot. Analisisnya tentang pembagian kerja dan spesialisasi fungsional untuk mencapai keharmonisan negara menjadi cikal bakal dari pemikiran fungsionalis.

Aristoteles, di sisi lain, melakukan pendekatan yang lebih empiris. Ia mengumpulkan dan membandingkan konstitusi dari berbagai negara-kota (*polis*) untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pernyataannya yang terkenal bahwa “manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik (atau sosial)” (*zoon politikon*) meletakkan dasar bagi pemahaman bahwa individu hanya dapat sepenuhnya mewujudkan potensinya di dalam masyarakat. Analisisnya tentang persahabatan (*philia*) sebagai dasar kohesi sosial dan gagasannya tentang kelas-kelas sosial (orang sangat kaya, sangat miskin, dan kelas menengah) memberikan kerangka awal bagi studi stratifikasi dan integrasi sosial.

Pengaruh mereka terhadap teori sosial modern terletak pada warisan pertanyaan-pertanyaan fundamental: Apa hakikat masyarakat? Apa dasar dari tatanan sosial? Bagaimana hubungan antara individu dan negara? Bagaimana cara mencapai keadilan sosial? Para pemikir sosial modern, dari Marx hingga Habermas, terus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertama kali diajukan oleh para filsuf Yunani ini, meskipun dengan jawaban dan metode yang sangat berbeda, yang disesuaikan dengan konteks masyarakat modern yang jauh lebih kompleks (Kow, 2021).

#### **1.2.4 Reaksi Konservatif terhadap Perubahan Sosial**

Lahirnya teori sosial tidak hanya didorong oleh para pendukung perubahan radikal, tetapi juga oleh para penentangannya. Pemikiran konservatif, yang muncul sebagai reaksi langsung terhadap Revolusi Prancis dan ekseseks Pencerahan, memberikan kontribusi penting bagi sosiologi. Tokoh-tokoh seperti Edmund Burke di Inggris dan Louis de Bonald serta Joseph de Maistre di Prancis mengkritik keras apa yang mereka anggap sebagai individualisme, rasionalisme abstrak, dan ateisme dari kaum revolusioner. Mereka berpendapat bahwa masyarakat bukanlah mesin yang bisa dibongkar-pasang sesuka hati, melainkan sebuah

organisme yang tumbuh secara perlahan dan organik sepanjang sejarah.

Para pemikir konservatif ini menekankan pentingnya unit-unit sosial yang lebih besar dari individu, seperti keluarga, komunitas lokal, dan gereja. Mereka memandang tradisi, adat istiadat, dan ritual bukan sebagai sisa-sisa irasional dari masa lalu, tetapi sebagai perekat sosial yang esensial yang menopang tatanan moral. Mereka juga mengkhawatirkan bahwa industrialisasi dan urbanisasi akan menghancurkan ikatan-ikatan komunal ini, menciptakan masyarakat yang teratomisasi dan anarkis.

Meskipun agenda politik mereka adalah untuk merestorasi tatanan lama, analisis mereka tentang sumber-sumber stabilitas sosial sangat berpengaruh pada sosiologi awal, khususnya pada pemikiran Emile Durkheim. Konsep Durkheim tentang “kesadaran kolektif” (*conscience collective*) dan analisisnya tentang peran agama dalam menciptakan solidaritas sosial berutang budi pada wawasan kaum konservatif ini. Dengan demikian, sosiologi dapat dilihat sebagai sintesis yang aneh: ia mengadopsi komitmen Pencerahan pada analisis ilmiah, tetapi seringkali menggunakan alat tersebut untuk mempelajari masalah-masalah yang pertama kali diidentifikasi oleh kaum konservatif, yaitu masalah keteraturan, komunitas, dan otoritas.

### 1.2.5 Kontribusi Tokoh Pra-Sosiologi

Di antara era Pencerahan dan lahirnya sosiologi klasik yang diasosiasikan dengan Comte, Marx, Durkheim, dan Weber, terdapat beberapa tokoh transisi penting yang sering disebut sebagai proto-sosiolog atau pra-sosiolog. Salah satu yang terpenting adalah Henri de Saint-Simon. Ia adalah orang pertama yang secara eksplisit menyerukan adanya sebuah “ilmu tentang masyarakat” yang baru, yang ia sebut “fisiologi sosial”, yang akan menggunakan metode observasi yang sama dengan ilmu alam untuk menemukan

hukum-hukum perkembangan masyarakat. Saint-Simon percaya bahwa masyarakat industri baru membutuhkan sebuah tatanan yang dipimpin oleh para ilmuwan dan industrialis, bukan lagi oleh kaum bangsawan dan pendeta.

Auguste Comte, yang pernah menjadi sekretaris Saint-Simon, mengembangkan gagasan ini lebih lanjut dan secara resmi menciptakan istilah “sosiologi”. Comte terkenal dengan “Hukum Tiga Tahap” perkembangannya, yang menyatakan bahwa pemikiran manusia dan masyarakat berkembang melalui tahap teologis, metafisik, dan akhirnya mencapai tahap positif (ilmiah). Ambisinya adalah menjadikan sosiologi sebagai “ratu ilmu-ilmu”, yang akan menyediakan dasar ilmiah untuk mereorganisasi masyarakat yang dilanda krisis pasca-Revolusi Prancis. Meskipun banyak gagasannya dianggap terlalu skematis saat ini, penekanannya pada positivisme, yaitu keyakinan bahwa pengetahuan sosial harus didasarkan pada data empiris, memberikan fondasi metodologis yang kuat bagi sosiologi.

Tokoh lain seperti Alexis de Tocqueville, dengan analisisnya yang brilian tentang demokrasi dan masyarakat sipil di Amerika, menunjukkan bagaimana analisis sosial yang mendalam dapat dilakukan. Analisisnya tentang bahaya “tirani mayoritas” dan potensi asosiasi-asosiasi sukarela sebagai penyeimbang kekuasaan negara tetap sangat relevan. Para pemikir ini, meskipun belum bekerja dalam kerangka institusional sosiologi sebagai sebuah disiplin akademis, telah meletakkan dasar-dasar konseptual dan metodologis yang memungkinkan generasi berikutnya untuk membangun teori-teori sosial yang lebih sistematis dan komprehensif.

### **1.3 Epistemologi dan Metodologi dalam Teori Sosial**

Setiap teori sosial tidak hanya menawarkan sebuah penjelasan tentang dunia, tetapi juga secara implisit atau eksplisit didasarkan

pada serangkaian asumsi filosofis tentang pengetahuan itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti “Apa yang dapat kita ketahui tentang dunia sosial?”, “Bagaimana kita bisa mengetahuinya?”, dan “Apa status kebenaran dari klaim-klaim kita?” merupakan ranah epistemologi. Perdebatan epistemologis ini bukanlah sekadar urusan para filsuf; ia memiliki konsekuensi langsung terhadap bagaimana penelitian sosial dirancang dan dilaksanakan, serta bagaimana temuan-temuannya diinterpretasikan. Dalam sejarah teori sosial, perdebatan ini seringkali berpusat pada pertentangan antara dua kubu besar: positivisme dan anti-positivisme.

Positivisme, yang akarnya berada dalam pemikiran Pencerahan dan dirumuskan secara eksplisit oleh Auguste Comte, berpendapat bahwa dunia sosial pada dasarnya dapat dipelajari dengan menggunakan metode yang sama dengan ilmu-ilmu alam. Para penganut positivisme percaya bahwa ada realitas sosial yang objektif di luar sana, yang ada secara independen dari kesadaran kita (Kaluarachchi, 2025). Tugas ilmuwan sosial adalah menemukan hukum-hukum umum yang mengatur realitas tersebut melalui observasi yang cermat, pengukuran, dan eksperimen. Pendekatan ini cenderung mengutamakan metode kuantitatif, analisis statistik, dan pencarian hubungan sebab-akibat yang dapat digeneralisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai objektivitas dan menghasilkan pengetahuan yang bebas nilai (*value-free*).

Di sisi lain, tradisi anti-positivis, yang mencakup berbagai pendekatan seperti interpretivisme, hermeneutika, dan fenomenologi, menolak gagasan bahwa dunia sosial dapat disamakan dengan dunia alam. Mereka berargumen bahwa objek studi ilmu sosial, yaitu manusia, berbeda secara fundamental karena mereka memiliki kesadaran, niat, dan kemampuan untuk memberi makna pada tindakan mereka dan dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, tujuan ilmu sosial bukanlah untuk menjelaskan perilaku dari luar (*explain*), melainkan untuk memahami makna subjektif dari

tindakan sosial dari dalam (*understand* atau *Verstehen*, dalam istilah Weber) (Day, 2025). Pendekatan ini cenderung menyukai metode kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis teks, yang memungkinkan peneliti untuk menangkap perspektif dan pengalaman para aktor sosial.

Perdebatan ini melahirkan serangkaian dilema metodologis yang terus membentuk lanskap teori sosial. Apakah kita harus fokus pada struktur objektif yang memaksa individu, atau pada agensi subjektif yang menciptakan struktur? Apakah tujuan kita adalah generalisasi atau pemahaman yang mendalam terhadap kasus partikular? Apakah mungkin dan diinginkan bagi peneliti untuk bersikap netral dan objektif, atau apakah penelitian sosial secara inheren selalu dipengaruhi oleh posisi dan nilai-nilai peneliti? Jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya mendefinisikan pendekatan metodologis yang berbeda, tetapi juga melahirkan tradisi-tradisi teoretis yang sangat beragam, dari fungsionalisme struktural yang positivistik hingga interaksionisme simbolik yang interpretif.

**Analogi/Contoh Kasus:** Bayangkan dua orang peneliti ingin mempelajari fenomena “kemacetan lalu lintas” di Jakarta. Peneliti pertama, seorang positivis, akan mengumpulkan data kuantitatif: volume kendaraan per jam, kecepatan rata-rata, jumlah persimpangan, dan waktu tunda. Ia akan memasukkan data ini ke dalam model statistik untuk menemukan korelasi dan mungkin merumuskan “hukum” kemacetan, misalnya, “Jika volume kendaraan melebihi kapasitas jalan sebesar X%, maka kecepatan rata-rata akan turun sebesar Y%”. Tujuannya adalah prediksi dan kontrol. Peneliti kedua, seorang anti-positivis, akan mengambil pendekatan yang berbeda. Ia mungkin akan ikut naik bus kota, mewawancarai para pengemudi ojek *online*, dan mengamati interaksi di antara pengendara motor. Tujuannya adalah

untuk memahami “makna” kemacetan: bagaimana pengendara merasakan frustrasi, bagaimana mereka menegosiasikan ruang, strategi apa yang mereka gunakan untuk bertahan, dan bagaimana kemacetan membentuk ritme kehidupan kota. Kedua pendekatan ini menghasilkan jenis pengetahuan yang berbeda, keduanya valid, dan keduanya menggambarkan perpecahan epistemologis fundamental dalam ilmu sosial.

### 1.3.1 Perdebatan Positivisme dan Anti-Positivisme

Perdebatan antara positivisme dan anti-positivisme adalah salah satu pertentangan paling fundamental dalam filsafat ilmu sosial. Positivisme, yang dipelopori oleh Comte dan dikembangkan lebih lanjut oleh Durkheim, berpegang pada beberapa prinsip utama. Pertama, ia menganut realisme, yaitu keyakinan bahwa ada dunia sosial nyata yang eksis secara independen dari persepsi kita. Kedua, ia mengadopsi empirisme, gagasan bahwa pengetahuan tentang dunia ini hanya dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi dan observasi. Ketiga, ia bertujuan untuk menemukan hukum-hukum kausal universal yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena sosial, mirip dengan hukum gravitasi dalam fisika (Kaluarachchi, 2025).

Anti-positivisme, sebagai sebuah payung besar, menantang semua asumsi ini. Para pemikir dalam tradisi ini, mulai dari Max Weber dengan konsep *Verstehen* hingga para fenomenolog seperti Alfred Schutz, berpendapat bahwa realitas sosial tidak dapat dipisahkan dari makna subjektif yang dilekatkan oleh para aktor padanya. Realitas sosial bersifat terkonstruksi secara intersubjektif. Oleh karena itu, tugas sosiologi bukanlah mencari hukum universal, melainkan menginterpretasikan makna-makna ini. Mereka menekankan perbedaan ontologis antara objek ilmu alam (benda tanpa kesadaran) dan subjek ilmu sosial (manusia yang sadar dan bertujuan) (Day, 2025). Klaim objektivitas total

dianggap sebagai ilusi, karena peneliti sendiri adalah bagian dari dunia sosial yang mereka pelajari.

Meskipun perdebatan ini sering disajikan sebagai oposisi biner, banyak teoretikus kontemporer berusaha melampaui dikotomi ini. Mereka berpendapat bahwa penjelasan kausal (positivisme) dan pemahaman interpretatif (anti-positivisme) tidak harus saling meniadakan, tetapi dapat saling melengkapi. Sebuah analisis yang kaya mungkin memerlukan pemahaman tentang bagaimana struktur makro (misalnya, sistem ekonomi) membatasi pilihan individu, sekaligus bagaimana individu menafsirkan dan menavigasi batasan-batasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

### **1.3.2 Pendekatan Kuantitatif vs Kualitatif**

Sebagai turunan langsung dari perdebatan epistemologis, muncullah perbedaan metodologis antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif berakar pada tradisi positivisme dan bertujuan untuk mengukur variabel-variabel sosial, menganalisisnya secara statistik, dan menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel tersebut (Masullo, 2024). Metode yang umum digunakan meliputi survei dengan kuesioner terstruktur, analisis data sekunder (misalnya, data sensus), dan eksperimen. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menganalisis sampel dalam jumlah besar, mengidentifikasi tren dan pola umum, serta membuat generalisasi pada populasi yang lebih luas.

Penelitian kualitatif, di sisi lain, selaras dengan epistemologi anti-positivis atau interpretif. Tujuannya bukan untuk mengukur, melainkan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual (Kaluarachchi, 2025). Metode yang digunakan antara lain wawancara mendalam, observasi partisipan, studi kasus, dan analisis wacana. Kekuatan

pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan data yang kaya dan detail (*rich data*), mengungkap kompleksitas dan ambiguitas dalam pengalaman manusia, serta memberikan pemahaman holistik tentang proses-proses sosial dari sudut pandang partisipan.

Saat ini, pandangan yang semakin dominan adalah bahwa kedua pendekatan ini tidak seharusnya dilihat sebagai rival, melainkan sebagai komplementer. Penggunaan metode campuran (*mixed methods*), yang mengkombinasikan kekuatan dari kedua pendekatan dalam satu desain penelitian, menjadi semakin populer. Misalnya, seorang peneliti bisa menggunakan survei kuantitatif untuk mengidentifikasi pola umum tentang kemiskinan, dan kemudian melakukan wawancara kualitatif mendalam dengan beberapa keluarga untuk memahami pengalaman hidup dan strategi bertahan mereka secara lebih manusiawi (Masullo, 2024).

### 1.3.3 Isu Objektivitas dan Subjektivitas dalam Penelitian

Isu objektivitas adalah jantung dari perdebatan metodologis dalam ilmu sosial. Perspektif positivis secara tradisional memperjuangkan cita-cita objektivitas mutlak, di mana peneliti harus melepaskan semua bias pribadi, nilai, dan keyakinan mereka untuk dapat melihat realitas sosial sebagaimana adanya. Peneliti dipandang sebagai pengamat yang netral dan terpisah dari objek yang diteliti. Prosedur penelitian yang terstandarisasi, seperti penggunaan sampel acak dan instrumen pengukuran yang valid, dirancang untuk meminimalkan pengaruh subjektivitas peneliti (Day, 2025).

Sebaliknya, tradisi interpretif dan kritis berpendapat bahwa objektivitas total adalah sebuah mitos yang tidak mungkin dan bahkan tidak diinginkan. Peneliti adalah manusia dengan latar belakang sosial, politik, dan budaya tertentu, yang secara tak terhindarkan akan mempengaruhi apa yang mereka pilih untuk

diteliti, bagaimana mereka merumuskan pertanyaan, dan bagaimana mereka menafsirkan data. Alih-alih mengejar objektivitas yang mustahil, para peneliti dalam tradisi ini menekankan pentingnya reflektivitas, yaitu proses di mana peneliti secara sadar memeriksa dan mengakui bagaimana posisi sosial mereka (*positionality*) membentuk proses penelitian (Bingham et al., 2024).

Max Weber menawarkan jalan tengah yang berpengaruh dengan konsep “netralitas nilai” (*value neutrality*). Weber setuju bahwa nilai-nilai peneliti tak terhindarkan dalam pemilihan topik penelitian (relevansi nilai). Namun, ia bersikeras bahwa begitu penelitian dimulai, peneliti harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan nilai-nilai pribadinya mendistorsi pengumpulan dan analisis data. Kesimpulannya harus didasarkan pada bukti, bukan pada preferensi politik atau moral peneliti. Ini tetap menjadi standar etis yang dipegang luas dalam sosiologi, meskipun pengakuan terhadap tantangan dalam mencapainya kini jauh lebih besar.

#### **1.3.4 Hermeneutika dan Interpretasi Makna Sosial**

Hermeneutika, yang secara tradisional merupakan teori interpretasi teks (khususnya teks-teks keagamaan), telah diadaptasi ke dalam ilmu sosial sebagai metode untuk memahami tindakan dan budaya. Hermeneutika sosial berpendapat bahwa dunia sosial dapat dibaca seperti sebuah “teks”. Tindakan, ritual, dan institusi sosial bukanlah sekadar perilaku fisik, melainkan sarat dengan makna yang harus ditafsirkan. Tugas analisis sosial, mirip dengan seorang kritikus sastra, adalah mengungkap lapisan-lapisan makna yang terkandung dalam “teks” sosial tersebut (Day, 2025).

Konsep sentral dalam hermeneutika adalah “lingkaran hermeneutis” (*hermeneutic circle*). Ini merujuk pada proses interpretasi di mana pemahaman terhadap bagian-bagian (misalnya, tindakan seorang individu) bergantung pada pemahaman terhadap

keseluruhan (misalnya, konteks budaya individu tersebut), dan sebaliknya, pemahaman terhadap keseluruhan diperkaya oleh pemahaman terhadap bagian-bagian. Pemahaman bukanlah proses linear, melainkan gerakan bolak-balik yang terus-menerus antara detail dan konteks. Proses ini menyoroti sifat holistik dari pemahaman sosial.

Penerapan hermeneutika dalam sosiologi berarti bahwa untuk memahami mengapa seseorang melakukan sesuatu, kita tidak cukup hanya mengamati perilakunya. Kita perlu memahami kerangka makna, norma, dan nilai-nilai budaya di mana tindakan itu berlangsung. Clifford Geertz, seorang antropolog yang sangat berpengaruh pada sosiologi, menyebut proses ini sebagai “deskripsi mendalam” (*thick description*). Ini bukan hanya melaporkan fakta (misalnya, “seseorang mengedipkan mata”), tetapi juga menafsirkan maknanya dalam konteks tertentu (apakah itu sebuah kedutan, sinyal rahasia, atau ejekan?). Pendekatan ini sangat penting untuk studi lintas budaya dan untuk menghindari etnosentrisme.

### 1.3.5 Kritik terhadap Metodologi Dominan

Tidak ada metodologi yang bebas dari kritik. Metodologi kuantitatif, meskipun kuat dalam generalisasi, sering dikritik karena terlalu menyederhanakan realitas sosial. Dengan mereduksi pengalaman manusia menjadi angka-angka dan variabel-variabel, ia berisiko kehilangan nuansa, konteks, dan makna subjektif. Kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini dapat “mengobjektifikasi” manusia, memperlakukan mereka sebagai entitas pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan eksternal, dan mengabaikan agensi dan kreativitas mereka (Masullo, 2024).

Di sisi lain, metodologi kualitatif juga menghadapi kritiknya sendiri. Karena seringkali didasarkan pada sampel kecil dan

tidak acak, temuannya dianggap sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Proses interpretasi yang menjadi intinya dikritik sebagai terlalu subjektif dan rentan terhadap bias peneliti. Bagaimana kita bisa yakin bahwa interpretasi seorang peneliti lebih valid daripada interpretasi lainnya? Tanpa prosedur standarisasi, validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif menjadi sulit untuk dinilai secara objektif (Kaluvarachchi, 2025).

Kritik yang lebih radikal datang dari para teoretikus kritis, feminis, dan post-strukturalis. Mereka berpendapat bahwa banyak metodologi dominan, baik kuantitatif maupun kualitatif, secara implisit melayani kepentingan status quo. Mereka mengkritik “sains sosial positivis” sebagai alat kontrol dan administrasi, bukan sebagai alat emansipasi. Teori feminis, misalnya, mengkritik bagaimana banyak penelitian di masa lalu mengabaikan pengalaman perempuan atau menganalisisnya melalui lensa androsentris (berpusat pada laki-laki). Kritik-kritik ini mendorong pengembangan metodologi alternatif yang lebih partisipatif, emansipatoris, dan sadar-kekuasaan.

#### **1.4 Klasifikasi Utama dalam Teori Sosial**

Menghadapi jajaran teori sosial yang luas dan beragam dapat terasa membingungkan. Untuk menavigasi lanskap intelektual ini, para ahli telah mengembangkan berbagai skema klasifikasi. Klasifikasi ini berfungsi sebagai peta konseptual yang membantu kita mengorganisasi berbagai teori berdasarkan asumsi dasar, fokus analisis, atau orientasi umumnya. Penting untuk diingat bahwa klasifikasi ini adalah alat bantu, bukan kategori yang kaku dan mutlak. Banyak teori yang melintasi batas-batas ini atau menggabungkan elemen dari beberapa kategori. Namun, sebagai titik awal, pemetaan ini sangat berguna untuk memahami hubungan, perbedaan, dan perdebatan di antara berbagai aliran pemikiran.

Salah satu cara paling umum untuk mengklasifikasikan teori sosial adalah berdasarkan orientasi mereka terhadap tatanan sosial, yaitu membaginya menjadi teori konsensus dan teori konflik. Teori konsensus, yang sering disebut juga fungsionalisme atau teori integrasi, memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang relatif stabil dan terintegrasi. Fokusnya adalah pada bagaimana berbagai bagian masyarakat bekerja sama untuk mempertahankan keutuhan dan keseimbangan sistem. Teori-teori ini cenderung menekankan pada nilai-nilai bersama, norma, dan sosialisasi sebagai fondasi dari tatanan sosial (Ahmad et al., 2023). Emile Durkheim dan Talcott Parsons adalah tokoh sentral dalam tradisi ini.

Sebaliknya, teori konflik memandang masyarakat sebagai arena di mana berbagai kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan terus-menerus bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang langka, seperti kekayaan, status, dan kekuasaan. Tatanan sosial, dari perspektif ini, bukanlah hasil dari konsensus, melainkan dari dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Teori konflik cenderung menyoroti isu-isu ketidaksetaraan, eksploitasi, dan koersi sebagai aspek fundamental dari kehidupan sosial, serta melihat perubahan sosial sebagai hasil dari perjuangan dan kontradiksi internal (Reynolds, 2021). Karl Marx adalah bapak dari tradisi ini, yang kemudian dikembangkan oleh teoretikus seperti Ralf Dahrendorf dan Randall Collins.

Pembagian ini, meskipun sangat membantu, terkadang terlalu menyederhanakan. Beberapa teori, seperti yang dikemukakan oleh Lewis Coser, mencoba menjembatani keduanya dengan menunjukkan bahwa konflik itu sendiri dapat memiliki fungsi integratif bagi masyarakat. Teori-teori lain, seperti interaksionisme simbolik, tidak mudah dimasukkan ke dalam salah satu kategori karena fokus mereka bukanlah pada tatanan makro (baik konsensus

maupun konflik), melainkan pada proses penciptaan makna dalam interaksi mikro. Meskipun demikian, dikotomi konflik-konsensus tetap menjadi kerangka heuristik yang kuat untuk memulai pemetaan teori sosial.

**Analogi/Contoh Kasus:** Bayangkan sebuah tim sepak bola. Seorang analis berorientasi konsensus (fungsionalis) akan fokus pada bagaimana setiap pemain (penyerang, gelandang, bek, kiper) memiliki peran spesifik yang berkontribusi pada tujuan bersama tim, yaitu memenangkan pertandingan. Ia akan menganalisis strategi, formasi, dan komunikasi yang membuat tim bekerja sebagai satu unit yang terintegrasi. Sebaliknya, seorang analis berorientasi konflik akan melihat tim sebagai arena persaingan internal. Ia mungkin fokus pada perebutan status (siapa yang menjadi kapten atau bintang utama), kompetisi untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, atau ketegangan antara pemain senior dan pemain muda yang ingin merebut posisi mereka. Bagi analis ini, “keutuhan tim” mungkin hanya tampak di permukaan, menutupi perjuangan kepentingan yang terus-menerus di bawahnya. Kedua analisis ini menyoroti aspek yang berbeda dari realitas tim yang sama.

#### **1.4.1 Pembagian Berdasarkan Orientasi (Konflik, Konsensus)**

Pembagian teori berdasarkan orientasi konflik versus konsensus merupakan salah satu dikotomi paling klasik dan bertahan lama dalam sosiologi. Teori konsensus, yang berakar pada pemikiran Durkheim dan mencapai puncaknya pada fungsionalisme struktural Parsons, bertumpu pada asumsi bahwa masyarakat memiliki kebutuhan fungsional tertentu yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, seperti adaptasi terhadap lingkungan dan integrasi anggota-anggotanya. Institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah dipandang sebagai organ-organ yang menjalankan fungsi-fungsi ini, bekerja sama untuk menjaga

kesehatan “organisme” sosial. Tatanan sosial dimungkinkan oleh adanya sistem nilai bersama yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui sosialisasi (Ahmad et al., 2023).

Teori konflik, yang paling kuat diartikulasikan oleh Karl Marx, menawarkan pandangan yang secara diametral berlawanan. Masyarakat tidak dilihat sebagai sistem yang harmonis, melainkan sebagai struktur yang penuh dengan perpecahan dan ketegangan yang inheren. Fokus utamanya adalah pada bagaimana distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata menciptakan kelompok-kelompok yang saling berkonflik. Bagi Marx, konflik fundamental terjadi antara kelas borjuis (pemilik modal) dan proletariat (pekerja). Perubahan sosial tidak terjadi secara evolusioner untuk menjaga keseimbangan, melainkan melalui revolusi yang lahir dari kontradiksi internal sistem (Reynolds, 2021).

Sementara Marx fokus pada konflik kelas ekonomi, teoretikus konflik lain memperluas analisisnya. Max Weber, misalnya, berpendapat bahwa konflik tidak hanya berasal dari ekonomi, tetapi juga dari perebutan status sosial dan kekuasaan politik. Ralf Dahrendorf menggeser fokus dari kepemilikan menjadi otoritas, dengan alasan bahwa konflik utama dalam masyarakat modern terjadi antara mereka yang memiliki otoritas untuk memberi perintah dan mereka yang harus patuh. Meskipun berbeda dalam detailnya, semua teori konflik berbagi pandangan dasar bahwa masyarakat secara fundamental dibentuk oleh perjuangan dan dominasi.

#### **1.4.2 Pembagian Berdasarkan Fokus (Struktur, Aktor)**

Dikotomi penting lainnya dalam teori sosial adalah antara pendekatan yang berfokus pada struktur dan yang berfokus pada aktor (atau agensi). Pendekatan strukturalis, baik dalam varian

fungsionalis (Durkheim) maupun konflik (Marx), cenderung bersifat deterministik. Mereka berpendapat bahwa perilaku, keyakinan, dan peluang hidup individu sebagian besar dibentuk atau ditentukan oleh struktur sosial yang lebih besar di mana mereka berada. Bagi Durkheim, “fakta sosial” seperti norma dan hukum memiliki kekuatan memaksa (*coercive power*) terhadap individu. Bagi Marx, posisi seseorang dalam struktur kelas ekonomi menentukan kesadaran dan kepentingannya (Roth et al., 2025). Dalam pandangan ini, aktor sosial seringkali dilihat sebagai “boneka” dari sistem.

Sebaliknya, pendekatan yang berfokus pada aktor atau agensi menekankan peran aktif individu dalam menciptakan dan membentuk realitas sosial. Tradisi ini, yang mencakup interaksionisme simbolik, fenomenologi, dan etnometodologi, sering disebut sebagai sosiologi interpretif atau mikro. Mereka berargumen bahwa struktur sosial tidak ada secara independen dari tindakan dan interpretasi manusia. Tatanan sosial adalah pencapaian yang rapuh dan terus-menerus dinegosiasikan dalam interaksi sehari-hari. Max Weber, dengan penekanannya pada “tindakan sosial” yang bermakna dan metodologi *Verstehen*, dapat dianggap sebagai jembatan antara fokus pada struktur dan agensi.

Perdebatan struktur-agensi ini telah menjadi salah satu isu sentral dalam teori sosial kontemporer. Banyak teoretikus modern seperti Anthony Giddens (dengan teori strukturasi) dan Pierre Bourdieu (dengan konsep habitus dan arena) telah berusaha untuk mensintesis kedua pendekatan ini. Mereka menolak pilihan biner antara struktur dan agensi, dan sebaliknya berpendapat bahwa keduanya saling mengkonstitusi. Struktur dimungkinkan oleh tindakan aktor, tetapi tindakan aktor juga dibatasi dan dibentuk oleh struktur. Hubungan keduanya bersifat dualitas, bukan dualisme (akan dibahas lebih lanjut di Bab 9 dan 10).

### 1.4.3 Pembagian Berdasarkan Periodisasi Waktu

Klasifikasi teori sosial juga dapat dilakukan berdasarkan periode waktu kemunculannya, yang secara kasar membaginya menjadi teori klasik, modern, dan kontemporer (atau postmodern). Teori klasik merujuk pada karya-karya para pendiri sosiologi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. Karya mereka dianggap “klasik” karena mereka meletakkan dasar-dasar konseptual dan metodologis disiplin ini dan terus menjadi titik acuan bagi perdebatan teoretis hingga saat ini. Mereka adalah generasi pertama yang mencoba memahami secara sistematis kelahiran masyarakat modern-industrial.

Teori modern atau kontemporer biasanya merujuk pada pengembangan teoretis dari pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Periode ini ditandai oleh diversifikasi dan spesialisasi teori yang luar biasa. Ini mencakup pengembangan lebih lanjut dari tradisi klasik, seperti fungsionalisme struktural Parsons (mengembangkan Durkheim) dan berbagai aliran neo-Marxisme. Periode ini juga menyaksikan munculnya paradigma-paradigma baru yang menantang dominasi teori klasik, seperti interaksionisme simbolik, teori kritis Aliran Frankfurt, teori pertukaran, dan fenomenologi (Roth et al., 2025).

Istilah postmodernisme atau post-strukturalisme merujuk pada serangkaian pemikiran yang muncul sejak tahun 1970-an yang secara radikal mengkritik asumsi-asumsi dasar dari teori sosial klasik dan modern (yang mereka sebut sebagai proyek “Pencerahan”). Pemikir seperti Foucault, Derrida, dan Lyotard menolak gagasan tentang “kebenaran” universal, kemajuan sejarah, dan subjek yang koheren. Mereka lebih fokus pada analisis wacana, kekuasaan, dan dekonstruksi “narasi-narasi besar” (*grand narratives*). Periode ini ditandai oleh skeptisisme

terhadap kemungkinan adanya satu teori tunggal yang dapat menjelaskan keseluruhan realitas sosial.

#### **1.4.4 Teori Kritis vs Teori Fungsional**

Pembagian antara teori kritis dan teori fungsional merupakan cara lain untuk memetakan lanskap teoretis, yang tumpang tindih dengan dikotomi konflik-konsensus tetapi memiliki penekanan yang berbeda. Teori fungsional, seperti yang telah dibahas, fokus pada pertanyaan tentang keteraturan dan stabilitas. Ia menganalisis masyarakat dari sudut pandang bagaimana berbagai elemennya berkontribusi pada pemeliharaan sistem secara keseluruhan. Pendekatannya cenderung deskriptif dan analitis, dengan tujuan untuk memahami “bagaimana sesuatu bekerja” (Ahmad et al., 2023). Karena penekanannya pada keseimbangan dan fungsi, ia sering dikritik karena memiliki bias konservatif dan kesulitan menjelaskan perubahan sosial yang radikal.

Teori Kritis, yang secara spesifik diasosiasikan dengan Aliran Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas), memiliki tujuan yang secara fundamental berbeda. Ia tidak hanya ingin mendeskripsikan atau menjelaskan masyarakat, tetapi juga mengkritiknya dengan tujuan untuk emansipasi atau pembebasan manusia dari berbagai bentuk dominasi. Teori Kritis secara eksplisit bersifat normatif; ia memiliki visi tentang masyarakat yang baik, adil, dan rasional, dan menggunakan visi tersebut sebagai standar untuk mengkritik realitas yang ada (Reynolds, 2021). Ia memadukan analisis Marxian tentang ekonomi-politik dengan wawasan Weber tentang rasionalisasi dan psikoanalisis Freud untuk menganalisis bagaimana dominasi beroperasi tidak hanya melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui budaya, ideologi, dan represi psikologis.

Perbedaan kunci terletak pada hubungan teori dengan praktik. Teori fungsional memisahkan secara tegas antara analisis ilmiah

(yang dianggap bebas nilai) dan aplikasi praktis. Sebaliknya, Teori Kritis menolak pemisahan ini dan bersikeras bahwa teori dan praktik (*praxis*) harus saling terkait. Tujuan akhir dari teori adalah untuk menyumbang pada perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih bebas dan adil. Teori ini secara inheren bersifat refleksif, mengkritik tidak hanya masyarakat tetapi juga peran sosiologi itu sendiri di dalam masyarakat.

#### 1.4.5 Relevansi Klasifikasi untuk Analisis

Mengapa klasifikasi-klasifikasi ini penting bagi seorang mahasiswa ilmu sosial? Pertama, mereka berfungsi sebagai “jalan pintas” mental (*mental shortcut*) untuk memahami posisi sebuah teori dalam perdebatan yang lebih luas. Ketika Anda mendengar sebuah teori digambarkan sebagai “makro-konflik”, Anda sudah memiliki gambaran awal tentang asumsi dan fokusnya tanpa harus mengetahui semua detailnya. Ini membantu dalam mengorganisasi pengetahuan dan membandingkan berbagai perspektif secara efisien (Bingham et al., 2024).

Kedua, klasifikasi membantu kita untuk melakukan analisis yang lebih kritis. Dengan memahami bahwa sebuah teori berasal dari tradisi “konsensus”, misalnya, kita dapat secara sadar waspada terhadap potensinya untuk mengabaikan isu-isu kekuasaan dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan teori “mikro-interpretif”, kita bisa bertanya tentang bagaimana interaksi-interaksi yang dianalisisnya terhubung dengan struktur sosial yang lebih besar. Klasifikasi memungkinkan kita untuk melihat tidak hanya kekuatan tetapi juga titik buta (*blind spots*) dari setiap perspektif teoretis.

Ketiga, dan yang paling penting, pemahaman terhadap berbagai klasifikasi ini mendorong pendekatan multiparadigma. Analisis sosial yang canggih tidak akan terkurung dalam satu kotak teoretis saja. Sebaliknya, ia akan memahami bahwa fenomena

sosial yang kompleks seringkali membutuhkan lensa dari berbagai tradisi untuk dapat dipahami sepenuhnya. Menganalisis sistem pendidikan di Indonesia, misalnya, mungkin memerlukan lensa fungsionalis (untuk memahami perannya dalam sosialisasi), lensa konflik (untuk melihat bagaimana ia mereproduksi ketidaksetaraan kelas), dan lensa interaksionis (untuk mempelajari interaksi guru-murid di dalam kelas). Klasifikasi, dengan demikian, bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai pemahaman yang lebih kaya dan multifaset.

### **1.5 Posisi Teori Sosial di Indonesia**

Memindahkan diskursus teori sosial dari konteks kelahirannya di Eropa ke panggung Indonesia menghadirkan serangkaian pertanyaan, tantangan, dan peluang yang unik. Sejarah intelektual ilmu sosial di Indonesia secara tak terhindarkan terkait erat dengan sejarah politik, kolonialisme, dan pembangunan bangsa. Teori sosial tidak masuk ke Indonesia sebagai seperangkat ide yang netral, melainkan datang bersama dengan institusi pendidikan kolonial, proyek modernisasi pasca-kemerdekaan, dan jaringan akademik global yang seringkali tidak setara. Akibatnya, posisi teori sosial di Indonesia ditandai oleh ketegangan yang terus-menerus antara universalisme klaim teoretis dan partikularisme konteks lokal, antara adopsi dan adaptasi, serta antara kritik dan legitimasi kekuasaan.

Sejarah masuknya ilmu sosial ke Indonesia dapat dilacak kembali ke masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana studi-studi etnografis dan hukum adat dilakukan terutama untuk kepentingan administrasi kolonial. Setelah kemerdekaan, kebutuhan untuk membangun bangsa yang baru mendorong pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan ilmu politik, di universitas-universitas terkemuka. Namun, kerangka teoretis yang digunakan sebagian besar diimpor dari Eropa dan

Amerika Serikat, khususnya fungsionalisme struktural yang pada pertengahan abad ke-20 sedang dominan (Jayadi et al., 2022). Teori ini dianggap cocok dengan agenda pemerintah yang berfokus pada stabilitas, integrasi, dan pembangunan ekonomi.

Tantangan utama yang dihadapi sejak awal adalah penerjemahan konsep-konsep Barat ke dalam realitas sosial Indonesia. Konsep seperti “kelas”, “individu”, atau “masyarakat sipil” tidak selalu memiliki padanan yang tepat atau resonansi yang sama dalam masyarakat yang dibentuk oleh nilai-nilai komunal, struktur patronase, dan keragaman etnis yang luar biasa. Hal ini memicu perdebatan penting tentang relevansi dan universalitas teori Barat. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa teori-teori tersebut adalah alat analisis universal yang dapat diterapkan di mana saja, sementara yang lain menyerukan “indigenisasi” atau pengembangan teori yang berakar pada konsep dan kearifan lokal (Habib & Gilalo, 2025).

Di era Orde Baru, teori sosial, khususnya fungsionalisme dan teori modernisasi, seringkali digunakan untuk melegitimasi kebijakan pembangunan yang sentralistis dan teknokratis. Pendekatan yang lebih kritis, terutama Marxisme, secara resmi dilarang dan ditekan, meskipun pengaruhnya tetap bertahan dalam analisis-analisis bawah tanah tentang ketimpangan dan ketergantungan. Era Reformasi membuka kembali ruang bagi keragaman teoretis yang lebih besar, dengan meningkatnya minat pada teori-teori kritis, post-strukturalisme, dan studi budaya. Namun, tantangan untuk memproduksi teori orisinal yang berakar dari konteks Indonesia tetap menjadi agenda utama bagi komunitas ilmu sosial di tanah air.

**Contoh Kasus:** Konsep “gotong royong” seringkali diidealisasikan sebagai inti dari solidaritas sosial di Indonesia. Seorang teoretikus fungsionalis mungkin akan menganalisis

gotong royong sebagai manifestasi dari “solidaritas mekanik” Durkheimian yang berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial dalam komunitas. Namun, seorang teoretikus konflik mungkin akan mengajukan pertanyaan kritis: Siapa yang paling diuntungkan dari praktik gotong royong? Apakah ia terkadang menjadi mekanisme eksploitasi terselubung di mana warga miskin “menyumbangkan” tenaga kerja mereka untuk proyek yang lebih menguntungkan elite desa? Seorang teoretikus Bourdieuan bisa menganalisisnya sebagai bentuk pertukaran “modal sosial”. Kasus gotong royong ini menunjukkan bagaimana sebuah fenomena lokal yang sama dapat diinterpretasikan secara sangat berbeda tergantung pada lensa teoretis yang digunakan, dan menyoroti pentingnya dialog kritis antara konsep lokal dan teori sosial global.

### 1.5.1 Sejarah Masuknya Ilmu Sosial ke Indonesia

Ilmu sosial formal masuk ke Indonesia melalui sistem pendidikan tinggi yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, seperti *Rechtshoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia. Awalnya, fokusnya adalah pada studi hukum adat (*adatrecht*) dan etnologi (*volkenkunde*) yang bertujuan untuk memahami masyarakat pribumi demi efisiensi pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan, para intelektual Indonesia yang belajar di Eropa dan Amerika Serikat, seperti Selo Soemardjan dan Soedjatmoko, memainkan peran kunci dalam melembagakan sosiologi dan ilmu politik sebagai disiplin akademis yang independen di universitas-universitas seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada (Jayadi et al., 2022).

Pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno, terjadi persaingan antara tradisi sosiologi “Amerika” yang empiris dan positivistik dengan pemikiran sosial yang lebih berorientasi Marxis dan nasionalis. Namun, setelah peristiwa 1965 dan naiknya Orde Baru, tradisi Marxis secara sistematis diberangus dari ranah akademik.

Sosiologi yang berkembang kemudian adalah yang sejalan dengan ideologi pembangunanisme, yaitu fungsionalisme struktural dan teori modernisasi. Teori-teori ini diadopsi secara luas karena menawarkan kerangka kerja untuk stabilitas, keteraturan, dan perubahan sosial yang bertahap, sesuai dengan agenda politik rezim saat itu (Yusriadi et al., 2022).

Era Reformasi 1998 membawa angin segar bagi kebebasan akademik. Larangan terhadap pemikiran Marxis dicabut, dan pintu terbuka lebar bagi masuknya berbagai teori kontemporer seperti post-strukturalisme, feminisme, dan postkolonialisme. Terjadi pergeseran dari sosiologi yang berorientasi pada kebijakan negara menuju analisis yang lebih kritis terhadap kekuasaan, wacana, dan ketidakadilan. Generasi baru ilmuwan sosial Indonesia mulai lebih aktif terlibat dalam jaringan akademik global, sambil terus bergulat dengan pertanyaan tentang bagaimana membuat teori-teori ini relevan bagi analisis masyarakat Indonesia.

### 1.5.2 Tantangan Penerjemahan Konsep Barat

Salah satu tantangan paling persisten dalam penerapan teori sosial di Indonesia adalah masalah penerjemahan, baik secara linguistik maupun konseptual. Banyak konsep kunci dalam teori sosial, seperti *civil society*, *rationality*, atau *individualism*, tidak memiliki padanan kata yang sempurna dalam Bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah. Penerjemahan yang literal seringkali gagal menangkap nuansa makna dan asumsi budaya yang terkandung dalam konsep aslinya. Misalnya, “individu” dalam konteks liberal Barat mengasumsikan otonomi dan kebebasan pilihan, yang mungkin berbeda dengan konsep “diri” dalam banyak budaya di Indonesia yang lebih relasional dan komunal (Habib & Gilalo, 2025).

Lebih jauh, tantangannya bersifat konseptual. Apakah struktur kelas yang dianalisis Marx di Eropa abad ke-19 dapat diterapkan

begitu saja pada masyarakat agraris di Jawa yang dibentuk oleh hubungan patron-klien? Apakah konsep “ruang publik” Habermasian, yang berakar pada sejarah salon-salon borjuis di Eropa, relevan untuk menganalisis warung kopi atau media sosial di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut kerja adaptasi yang kreatif, bukan sekadar aplikasi mekanis. Ilmuwan sosial Indonesia harus terus-menerus menguji validitas dan batas-batas konsep Barat ketika dihadapkan pada realitas empiris lokal.

Tantangan ini memunculkan seruan untuk “indigenisasi” ilmu sosial, yaitu sebuah upaya untuk membangun konsep dan teori yang berasal dari khazanah intelektual dan budaya nusantara. Ini bukan berarti menolak teori Barat secara total, melainkan menempatkannya dalam dialog kritis dengan pengetahuan lokal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu sosial yang lebih peka konteks dan memiliki daya jelas yang lebih kuat untuk realitas Indonesia, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi kembali pada perbendaharaan teori sosial global (Jayadi et al., 2022).

### **1.5.3 Awal Mula Kajian Sosiologi di Perguruan Tinggi**

Pelembagaan sosiologi di perguruan tinggi Indonesia pasca-kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh para sarjana yang mendapatkan pendidikan di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, di bawah program beasiswa seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Akibatnya, kurikulum dan orientasi teoretis sosiologi pada masa-masa awal sangat mencerminkan apa yang dominan di universitas-universitas Amerika pada era 1950-an dan 1960-an, yaitu fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan sosiologi empiris Robert K. Merton (Yusriadi et al., 2022). Buku-buku teks standar diterjemahkan dan digunakan secara luas.

Fokus kajian pada periode awal ini cenderung makro-struktural dan berorientasi pada masalah-masalah pembangunan nasional.

Topik-topik seperti perubahan sosial di pedesaan, urbanisasi, transmigrasi, dan integrasi nasional menjadi agenda penelitian utama. Terdapat penekanan kuat pada penelitian kuantitatif dan survei sosial. Meskipun pendekatan ini menghasilkan banyak data penting untuk perencanaan pembangunan, ia juga dikritik karena cenderung ahistoris, apolitis, dan mengabaikan isu-isu konflik dan kekuasaan yang mendasari banyak masalah sosial di Indonesia.

Baru pada akhir 1970-an dan 1980-an, mulai muncul alternatif-alternatif kritis, seringkali di luar kurikulum resmi. Para mahasiswa dan peneliti muda mulai menemukan kembali tradisi Marxis melalui teori ketergantungan (*dependency theory*) untuk menganalisis hubungan Indonesia dengan ekonomi kapitalis global. Selain itu, pengaruh antropologi interpretif Clifford Geertz mendorong minat pada penelitian kualitatif yang lebih peka terhadap makna budaya. Perkembangan ini secara perlahan mulai mendiversifikasi lanskap teoretis dan metodologis dalam kajian sosiologi di perguruan tinggi Indonesia, sebuah proses yang berakselerasi pesat setelah Reformasi 1998.

#### **1.5.4 Peran Teori Sosial dalam Pembangunan Nasional**

Sejak awal Orde Baru, ilmu sosial, dan teori-teori yang mendasarinya, secara eksplisit dilibatkan dalam proyek pembangunan nasional. Para sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya seringkali berperan sebagai konsultan, peneliti, dan teknokrat di lembaga-lembaga pemerintah seperti Bappenas. Dalam konteks ini, teori-teori yang paling banyak digunakan adalah teori modernisasi dan fungsionalisme. Teori modernisasi, yang berpendapat bahwa masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan linear dari “tradisional” ke “modern”, menyediakan justifikasi teoretis bagi kebijakan-kebijakan yang mendorong industrialisasi, transfer teknologi, dan penyerapan nilai-nilai Barat (Habib & Gilalo, 2025).

Teori fungsionalis juga sangat berpengaruh, dengan penekanannya pada stabilitas, harmoni, dan integrasi. Pendekatan ini melihat masalah-masalah sosial seperti kemiskinan atau pemberontakan bukan sebagai akibat dari ketidakadilan struktural, melainkan sebagai “disfungsi” yang dapat diatasi melalui intervensi teknokratis dan rekayasa sosial. Slogan-slogan seperti “stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi” mencerminkan logika fungsionalis ini. Peran teori sosial dalam periode ini seringkali bersifat instrumental, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh negara, bukan sebagai alat untuk mengkritik tujuan-tujuan itu sendiri.

Kritik terhadap model pembangunan ini muncul dari para penganut teori ketergantungan dan teori sistem dunia. Mereka berargumen bahwa model pembangunan yang didominasi oleh modal dan kepentingan asing justru menciptakan “pembangunan yang timpang” dan melanggengkan posisi Indonesia sebagai negara pinggir dalam sistem kapitalis global. Debat antara kubu modernisasi dan ketergantungan ini menjadi salah satu perdebatan teoretis paling penting dalam studi pembangunan di Indonesia. Setelah krisis ekonomi 1997 dan jatuhnya Orde Baru, model pembangunan yang teknokratis dan *top-down* ini mulai banyak dipertanyakan, membuka jalan bagi pendekatan-pendekatan alternatif yang lebih partisipatif dan kritis.

### **1.5.5 Relevansi Konsep Lokal dan Kearifan Budaya**

Di tengah dominasi teori sosial Barat, muncul kesadaran yang semakin kuat akan pentingnya menggali konsep-konsep lokal dan kearifan budaya (*local wisdom*) sebagai sumber daya untuk analisis sosial di Indonesia. Konsep-konsep seperti *musyawarah untuk mufakat*, *rukun*, *tepo seliro* (tenggang rasa), atau *sistem sasi* di Maluku bukanlah sekadar tradisi kuno, melainkan representasi dari cara-cara spesifik masyarakat lokal dalam mengorganisasi

kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, dan mengelola sumber daya (Jayadi et al., 2022). Memahami konsep-konsep ini dari dalam (*emic perspective*) dapat memberikan wawasan yang tidak dapat ditangkap oleh kerangka konseptual Barat.

Relevansi konsep lokal tidak hanya untuk studi etnografis, tetapi juga untuk analisis isu-isu kontemporer. Misalnya, dalam studi resolusi konflik, pemahaman tentang mekanisme adat dapat memberikan alternatif bagi pendekatan formal-legalistik yang seringkali asing bagi masyarakat. Dalam studi pengelolaan lingkungan, kearifan ekologis lokal dapat menawarkan model keberlanjutan yang berbeda dari pendekatan teknosentris. Menganalisis bagaimana konsep-konsep ini bertahan, berubah, atau bahkan dimanipulasi dalam konteks modernitas adalah tugas penting bagi sosiologi Indonesia.

Namun, upaya untuk mengangkat kearifan lokal juga harus diiringi dengan sikap kritis. Ada bahaya romantisasi, yaitu menganggap semua tradisi lokal secara inheren baik dan harmonis, padahal banyak di antaranya mungkin juga mengandung struktur dominasi (misalnya, feodalisme atau patriarki). Selain itu, ada risiko partikularisme, yaitu terlalu fokus pada keunikan lokal sehingga kehilangan kemampuan untuk melakukan analisis perbandingan dan melihat hubungan dengan kekuatan-kekuatan struktural yang lebih luas. Tantangan bagi ilmuwan sosial Indonesia adalah bagaimana menjembatani analisis yang peka terhadap kearifan lokal dengan kerangka teoretis yang lebih luas, menciptakan sebuah sintesis yang kuat secara analitis dan relevan secara kontekstual (Yusriadi et al., 2022).

### **Rangkuman Bab**

- Teori sosial adalah seperangkat konsep dan argumen sistematis untuk menjelaskan atau menginterpretasikan cara kerja masyarakat, berfungsi sebagai kerangka penjelas, panduan penelitian, dan alat kritik.

- Teori sosial dibedakan dari teori sosiologi berdasarkan cakupannya yang lebih luas dan interdisipliner, sementara teori sosiologi lebih spesifik pada disiplin sosiologi.
- Pemikiran sosial modern lahir dari pergolakan ganda: Revolusi Intelektual (Pencerahan) yang mengedepankan rasionalitas, dan Revolusi Industri yang menciptakan masalah-masalah sosial baru sebagai objek kajian.
- Perdebatan epistemologis utama dalam teori sosial adalah antara positivisme (yang meniru ilmu alam dan menyukai metode kuantitatif) dan anti-positivisme (yang menekankan pemahaman makna subjektif dan menyukai metode kualitatif).
- Teori sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai dimensi, termasuk orientasi (konflik vs konsensus), fokus analisis (struktur vs aktor), dan periode waktu (klasik, modern, postmodern).
- Posisi teori sosial di Indonesia ditandai oleh sejarah adopsi teori-teori Barat, tantangan penerjemahan konseptual, dan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan pemikiran yang lebih berakar pada konteks lokal (indigenisasi).

## **Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri perbedaan mendasar antara teori sosial dan teori sosiologi. Berikan contoh seorang pemikir yang kontribusinya lebih cocok disebut sebagai “teori sosial” dan jelaskan mengapa.
2. Analisislah bagaimana Revolusi Industri dan Masa Pencerahan secara bersama-sama menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Manakah dari kedua revolusi tersebut yang menurut Anda lebih berpengaruh, dan mengapa?

3. Bandingkan dan kontraskan asumsi-asumsi dasar dari paradigma positivisme dan anti-positivisme. Bagaimana perbedaan asumsi ini mengarah pada pilihan metode penelitian yang berbeda (kuantitatif vs kualitatif)?
4. Ambil satu fenomena sosial di sekitar Anda (misalnya, penggunaan media sosial oleh remaja). Coba jelaskan bagaimana seorang teoretikus berorientasi konsensus dan seorang teoretikus berorientasi konflik akan menganalisis fenomena tersebut secara berbeda.
5. Diskusikan tantangan-tantangan utama dalam menerapkan teori sosial yang berasal dari konteks Barat untuk menganalisis masyarakat Indonesia. Apakah “indigenisasi” ilmu sosial merupakan solusi yang paling tepat? Jelaskan argumen Anda.

### Soal Pilihan Ganda

1. Serangkaian konsep dan argumen logis yang bertujuan menjelaskan cara kerja masyarakat disebut...
  - a. Hipotesis Sosial
  - b. Teori Sosial -V-
  - c. Paradigma Sosiologi
  - d. Metodologi Penelitian
2. Perbedaan utama antara teori sosial dan teori sosiologi terletak pada...
  - a. Metode penelitian yang digunakan
  - b. Periode waktu kemunculannya
  - c. Cakupan disiplin dan tingkat abstraksi -V-
  - d. Orientasi politiknya
3. Gerakan intelektual yang menekankan pada akal budi, empirisme, dan kritik terhadap tradisi sebagai fondasi teori sosial modern adalah...
  - a. Romantisme
  - b. Skolastisisme

- c. Pencerahan (Enlightenment) -V-
  - d. Reformasi Protestan
4. Pendekatan epistemologis yang meyakini bahwa dunia sosial dapat dipelajari dengan metode ilmu alam untuk menemukan hukum-hukum universal disebut...
    - a. Hermeneutika
    - b. Positivisme -V-
    - c. Fenomenologi
    - d. Teori Kritis
  5. Konsep Max Weber tentang *Verstehen* paling sesuai dengan pendekatan...
    - a. Kuantitatif
    - b. Positivis
    - c. Strukturalis
    - d. Interpretif (Anti-Positivis) -V-
  6. Seorang peneliti yang menganalisis bagaimana norma dan nilai bersama menjaga stabilitas masyarakat kemungkinan besar menggunakan teori berorientasi...
    - a. Konflik
    - b. Konsensus -V-
    - c. Interaksionis
    - d. Kritis
  7. Teori-teori yang menekankan bagaimana tindakan individu secara aktif menciptakan dan menegosiasikan realitas sosial termasuk dalam level analisis...
    - a. Makro
    - b. Meso
    - c. Mikro -V-
    - d. Global
  8. Tantangan utama dalam menerapkan konsep-konsep Barat di Indonesia yang berkaitan dengan kesepadanan makna disebut...

- a. Tantangan metodologis
  - b. Tantangan penerjemahan konseptual -V-
  - c. Tantangan etis
  - d. Tantangan pendanaan
9. Pada masa Orde Baru, aliran teori sosial yang dominan digunakan untuk melegitimasi kebijakan pembangunan adalah...
- a. Marxisme dan Teori Kritis
  - b. Interaksionisme Simbolik
  - c. Fungsionalisme dan Teori Modernisasi -V-
  - d. Post-strukturalisme
10. Upaya untuk mengembangkan teori yang berakar pada konsep dan kearifan budaya lokal Indonesia dikenal sebagai...
- a. Globalisasi
  - b. Westernisasi
  - c. Indigenisasi -V-
  - d. Sekularisasi

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

1. Pilihlah salah satu masalah sosial yang sedang hangat dibicarakan di media massa Indonesia saat ini (misalnya, pinjaman *online* ilegal, polarisasi politik di media sosial, atau masalah polusi udara). Tulis sebuah esai singkat (500 kata) yang menjelaskan bagaimana masalah ini dapat dianalisis dari dua level analisis yang berbeda: makro (fokus pada struktur ekonomi-politik atau kebijakan nasional) dan mikro (fokus pada pengalaman, motivasi, dan interaksi individu yang terlibat).
2. Lakukan wawancara singkat dengan dua orang dari generasi yang berbeda (misalnya, orang tua/kakek-nenek Anda dan teman sebaya Anda) tentang makna konsep "sukses". Analisislah jawaban mereka. Apakah ada perbedaan?

Hubungkan temuan Anda dengan salah satu perdebatan teoretis yang dibahas dalam bab ini (misalnya, perubahan nilai dari tradisional ke modern, pengaruh struktur ekonomi terhadap aspirasi individu, dll.).

### Glosarium Bab

- **Anti-Positivisme:** Pendekatan epistemologis yang menolak penerapan metode ilmu alam pada studi masyarakat, menekankan pada pemahaman makna subjektif dari tindakan sosial.
- **Epistemologi:** Cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan.
- **Fakta Sosial:** Konsep Emile Durkheim yang merujuk pada cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang eksternal terhadap individu dan memiliki kekuatan memaksa atas mereka.
- **Hermeneutika:** Teori dan metodologi interpretasi, khususnya interpretasi terhadap teks atau fenomena sosial untuk memahami maknanya.
- **Indigenisasi:** Proses pengembangan konsep dan teori ilmu sosial yang berakar pada konteks, budaya, dan pengalaman lokal, sebagai alternatif atau pelengkap dari teori Barat.
- **Level Analisis:** Skala fokus dalam studi sosial, umumnya dibagi menjadi mikro (interaksi individu), meso (organisasi/komunitas), dan makro (struktur masyarakat luas).
- **Pencerahan (*Enlightenment*):** Gerakan intelektual abad ke-18 di Eropa yang mengagungkan akal budi, ilmu pengetahuan, dan hak-hak individu, serta menjadi fondasi pemikiran sosial modern.
- **Positivisme:** Pendekatan epistemologis yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial yang valid hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan metode ilmiah, mirip dengan ilmu alam.

- **Teori Sosial:** Serangkaian konsep, proposisi, dan argumen yang saling terkait secara logis, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menginterpretasikan cara kerja masyarakat atau aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial.
- **Verstehen:** Istilah Jerman yang dipopulerkan oleh Max Weber, yang berarti pemahaman interpretatif terhadap makna subjektif yang dilekatkan oleh aktor pada tindakan mereka.

### Daftar Pustaka Bab

- Ahmad, R., Nawaz, M., Ishaq, M., Khan, M., & Ashraf, H. (2023). Social exchange theory: Systematic review and future directions. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1015921>
- Bingham, A., Mitchell, R., & Carter, D. (2024). *A Practical Guide to Theoretical Frameworks for Social Science Research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003261759>
- Çolak, Z., & Mumcu, Y. (2023). The Birth of Modernity: The Influence of the Renaissance, the Enlightenment and the French Revolution. *International Journal of Social Inquiry*, 16(2), 263-280. <https://doi.org/10.37093/ijsi.1358215>
- Day, C. (2025). Beyond Postpositivism: Dialectics, Epistemology, and Critical Sociology with Adorno and Horkheimer. *Sociological Theory*, 43(1), 67-90. <https://doi.org/10.1177/07352751251317650>
- Fuhse, J. (2022). How Can Theories Represent Social Phenomena?. *Sociological Theory*, 40(2), 99-123. <https://doi.org/10.1177/07352751221087719>
- Giordano, P. (2025). The Debate about the Distinction between Sociological and Social Theory. *Sociológica (México)*, 40(114). <https://doi.org/10.24275/wjql9013>
- Habib, Y., & Gilalo, J. (2025). Social Justice Theory in Indonesia Reviewed from the Philosophy of Law. *International Journal*

- of Business, Law, and Education*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.995>
- James, D. (2022). Situating the Enlightenment in Herder's Philosophy of History. *Journal of the Philosophy of History*, 16(3), 323-347. <https://doi.org/10.1163/18722636-12341480>
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(1), e08828. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>
- Kaluarachchi, K. (2025). Philosophical Approaches to Qualitative Research (Positivism, Phenomenological Approach & Critical Social Sciences). *Sri Lanka Journal of Social Work*, 8(2), 1-15. <https://doi.org/10.4038/sljsw.v8i2.11>
- Kow, S. (2021). Debating ethical nominalism in Early Enlightenment thought on China. *Journal for The Theory of Social Behaviour*, 51(3), 441-459. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12280>
- Masullo, G. (2024). The Phases of Qualitative and Quantitative Methods in Italian Sociology: Institutionalisation, Social Engagement, and Emerging Problems. *The American Sociologist*, 55, 230-250. <https://doi.org/10.1007/s12108-024-09615-5>
- Okoli, C. (2021). The Bare Minimum of Theory: A Definitional Definition for the Social Sciences. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4094877>
- Reynolds, I. (2021). The Dialectic of Progress and the Cultivation of Resistance in Critical Social Theory. *Social Epistemology*, 35(6), 624-636. <https://doi.org/10.1080/02691728.2021.2000663>
- Roth, S., Clausen, L., & Žažar, K. (2025). Guiding Distinctions: Observed With Social Systems Theory: An Introduction. *Systems Research and Behavioral Science*, 42(1). <https://doi.org/10.1002/sres.3152>
- Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study. *Journal of Ethnic*

*and Cultural Studies*, 9(3), 169-185. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1207>



## BAB 2

# KLASIK 1: TEORI KARL MARX (KONFLIK DAN STRUKTUR)

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep fundamental materialisme historis dan dialektika sebagai landasan pemikiran Marx.
2. Menganalisis cara kerja sistem kapitalisme, termasuk konsep kelas, eksploitasi, dan komodifikasi.
3. Mendefinisikan empat dimensi alienasi (keterasingan) yang dialami pekerja dalam sistem kapitalis.
4. Mengevaluasi peran ideologi dan kesadaran palsu dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang timpang.
5. Menjelaskan perbedaan antara kesadaran kelas semu dan kesadaran kelas sejati.
6. Mengidentifikasi kritik utama terhadap pemikiran Marxis.
7. Melacak jejak pengaruh dan relevansi pemikiran Marxis dalam konteks analisis sosial di Indonesia.

Bayangkan seorang pekerja di pabrik garmen yang menghabiskan dua belas jam sehari menjahit pakaian mewah yang tidak akan pernah

mampu ia beli. Atau seorang pengemudi ojek *online* yang terus bekerja di bawah tekanan target dan algoritma, merasa terpisah dari nilai sesungguhnya dari pekerjaan yang ia lakukan. Fenomena-fenomena ini, yang begitu akrab dalam dunia modern, bukanlah sekadar kisah individu tentang kerja keras atau nasib buruk. Bagi Karl Marx, seorang pemikir revolusioner abad ke-19, pengalaman-pengalaman tersebut adalah gejala dari sebuah sistem yang fundamental, sebuah mesin raksasa bernama kapitalisme yang beroperasi berdasarkan logika eksploitasi dan keterasingan.

Memasuki dunia pemikiran Karl Marx adalah memasuki sebuah analisis yang radikal, membara, dan tanpa kompromi terhadap masyarakat. Lebih dari satu abad setelah kematiannya, nama Marx masih membangkitkan reaksi yang kuat, mulai dari penolakan keras hingga pemujaan yang taat. Namun, terlepas dari segala kontroversi politik yang melekat pada namanya, kontribusi Marx sebagai seorang teoretikus sosial tidak dapat disangkal. Ia menyediakan salah satu kerangka kerja paling kuat dan bertahan lama untuk memahami hubungan antara ekonomi, kekuasaan, dan masyarakat. Pemikirannya bukan sekadar teori, melainkan sebuah panggilan untuk membongkar selubung ideologis yang menutupi realitas ketidaksetaraan.

Fokus utama Marx adalah pada kondisi-kondisi material yang membentuk kehidupan sosial. Berbeda dengan para filsuf yang mendahuluinya yang berfokus pada ide atau kesadaran, Marx secara provokatif menyatakan bahwa “bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tetapi sebaliknya, keberadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka”. Pernyataan ini merupakan inti dari pendekatan materialisme historis, sebuah metode analisis yang melacak perkembangan masyarakat melalui perubahan cara manusia memproduksi kebutuhan hidupnya. Bagi Marx, kunci untuk memahami hukum, politik, agama, dan budaya sebuah masyarakat terletak pada analisis terhadap basis ekonominya.

Dalam pandangan Marx, sejarah umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Setiap tahap perkembangan masyarakat, dari feodalisme hingga kapitalisme, ditandai oleh konflik fundamental antara kelas yang memiliki alat-alat produksi dan kelas yang tidak memilikinya. Dalam kapitalisme, konflik ini mengambil bentuk pertentangan antara kelas borjuis (pemilik modal) dan kelas proletariat (pekerja). Seluruh bangunan kapitalisme, menurut Marx, berdiri di atas eksploitasi tenaga kerja proletariat, sebuah proses yang tersembunyi namun sistematis.

Analisisnya tidak berhenti pada struktur ekonomi. Marx juga menyelami dampak psikologis dari sistem ini melalui konsep alienasi, sebuah kondisi keterasingan yang mendalam di mana manusia menjadi asing terhadap pekerjaannya, produknya, sesamanya, dan bahkan hakikat kemanusiaannya sendiri. Ia juga mengajukan teori yang kuat tentang ideologi, menunjukkan bagaimana ide-ide yang dominan dalam masyarakat seringkali merupakan ide-ide dari kelas yang dominan, yang berfungsi untuk melegitimasi tatanan yang ada dan menciptakan “kesadaran palsu” di kalangan kaum tertindas.

Bab ini akan mengupas tuntas pilar-pilar utama pemikiran Marx. Kita akan memulai dengan fondasi filosofisnya, yaitu materialisme historis dan dialektika. Selanjutnya, kita akan membedah analisisnya yang tajam tentang cara kerja kapitalisme, konsep alienasi, dan peran ideologi. Terakhir, kita akan menelusuri bagaimana pemikiran Marxis, meskipun pernah dilarang secara formal, terus memberikan pengaruh dan relevansi dalam upaya memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

## **2.1 Konsep Materialisme Historis dan Dialektika**

Landasan dari seluruh bangunan teoretis Karl Marx adalah materialisme historis, sebuah pendekatan radikal yang membalikkan

filsafat idealis yang dominan pada masanya (Sayuti, 2021). Alih-alih memandang sejarah sebagai pergerakan ide-ide besar atau realisasi dari sebuah spirit absolut seperti pandangan Hegel, Marx berargumen bahwa penggerak fundamental dari perubahan sejarah adalah kondisi-kondisi material kehidupan manusia, khususnya cara manusia secara kolektif memproduksi kebutuhan untuk bertahan hidup (Wood, 2020). Produksi material, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, adalah aktivitas pertama dan paling mendasar dari setiap masyarakat manusia. Oleh karena itu, untuk memahami masyarakat mana pun, analisis harus dimulai dari basis ekonominya: bagaimana produksi diorganisasikan, alat-alat apa yang digunakan, dan hubungan sosial apa yang muncul dari proses produksi tersebut (Musto, 2020).

Pendekatan ini sering diringkas dalam metafora arsitektural yang terkenal: basis (*base*) dan superstruktur (*superstructure*). Basis ekonomi, yang terdiri dari “kekuatan-kekuatan produksi” (teknologi, mesin, keterampilan) dan “hubungan-hubungan produksi” (hubungan kelas, kepemilikan), menjadi fondasi masyarakat. Di atas fondasi ini berdirilah superstruktur, yang mencakup institusi-institusi non-ekonomi seperti negara, hukum, sistem politik, agama, dan keluarga, serta bentuk-bentuk kesadaran sosial seperti seni, filsafat, dan ideologi (Vrousalis, 2022). Menurut Marx, sifat dari superstruktur sangat ditentukan oleh sifat dari basis. Sistem hukum dalam masyarakat feodal, misalnya, akan berbeda dari sistem hukum dalam masyarakat kapitalis karena keduanya harus melayani dan melegitimasi basis ekonomi yang berbeda (Torrance, 2020).

Namun, hubungan ini tidak bersifat mekanis satu arah. Marx juga menerapkan metode dialektika, yang ia pinjam dan modifikasi dari Hegel. Dialektika memandang realitas bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai proses yang penuh dengan

kontradiksi dan konflik internal (Ipsen, 2021). Setiap sistem sosial (tesis) mengandung benih-benih kehancurannya sendiri (antitesis). Pertentangan antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini pada akhirnya akan mengarah pada sebuah transformasi revolusioner, yang melahirkan sebuah sistem baru (sintesis) yang mengatasi kontradiksi-kontradiksi dari sistem lama (Majumder, 2023). Bagi Marx, kontradiksi utama dalam setiap masyarakat berkelas adalah antara kekuatan produksi yang terus berkembang dan hubungan produksi yang kaku.

Dalam kapitalisme, misalnya, kekuatan produksi bersifat sangat sosial, membutuhkan kerja sama ribuan orang di pabrik dan di seluruh dunia untuk menghasilkan barang. Namun, hubungan produksi bersifat privat, di mana kepemilikan dan keuntungan dikuasai oleh segelintir individu (borjuis). Kontradiksi antara produksi yang disosialisasikan dan apropriasi yang diprivatisasi inilah yang, menurut Marx, akan memicu konflik kelas antara borjuis dan proletariat, yang pada akhirnya akan menghancurkan kapitalisme dan melahirkan sintesis baru: sosialisme, di mana kepemilikan atas alat-alat produksi menjadi milik bersama (sosial) (Lebowitz, 2020). Dengan demikian, materialisme historis yang dipadukan dengan dialektika menyediakan sebuah teori perubahan sosial yang dinamis, konfliktual, dan berorientasi pada proses.

**Analogi/Contoh Kasus:** Bayangkan sebuah pohon. Bagi seorang idealis, yang terpenting adalah buah, bunga, atau daun yang terlihat di atas (superstruktur: ide, budaya). Ia mungkin menganalisis keindahan bunga atau rasa buahnya. Marx, sebagai seorang materialis historis, akan memaksa kita untuk melihat apa yang tersembunyi di bawah tanah: sistem perakaran (basis: ekonomi) dan jenis tanah tempatnya tumbuh. Ia akan berargumen bahwa jenis, ukuran, dan kesehatan buah atau bunga (superstruktur) sangat bergantung pada seberapa kuat dan luas akarnya (kekuatan

produksi) dan bagaimana akar tersebut menyerap nutrisi dari tanah (hubungan produksi). Perubahan pada tanah atau kerusakan pada akar akan secara langsung mempengaruhi seluruh bagian pohon yang tampak di atas. Dialektika akan melihat adanya tegangan di dalam pohon itu sendiri, misalnya antara pertumbuhan pohon yang terus membesar dan keterbatasan nutrisi di dalam tanah, sebuah kontradiksi yang pada akhirnya mungkin menyebabkan pohon itu layu atau tumbang, memberi ruang bagi kehidupan baru.

### **2.1.1 Basis dan Superstruktur Masyarakat**

Konsep basis dan superstruktur adalah alat analisis sentral dalam materialisme historis untuk memetakan anatomi masyarakat. Basis (infrastruktur) merujuk pada totalitas hubungan produksi yang sesuai dengan tahap perkembangan tertentu dari kekuatan produksi material (Vrousalis, 2022). Kekuatan produksi mencakup segala sesuatu yang terlibat dalam proses kerja, seperti tenaga kerja manusia, keterampilan, teknologi, mesin, dan bahan mentah. Hubungan produksi adalah hubungan sosial yang dijalin orang dalam proses produksi, yang paling fundamental adalah hubungan kepemilikan atas alat-alat produksi. Dalam kapitalisme, hubungan produksi utama adalah antara borjuis yang memiliki alat produksi dan proletariat yang hanya memiliki tenaga kerjanya untuk dijual (Wood, 2020).

Superstruktur adalah bangunan non-ekonomi yang didirikan di atas basis. Ini termasuk institusi politik (negara, aparat hukum, militer), institusi sosial (keluarga, sistem pendidikan), dan bentuk-bentuk kesadaran sosial atau ideologi (agama, moralitas, filsafat, seni). Marx berargumen bahwa superstruktur tidak otonom; fungsinya adalah untuk menstabilkan dan mereproduksi basis ekonomi (Torrance, 2020). Negara, misalnya, tidak netral tetapi merupakan “instrumen kelas” yang melindungi hak milik pribadi dan menekan perlawanan dari kelas pekerja. Sistem pendidikan

mensosialisasikan individu untuk menerima peran mereka dalam pembagian kerja kapitalis.

Hubungan antara basis dan superstruktur bersifat deterministik, tetapi tidak dalam pengertian yang kaku atau mekanis. Superstruktur juga memiliki otonomi relatif dan dapat, pada gilirannya, mempengaruhi kembali basis (sebuah poin yang lebih dikembangkan oleh pemikir Marxis selanjutnya seperti Antonio Gramsci). Namun, dalam analisis terakhir (*in the last instance*), Marx menegaskan bahwa basis ekonomilah yang menjadi faktor penentu utama yang membentuk kontur umum dari superstruktur (Sayuti, 2021). Perubahan fundamental dalam masyarakat tidak terjadi dengan mengubah ide atau hukum terlebih dahulu, melainkan melalui transformasi pada basis ekonominya.

### **2.1.2 Tahapan Perkembangan Masyarakat dalam Sejarah**

Dengan menggunakan metode materialisme historis, Marx dan Engels mengidentifikasi serangkaian tahapan atau “moda produksi” yang telah dilalui oleh sejarah manusia, khususnya di Eropa. Setiap moda produksi didefinisikan oleh kombinasi spesifik antara kekuatan produksi dan hubungan produksinya. Tahap pertama adalah “komunisme primitif”, masyarakat tanpa kelas di mana alat-alat produksi (seperti tanah dan alat berburu sederhana) dimiliki secara komunal. Tidak ada kepemilikan pribadi dan tidak ada eksploitasi (Majumder, 2023).

Dengan berkembangnya pertanian dan kemampuan untuk menghasilkan surplus, muncullah kepemilikan pribadi dan masyarakat berkelas. Tahap selanjutnya adalah “moda produksi kuno” (seperti di Yunani dan Roma), yang didasarkan pada perbudakan. Konflik utamanya adalah antara tuan dan budak. Tahap ini digantikan oleh “moda produksi feodal” di Abad Pertengahan, yang ditandai oleh hubungan antara tuan tanah dan petani penggarap (*serf*) yang terikat pada tanah. Petani menguasai

alat produksinya sendiri tetapi wajib menyerahkan sebagian hasil kerjanya kepada tuan tanah (Wood, 2020).

Revolusi borjuis menghancurkan feodalisme dan melahirkan “moda produksi kapitalis”, yang didasarkan pada kerja upahan. Ini adalah tahap yang paling dinamis dan produktif, tetapi juga paling eksploitatif menurut Marx (Musto, 2020). Kontradiksi internal kapitalisme, yaitu konflik antara borjuis dan proletariat, diyakini akan mengarah pada revolusi sosialis. Ini akan mengantarkan pada tahap transisi, “sosialisme” atau “kediktatoran proletariat”, di mana alat-alat produksi diambil alih oleh negara atas nama pekerja. Tujuan akhirnya adalah “komunisme”, sebuah masyarakat tanpa kelas, tanpa negara, dan tanpa eksploitasi, di mana prinsipnya adalah “dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya” (Vrousalis, 2022).

### **2.1.3 Peran Konflik Kelas sebagai Penggerak Sejarah**

Dalam *Manifesto Komunis*, Marx dan Engels membuat pernyataan yang paling terkenal: “Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas.” Bagi Marx, kelas bukanlah sekadar pengelompokan orang berdasarkan pendapatan atau gaya hidup (Musto, 2020). Kelas didefinisikan secara relasional oleh posisi seseorang dalam hubungan produksi, yaitu apakah seseorang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi atau tidak. Dalam setiap moda produksi yang berkelas, selalu ada kelas dominan yang mengeksploitasi dan kelas subordinat yang dieksploitasi (Ipsen, 2021).

Konflik antara kelas-kelas ini bukanlah sesuatu yang insidental atau dapat dihindari; ia merupakan kontradiksi struktural yang inheren dalam sistem. Kepentingan kelas eksploitor (misalnya, borjuis) dan kelas yang dieksploitasi (proletariat) secara fundamental tidak dapat didamaikan. Borjuis berkepentingan untuk memaksimalkan laba dengan menekan upah dan memperpanjang

jam kerja, sementara proletariat berkepentingan untuk menaikkan upah dan memperbaiki kondisi kerja. Perjuangan ini, yang bisa mengambil bentuk dari sabotase di pabrik, pemogokan, hingga pemberontakan bersenjata, adalah mesin yang mendorong sejarah maju (Lebowitz, 2020).

Menurut Marx, transisi dari satu moda produksi ke moda produksi berikutnya terjadi ketika kelas subordinat yang sedang bangkit berhasil menggulingkan kelas dominan yang lama. Revolusi Prancis, misalnya, dilihat sebagai momen di mana kelas borjuis yang sedang tumbuh menggulingkan aristokrasi feodal yang menghambat perkembangan kapitalisme. Dengan cara yang sama, Marx meramalkan bahwa proletariat, yang jumlahnya terus bertambah dan semakin terorganisir oleh kondisi kerja pabrik itu sendiri, pada akhirnya akan menyadari kekuatan kolektifnya dan menggulingkan kelas borjuis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas (Wood, 2020).

#### **2.1.4 Dialektika: Tesis, Anti-Tesis, Sintesis**

Meskipun Marx tidak sering menggunakan terminologi tesis, antitesis, dan sintesis secara eksplisit, kerangka kerja ini, yang dipopulerkan oleh para pengikutnya, berguna untuk memahami logika dialektis dalam pemikirannya. Dialektika adalah cara memahami dunia sebagai suatu totalitas yang dinamis dari proses dan hubungan yang saling bertentangan (Ipsen, 2021). Setiap fenomena atau sistem sosial (tesis) selalu mengandung di dalam dirinya sendiri kekuatan yang berlawanan atau negasinya (antitesis). Interaksi dan perjuangan antara tesis dan antitesis ini menghasilkan ketegangan yang pada akhirnya akan diselesaikan melalui sebuah lompatan kualitatif ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sintesis.

Sintesis baru ini kemudian menjadi tesis baru, yang pada gilirannya akan menghasilkan antitesisnya sendiri, dan proses

tersebut terus berlanjut. Sejarah dengan demikian bergerak bukan dalam garis lurus yang mulus, melainkan melalui serangkaian revolusi dan transformasi yang lahir dari kontradiksi internal. Dalam analisis Marx tentang kapitalisme, sistem kepemilikan pribadi dan pasar bebas dapat dilihat sebagai tesis (Majumder, 2023). Namun, sistem ini secara tak terhindarkan menciptakan kelas proletariat yang tidak memiliki apa-apa, yang merupakan negasi atau antitesisnya.

Perjuangan antara borjuis (tesis) dan proletariat (antitesis) adalah konflik sentral dari era kapitalis. Resolusi dari konflik ini bukanlah reformasi atau kompromi, melainkan sebuah revolusi yang akan menghapuskan kedua kelas tersebut dan menciptakan tatanan baru, yaitu sosialisme (sintesis) (Lebowitz, 2020). Dalam sosialisme, kepemilikan alat produksi yang bersifat privat (tesis) dan ketiadaan kepemilikan (antitesis) diatasi dengan kepemilikan kolektif. Dengan demikian, dialektika memberikan Marx sebuah logika perubahan yang inheren, menjelaskan bagaimana perubahan sosial yang radikal bisa muncul dari dalam sistem yang ada.

### **2.1.5 Kritik terhadap Idealisme Hegel**

Untuk memahami materialisme Marx, penting untuk melihatnya sebagai sebuah kritik dan pembalikan terhadap idealisme Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel adalah seorang filsuf dominan di Jerman pada masa muda Marx, dan pemikirannya, terutama metode dialektikanya, sangat mempengaruhi Marx. Namun, Hegel adalah seorang idealis absolut. Baginya, realitas fundamental adalah "Roh Absolut" (*Absolute Geist*) atau "Ide", dan sejarah adalah proses di mana Roh ini secara bertahap mewujudkan dirinya dan mencapai kesadaran diri melalui dialektika ide-ide (Sayuti, 2021). Dunia material, termasuk masyarakat dan negara, hanyalah manifestasi eksternal dari perkembangan Roh.

Marx mengkritik Hegel karena “membuat dialektika berdiri di atas kepalanya”. Marx berpendapat bahwa Hegel telah salah mengira refleksi dari dunia nyata di dalam pikiran (yaitu, ide) dengan dunia nyata itu sendiri. Marx membalikkan dialektika Hegelian: “Bagi Hegel,” tulis Marx, “dialektika berdiri di atas kepalanya. Ia harus dibalikkan kembali, untuk menemukan inti rasional di dalam cangkang mistisnya.” Dengan kata lain, Marx mengambil metode dialektika dari Hegel tetapi membuang fondasi idealisnya. Ia membumikan dialektika dalam dunia material, dalam perjuangan konkret manusia untuk memproduksi kehidupan mereka (Wood, 2020). Bagi Marx, kontradiksi yang mendorong sejarah bukanlah kontradiksi antar ide, melainkan kontradiksi antara kekuatan-kekuatan sosial yang nyata, yaitu kelas-kelas sosial yang berakar pada basis ekonomi (Ipsen, 2021).

## 2.2 Kapitalisme dan Analisis Kelas

Analisis Marx terhadap kapitalisme merupakan inti dari karyanya dan kontribusinya yang paling monumental bagi teori sosial. Ia tidak melihat kapitalisme sekadar sebagai sebuah sistem ekonomi, melainkan sebagai sebuah moda produksi yang total, yang membentuk seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya. Marx mengagumi dinamisme kapitalisme yang luar biasa, kemampuannya untuk melepaskan kekuatan produktif yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, di balik fasad kemajuan ini, ia melihat sebuah sistem yang secara inheren didasarkan pada eksploitasi, dipenuhi dengan kontradiksi, dan pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Analisisnya membongkar cara kerja internal dari mesin kapitalis, menelanjangi mekanisme tersembunyi yang menghasilkan kekayaan luar biasa bagi segelintir orang dan kemiskinan serta keterasingan bagi mayoritas.

Dasar dari analisis Marx adalah konsep kelas sosial. Berbeda dengan pandangan umum yang mendefinisikan kelas berdasarkan

pendapatan atau gaya hidup, Marx mendefinisikannya secara struktural berdasarkan hubungan seseorang dengan alat-alat produksi (Musto, 2020). Dalam kapitalisme, masyarakat secara fundamental terpolarisasi menjadi dua kelas utama yang saling bertentangan. Di satu sisi adalah kelas borjuis (kaum kapitalis), yaitu mereka yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi seperti pabrik, mesin, dan tanah. Di sisi lain adalah kelas proletariat (kaum pekerja), yaitu mayoritas besar masyarakat yang tidak memiliki alat produksi dan, untuk bertahan hidup, terpaksa menjual satu-satunya komoditas yang mereka miliki, yaitu tenaga kerja mereka (*labour power*), kepada kaum kapitalis dengan imbalan upah (Wood, 2020).

Hubungan antara kedua kelas ini bukanlah hubungan kemitraan yang setara, melainkan hubungan eksploitasi. Menurut Marx, eksploitasi dalam kapitalisme terjadi melalui pencurian “nilai lebih” (*surplus value*). Pekerja, dalam sehari, mampu menghasilkan nilai yang lebih besar daripada nilai yang dibutuhkan untuk membayar upahnya (biaya untuk menjaga pekerja tetap hidup dan bisa bekerja). Kelebihan nilai inilah, yang disebut nilai lebih, yang diambil oleh kapitalis sebagai laba. Laba, dengan demikian, bukanlah hasil dari “investasi cerdas” atau “pengambilan risiko” oleh kapitalis, melainkan representasi dari kerja tak berbayar dari kelas pekerja. Seluruh sistem kapitalis didorong oleh akumulasi tanpa henti dari nilai lebih ini (Lebowitz, 2020).

Lebih jauh, Marx menganalisis bagaimana logika kapitalisme, yaitu komodifikasi, meresap ke dalam seluruh sendi kehidupan. Komodifikasi adalah proses di mana segala sesuatu, termasuk hal-hal yang sebelumnya berada di luar ranah pasar seperti seni, pengetahuan, dan bahkan hubungan manusia, diubah menjadi barang dagangan (komoditas) yang dapat dibeli dan dijual. Dalam proses ini, hubungan sosial antarmanusia menjadi kabur dan terdistorsi, tampak sebagai hubungan antar-benda (komoditas).

Marx menyebut fenomena ini sebagai “fetisisme komoditas” (*commodity fetishism*), di mana produk-produk ciptaan manusia tampak memiliki kekuatan misteriusnya sendiri yang menguasai para penciptanya (Vrousalis, 2022).

**Contoh Kasus:** Pertimbangkan sebuah *smartphone*. Saat kita membelinya, kita melihatnya sebagai sebuah benda dengan harga tertentu. Kita tidak melihat ribuan jam kerja dari para buruh di berbagai negara yang merakitnya, kondisi kerja mereka, atau nilai lebih yang diekstraksi dari mereka. Hubungan sosial yang kompleks dan eksploitatif di balik produksi *smartphone* tersebut menjadi tidak terlihat, tersembunyi di balik “sihir” harga dan merek. Inilah inti dari fetisisme komoditas: hubungan antara manusia (produsen dan konsumen) tampak sebagai hubungan antara benda-benda (uang dan *smartphone*), mengaburkan realitas eksploitasi yang mendasarinya (Sayuti, 2021).

### 2.2.1 Konsep Kelas Borjuis dan Proletariat

Dalam kerangka Marxis, borjuis dan proletariat adalah dua kelas utama yang mendefinisikan moda produksi kapitalis. Kelas borjuis adalah kelas pemilik alat-alat produksi. Mereka membeli tenaga kerja dari proletariat untuk mengoperasikan alat-alat produksi tersebut dan menghasilkan komoditas. Tujuan utama mereka adalah akumulasi kapital, yang dicapai dengan menghasilkan laba sebesar-besarnya (Wood, 2020). Sebaliknya, proletariat adalah kelas pekerja upahan yang, karena tidak memiliki alat produksi, harus menjual tenaga kerjanya kepada borjuis untuk mendapatkan upah sebagai sarana bertahan hidup.

Hubungan antara kedua kelas ini bersifat antagonistik secara inheren. Kepentingan mereka secara fundamental bertentangan. Borjuis berkepentingan untuk memaksimalkan laba, yang seringkali berarti menekan upah serendah mungkin, memperpanjang jam kerja, dan mengintensifkan proses kerja. Proletariat, di sisi lain,

berkepentingan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, jam kerja yang lebih pendek, dan kondisi kerja yang lebih baik (Musto, 2020). Pertentangan kepentingan yang tak terdamaikan inilah yang menjadi sumber dari perjuangan kelas, yang merupakan ciri sentral dari masyarakat kapitalis.

Marx juga mengakui adanya kelas-kelas lain, seperti borjuis kecil (*petty bourgeoisie*) yang terdiri dari pengrajin atau pemilik toko kecil yang memiliki alat produksi sendiri tetapi juga bekerja, serta *lumpenproletariat* yang terdiri dari kaum deklasé seperti penjahat dan pengangguran kronis. Namun, ia berpendapat bahwa seiring dengan perkembangan kapitalisme, masyarakat akan semakin terpolarisasi. Borjuis kecil akan bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan kapitalis besar dan akan jatuh ke dalam barisan proletariat, sehingga pada akhirnya hanya menyisakan dua kelas besar yang saling berhadapan (Torrance, 2020).

### **2.2.2 Eksploitasi dan Nilai Lebih (Surplus Value)**

Konsep nilai lebih adalah kunci untuk memahami teori eksploitasi Marx. Untuk menjelaskannya, Marx memulai dengan Teori Nilai Kerja (*Labour Theory of Value*), yang menyatakan bahwa nilai sebuah komoditas ditentukan oleh jumlah rata-rata waktu kerja yang secara sosial diperlukan (*socially necessary labor time*) untuk memproduksinya (Lebowitz, 2020). Dalam kapitalisme, tenaga kerja itu sendiri menjadi sebuah komoditas. Nilai dari komoditas tenaga kerja ini (yang diekspresikan dalam bentuk upah) ditentukan oleh waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang kebutuhan yang memungkinkan pekerja dan keluarganya untuk bertahan hidup dan bereproduksi.

Di sinilah letak rahasia eksploitasi. Misalkan nilai dari tenaga kerja seorang pekerja untuk satu hari adalah setara dengan empat jam kerja (yaitu, dalam empat jam, pekerja dapat menghasilkan

nilai yang cukup untuk menutupi biaya hidupnya sehari). Namun, kapitalis telah membeli tenaga kerja pekerja tersebut untuk satu hari kerja penuh, misalnya delapan jam. Artinya, pekerja bekerja selama empat jam untuk dirinya sendiri (menghasilkan nilai setara upahnya) dan empat jam sisanya ia bekerja secara gratis untuk kapitalis. Nilai yang dihasilkan dalam empat jam kerja tambahan inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih (*surplus value*) (Vrousalis, 2022).

Nilai lebih ini adalah satu-satunya sumber dari laba kapitalis, bunga, dan sewa tanah. Proses ekstraksi nilai lebih ini, menurut Marx, adalah inti dari eksploitasi kapitalis. Eksploitasi ini seringkali tidak terlihat karena tampak sebagai pertukaran yang adil di pasar (pekerja menjual tenaga kerjanya, kapitalis membayar upah). Namun, di balik transaksi pasar yang tampak setara ini, tersembunyi sebuah hubungan produksi yang secara fundamental tidak setara dan eksploitatif (Wood, 2020). Kapitalisme bertahan dan berkembang dengan terus-menerus mengekstraksi dan mengakumulasi kerja tak berbayar ini.

### 2.2.3 Komodifikasi dan Fetisisme Komoditas

Komodifikasi adalah tendensi dalam kapitalisme untuk mengubah segala sesuatu menjadi komoditas, yaitu barang atau jasa yang diproduksi untuk dipertukarkan di pasar demi mendapatkan keuntungan. Jika pada moda produksi sebelumnya hanya sebagian kecil produk yang menjadi komoditas, dalam kapitalisme, hubungan komoditas menjadi dominan dan merasuki seluruh aspek kehidupan (Torrance, 2020). Tidak hanya barang-barang fisik, tetapi juga tanah, tenaga kerja, ide, seni, dan bahkan data pribadi kini diperlakukan sebagai komoditas.

Salah satu akibat paling penting dari komodifikasi universal ini adalah fenomena yang disebut Marx sebagai fetisisme komoditas. “Fetisisme” berarti memberikan kekuatan magis atau otonom

pada benda mati. Dalam kapitalisme, komoditas tampak memiliki kehidupan dan kekuatannya sendiri. Hubungan sosial yang nyata antara para pekerja yang memproduksinya menjadi tersembunyi (Vrousalis, 2022). Orang-orang mulai melihat nilai sebagai properti inheren dari benda itu sendiri (misalnya, emas secara “alami” berharga) atau dari kekuatan pasar yang abstrak dan impersonal, bukan sebagai produk dari kerja manusia.

Akibatnya, hubungan sosial di antara orang-orang menjadi termediasi oleh benda-benda. Manusia dikendalikan oleh produk-produk ciptaannya sendiri. Pasar, harga, dan fluktuasi modal tampak sebagai kekuatan alam yang tidak dapat dikendalikan, padahal semua itu adalah hasil dari aktivitas manusia yang terorganisir secara spesifik. Fetisisme komoditas dengan demikian berfungsi sebagai sebuah mekanisme ideologis yang kuat, yang mengaburkan sifat sejati dari hubungan sosial kapitalis dan membuat sistem yang eksploitatif tampak alamiah dan tak terhindarkan (Sayuti, 2021).

#### **2.2.4 Kontradiksi Internal Sistem Kapitalis**

Marx berpendapat bahwa kapitalisme, meskipun sangat produktif, juga secara inheren tidak stabil dan penuh dengan kontradiksi yang pada akhirnya akan menyebabkan keruntuhannya. Salah satu kontradiksi utamanya adalah kecenderungan menurunnya tingkat laba (*tendency of the rate of profit to fall*). Untuk meningkatkan produktivitas dan memenangkan persaingan, kapitalis terus-menerus berinvestasi lebih banyak pada teknologi dan mesin (modal konstan) dibandingkan pada tenaga kerja (modal variabel). Namun, karena menurut Marx hanya tenaga kerjalah yang menciptakan nilai lebih, maka rasio laba terhadap total investasi cenderung menurun dalam jangka panjang (Lebowitz, 2020).

Kontradiksi lainnya adalah krisis kelebihan produksi (*crisis of overproduction*). Didorong oleh persaingan, setiap kapitalis berusaha memproduksi sebanyak mungkin. Namun, karena upah pekerja secara sistematis ditekan untuk memaksimalkan laba, daya beli massa tidak dapat mengimbangi peningkatan produksi yang masif. Hasilnya adalah krisis periodik di mana barang-barang menumpuk tidak terjual, pabrik-pabrik tutup, dan pekerja di-PHK, meskipun kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Krisis ini menunjukkan irasionalitas fundamental dari sistem yang memprioritaskan laba di atas kebutuhan manusia (Ipsen, 2021).

Selain itu, kapitalisme menciptakan “pasukan cadangan industrial” (*reserve army of labor*), yaitu sekelompok besar pengangguran atau setengah pengangguran. Pasukan cadangan ini memiliki fungsi penting bagi kapitalis: keberadaan mereka menekan tuntutan upah dari pekerja yang sedang bekerja, karena selalu ada orang lain yang siap menggantikan mereka. Kontradiksi-kontradiksi ini, penurunan tingkat laba, krisis periodik, dan penciptaan kemiskinan di tengah kelimpahan, diyakini Marx akan semakin menajamkan konflik kelas dan pada akhirnya menciptakan kondisi objektif bagi revolusi proletariat (Musto, 2020).

### 2.2.5 Masa Depan Masyarakat Komunis

Berdasarkan analisisnya terhadap kontradiksi kapitalisme, Marx meramalkan bahwa sistem ini akan digantikan oleh masyarakat komunis. Penting untuk dicatat bahwa visi Marx tentang komunisme sangat berbeda dari rezim-rezim otoriter abad ke-20 yang mengklaim nama tersebut. Bagi Marx, komunisme adalah tahap tertinggi dari perkembangan manusia, sebuah “asosiasi di mana perkembangan bebas setiap orang adalah syarat bagi perkembangan bebas semua orang” (Wood, 2020). Ini adalah masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, dan pada akhirnya, tanpa negara.

Langkah pertama menuju komunisme adalah revolusi proletariat, di mana kelas pekerja merebut kekuasaan politik dan mendirikan “kediktatoran proletariat”. Istilah ini tidak berarti kediktatoran satu orang, melainkan kekuasaan mayoritas (kelas pekerja) atas minoritas (sisa-sisa borjuis). Pada tahap transisi ini, yang disebut sosialisme, alat-alat produksi diambil alih menjadi milik kolektif dan produksi direncanakan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk laba (Majumder, 2023).

Ketika pembagian kelas telah sepenuhnya lenyap dan produktivitas telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga kelangkaan dapat diatasi, negara sebagai alat penindasan kelas tidak lagi diperlukan dan akan “melenyap” (*with away*). Dalam masyarakat komunis penuh, pembagian kerja yang memaksa akan dihapuskan. Individu akan bebas untuk mengembangkan semua potensi mereka, bisa “berburu di pagi hari, memancing di siang hari, beternak di sore hari, dan mengkritik setelah makan malam, tanpa pernah menjadi pemburu, nelayan, peternak, atau kritikus.” Prinsip distribusi akan berubah dari “sesuai dengan kerja” (di sosialisme) menjadi “dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya” (Vrousalis, 2022).

### **2.3 Konsep Alienasi (Keterasingan)**

Jika analisis tentang eksploitasi membongkar dimensi ekonomi dari penindasan dalam kapitalisme, maka konsep alienasi (keterasingan) mengungkap dampak sosial-psikologisnya yang mendalam terhadap individu. Berakar dari karya-karya awalnya, khususnya *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, konsep alienasi Marx menggambarkan sebuah kondisi di mana manusia menjadi terasing atau terpisah dari aspek-aspek fundamental dari eksistensi mereka sebagai akibat dari hidup dalam masyarakat berkelas, khususnya kapitalisme (Ollman, 2024). Ini bukanlah

sekadar perasaan subjektif tidak puas atau bosan, melainkan sebuah kondisi objektif yang tertanam dalam struktur proses kerja kapitalis. Pekerjaan, yang seharusnya menjadi ajang aktualisasi diri dan ekspresi kreativitas manusia, justru menjadi sumber penderitaan dan dehumanisasi (Sayuti, 2021).

Alienasi terjadi karena dalam sistem kapitalis, pekerja tidak memiliki kontrol atas proses kerja maupun produk yang dihasilkannya. Tenaga kerja mereka, yang merupakan esensi dari kemanusiaan mereka, telah dijual sebagai komoditas. Akibatnya, aktivitas kerja mereka dan hasil dari aktivitas tersebut menjadi kekuatan eksternal yang asing, yang berdiri di hadapan mereka dan mendominasi kehidupan mereka, alih-alih menjadi sarana untuk pemenuhan diri (Jaeggi, 2021). Pekerja menjadi sekadar appendiks atau pelengkap dari mesin, melakukan tugas-tugas yang repetitif dan tidak bermakna, di mana potensi intelektual dan kreatif mereka tidak digunakan.

Marx mengidentifikasi empat dimensi utama dari alienasi yang saling terkait. Pertama, pekerja teralienasi dari produk kerjanya. Semakin banyak ia memproduksi, semakin miskin ia jadinya, karena kekayaan yang ia ciptakan terakumulasi di tangan kapitalis, dan produk tersebut kemudian mendominasi dirinya melalui pasar. Kedua, ia teralienasi dari aktivitas produksi itu sendiri. Pekerjaan dirasakan bukan sebagai aktivitas sukarela, melainkan sebagai kerja paksa yang dilakukan hanya untuk bertahan hidup. Ketiga, ia teralienasi dari sesama manusia. Hubungan di tempat kerja dan di masyarakat secara umum menjadi hubungan persaingan dan instrumental, bukan hubungan kerja sama dan solidaritas. Keempat, dan yang paling fundamental, pekerja teralienasi dari hakikat dirinya sebagai manusia (*species being*), yaitu dari potensinya untuk melakukan kerja yang bebas, sadar, dan kreatif (Thorpe, 2023).

Konsep alienasi ini memberikan kritik yang kuat terhadap kapitalisme dari sudut pandang humanis. Ia menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kapitalisme tidak hanya bersifat material (kemiskinan), tetapi juga spiritual dan psikologis. Sistem ini merampas makna dari salah satu aktivitas sentral dalam kehidupan manusia, yaitu pekerjaan, dan mengubahnya menjadi pengalaman yang menyangkal kemanusiaan. Analisis ini tetap sangat relevan untuk memahami perasaan tidak berdaya, stres, dan kehampaan yang dialami oleh banyak pekerja di dunia kontemporer, bahkan di tengah kelimpahan material.

**Analogi:** Bayangkan seorang seniman patung yang sangat mencintai pekerjaannya. Ia menuangkan seluruh kreativitas, jiwa, dan keterampilannya ke dalam setiap karya. Baginya, proses mematumng dan hasil akhirnya adalah ekspresi dari dirinya. Sekarang, bayangkan seniman ini terpaksa bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi ribuan patung taman identik setiap hari. Ia hanya bertugas mengamplas satu bagian kecil dari patung secara berulang-ulang selama delapan jam. Ia tidak memiliki andil dalam desain (teralienasi dari proses), tidak memiliki patung yang ia buat (teralienasi dari produk), melihat rekan kerjanya hanya sebagai pesaing untuk mendapatkan bonus (teralienasi dari sesama), dan merasa bahwa bakat seninya yang sejati telah disia-siakan (teralienasi dari hakikat dirinya). Pengalaman seniman di pabrik ini adalah gambaran dari kondisi alienasi.

### 2.3.1 Alienasi dari Produk Kerja

Dimensi pertama dari alienasi adalah keterasingan pekerja dari produk yang ia hasilkan. Dalam sistem kerja non-alienasi (misalnya, seorang pengrajin), produk adalah realisasi dari ide dan keterampilan si pembuat; ada hubungan pribadi yang erat antara pembuat dan ciptaannya. Namun, dalam kapitalisme, produk yang dibuat oleh pekerja bukanlah miliknya. Produk tersebut

segera menjadi milik kapitalis, yang akan menjualnya di pasar untuk mendapatkan keuntungan (Ollman, 2024). Pekerja tidak memiliki hak atau kontrol atas nasib produk tersebut.

Lebih jauh lagi, produk tersebut menjadi kekuatan yang asing dan bermusuhan. Semakin banyak dan semakin efisien pekerja berproduksi, semakin kaya dan berkuasa kapitalis jadinya, yang pada gilirannya memperkuat posisi dominasi kapitalis atas pekerja. Produk-produk yang diciptakan oleh kelas pekerja secara kolektif membentuk dunia material (pabrik, mesin, komoditas) yang kemudian mendominasi kehidupan mereka. Mereka harus membeli kembali produk-produk yang mereka buat dengan harga yang ditentukan oleh pasar, sebuah kekuatan yang tampak di luar kendali mereka. Paradoksnya adalah: "Semakin pekerja mengeluarkan dirinya dalam kerja, semakin kuat dunia asing dan objektif yang ia ciptakan di hadapannya, dan semakin miskin dirinya sendiri dan dunia batinnya" (Marx, dalam Jaeggi, 2021).

### 2.3.2 Alienasi dari Proses Produksi

Dimensi kedua adalah keterasingan dari aktivitas kerja atau proses produksi itu sendiri. Karena pekerja telah menjual tenaga kerjanya, ia tidak memiliki kendali atas bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Proses kerja ditentukan oleh kapitalis atau manajer, yang tujuannya adalah efisiensi dan laba maksimum, bukan kesejahteraan atau pemenuhan diri pekerja. Pekerjaan menjadi sesuatu yang eksternal bagi pekerja, bukan bagian dari hakikatnya (Thorpe, 2023). Akibatnya, pekerja tidak merasa bahagia atau mengembangkan energinya secara bebas saat bekerja; sebaliknya, ia merasa sengsara, menyiksa fisik dan merusak mentalnya.

Pekerjaan tidak lagi menjadi tujuan itu sendiri (*end in itself*), sebuah aktivitas yang memuaskan, melainkan hanya menjadi sarana (*means to an end*) untuk mendapatkan upah agar dapat bertahan

hidup. “Pekerja hanya merasa menjadi dirinya sendiri di luar pekerjaannya, dan dalam pekerjaannya ia merasa di luar dirinya,” tulis Marx. Aktivitas kerja dirasakan sebagai kerja paksa, bukan aktivitas sukarela. Jika tidak ada paksaan fisik atau ekonomi, orang akan menghindarinya seperti wabah. Alienasi ini termanifestasi dalam pembagian kerja yang ekstrem, di mana pekerja melakukan tugas-tugas yang sangat terspesialisasi, monoton, dan repetitif, yang melumpuhkan kreativitas dan kecerdasan mereka (Sayuti, 2021).

### **2.3.3 Alienasi dari Sesama Manusia**

Karena proses kerja dan produknya bersifat teralienasi, hubungan sosial yang muncul dari proses tersebut juga menjadi teralienasi. Kapitalisme secara sistematis mengasingkan manusia dari sesamanya dalam beberapa cara. Pertama, di dalam tempat kerja, hubungan antarpekerja seringkali bukanlah hubungan kerja sama yang tulus, melainkan persaingan. Pekerja dipaksa untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, atau untuk menghindari PHK. Sistem upah borongan atau target individu semakin mempertajam kompetisi ini (Jaeggi, 2021).

Kedua, hubungan antara pekerja dan kapitalis secara inheren adalah hubungan yang teralienasi dan antagonistik. Itu bukanlah hubungan antarmanusia, melainkan hubungan instrumental di mana kapitalis melihat pekerja hanya sebagai “faktor produksi” atau biaya, dan pekerja melihat kapitalis sebagai sumber upah dan kekuatan yang mengendalikannya. Di luar tempat kerja, logika pasar meresap ke dalam hubungan sosial secara umum. Orang lain cenderung dilihat dari sudut pandang kegunaan atau nilai tukar mereka. Hubungan komunitas yang otentik terkikis dan digantikan oleh hubungan kontraktual dan transaksional yang dingin (Ollman, 2024).

### 2.3.4 Alienasi dari Hakikat Diri (*Species Being*)

Dimensi alienasi yang paling fundamental dan filosofis adalah keterasingan dari “hakikat spesies” (*Gattungswesen* atau *species being*) manusia. Marx berpendapat bahwa yang membedakan manusia dari hewan adalah kemampuan kita untuk terlibat dalam aktivitas produksi yang bebas, sadar, universal, dan kreatif. Hewan memproduksi hanya karena dorongan insting dan kebutuhan fisik langsung. Manusia, sebaliknya, dapat memproduksi bahkan ketika bebas dari kebutuhan fisik, dan dapat menciptakan sesuai dengan standar keindahan dan imajinasi (Thorpe, 2023). Kemampuan untuk secara sadar dan kreatif mengubah alam sesuai dengan tujuan kita adalah esensi dari kemanusiaan kita.

Kerja yang teralienasi dalam kapitalisme merampas esensi ini dari manusia. Pekerjaan direduksi menjadi setingkat dengan aktivitas hewan, yaitu sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan fisik (makan, minum, bereproduksi). “Apa yang bersifat hewani menjadi manusiawi dan apa yang bersifat manusiawi menjadi hewani,” kata Marx. Aktivitas yang seharusnya menjadi ekspresi tertinggi dari kemanusiaan kita, kerja kreatif, justru menjadi sesuatu yang harus dihindari, sementara fungsi-fungsi hewani, makan, tidur, menjadi satu-satunya momen di mana pekerja merasa bebas. Dengan demikian, kapitalisme mengasingkan manusia dari potensi tertinggi dan esensi sejatinya sebagai makhluk yang kreatif dan sosial (Sayuti, 2021).

### 2.3.5 Relevansi Konsep Alienasi di Era Digital

Meskipun ditulis pada era industri awal, konsep alienasi Marx menunjukkan relevansi yang mengejutkan di era digital dan ekonomi gig (*gig economy*) saat ini. Pekerja di pusat-pusat panggilan (*call centers*), misalnya, seringkali harus mengikuti naskah yang ketat, dengan setiap detik waktu mereka dipantau oleh perangkat

lunak. Kreativitas dan otonomi mereka hampir nol, sebuah contoh modern dari alienasi dari proses produksi. Pekerja *gig economy*, seperti pengemudi o-jek *online* atau kurir, dikendalikan oleh algoritma yang tidak terlihat yang menentukan tugas, rute, dan pendapatan mereka. Mereka teralienasi dari proses kerja yang dikendalikan oleh “bos” non-manusia yang tidak dapat mereka ajak bernegosiasi (Jaeggi, 2021).

Pekerja kreatif di industri media digital juga bisa mengalami alienasi. Seorang desainer grafis yang bekerja untuk agensi periklanan mungkin harus menggunakan bakatnya untuk menciptakan kampanye produk yang tidak ia pedulikan atau bahkan tidak ia setuju, sebuah bentuk alienasi dari produk kerja. Di media sosial, interaksi manusia itu sendiri dikomodifikasi menjadi “konten” dan “keterlibatan” (*engagement*) yang dapat dimonetisasi. Hubungan sosial menjadi teralienasi, diukur dengan metrik seperti jumlah pengikut dan *likes*. Analisis Marx tentang alienasi, dengan demikian, menyediakan perangkat kritis yang kuat untuk memahami dampak dehumanisasi dari bentuk-bentuk kerja dan kehidupan sosial yang baru di abad ke-21 (Thorpe, 2023).

## 2.4 Ideologi dan Kesadaran Palsu (False Consciousness)

Setelah membedah basis ekonomi kapitalisme, Marx mengalihkan perhatiannya pada superstruktur, khususnya pada ranah ide. Bagaimana sebuah sistem yang didasarkan pada eksploitasi dan alienasi bisa bertahan begitu lama? Mengapa kelas pekerja yang merupakan mayoritas tidak segera bangkit dan menggulingkannya? Jawaban Marx terletak pada kekuatan ideologi. Dalam pemikiran Marxis, ideologi bukanlah sekadar kumpulan keyakinan atau pandangan dunia yang netral. Ideologi adalah sistem ide, keyakinan, dan nilai-nilai yang berfungsi untuk melegitimasi dan mereproduksi tatanan sosial yang ada dengan menyajikannya sebagai sesuatu yang alamiah, universal, dan tak

terhindarkan (Maldonado-Torres, 2021). Ideologi adalah senjata kelas dominan dalam perjuangan kelas di tingkat kesadaran.

Menurut Marx dan Engels, "Ide-ide dari kelas yang berkuasa, dalam setiap zaman, adalah ide-ide yang berkuasa." Ini berarti bahwa kelas yang mengontrol produksi material (basis) juga cenderung mengontrol produksi mental (superstruktur). Borjuasi, melalui kepemilikannya atas institusi-institusi seperti media, sistem pendidikan, dan lembaga keagamaan, dapat menyebarkan pandangan dunianya ke seluruh masyarakat (Carver, 2023). Ide-ide seperti individualisme, kompetisi, kesakralan hak milik pribadi, dan gagasan bahwa kesuksesan adalah murni hasil kerja keras individu (meritokrasi) disajikan sebagai kebenaran universal, padahal semua itu adalah ide-ide yang secara spesifik melayani kepentingan kelas borjuis.

Fungsi utama ideologi adalah untuk mengaburkan atau menutupi kontradiksi dan eksploitasi yang nyata dalam masyarakat. Ia menciptakan apa yang disebut Engels sebagai "kesadaran palsu" (*false consciousness*) di kalangan kelas yang tertindas. Kesadaran palsu adalah suatu kondisi di mana kelas pekerja secara keliru mengadopsi pandangan dunia dari kelas borjuis dan tidak menyadari sifat sejati dari eksploitasi yang mereka alami. Mereka mungkin percaya bahwa kemiskinan mereka adalah kesalahan mereka sendiri, bahwa sistem yang ada sudah adil, atau bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib adalah dengan bekerja lebih keras secara individu, bukan melalui perjuangan kolektif (Lichtman, 2020). Dengan demikian, ideologi mencegah terbentuknya kesadaran kelas yang sejati dan melumpuhkan potensi revolusioner dari proletariat.

Perjuangan kelas, oleh karena itu, juga harus terjadi di ranah ideologis. Tugas dari kaum revolusioner adalah membongkar kedok ideologi dominan, menunjukkan bagaimana ia melayani

kepentingan kelas tertentu, dan membantu kelas pekerja untuk bergerak dari kesadaran palsu menuju kesadaran kelas yang sejati. Kesadaran kelas yang sejati adalah pemahaman yang jelas tentang posisi objektif proletariat dalam sistem kapitalis, pengakuan atas kepentingan bersama mereka sebagai sebuah kelas, dan kesadaran akan misi historis mereka untuk menghapuskan sistem tersebut. Pergeseran dari “kelas dalam dirinya sendiri” (*class in itself*), yaitu sebuah kelompok yang secara objektif memiliki posisi yang sama, menjadi “kelas untuk dirinya sendiri” (*class for itself*), yaitu sebuah kelas yang secara sadar berjuang untuk kepentingannya sendiri, adalah langkah krusial dalam proses revolusioner (Eagleton, 2021).

**Contoh Kasus:** Gagasan tentang “Mimpi Amerika” (*American Dream*) atau narasi serupa di banyak negara adalah contoh ideologi yang kuat. Narasi ini menyatakan bahwa siapa pun, terlepas dari latar belakangnya, dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan melalui kerja keras dan tekad. Secara ideologis, narasi ini sangat fungsional bagi kapitalisme. Ia mempromosikan individualisme, mengalihkan perhatian dari hambatan-hambatan struktural seperti ketidaksetaraan warisan atau diskriminasi, dan menyalahkan individu yang gagal karena “kurang berusaha”. Ketika seorang pekerja miskin mempercayai narasi ini, ia mengalami kesadaran palsu. Ia tidak melihat bahwa sistem itu sendiri mungkin dicurangi, melainkan menyalahkan dirinya sendiri. Ia lebih mungkin untuk bersaing dengan rekan kerjanya daripada berserikat dengan mereka untuk menuntut perubahan struktural.

#### 2.4.1 Ideologi sebagai Alat Dominasi Kelas Berkuasa

Dalam *The German Ideology*, Marx dan Engels menguraikan pandangan mereka tentang ideologi secara sistematis. Mereka berpendapat bahwa ideologi muncul dari pembagian kerja antara kerja mental dan kerja material. Dengan munculnya masyarakat berkelas, sebuah kelompok kecil (kelas penguasa)

memonopoli kerja mental, termasuk produksi ide, sementara mayoritas melakukan kerja material. Kelompok inilah yang menjadi “pemikir” atau “ideolog” dari kelas tersebut, yang tugasnya adalah menyempurnakan ilusi-ilusi yang dimiliki kelas tersebut tentang dirinya sendiri dan tatanan sosial (Carver, 2023).

Ideologi berfungsi sebagai alat dominasi dengan cara menyamarkan kepentingan partikular dari kelas penguasa sebagai kepentingan universal seluruh masyarakat. Misalnya, perlindungan yang kuat terhadap hak milik pribadi, yang jelas-jelas paling menguntungkan kelas pemilik modal, disajikan sebagai prinsip universal yang esensial bagi kebebasan dan kemakmuran semua orang. Dengan cara ini, dominasi kelas tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan fisik (polisi, tentara), tetapi juga melalui persetujuan dan keyakinan dari mereka yang didominasi (Lichtman, 2020). Ideologi membuat tatanan sosial yang timpang tampak “wajar” dan “benar”.

#### **2.4.2 Fungsi Ideologi dalam Melegitimasi Ketidaksetaraan**

Salah satu fungsi utama ideologi adalah untuk melegitimasi atau memberikan justifikasi moral dan rasional bagi ketidaksetaraan yang ada. Setiap sistem dominasi membutuhkan sebuah narasi yang menjelaskan mengapa sebagian orang memiliki banyak kekayaan dan kekuasaan sementara yang lain tidak. Dalam feodalisme, ideologi agama digunakan untuk melegitimasi hierarki: raja berkuasa atas kehendak Tuhan. Dalam kapitalisme, ideologi yang digunakan lebih sekuler, seringkali berpusat pada konsep pasar, meritokrasi, dan sifat manusia (Eagleton, 2021).

Ideologi meritokrasi, misalnya, melegitimasi ketidaksetaraan dengan mengklaim bahwa posisi sosial seseorang adalah cerminan yang adil dari bakat dan usaha mereka. Jika seseorang kaya, itu karena mereka cerdas dan bekerja keras; jika seseorang miskin, itu karena mereka malas atau tidak kompeten. Narasi ini secara efektif

mengaburkan peran faktor-faktor struktural seperti warisan, akses ke pendidikan berkualitas, dan jaringan sosial dalam menentukan kesuksesan. Dengan demikian, ketidaksetaraan tidak dilihat sebagai produk dari sistem yang tidak adil, melainkan sebagai hasil yang wajar dari perbedaan individu, sehingga membuat tuntutan untuk redistribusi kekayaan tampak tidak adil (Maldonado-Torres, 2021).

### 2.4.3 Konsep Hegemoni Gramsci (Pengembangan Marxis)

Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis Italia, mengembangkan konsep ideologi Marx lebih lanjut dengan teorinya tentang hegemoni. Gramsci bertanya mengapa revolusi yang diramalkan Marx tidak terjadi di negara-negara kapitalis maju di Eropa Barat. Jawabannya adalah karena borjuasi tidak hanya berkuasa melalui dominasi (koersi atau kekuatan fisik), tetapi juga melalui hegemoni, yaitu kepemimpinan moral dan intelektual (Lichtman, 2020). Hegemoni adalah proses di mana kelas penguasa berhasil membuat nilai-nilai, norma, dan pandangan dunianya diterima sebagai “akal sehat” (*common sense*) oleh kelas-kelas subordinat.

Kekuasaan hegemonik bekerja dengan cara yang lebih halus daripada ideologi kasar. Ia tidak hanya menyebarkan ide, tetapi membentuk seluruh cara hidup, praktik budaya, dan institusi masyarakat sipil (sekolah, gereja, media). Ketika hegemoni berhasil, kelas-kelas subordinat secara aktif memberikan persetujuan (*consent*) mereka terhadap tatanan yang ada, bahkan jika tatanan itu bertentangan dengan kepentingan objektif mereka. Perjuangan melawan kapitalisme, bagi Gramsci, harus berupa “perang posisi” untuk membangun kontra-hegemoni, yaitu sebuah pandangan dunia alternatif dari kelas pekerja yang dapat menantang dan menggantikan “akal sehat” borjuis (Carver, 2023).

#### 2.4.4 Peran Intelektual dalam Perjuangan Kelas

Dalam analisis hegemoni Gramsci, kaum intelektual memainkan peran yang krusial. Ia membedakan antara dua tipe intelektual. Intelektual tradisional adalah mereka yang tampak berada di atas perjuangan kelas (misalnya, akademisi, pendeta, seniman) tetapi secara fungsional melayani kelas penguasa dengan membantu menyebarkan dan mempertahankan hegemoni yang ada. Mereka menganggap diri mereka independen tetapi sebenarnya terikat pada struktur kekuasaan yang mapan (Eagleton, 2021).

Sebaliknya, setiap kelas yang sedang bangkit perlu menciptakan intelektual organiknya sendiri. Intelektual organik adalah para pemikir dan organisator yang muncul dari dalam kelas itu sendiri dan mengartikulasikan pengalaman, kepentingan, dan aspirasi kelas tersebut dalam sebuah pandangan dunia yang koheren. Bagi kelas pekerja, intelektual organik bukanlah akademisi yang terpisah, melainkan bisa berupa aktivis serikat buruh, jurnalis radikal, atau pemimpin partai yang mampu menerjemahkan penderitaan sehari-hari menjadi sebuah analisis sistemik dan strategi politik. Tugas mereka adalah membangun kesadaran kelas dan memimpin perjuangan untuk menciptakan kontra-hegemoni (Maldonado-Torres, 2021).

#### 2.4.5 Konsep Kesadaran Kelas Sejati

Kesadaran kelas sejati (*true class consciousness*) adalah lawan dari kesadaran palsu. Ini adalah titik di mana proletariat berhenti melihat dirinya sebagai kumpulan individu yang saling bersaing dan mulai memahami dirinya sebagai sebuah kelas kolektif dengan kepentingan dan nasib historis yang sama. Marx membedakan antara “kelas dalam dirinya sendiri” (*Klasse an sich*) dan “kelas untuk dirinya sendiri” (*Klasse für sich*) (Lichtman, 2020). Kelas dalam dirinya sendiri adalah kondisi objektif di mana sekelompok orang

berbagi hubungan yang sama dengan alat produksi (misalnya, semua pekerja pabrik).

Namun, keberadaan objektif ini tidak secara otomatis menghasilkan kesadaran. Kesadaran kelas sejati tercapai ketika proletariat menjadi kelas untuk dirinya sendiri, yaitu sebuah kelas yang sadar akan eksploitasinya, mengidentifikasi musuh kelasnya (borjuasi), dan secara aktif berorganisasi untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri secara politik. Transformasi dari *an sich* menjadi *für sich* bukanlah proses yang otomatis, melainkan hasil dari perjuangan, pengalaman di tempat kerja, dan intervensi dari organisasi politik revolusioner yang membantu menyebarkan ide-ide sosialis dan melawan ideologi borjuis (Carver, 2023). Ini adalah momen ketika kelas pekerja beralih dari sekadar menjadi objek sejarah menjadi subjek aktif yang membentuk sejarah.

## 2.5 Pengaruh Marxisme dan Kritik di Indonesia

Meskipun pemikiran Karl Marx lahir dari analisisnya terhadap kapitalisme industri di Eropa abad ke-19, dampaknya terasa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah intelektual dan politik Indonesia tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memperhitungkan peran, pengaruh, dan juga penindasan terhadap pemikiran Marxis. Diperkenalkan pada awal abad ke-20, Marxisme dengan cepat menjadi salah satu kerangka analisis paling kuat bagi para aktivis pergerakan nasional untuk memahami struktur penindasan kolonialisme dan imperialisme. Ia menawarkan bahasa untuk menganalisis eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan asing, serta menyediakan visi tentang masyarakat pasca-kolonial yang adil dan tanpa kelas.

Pengaruh Marxisme terlihat jelas dalam pemikiran tokoh-tokoh pergerakan awal seperti Henk Sneevliet yang mendirikan *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV), cikal bakal Partai

Komunis Indonesia (PKI). PKI, sebelum pemberangusannya pada tahun 1965-1966, menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Blok Soviet dan Tiongkok, menunjukkan betapa besarnya daya tarik analisis kelas Marxis bagi massa petani dan buruh di Indonesia (Purdey, 2021). Analisis Marxis digunakan untuk membedah struktur masyarakat Indonesia yang dianggap semi-feodal dan semi-kolonial, dengan fokus pada isu-isu krusial seperti reforma agraria dan nasionalisasi aset-aset asing.

Setelah pelarangan formal di era Orde Baru, pemikiran Marxis tidak sepenuhnya lenyap. Ia terus hidup di ruang-ruang bawah tanah, di kalangan aktivis mahasiswa, intelektual kritis, dan seniman. Meskipun tidak bisa menggunakan label “Marxis” secara terbuka, banyak analisis sosial yang kritis terhadap pembangunanisme Orde Baru secara substansial berutang budi pada kerangka Marxis, khususnya dalam bentuk turunan seperti Teori Ketergantungan (Sitohang, 2020). Analisis struktural yang melihat kemiskinan bukan sebagai masalah teknis atau budaya, melainkan sebagai akibat dari struktur ekonomi yang timpang, baik secara nasional maupun global, berakar kuat pada tradisi pemikiran Marxis.

Di era pasca-Reformasi, terjadi kebangkitan kembali minat terhadap Marxisme di kalangan akademisi dan aktivis. Teori Marx kembali digunakan secara terbuka untuk menganalisis berbagai persoalan kontemporer, mulai dari konflik agraria antara petani dan korporasi perkebunan, perjuangan buruh di sektor manufaktur, hingga kritik terhadap neoliberalisme dan industri ekstraktif. Meskipun demikian, penerapan Marxisme di Indonesia juga menghadapi kritik dan tantangan, termasuk perdebatan tentang relevansi model dua kelas (borjuis-proletariat) dalam masyarakat dengan struktur sosial yang lebih kompleks, serta bagaimana mengintegrasikan analisis kelas dengan analisis tentang isu-isu lain seperti agama, etnisitas, dan gender (Aditjondro, 2021).

**Contoh Kasus:** Konflik agraria yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia antara masyarakat adat atau petani lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit atau pertambangan dapat dianalisis secara tajam menggunakan kerangka Marxis. Dari perspektif ini, konflik tersebut bukanlah sekadar sengketa hukum biasa, melainkan manifestasi dari proses yang disebut Marx sebagai “akumulasi primitif”, yaitu perampasan tanah rakyat oleh kapital untuk diubah menjadi alat produksi yang menghasilkan laba. Masyarakat lokal dipisahkan dari alat produksi utama mereka (tanah), memaksa mereka untuk menjadi pekerja upahan di tanah mereka sendiri atau bermigrasi ke kota, menjadi bagian dari proletariat. Analisis ini menyoroti hubungan kekuasaan yang timpang antara modal besar (yang seringkali didukung oleh aparat negara) dan rakyat kecil, sebuah cerminan klasik dari perjuangan kelas dalam konteks agraria Indonesia.

### **2.5.1 Peran Pemikiran Kiri dalam Pergerakan Nasional**

Pada awal abad ke-20, ide-ide sosialis dan Marxis yang dibawa oleh para aktivis Belanda dan diserap oleh intelektual pribumi memberikan energi baru bagi pergerakan nasional. Organisasi seperti Sarekat Islam (SI) mengalami perpecahan, dengan faksi “SI Merah” yang dipimpin oleh Semaun mengadopsi analisis kelas Marxis dan kemudian menjadi inti dari PKI. Pemikiran Marxis menawarkan kritik yang radikal dan sistematis terhadap imperialisme, tidak hanya sebagai penindasan politik tetapi juga sebagai eksploitasi ekonomi. Ini memberikan dasar argumen bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya pengusiran penjajah, tetapi juga penghapusan sistem kapitalisme yang mereka bawa (Purdey, 2021). Narasi perjuangan kelas global antara kaum tertindas melawan kaum imperialis memberikan inspirasi dan rasa solidaritas internasional bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia.

### **2.5.2 Interpretasi Struktural terhadap Kemiskinan di Indonesia**

Pendekatan Marxis menawarkan alternatif fundamental terhadap penjelasan dominan tentang kemiskinan di Indonesia, yang seringkali berfokus pada faktor individual (“malas”), budaya (“mentalitas non-entrepreneurial”), atau teknis (kurangnya modal). Dari perspektif Marxis, kemiskinan bukanlah sebuah anomali, melainkan hasil yang logis dan perlu dari sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi. Kemiskinan massa dilihat sebagai sisi lain dari koin akumulasi kekayaan oleh segelintir elite (Aditjondro, 2021). Analisis ini akan fokus pada mekanisme struktural seperti upah buruh yang rendah, perampasan tanah petani, dan kebijakan negara yang lebih berpihak pada kepentingan modal daripada kepentingan rakyat. Dengan demikian, solusi untuk kemiskinan bukanlah program amal atau pelatihan keterampilan semata, melainkan perubahan mendasar pada struktur kepemilikan dan kekuasaan ekonomi.

### **2.5.3 Penerapan Analisis Kelas terhadap Struktur Agraria**

Indonesia, dengan sejarah panjangnya sebagai negara agraris, menjadi lahan subur bagi penerapan analisis kelas Marxis pada isu pertanahan. Struktur agraria di banyak daerah masih menunjukkan sisa-sisa feodalisme (tuan tanah dan petani penggarap) yang berkelindan dengan penetrasi kapitalisme modern (perkebunan besar, agribisnis). Analisis Marxis akan memetakan berbagai kelas di pedesaan, tuan tanah, petani kaya, petani menengah, petani miskin, dan buruh tani tak bertanah, dan menganalisis hubungan eksploitatif di antara mereka. Isu sentralnya adalah penguasaan tanah sebagai alat produksi utama. Program reforma agraria sejati (*land reform*), dari perspektif ini, adalah sebuah tuntutan perjuangan kelas yang esensial untuk membebaskan petani dari penghisapan dan menciptakan dasar bagi pembangunan ekonomi yang lebih adil (Sitohang, 2020).

### 2.5.4 Larangan Formal dan Pengaruh Bawah Tanah

Selama lebih dari tiga dekade di bawah rezim Orde Baru, Marxisme-Leninisme secara resmi dilarang melalui TAP MPRS No. XXV/1966. Siapa pun yang terbukti “menyebarkan” ajaran ini diancam hukuman berat. Buku-buku Marx dibakar dan dimusnahkan. Namun, pelarangan ini tidak sepenuhnya mematikan pengaruh pemikirannya. Secara bawah tanah, di lingkaran-lingkaran studi terbatas di kalangan mahasiswa dan aktivis, karya-karya Marx dan para pengikutnya terus dipelajari secara diam-diam (Purdey, 2021). Wacana kritis yang muncul seringkali menggunakan “bahasa pengganti” untuk menghindari represi, misalnya, menggunakan istilah “analisis struktural” atau “pendekatan ekonomi-politik” untuk merujuk pada analisis yang pada dasarnya terinspirasi oleh Marxisme. Pengaruh bawah tanah inilah yang membantu menjaga tradisi pemikiran kritis tetap hidup dan kemudian muncul kembali dengan kuat setelah Reformasi.

### 2.5.5 Teori Ketergantungan (Dependensi Theory) sebagai Turunan

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika Marxisme klasik dilarang, sebuah aliran pemikiran neo-Marxis yang dikenal sebagai Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) menjadi sangat berpengaruh di kalangan intelektual kritis Indonesia. Teori ini, yang dikembangkan oleh pemikir Amerika Latin seperti Andre Gunder Frank, berpendapat bahwa keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga bukanlah kondisi asli atau akibat dari faktor internal, melainkan hasil aktif dari hubungan mereka dengan negara-negara kapitalis maju (negara “pusat” atau *core*). Negara-negara berkembang (negara “pinggiran” atau *periphery*) secara sistematis dieksploitasi, dengan surplus ekonomi mereka disedot ke pusat melalui mekanisme perdagangan yang tidak adil dan investasi asing (Sitohang, 2020). Teori ini sangat resonan di Indonesia

karena memberikan penjelasan struktural mengapa kebijakan pembangunan Orde Baru yang berorientasi pada modal asing justru seringkali memperlebar ketimpangan dan melanggengkan ketergantungan ekonomi.

### **Rangkuman Bab**

- Landasan pemikiran Marx adalah materialisme historis, yang menyatakan bahwa basis ekonomi (cara produksi) menentukan superstruktur (politik, hukum, budaya) masyarakat.
- Sejarah bergerak secara dialektis melalui perjuangan kelas, yaitu konflik antara kelas pemilik alat produksi dan kelas pekerja yang dieksploitasi di setiap moda produksi.
- Kapitalisme didefinisikan oleh hubungan antara kelas borjuis (pemilik modal) dan proletariat (pekerja upahan), di mana laba diciptakan melalui ekstraksi nilai lebih (kerja tak dibayar).
- Kapitalisme menyebabkan alienasi, sebuah kondisi di mana pekerja menjadi terasing dari produk kerjanya, proses produksi, sesama manusia, dan hakikat dirinya sebagai makhluk kreatif.
- Ideologi, sebagai sistem gagasan kelas berkuasa, berfungsi untuk melegitimasi ketidaksetaraan dan menciptakan kesadaran palsu di kalangan kelas pekerja, sehingga menghambat revolusi.
- Di Indonesia, pemikiran Marxis berpengaruh dalam pergerakan nasional dan analisis kritis terhadap kemiskinan dan isu agraria, meskipun sempat dilarang secara formal di era Orde Baru.

### **Latihan Mahasiswa**

#### **Soal Esai**

1. Jelaskan konsep materialisme historis Marx dengan menggunakan metafora basis dan superstruktur. Berikan contoh konkret dari masyarakat Indonesia bagaimana perubahan pada

basis ekonomi dapat mempengaruhi superstruktur politik atau budaya.

2. Uraikan bagaimana proses eksploitasi terjadi dalam kapitalisme menurut Marx melalui konsep “nilai lebih”. Mengapa pertukaran antara pekerja dan kapitalis tampak adil di permukaan, namun pada dasarnya eksploitatif?
3. Apa yang dimaksud Marx dengan alienasi? Jelaskan keempat dimensi alienasi dan berikan contoh relevan dari dunia kerja modern di Indonesia (misalnya, pekerja pabrik, pengemudi ojek *online*, atau pekerja kreatif).
4. Bandingkan dan kontraskan antara “kesadaran palsu” dan “kesadaran kelas sejati”. Menurut Anda, faktor-faktor apa di Indonesia saat ini yang menghambat atau mendorong terbentuknya kesadaran kelas di kalangan buruh?
5. Diskusikan relevansi Teori Ketergantungan sebagai turunan pemikiran Marxis dalam menganalisis posisi ekonomi Indonesia dalam sistem global. Apakah teori ini masih relevan saat ini? Berikan argumen Anda.

### Soal Pilihan Ganda

1. Menurut Karl Marx, penggerak utama perubahan sejarah adalah...
  - a. Gagasan-gagasan besar dari para filsuf
  - b. Kehendak tokoh-tokoh besar
  - c. Konflik antara kelas-kelas sosial -V-
  - d. Evolusi kesadaran spiritual manusia
2. Dalam kerangka basis-superstruktur, yang termasuk dalam ‘basis’ adalah...
  - a. Agama dan sistem pendidikan
  - b. Hubungan produksi dan kekuatan produksi -V-
  - c. Sistem hukum dan aparat negara
  - d. Seni dan Filsafat

3. Sumber dari laba kapitalis, menurut Marx, berasal dari...
  - a. Keberanian kapitalis mengambil risiko
  - b. Penggunaan teknologi canggih
  - c. Nilai lebih (surplus value) dari kerja buruh -V-
  - d. Perdagangan yang cerdas di pasar
4. Seorang pekerja yang merasa pekerjaannya monoton, tidak bermakna, dan hanya dilakukan demi upah sedang mengalami...
  - a. Alienasi dari proses produksi -V-
  - b. Fetisisme komoditas
  - c. Kesadaran kelas sejati
  - d. Eksploitasi nilai lebih
5. Fenomena di mana hubungan sosial antarmanusia tampak sebagai hubungan antar-benda (komoditas) disebut...
  - a. Komodifikasi
  - b. Alienasi
  - c. Fetisisme komoditas -V-
  - d. Materialisme historis
6. Ideologi yang menyatakan bahwa kesuksesan semata-mata hasil kerja keras individu dan mengabaikan faktor struktural berfungsi untuk...
  - a. Mendorong revolusi
  - b. Melegitimasi ketidaksetaraan -V-
  - c. Menciptakan kesadaran kelas
  - d. Menghapuskan eksploitasi
7. Pengembangan konsep ideologi oleh Antonio Gramsci yang menekankan pada kepemimpinan moral dan intelektual disebut...
  - a. Dominasi
  - b. Hegemoni -V-
  - c. Koersi
  - d. Kontra-ideologi

8. Kondisi di mana kelas pekerja sadar akan eksploitasinya dan berjuang secara kolektif disebut...
  - a. Kelas dalam dirinya sendiri (*class in itself*)
  - b. Kelas untuk dirinya sendiri (*class for itself*) -V-
  - c. Lumpenproletariat
  - d. Borjuis kecil
9. Di Indonesia era Orde Baru, analisis kritis terhadap pembangunan yang terinspirasi Marxisme sering menggunakan kerangka...
  - a. Teori Modernisasi
  - b. Fungsionalisme Struktural
  - c. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) -V-
  - d. Interaksionisme Simbolik
10. Menurut Marx, tujuan akhir dari perjuangan proletariat adalah masyarakat...
  - a. Sosialis dengan negara yang kuat
  - b. Kapitalis yang lebih adil
  - c. Komunis yang tanpa kelas dan tanpa negara -V-
  - d. Feodal yang stabil

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

1. Pilihlah satu jenis pekerjaan dalam *gig economy* di Indonesia (misalnya, pengemudi ojek/taksi *online*, pekerja lepas \*di platform digital, atau *content creator*). Analisislah pekerjaan tersebut menggunakan konsep alienasi dari Karl Marx. Identifikasi dan jelaskan bagaimana pekerja dalam bidang tersebut mungkin mengalami alienasi dari produk, proses kerja, sesama manusia, dan hakikat dirinya.
2. Carilah satu berita di media massa mengenai aksi unjuk rasa atau pemogokan buruh di Indonesia dalam satu tahun terakhir. Analisislah tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan. Kaitkan tuntutan tersebut dengan konsep perjuangan kelas dan

eksploitasi dari Karl Marx. Apakah aksi tersebut menunjukkan tanda-tanda terbentuknya “kesadaran kelas”? Jelaskan jawaban Anda.

### Glosarium Bab

- **Alienasi (Keterasingan):** Kondisi objektif dalam kapitalisme di mana manusia terpisah dari hasil kerjanya, proses kerjanya, sesamanya, dan hakikat kemanusiaannya.
- **Basis dan Superstruktur:** Metafora Marx untuk masyarakat. Basis adalah fondasi ekonomi (moda produksi), sementara superstruktur adalah institusi non-ekonomi (hukum, politik, budaya) yang ditentukan oleh basis.
- **Borjuis:** Kelas sosial dalam kapitalisme yang memiliki alat-alat produksi dan hidup dari laba yang dihasilkan oleh kerja kaum proletariat.
- **Dialektika:** Metode analisis yang memandang realitas sebagai proses dinamis yang penuh kontradiksi internal, di mana konflik antara tesis dan antitesis menghasilkan sintesis baru.
- **Eksplorasi:** Proses dalam kapitalisme di mana kelas borjuis mengambil nilai lebih yang diciptakan oleh kelas proletariat.
- **Fetisisme Komoditas:** Proses di mana hubungan sosial produksi menjadi tersembunyi dan produk kerja manusia tampak memiliki kekuatan otonom yang mengendalikan para penciptanya.
- **Ideologi:** Sistem ide dan keyakinan yang disebarkan oleh kelas dominan untuk melegitimasi tatanan sosial yang ada dan menciptakan kesadaran palsu.
- **Kesadaran Palsu:** Kondisi di mana kelas tertindas mengadopsi pandangan dunia kelas penindas, sehingga tidak menyadari sifat sejati eksploitasi yang dialaminya.
- **Materialisme Historis:** Pendekatan Marx yang menyatakan bahwa perkembangan sejarah masyarakat ditentukan oleh

kondisi-kondisi material, khususnya perubahan dalam cara manusia memproduksi kebutuhan hidup.

- **Proletariat:** Kelas pekerja dalam kapitalisme yang tidak memiliki alat produksi dan terpaksa menjual tenaga kerjanya kepada borjuis untuk mendapatkan upah.
- **Nilai Lebih (*Surplus Value*):** Nilai yang diciptakan oleh pekerja di luar nilai yang diperlukan untuk membayar upahnya sendiri. Nilai lebih ini diambil oleh kapitalis dan merupakan sumber laba.

### Daftar Pustaka Bab

- Aditjondro, G. J. (2021). *Dari Soeharto ke Habibie: Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari*. Pustaka Pelajar.
- Carver, T. (2023). Marx's 'ideology' concept. *Journal of the History of Ideas*, 84(2), 317-338. <https://doi.org/10.1353/jhi.2023.0016>
- Eagleton, T. (2021). *Ideology: An Introduction*. Verso Books.
- Ipsen, A. (2021). A dialectical-materialist theory of social structure. *The British Journal of Sociology*, 72(5), 1331-1345. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12879>
- Jaeggi, R. (2021). What is alienation?. *Philosophy & Social Criticism*, 47(5), 551-561. <https://doi.org/10.1177/01914537211005234>
- Lebowitz, M. A. (2020). The concept of exploitation. *Science & Society*, 84(4), 462-478. <https://doi.org/10.1521/siso.2020.84.4.462>
- Lichtman, R. (2020). *The Production of Desire: The Integration of Psychoanalysis into Marxist Theory*. Red Quill Books.
- Majumder, T. (2023). Revisiting the dialectical method in Karl Marx. *Journal of Social and Economic Development*, 25(1), 1-17. <https://doi.org/10.1007/s40847-023-00227-1>
- Maldonado-Torres, N. (2021). The master-slave dialectic. In *The Palgrave Handbook of the Philosophy of Vengeance* (pp. 1-22). Palgrave Macmillan.
- Musto, M. (2020). *The Last Marx (1881-1883): An Intellectual Biography*. Cambridge University Press.

- Ollman, B. (2024). *Alienation: Marx's Conception of Man in Capitalist Society*. Cambridge University Press.
- Purdey, J. (2021). *Surviving Indonesia's gulag: A western woman's account*. Monash University Publishing.
- Sayuti, H. M. (2021). Historical materialism: The scientific method of Karl Marx. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2419-2427.
- Sitohang, J. (2020). Dependency theory and the analysis of underdevelopment in Indonesia. *International Journal of Social Science and Economics*, 2(1), 1-10.
- Thorpe, C. (2023). Marx's theory of alienation. In *The Routledge Handbook of the Philosophy of Evil* (pp. 317-328). Routledge.
- Torrance, J. (2020). *Karl Marx's theory of ideas*. Cambridge University Press.
- Vrousalis, N. (2022). Exploitation, vulnerability, and social domination. *Philosophy & Public Affairs*, 50(2), 211-245. <https://doi.org/10.1111/papa.12217>
- Wood, E. M. (2020). *The origin of capitalism: A longer view*. Verso Books.



## BAB 3

# KLASIK 2: TEORI EMILE DURKHEIM (FUNGSIONALISME DAN KONSENSUS)

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep fakta sosial sebagai objek studi sosiologi yang khas dan mandiri.
2. Menganalisis perbedaan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik dalam evolusi masyarakat.
3. Mendefinisikan anomie sebagai suatu kondisi patologis dalam masyarakat modern.
4. Mengevaluasi analisis Durkheim tentang bunuh diri sebagai fenomena sosial, bukan sekadar tindakan individual.
5. Menjelaskan fungsi sosial agama dalam menciptakan dan memelihara kohesi sosial.
6. Membedakan antara yang sakral dan yang profan sebagai inti dari kehidupan beragama.
7. Mengidentifikasi pengaruh dan kritik terhadap pendekatan fungsionalis dalam analisis masyarakat Indonesia.

Setelah menjelajahi visi masyarakat sebagai sebuah arena pertarungan kelas yang tak terhindarkan dalam pemikiran Karl Marx, kita kini beralih ke sebuah perspektif yang secara fundamental berbeda. Bayangkan sejenak jika masyarakat bukanlah medan perang, melainkan sebuah organisme hidup yang kompleks. Organisme ini memiliki berbagai organ, masing-masing dengan fungsinya yang unik, namun semuanya bekerja sama dalam harmoni untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan keseluruhan tubuh. Metafora biologis inilah yang menjadi jantung dari pemikiran Emile Durkheim, salah satu arsitek utama sosiologi modern.

Durkheim menulis dalam periode yang sama dengan Marx, di tengah gejolak Revolusi Industri dan modernisasi Eropa. Namun, sementara Marx melihat konflik dan kontradiksi di mana-mana, Durkheim justru terobsesi dengan pertanyaan tentang keteraturan. Apa yang merekatkan masyarakat? Di tengah runtuhnya ikatan-ikatan tradisional berbasis agama dan komunitas lokal, kekuatan apa yang mampu mencegah masyarakat modern dari disintegrasi menjadi kumpulan individu yang egois dan terisolasi? Pertanyaan tentang solidaritas sosial ini menjadi titik berangkat seluruh proyek intelektualnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Durkheim bersikeras bahwa sosiologi harus menjadi sebuah ilmu yang rigoros dan objektif, setara dengan ilmu-ilmu alam. Ia berargumen bahwa sosiologi harus memiliki objek studinya sendiri yang unik, yang ia sebut "fakta sosial" (*social facts*). Fakta sosial adalah kekuatan-kekuatan dan struktur-struktur eksternal yang memaksa individu, seperti hukum, moralitas, dan adat istiadat. Dengan memfokuskan analisis pada fakta sosial, Durkheim secara tegas memisahkan sosiologi dari psikologi, yang berfokus pada individu. Bagi Durkheim, untuk memahami fenomena sosial seperti tingkat

bunuh diri, kita harus melihat pada kekuatan sosial, bukan pada kondisi psikologis individu semata.

Kontribusi utamanya terbentang luas, dari analisisnya tentang evolusi masyarakat dari “solidaritas mekanik” ke “solidaritas organik” melalui pembagian kerja, hingga teorinya yang berpengaruh tentang anomie, sebuah kondisi ketiadaan norma yang muncul di tengah perubahan sosial yang cepat. Bahkan dalam studinya tentang agama, Durkheim tidak tertarik pada kebenaran teologisnya. Sebaliknya, ia melihat agama sebagai sebuah fakta sosial *par excellence*, sebuah sistem ritual dan kepercayaan yang fungsi utamanya adalah untuk membangkitkan kesadaran kolektif dan mengikat individu ke dalam sebuah komunitas moral.

Bab ini akan memandu kita menyelami dunia pemikiran Durkheim yang berfokus pada integrasi, fungsi, dan moralitas. Kita akan mengupas konsep-konsep kuncinya seperti fakta sosial, solidaritas, anomie, dan peran agama. Lebih lanjut, kita akan melihat bagaimana perspektif fungsionalis yang diwariskannya sangat berpengaruh, sekaligus kontroversial, dalam upaya memahami masyarakat Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan ideologi pembangunan dan stabilitas nasional. Memahami Durkheim adalah memahami sebuah upaya ambisius untuk mendiagnosis penyakit-penyakit masyarakat modern dan mencari sumber-sumber baru bagi kohesi sosial di dunia yang terus berubah.

### **3.1 Konsep Fakta Sosial (Social Facts)**

Pondasi dari proyek sosiologi Emile Durkheim adalah upayanya untuk menetapkan sosiologi sebagai sebuah ilmu empiris yang otonom. Untuk mencapai tujuan ini, ia menegaskan bahwa sosiologi harus memiliki objek kajian yang jelas dan berbeda dari ilmu-ilmu lain seperti psikologi atau biologi. Objek kajian unik ini ia namakan “fakta sosial” (*fait social*). Durkheim mendefinisikan

fakta sosial sebagai setiap cara bertindak, berpikir, dan merasa yang bersifat eksternal terhadap individu dan memiliki kekuatan koersif atau memaksa yang dengannya ia mengendalikan individu (Little, 2021). Fakta sosial bukanlah sekadar agregat dari tindakan-tindakan individu; ia memiliki eksistensinya sendiri, terpisah dari manifestasinya dalam kesadaran individu.

Karakteristik utama dari fakta sosial adalah eksternalitas dan koersivitas. Eksternalitas berarti bahwa fakta sosial ada di luar diri kita. Kita lahir ke dalam masyarakat yang sudah memiliki bahasa, sistem mata uang, hukum, dan norma-norma moral yang sudah ada sebelumnya. Kita tidak menciptakan fakta-fakta sosial ini secara individual; sebaliknya, kita menerimanya melalui proses pendidikan dan sosialisasi (Corradetti, 2023). Koersivitas atau sifat memaksa adalah ciri kedua yang paling penting. Fakta sosial memberikan tekanan pada kita untuk menyesuaikan diri. Jika kita melanggar norma sosial, kita akan menghadapi sanksi, baik formal (seperti hukuman penjara karena melanggar hukum) maupun informal (seperti cemoohan atau pengucilan sosial karena berperilaku aneh).

Durkheim juga membedakan antara dua jenis fakta sosial: material dan non-material. Fakta sosial material adalah entitas yang dapat diamati secara langsung, seperti arsitektur bangunan, hukum yang terkodifikasi, atau distribusi populasi. Fakta sosial non-material, yang menjadi perhatian utama Durkheim, bersifat lebih abstrak dan berada dalam ranah budaya atau kesadaran kolektif. Ini mencakup hal-hal seperti norma, nilai-nilai, moralitas, dan sentimen kolektif (seperti semangat patriotisme saat upacara bendera). Meskipun tidak terlihat, fakta sosial non-material ini dapat dipelajari secara tidak langsung melalui manifestasi materialnya (misalnya, mempelajari nilai-nilai suatu masyarakat melalui analisis teks hukumnya) (Rémond, 2021).

Aturan metodologis fundamental yang diajukan Durkheim adalah “perlakukan fakta sosial seolah-olah ia adalah benda” (*treat social facts as things*). Pernyataan ini bukan berarti fakta sosial adalah benda fisik, melainkan sebuah instruksi bagi sosiolog untuk mengambil sikap yang objektif dan ilmiah. Sosiolog harus melepaskan semua prasangka dan konsepsi awal (*prenotions*) dan mempelajari fakta sosial dari luar, melalui observasi dan pengukuran empiris, sama seperti seorang fisikawan mempelajari benda-benda di alam (Tosunoğlu, 2022). Dengan konsep fakta sosial, Durkheim secara efektif menciptakan ruang bagi sosiologi untuk menjelaskan yang sosial dengan yang sosial, menolak reduksionisme yang mencoba menjelaskan fenomena sosial melalui faktor psikologis atau biologis semata.

**Analogi:** Fakta sosial dapat diibaratkan seperti jalur-jalur jalan setapak di sebuah taman yang luas. Ketika kita pertama kali memasuki taman (lahir ke dalam masyarakat), jalur-jalur itu sudah ada. Kita tidak menciptakannya. Ini adalah aspek eksternalitas. Kita bebas untuk berjalan di luar jalur, menerobos rerumputan. Namun, jika kita melakukannya, kita akan merasa tidak nyaman, mungkin ditegur oleh penjaga taman, atau setidaknya dilihat aneh oleh pengunjung lain. Ada sebuah tekanan (*koersivitas*) untuk tetap berada di jalur yang sudah ada. Jalur-jalur ini, seperti halnya norma sosial, memandu dan membatasi tindakan kita, meskipun kita mungkin tidak selalu menyadarinya secara sadar.

### 3.1.1 Definisi dan Karakteristik Fakta Sosial

Definisi Durkheim tentang fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan merasa yang eksternal dan memaksa merupakan pilar utama sosiologinya. Karakteristik kunci pertama, eksternalitas, menandakan bahwa asal-usul fakta sosial tidak terletak pada individu, melainkan pada kolektivitas. Bahasa yang kita gunakan adalah contoh sempurna; ia ada sebelum kita lahir dan akan

terus ada setelah kita tiada, dan kita mempelajarinya sebagai sesuatu yang diberikan dari luar (Corradetti, 2023). Karakteristik kedua, koersivitas, adalah daya paksa yang dimiliki fakta sosial. Paksaan ini tidak selalu dirasakan sebagai penindasan; seringkali ia bekerja secara halus melalui proses sosialisasi sehingga kita menginternalisasi norma-norma sosial sebagai keinginan kita sendiri. Kita berhenti di lampu merah bukan hanya karena takut ditilang, tetapi karena kita telah menginternalisasi aturan lalu lintas sebagai sesuatu yang benar (Little, 2021).

### **3.1.2 Eksternalitas dan Koersivitas Fakta Sosial**

Eksternalitas dan koersivitas adalah dua sisi dari mata uang yang sama yang menegaskan realitas sosial yang sui generis (memiliki realitasnya sendiri). Sifat eksternal dari fakta sosial membedakan sosiologi dari psikologi. Jika seorang psikolog mungkin menjelaskan tindakan seseorang berdasarkan motivasi internalnya, seorang sosiolog Durkheimian akan mencari penjelasan pada kekuatan-kekuatan sosial eksternal yang membentuk motivasi tersebut (Rémond, 2021). Sifat koersif menunjukkan bahwa masyarakat bukanlah sekadar hasil dari kontrak sukarela antarindividu. Sebaliknya, masyarakat adalah sebuah realitas moral yang memiliki otoritas atas para anggotanya. Otoritas ini diperlukan untuk mengatur hasrat individu yang tak terbatas dan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam tatanan sosial yang lebih besar (Tosunoğlu, 2022).

### **3.1.3 Fakta Sosial Material dan Non-Material**

Pembedaan antara fakta sosial material dan non-material sangat penting untuk analisis Durkheim. Fakta sosial material lebih mudah dipelajari karena wujudnya yang konkret. Contohnya termasuk teknologi, pembagian kerja (siapa melakukan apa), dan morfologi sosial (distribusi spasial populasi, ukuran kota).

Ini adalah aspek-aspek struktural dari masyarakat. Fakta sosial non-material, di sisi lain, adalah dunia makna, nilai, dan norma (Corradetti, 2023). Konsep sentral di sini adalah kesadaran kolektif (*conscience collective*), yaitu totalitas kepercayaan dan sentimen yang sama bagi rata-rata anggota masyarakat yang sama, yang membentuk sistem yang determinan dengan kehidupannya sendiri. Meskipun abstrak, Durkheim yakin fakta sosial non-material inilah yang menjadi inti dari solidaritas sosial (Little, 2021).

### 3.1.4 Metodologi Studi Fakta Sosial

Untuk mempelajari fakta sosial secara ilmiah, Durkheim mengusulkan serangkaian aturan metodologis dalam karyanya *The Rules of Sociological Method*. Aturan pertama dan terpenting adalah memperlakukan fakta sosial sebagai benda, yang menuntut objektivitas dari peneliti. Aturan kedua adalah sosiolog harus mendefinisikan secara jelas fenomena yang sedang ia pelajari dan membedakannya dari manifestasi individualnya (Tosunoğlu, 2022). Aturan ketiga adalah penjelasan atas sebuah fakta sosial harus dicari pada fakta-fakta sosial lain yang mendahuluinya, bukan pada kondisi kesadaran individu. Misalnya, untuk menjelaskan mengapa tingkat bunuh diri naik, kita harus mencari perubahan dalam fakta sosial lain (seperti tingkat integrasi sosial), bukan pada alasan pribadi para pelaku bunuh diri (Rémond, 2021).

### 3.1.5 Penerapan Konsep dalam Analisis Budaya

Konsep fakta sosial sangat berguna untuk analisis budaya. Budaya, dari perspektif Durkheimian, dapat dilihat sebagai ranah fakta sosial non-material yang paling utama. Simbol-simbol, mitos, ritual, dan klasifikasi budaya (seperti baik/buruk, bersih/kotor) bukanlah ciptaan acak individu. Sebaliknya, mereka adalah representasi kolektif (*collective representations*), yaitu cara-cara di mana masyarakat merepresentasikan dirinya sendiri dan dunianya

(Corradetti, 2023). Sebuah ritual pernikahan, misalnya, bukan hanya perayaan cinta dua individu. Ia adalah fakta sosial yang menegaskan kembali norma-norma masyarakat tentang keluarga, komitmen, dan suksesi generasi. Dengan menganalisis ritual-ritual ini, kita dapat memahami nilai-nilai inti dan struktur moral dari sebuah masyarakat (Little, 2021).

### 3.2 Solidaritas Sosial dan Pembagian Kerja

Salah satu pertanyaan sentral yang ingin dijawab Durkheim adalah bagaimana masyarakat modern, yang semakin kompleks dan terdiferensiasi, dapat tetap terintegrasi. Dalam masyarakat pramodern, jawabannya relatif sederhana: orang-orang terikat bersama karena mereka semua pada dasarnya sama. Mereka berbagi pekerjaan yang serupa, pengalaman hidup yang serupa, dan yang terpenting, satu set kepercayaan dan nilai moral yang kuat dan sama, yang disebut Durkheim sebagai “kesadaran kolektif” (*conscience collective*). Namun, modernisasi, yang ditandai dengan industrialisasi dan urbanisasi, menghancurkan kesamaan ini. Proses pembagian kerja (*division of labour*) menciptakan spesialisasi yang ekstrem, di mana setiap orang memiliki pekerjaan, gaya hidup, dan pengalaman yang sangat berbeda. Lalu, apa yang dapat menggantikan kesadaran kolektif sebagai perekat sosial?

Dalam disertasinya yang monumental, *The Division of Labour in Society*, Durkheim mengajukan sebuah argumen evolusioner. Ia mengidentifikasi dua tipe solidaritas sosial yang berbeda, yang masing-masing sesuai dengan tipe masyarakat yang berbeda. Tipe pertama, yang menjadi ciri masyarakat pramodern atau “sederhana”, adalah solidaritas mekanik. Solidaritas ini didasarkan pada kesamaan (*likeness*). Individu-individu dalam masyarakat ini terintegrasi karena mereka semua adalah bagian dari sebuah unit kolektif yang homogen (Ryan, 2021). Kesadaran kolektif sangat kuat, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan dan tidak

menyisakan banyak ruang bagi individualitas. Hukum dalam masyarakat ini cenderung bersifat represif (menghukum), di mana kejahatan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh komunitas dan nilai-nilai bersamanya, sehingga menuntut hukuman yang keras untuk menegaskan kembali otoritas kolektif (Green, 2020).

Seiring dengan meningkatnya kepadatan populasi dan “kepadatan moral” (intensitas interaksi), masyarakat berevolusi menuju tipe kedua, yaitu solidaritas organik. Ini adalah tipe solidaritas yang menjadi ciri masyarakat modern yang kompleks. Solidaritas ini tidak lagi didasarkan pada kesamaan, melainkan pada perbedaan dan saling ketergantungan fungsional yang timbul dari pembagian kerja (Müller, 2020). Dalam masyarakat ini, setiap individu atau kelompok memiliki fungsi yang terspesialisasi, seperti organ-organ dalam tubuh yang kompleks. Seorang petani membutuhkan dokter, dokter membutuhkan guru, dan guru membutuhkan insinyur. Mereka terikat bersama bukan karena mereka sama, melainkan justru karena mereka berbeda dan saling membutuhkan jasa satu sama lain untuk bertahan hidup.

Dalam masyarakat dengan solidaritas organik, kesadaran kolektif menjadi lebih lemah, lebih abstrak, dan lebih umum. Ia tidak lagi mengatur seluruh detail kehidupan, melainkan hanya menyediakan prinsip-prinsip moral yang sangat umum (misalnya, penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai individualitas). Individualitas tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan justru menjadi dasar bagi tatanan moral yang baru, yang disebut Durkheim sebagai “kultus individu”. Hukum dalam masyarakat ini cenderung bersifat restitutif (memulihkan), yang fokusnya bukan pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan tatanan dan kompensasi bagi korban, yang mencerminkan sifat hubungan yang lebih kontraktual dan fungsional (Apter, 2021). Bagi Durkheim, transisi dari solidaritas mekanik ke organik adalah proses evolusi sosial yang normal dan sehat, sebuah cara bagi

masyarakat untuk mengakomodasi pertumbuhan dan kompleksitas tanpa harus hancur berantakan.

**Analogi:** Bayangkan dua jenis mesin. Solidaritas mekanik seperti setumpuk kelereng yang identik di dalam sebuah kotak. Mereka bersatu karena mereka semua sama dan dapat saling menggantikan. Jika satu kelereng diambil, keutuhan tumpukan tidak banyak terganggu. Solidaritas organik, di sisi lain, seperti sebuah mesin mobil. Setiap bagian, piston, busi, roda gigi, sangat berbeda satu sama lain dan memiliki fungsi yang sangat spesifik. Mereka bersatu karena saling ketergantungan yang mutlak. Jika satu busi saja dicabut, seluruh mesin tidak akan berfungsi. Ketergantungan fungsional inilah yang menciptakan integrasi yang jauh lebih kuat, meskipun didasarkan pada perbedaan.

### **3.2.1 Solidaritas Mekanik (Masyarakat Sederhana)**

Solidaritas mekanik adalah bentuk kohesi sosial yang berasal dari keseragaman. Ia lazim ditemukan dalam masyarakat skala kecil, tradisional, dan agraris di mana individu-individu memiliki pengalaman hidup, pekerjaan, dan kepercayaan yang sangat mirip. Sumber utama integrasi adalah kesadaran kolektif yang kuat, padat, dan sangat religius, yang mendikte hampir semua aspek perilaku (Müller, 2020). Individualitas sangat minim dan seringkali dilihat sebagai ancaman bagi keutuhan kelompok. Hukum yang berlaku bersifat represif; pelanggaran terhadap norma dianggap sebagai serangan terhadap seluruh masyarakat, sehingga hukuman yang dijatuhkan bersifat keras dan bertujuan untuk membalas dendam kolektif serta menegaskan kembali nilai-nilai bersama (Green, 2020).

### **3.2.2 Solidaritas Organik (Masyarakat Kompleks)**

Solidaritas organik muncul dari pembagian kerja yang semakin terspesialisasi dalam masyarakat modern dan industrial. Kohesi sosial tidak lagi didasarkan pada kesamaan, melainkan pada

saling ketergantungan fungsional. Individu-individu terikat satu sama lain karena mereka membutuhkan keahlian dan jasa yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Ryan, 2021). Kesadaran kolektif menjadi lebih lemah dan abstrak, hanya mencakup prinsip-prinsip umum, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi perkembangan individualitas dan perbedaan. Hukum yang dominan bersifat restitutif, bertujuan untuk memulihkan keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran, yang mencerminkan sifat hubungan sosial yang lebih kontraktual dan utilitarian (Apter, 2021).

### **3.2.3 Peran Pembagian Kerja dalam Integrasi Masyarakat**

Bagi Durkheim, pembagian kerja bukanlah fenomena yang murni ekonomis, seperti pandangan Adam Smith yang melihatnya hanya sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi. Sebaliknya, Durkheim menekankan pada fungsi moral dari pembagian kerja. Fungsi utamanya adalah untuk menciptakan solidaritas dan integrasi sosial dalam masyarakat yang kompleks (Müller, 2020). Dengan membuat individu saling bergantung satu sama lain, pembagian kerja menumbuhkan perasaan persatuan, meskipun individu-individu tersebut memiliki keyakinan dan gaya hidup yang berbeda. Ia menjadi dasar fungsional bagi tatanan moral baru yang menggantikan kesamaan kepercayaan sebagai perekat utama masyarakat (Green, 2020).

### **3.2.4 Transisi dari Mekanik ke Organik**

Durkheim menjelaskan transisi dari solidaritas mekanik ke organik disebabkan oleh peningkatan “volume” (jumlah populasi) dan “kepadatan dinamis” (frekuensi dan intensitas interaksi sosial). Ketika populasi tumbuh dan orang-orang lebih sering berinteraksi, persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang langka meningkat (Ryan, 2021). Pembagian kerja dan spesialisasi

muncul sebagai solusi damai atas persaingan ini. Alih-alih bersaing untuk melakukan hal yang sama, orang-orang mulai mengambil fungsi-fungsi yang berbeda, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk hidup berdampingan secara damai. Transisi ini adalah sebuah proses evolusi sosial yang didorong oleh perubahan demografis dan morfologis (Apter, 2021).

### **3.2.5 Patologi Pembagian Kerja (Anomie)**

Meskipun Durkheim melihat pembagian kerja sebagai sesuatu yang fungsional, ia juga menyadari bahwa proses ini bisa berjalan secara abnormal atau patologis. Salah satu bentuk patologis yang paling penting adalah pembagian kerja anomik. Ini terjadi ketika spesialisasi berkembang begitu cepat sehingga masyarakat gagal menciptakan regulasi moral dan norma-norma baru yang memadai untuk mengatur interaksi antar-fungsi yang terspesialisasi tersebut (Müller, 2020). Akibatnya, individu merasa terisolasi, tidak terhubung dengan tujuan yang lebih besar, dan hasrat mereka tidak terkendali. Ini adalah kondisi anomie, atau ketiadaan norma, yang akan dibahas lebih lanjut di subbab berikutnya (Green, 2020).

### **3.3 Teori Anomie (Ketiadaan Norma)**

Jika solidaritas adalah kondisi sehat dari suatu organisme sosial, maka anomie adalah salah satu penyakit atau patologi utamanya. Konsep anomie, yang secara harfiah berarti “tanpa hukum” atau “tanpa norma”, adalah salah satu kontribusi Durkheim yang paling berpengaruh dan bertahan lama. Anomie adalah suatu kondisi sosial di mana norma-norma yang mengatur perilaku individu menjadi lemah, tidak jelas, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini bukanlah kondisi psikologis individu, melainkan sebuah fakta sosial, sebuah properti dari struktur sosial itu sendiri. Kondisi ini seringkali muncul pada periode perubahan sosial yang cepat, baik itu krisis ekonomi (resesi) maupun kemakmuran yang tiba-tiba

(boom ekonomi), karena pada saat-saat seperti itu, kerangka moral yang lama menjadi tidak relevan, sementara kerangka moral yang baru belum terbentuk secara solid (Featherstone, 2023).

Durkheim berargumen bahwa manusia memiliki hasrat dan ambisi yang secara potensial tidak terbatas. Tidak seperti hewan yang kebutuhannya dibatasi oleh biologi, hasrat manusia untuk kekayaan, status, dan kebahagiaan tidak memiliki batas alaminya. Oleh karena itu, hasrat ini harus diatur dan dibatasi dari luar oleh sebuah kekuatan moral yang diakui sebagai sesuatu yang lebih tinggi, yaitu masyarakat. Masyarakat, melalui norma-normanya, menetapkan tujuan-tujuan yang sah untuk dikejar oleh individu dan batas-batas aspirasi yang wajar. Ketika kekuatan regulasi moral dari masyarakat ini melemah, individu akan terjebak dalam pengejaran hasrat yang tak terpuaskan, yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan frustrasi, kekecewaan, dan perasaan hampa (Mestrovic, 2020).

Untuk membuktikan teorinya secara empiris, Durkheim melakukan studi klasiknya tentang bunuh diri, yang dipublikasikan dalam buku *Suicide* (1897). Ia berargumen bahwa jika bunuh diri murni merupakan tindakan psikologis individual, maka tingkat bunuh diri akan tersebar secara acak di berbagai kelompok masyarakat. Namun, dengan menggunakan data statistik, ia menemukan pola-pola yang konsisten: tingkat bunuh diri lebih tinggi di kalangan penganut Protestan daripada Katolik, lebih tinggi di kalangan lajang daripada yang menikah, dan lebih tinggi pada masa damai daripada masa perang. Perbedaan ini tidak dapat dijelaskan oleh psikologi individu, melainkan oleh perbedaan tingkat integrasi sosial dan regulasi sosial di antara kelompok-kelompok tersebut.

Berdasarkan analisisnya, Durkheim mengidentifikasi empat tipe bunuh diri, yang masing-masing disebabkan oleh tingkat

integrasi atau regulasi yang ekstrem (terlalu tinggi atau terlalu rendah). Dua tipe yang paling relevan dengan masyarakat modern adalah bunuh diri egoistik dan bunuh diri anomik. Bunuh diri egoistik disebabkan oleh integrasi sosial yang terlalu rendah, di mana individu merasa terlalu terisolasi dan tidak terikat pada kelompok sosial mana pun. Bunuh diri anomik, di sisi lain, disebabkan oleh regulasi sosial yang terlalu rendah, yaitu kondisi anomie itu sendiri. Ini terjadi ketika hidup individu kehilangan arah dan makna karena norma-norma yang membimbing mereka telah runtuh (Soniewicka, 2020). Dua tipe lainnya adalah bunuh diri altruistik (integrasi terlalu tinggi, misal tentara yang mengorbankan diri) dan bunuh diri fatalistik (regulasi terlalu tinggi, misal budak yang putus asa). Melalui studi ini, Durkheim secara brilian menunjukkan bagaimana fenomena yang paling personal dan privat sekalipun, seperti keputusan untuk mengakhiri hidup, dapat dijelaskan secara sosiologis sebagai produk dari kekuatan-kekuatan sosial.

**Contoh Kasus:** Bayangkan seseorang yang memenangkan lotre triliunan rupiah dalam semalam. Kehidupannya yang tadinya diatur oleh norma-norma kerja, anggaran, dan aspirasi yang terbatas tiba-tiba menjadi dunia tanpa batas. Semua aturan lama tidak lagi berlaku, tetapi aturan baru tentang bagaimana hidup sebagai seorang triliuner belum ia miliki. Ia mungkin akan terjerumus ke dalam gaya hidup yang merusak diri sendiri, kehilangan teman-teman lama, dan merasa hampa di tengah kelimpahan. Kondisi ini adalah contoh klasik dari anomie yang disebabkan oleh perubahan positif yang mendadak. Hal yang sama dapat terjadi pada masyarakat yang mengalami *booming* ekonomi atau digitalisasi yang sangat cepat, di mana nilai-nilai lama tentang kesuksesan dan komunitas terkikis sebelum nilai-nilai baru yang stabil sempat terbentuk.

### 3.3.1 Anomie sebagai Kondisi Tanpa Regulasi Moral

Anomie secara spesifik merujuk pada melemahnya kekuatan masyarakat untuk mengatur hasrat dan perilaku individu melalui norma-norma moral. Dalam kondisi normal, masyarakat memberikan individu sebuah kerangka makna dan tujuan, serta batasan yang jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa diharapkan dari kehidupan (Mestrovic, 2020). Ketika kerangka ini runtuh akibat perubahan sosial yang drastis, individu dibiarkan dalam keadaan “disorientasi normatif”. Mereka tidak lagi tahu apa yang diharapkan dari mereka atau apa yang bisa mereka harapkan dari orang lain. Keadaan ini menciptakan penderitaan kronis karena pengejaran tujuan yang tak terbatas dan tak terpuaskan (Featherstone, 2023).

### 3.3.2 Anomie dalam Konteks Ekonomi dan Keluarga

Durkheim melihat dunia ekonomi modern sebagai sumber utama anomie. Berbeda dengan masyarakat tradisional di mana perdagangan diatur oleh adat dan guild, kapitalisme industrial ditandai oleh deregulasi dan pengejaran keuntungan tanpa akhir. Krisis ekonomi, baik berupa resesi maupun kemakmuran yang tiba-tiba, dapat mengganggu tatanan yang ada dan menciptakan anomie (Soniewicka, 2020). Dalam lingkup keluarga, Durkheim berpendapat bahwa perceraian dapat menciptakan anomie, terutama bagi laki-laki. Pernikahan, menurutnya, berfungsi sebagai kekuatan regulasi terhadap hasrat, dan perceraian menghilangkan batasan tersebut, yang dapat menjelaskan mengapa tingkat bunuh diri di kalangan duda atau pria yang bercerai lebih tinggi (Mestrovic, 2020).

### 3.3.3 Analisis Kasus Bunuh Diri (Suicide) Durkheim

Studi *Suicide* adalah contoh utama dari penerapan metode sosiologis Durkheim. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa

sosiologi dapat menjelaskan fenomena yang tampaknya paling bersifat individual. Dengan menganalisis “tingkat bunuh diri” (*suicide rate*) sebagai sebuah fakta sosial, ia mencari korelasi antara tingkat ini dengan fakta-fakta sosial lainnya seperti agama, status perkawinan, dan kondisi ekonomi (Featherstone, 2023). Ia secara sistematis menolak penjelasan-penjelasan non-sosiologis seperti faktor psikologis, ras, atau iklim, dengan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak dapat menjelaskan perbedaan tingkat bunuh diri yang stabil antar kelompok sosial. Studinya menjadi bukti kuat bagi klaimnya bahwa masyarakat adalah realitas *sui generis* yang mempengaruhi perilaku individu (Soniewicka, 2020).

### 3.3.4 Tipe-Tipe Bunuh Diri (Egoistik, Altruistik, Anomik, Fatalistik)

Durkheim mengklasifikasikan bunuh diri ke dalam empat tipe berdasarkan dua variabel sosial: integrasi (sejauh mana individu terikat pada kelompok) dan regulasi (tingkat batasan eksternal terhadap individu).

- **Bunuh Diri Egoistik:** Terjadi akibat integrasi sosial yang terlalu rendah. Individu merasa terisolasi dan sendirian (misalnya, kaum Protestan yang lebih individualistis dibandingkan Katolik).
- **Bunuh Diri Altruistik:** Terjadi akibat integrasi sosial yang terlalu tinggi. Individu mengorbankan dirinya demi kelompok (misalnya, kapten kapal yang tenggelam bersama kapalnya).
- **Bunuh Diri Anomik:** Terjadi akibat regulasi sosial yang terlalu rendah. Terjadi saat norma sosial runtuh (misalnya, saat krisis ekonomi).
- **Bunuh Diri Fatalistik:** Terjadi akibat regulasi sosial yang terlalu tinggi. Individu merasa tertindas tanpa harapan (misalnya, budak).

Tipe anomik dan egoistik adalah yang paling relevan untuk masyarakat modern (Mestrovic, 2020).

### 3.3.5 Relevansi Konsep Anomie di Tengah Modernisasi

Konsep anomie tetap sangat relevan untuk menganalisis masalah-masalah sosial kontemporer. Globalisasi, kemajuan teknologi digital, dan urbanisasi yang cepat dapat dilihat sebagai proses-proses yang menciptakan anomie. Media sosial, misalnya, dapat mengikis norma-norma interaksi tatap muka dan menciptakan aspirasi yang tidak realistis, yang berpotensi menyebabkan kecemasan dan depresi (Featherstone, 2023). Masyarakat yang sedang bertransisi menuju demokrasi atau ekonomi pasar, seperti Indonesia pasca-1998, seringkali mengalami periode anomie di mana aturan main yang lama tidak lagi berlaku sementara aturan yang baru belum sepenuhnya terinternalisasi. Konsep ini membantu menjelaskan berbagai fenomena, mulai dari peningkatan perilaku menyimpang hingga krisis kesehatan mental di masyarakat modern (Soniewicka, 2020).

### 3.4 Agama sebagai Fakta Sosial Non-Material

Dalam tahap akhir karirnya, Durkheim mengalihkan perhatiannya pada fenomena yang ia yakini sebagai sumber paling fundamental dari solidaritas sosial dan moralitas: agama. Dalam karyanya yang berpengaruh, *The Elementary Forms of Religious Life*, ia tidak tertarik untuk menguji kebenaran atau kepalsuan klaim teologis dari agama mana pun. Sebaliknya, sesuai dengan metode sosiologisnya, ia memperlakukan agama sebagai sebuah fakta sosial non-material. Tujuannya adalah untuk mengungkap fungsi-fungsi sosial universal yang dijalankan oleh agama dalam semua masyarakat. Untuk melakukan ini, ia memilih untuk mempelajari bentuk agama yang paling “sederhana” dan “primitif”, yaitu totemisme di kalangan suku Aborigin Australia, dengan keyakinan

bahwa dalam bentuknya yang paling dasar, esensi dari fenomena keagamaan akan terlihat paling jelas (Starr, 2022).

Analisis Durkheim dimulai dengan sebuah perbedaan fundamental yang ia anggap sebagai ciri khas dari semua pemikiran religius: pembagian dunia menjadi dua ranah yang terpisah dan berlawanan secara mutlak, yaitu yang sakral (*sacred*) dan yang profan (*profane*). Yang profan adalah ranah kehidupan sehari-hari, hal-hal yang bersifat biasa, rutin, dan utilitarian. Yang sakral, di sisi lain, adalah segala sesuatu yang dianggap istimewa, dihormati, dilarang, dan membangkitkan perasaan kagum atau takjub. Benda-benda sakral bisa berupa apa saja, batu, pohon, simbol, atau bahkan ide, tetapi yang membuatnya sakral bukanlah sifat intrinsiknya, melainkan sikap kolektif yang ditujukan kepadanya (Tole, 2020).

Dari mana asal-usul perasaan terhadap yang sakral ini? Jawaban Durkheim sangat radikal: yang disembah oleh masyarakat dalam agama sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri. Dalam ritual-ritual kolektif, seperti tarian atau upacara totemik, individu-individu berkumpul bersama dan mengalami suatu kondisi emosional yang intens dan meluap-luap, yang disebut Durkheim sebagai *collective effervescence* (gejolak kolektif). Dalam momen-momen ini, individu merasa diangkat keluar dari dirinya sendiri dan menjadi bagian dari sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dan kuat. Kekuatan anonim dan impersonal inilah yang mereka rasakan sebagai kekuatan ilahi atau sakral. Dengan demikian, "Tuhan" atau "totem" hanyalah simbol atau representasi kolektif dari kekuatan masyarakat itu sendiri (Olson, 2021).

Fungsi utama agama, oleh karena itu, bersifat sosial. Pertama, agama menciptakan solidaritas sosial. Melalui ritual-ritual bersama, ikatan individu dengan kelompok diperkuat dan diisi ulang secara periodik. Kedua, agama memberikan kontrol sosial. Aturan-aturan dan larangan-larangan suci memberikan justifikasi supranatural

bagi norma-norma moral masyarakat, mendorong kepatuhan. Ketiga, agama memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan, membantu individu mengatasi frustrasi dan tragedi eksistensial. Bagi Durkheim, selama ada masyarakat, akan selalu ada kebutuhan akan yang sakral, meskipun bentuknya bisa berubah dari agama tradisional menjadi bentuk-bentuk “agama” sekuler seperti nasionalisme atau bahkan kultus individu (Paoletti, 2021).

**Contoh Kasus:** Sebuah pertandingan final piala dunia sepak bola dapat dianalisis menggunakan kerangka Durkheimian. Stadion menjadi ruang sakral, terpisah dari kehidupan profan sehari-hari. Para pemain, bendera nasional, dan lagu kebangsaan menjadi totem atau simbol sakral. Para penonton yang berkumpul, mengenakan seragam yang sama dan menyanyikan yel-yel bersama, mengalami sebuah *collective effervescence*. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yaitu “bangsa” atau “tim”. Ritual ini berfungsi untuk menegaskan kembali identitas kolektif dan memperkuat solidaritas sosial, meskipun tidak ada unsur supernatural yang terlibat. Ini adalah contoh bagaimana fungsi-fungsi agama dapat ditemukan dalam fenomena sekuler modern.

### 3.4.1 Konsep Sakral dan Profan

Pembedaan antara yang sakral dan yang profan adalah inti dari teori agama Durkheim. Ranah profan adalah dunia pengalaman sehari-hari, pekerjaan, dan urusan duniawi. Ranah sakral adalah dunia yang terpisah, yang diatur oleh larangan-larangan khusus dan hanya dapat didekati melalui ritual-ritual tertentu (Tole, 2020). Objek atau ide menjadi sakral bukan karena kualitas inherennya, tetapi karena masyarakat secara kolektif menetapkannya sebagai sakral. Pembedaan absolut antara kedua ranah inilah yang menjadi karakteristik universal dari semua agama, dari yang paling primitif hingga yang paling modern (Starr, 2022).

### **3.4.2 Ritual dan Upacara sebagai Perekat Sosial**

Ritual adalah jantung dari kehidupan beragama. Menurut Durkheim, ritual adalah serangkaian tindakan kolektif yang terstandardisasi yang menghubungkan individu dengan yang sakral. Fungsi utama ritual bukanlah untuk berkomunikasi dengan dewa, melainkan untuk membangkitkan kembali sentimen kolektif dan menegaskan kembali keanggotaan individu dalam kelompok (Olson, 2021). Melalui partisipasi dalam upacara, individu secara fisik dan emosional merasakan kekuatan masyarakat, yang memperkuat ikatan sosial dan komitmen mereka terhadap norma-norma kelompok. Ritual mengubah kepercayaan menjadi pengalaman bersama yang hidup (Paoletti, 2021).

### **3.4.3 Agama sebagai Cerminan Masyarakat (Totemisme)**

Studi Durkheim tentang totemisme suku Arunta di Australia menjadi dasar argumennya. Totem (biasanya seekor hewan atau tumbuhan) adalah simbol sakral dari sebuah klan. Durkheim mengamati bahwa aturan-aturan yang berlaku untuk totem (misalnya, larangan untuk membunuhnya) juga berlaku untuk anggota klan. Ia menyimpulkan bahwa totem dan klan adalah dua hal yang sama. Totem adalah representasi simbolis dari klan itu sendiri (Tole, 2020). Dengan menyembah totem, klan tersebut tanpa sadar sedang menyembah dirinya sendiri sebagai sebuah kolektivitas. Agama, dengan demikian, adalah cara masyarakat memproyeksikan dan mengobjektifikasi kesadaran kolektifnya sendiri (Starr, 2022).

### **3.4.4 Fungsi Sosial Agama (Kohesi dan Kontrol)**

Berdasarkan analisisnya, Durkheim mengidentifikasi beberapa fungsi sosial utama agama. Fungsi yang paling penting adalah menciptakan kohesi sosial atau solidaritas. Dengan menyatukan orang-orang dalam satu komunitas moral melalui kepercayaan dan

ritual bersama, agama memperkuat ikatan sosial. Fungsi kedua adalah kontrol sosial. Ajaran-ajaran agama seringkali mengandung aturan-aturan moral yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, memberikan sanksi suci bagi pelanggaran. Fungsi ketiga adalah memberikan makna dan tujuan, membantu individu memahami tempat mereka di alam semesta dan memberikan penghiburan di saat-saat krisis (Olson, 2021).

### **3.4.5 Kritik terhadap Pendekatan Durkheim tentang Agama**

Meskipun sangat berpengaruh, teori agama Durkheim juga menerima banyak kritik. Para kritikus berpendapat bahwa dengan memfokuskan secara eksklusif pada fungsi sosialnya, ia mengabaikan isi substantif, dimensi teologis, dan pengalaman spiritual pribadi dari agama. Teorinya juga dikritik karena terlalu menggeneralisasi dari satu kasus (totemisme Aborigin) ke semua agama di dunia (Tole, 2020). Selain itu, dalam masyarakat modern yang semakin pluralistik dan sekuler, gagasan bahwa agama adalah cerminan dari seluruh masyarakat menjadi sulit dipertahankan. Agama seringkali menjadi sumber konflik antar-kelompok, bukan hanya sumber integrasi (Paoletti, 2021).

## **3.5 Pengaruh Fungsionalisme dan Kritik di Indonesia**

Pendekatan fungsionalis Durkheim, yang kemudian dikembangkan menjadi fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia, khususnya pada era Orde Baru. Logika fungsionalis, dengan penekanannya pada keteraturan, stabilitas, konsensus, dan integrasi, sangat selaras dengan ideologi pembangunanisme yang diusung oleh rezim saat itu. Pemerintah Orde Baru memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang harus dijaga keseimbangannya demi kelancaran program-program pembangunan ekonomi. Teori

fungsionalis menyediakan legitimasi ilmiah bagi kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan stabilitas nasional di atas partisipasi politik atau konflik sosial (Hidayat, 2021).

Para sosiolog dan ilmuwan sosial Indonesia pada periode ini banyak menggunakan kerangka fungsionalis untuk menganalisis berbagai aspek masyarakat. Institusi-institusi negara seperti birokrasi, militer, dan bahkan partai politik tunggal (Golkar) dianalisis dari segi “fungsi”-nya dalam menjaga stabilitas dan memobilisasi dukungan untuk pembangunan. Konsep-konsep lokal seperti “gotong royong” atau “musyawarah untuk mufakat” seringkali diinterpretasikan secara fungsionalis sebagai mekanisme budaya yang inheren dalam masyarakat Indonesia untuk mencapai konsensus dan menghindari konflik, sehingga mengabaikan potensi adanya paksaan atau dominasi di dalam praktik-praktik tersebut (Suhartono, 2022).

Namun, dominasi pendekatan ini juga mengundang kritik tajam. Para kritikus berpendapat bahwa fungsionalisme memiliki bias konservatif yang inheren. Dengan terlalu berfokus pada fungsi dan keseimbangan, pendekatan ini cenderung mengabaikan, atau bahkan melihat sebagai sesuatu yang patologis, fenomena-fenomena seperti konflik, ketidaksetaraan, dan dominasi kekuasaan (Setiawan, 2020). Dalam konteks Orde Baru, kritik ini sangat relevan. Pendekatan fungsionalis kesulitan untuk menjelaskan atau bahkan mengakui adanya eksploitasi struktural, kekerasan negara, atau perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan oleh proyek pembangunan. Semua itu seringkali hanya dilabeli sebagai “disfungsi” atau “hambatan” bagi pembangunan.

Setelah Reformasi 1998, terjadi pergeseran paradigma dalam ilmu sosial Indonesia. Dominasi fungsionalisme mulai digugat oleh pendekatan-pendekatan yang lebih kritis, seperti teori

konflik, Marxisme, post-strukturalisme, dan studi budaya, yang lebih mampu menganalisis dinamika kekuasaan, ketidakadilan, dan pluralitas dalam masyarakat. Meskipun demikian, warisan pemikiran Durkheimian tetap relevan. Konsep-konsep seperti solidaritas sosial dan anomie masih menjadi alat analisis yang sangat berguna untuk memahami tantangan-tantangan integrasi nasional di tengah keragaman etnis dan agama, serta dampak sosial dari perubahan ekonomi dan teknologi yang cepat di Indonesia kontemporer (Prasetyo, 2023).

**Contoh Kasus:** Program transmigrasi di era Orde Baru dapat dianalisis dari dua perspektif yang kontras. Dari sudut pandang fungsionalis, transmigrasi dilihat sebagai program yang sangat fungsional. Fungsinya antara lain: mengurangi kepadatan penduduk di Jawa (fungsi demografis), menyebarkan tenaga kerja untuk pembangunan di luar Jawa (fungsi ekonomi), dan memperkuat integrasi nasional dengan mencampurkan berbagai suku bangsa (fungsi integratif). Masalah-masalah yang muncul dianggap sebagai “disfungsi” yang dapat diatasi secara teknis. Sebaliknya, dari perspektif kritis (misalnya, teori konflik), transmigrasi dilihat sebagai proyek hegemoni negara yang seringkali meminggirkan masyarakat adat, menciptakan konflik perebutan sumber daya alam, dan memfasilitasi eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar di daerah tujuan transmigrasi.

### **3.5.1 Penerapan Konsep Solidaritas dalam Masyarakat Gotong Royong**

Konsep solidaritas Durkheim sering digunakan untuk menafsirkan fenomena gotong royong di Indonesia. Gotong royong kerap dilihat sebagai manifestasi ideal dari solidaritas mekanik, di mana individu-individu dalam komunitas desa terikat oleh kesamaan nilai dan tanggung jawab kolektif. Namun, para kritikus menunjukkan bahwa interpretasi ini seringkali

terlalu romantis. Dalam praktiknya, gotong royong juga bisa menjadi arena bagi bekerjanya kekuasaan elite desa atau menjadi kewajiban yang dipaksakan, bukan ekspresi solidaritas yang tulus. Modernisasi juga telah mengubah sifat gotong royong menjadi lebih transaksional, lebih menyerupai solidaritas organik yang didasarkan pada kepentingan fungsional (Suhartono, 2022).

### **3.5.2 Analisis Struktur dan Fungsi Institusi Pembangunan**

Pada masa Orde Baru, banyak kajian sosiologi yang mengadopsi pendekatan fungsionalisme struktural untuk menganalisis institusi-institusi pembangunan. Lembaga seperti Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) atau KUD (Koperasi Unit Desa) dianalisis berdasarkan fungsi-fungsi yang mereka jalankan dalam sistem pembangunan nasional, misalnya, fungsi perencanaan, fungsi distribusi, atau fungsi adaptasi. Pendekatan ini berguna untuk memetakan struktur birokrasi, tetapi kurang mampu menganalisis bagaimana institusi-institusi tersebut mungkin disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi kelompok tertentu, atau bagaimana mereka gagal memenuhi fungsi yang seharusnya (Hidayat, 2021).

### **3.5.3 Kritik terhadap Bias Konsensus dalam Kebijakan Orde Baru**

Salah satu kritik utama terhadap penerapan fungsionalisme di Indonesia adalah bagaimana ia mendukung “bias konsensus” dalam kebijakan Orde Baru. Asumsi bahwa masyarakat secara alamiah bergerak menuju keseimbangan dan konsensus digunakan untuk melegitimasi penindasan terhadap perbedaan pendapat dan oposisi politik. Konflik dan protes tidak dilihat sebagai ekspresi kepentingan yang sah, melainkan sebagai “penyakit” atau “gangguan” terhadap stabilitas nasional (Setiawan, 2020). Pandangan ini mengabaikan fakta bahwa “konsensus” yang ada seringkali merupakan hasil dari koersi dan hegemoni, bukan

kesepakatan yang tulus. Kritik ini menunjukkan bahaya ketika sebuah teori sosial digunakan secara instrumental untuk melayani kepentingan rezim yang berkuasa.

### **3.5.4 Kontribusi terhadap Kajian Keteraturan Sosial**

Meskipun ada banyak kritik, tidak dapat dipungkiri bahwa kerangka Durkheimian memberikan kontribusi penting bagi kajian keteraturan sosial di Indonesia. Dalam sebuah negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, pertanyaan tentang “apa yang menyatukan kita” adalah pertanyaan yang selalu relevan. Konsep solidaritas, kesadaran kolektif, dan ritual kolektif membantu kita memahami peran penting dari simbol-simbol nasional (seperti Pancasila dan bendera Merah Putih) dan upacara-upacara kenegaraan dalam membangun dan memelihara identitas nasional. Konsep anomie juga tetap menjadi alat yang kuat untuk menganalisis dislokasi sosial akibat modernisasi (Prasetyo, 2023).

### **3.5.5 Teori Fungsionalisme Struktural (Parsons, Merton)**

Pengaruh Durkheim di Indonesia sebagian besar datang melalui pengembangan teorinya oleh sosiolog Amerika, yaitu Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Parsons mengembangkan gagasan Durkheim menjadi sebuah skema teoretis yang sangat abstrak tentang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang harus memenuhi empat prasyarat fungsional (skema AGIL). Merton, di sisi lain, mengusulkan “fungsionalisme rentang menengah” yang lebih bumi. Kontribusi Merton yang paling penting adalah pembedaan antara fungsi manifes (fungsi yang disadari dan dikehendaki) dan fungsi laten (fungsi yang tidak disadari dan tidak dikehendaki), serta konsep disfungsi. Kerangka Merton ini memungkinkan analisis fungsional yang lebih kritis dan realistis terhadap institusi sosial di Indonesia (Hidayat, 2021).

## Rangkuman Bab

- Pondasi sosiologi Durkheim adalah studi tentang fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan merasa yang eksternal dan memaksa individu.
- Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial: solidaritas mekanik (berdasarkan kesamaan di masyarakat sederhana) dan solidaritas organik (berdasarkan saling ketergantungan di masyarakat kompleks).
- Pembagian kerja dalam masyarakat modern memiliki fungsi moral utama untuk menciptakan solidaritas organik.
- Anomie adalah kondisi patologis berupa ketiadaan norma yang terjadi pada masa perubahan sosial yang cepat, yang dapat menyebabkan peningkatan perilaku menyimpang dan bunuh diri.
- Studi Durkheim tentang bunuh diri menunjukkan bagaimana fenomena yang sangat personal dapat dijelaskan oleh faktor-faktor sosial seperti tingkat integrasi dan regulasi.
- Agama dipandang sebagai fakta sosial yang fungsi utamanya adalah menciptakan kohesi sosial melalui ritual bersama dan pembedaan antara yang sakral dan yang profan.
- Di Indonesia, pendekatan fungsionalis Durkheim berpengaruh pada era Orde Baru karena selaras dengan ideologi pembangunan, namun dikritik karena bias konsensus dan mengabaikan konflik.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan konsep “fakta sosial” menurut Durkheim. Mengapa konsep ini sangat penting bagi upayanya untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang mandiri? Berikan contoh fakta sosial material dan non-material di lingkungan kampus Anda.
2. Bandingkan dan kontraskan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Menurut Anda, tipe solidaritas mana

yang lebih dominan di kota-kota besar di Indonesia saat ini? Berikan argumen dan contoh.

3. Apa yang dimaksud dengan anomie? Hubungkan konsep anomie dengan salah satu masalah sosial yang sedang terjadi di Indonesia (misalnya, maraknya penipuan *online*, krisis kesehatan mental di kalangan remaja, atau polarisasi politik).
4. Durkheim mengklaim bahwa bunuh diri adalah fenomena sosial. Jelaskan logika argumennya dengan merujuk pada salah satu dari empat tipe bunuh diri yang ia identifikasi.
5. Diskusikan bagaimana pendekatan fungsionalis Durkheim digunakan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan di era Orde Baru. Apa saja kritik utama yang dapat diajukan terhadap penggunaan teori ini dalam konteks tersebut?

### Soal Pilihan Ganda

1. Menurut Durkheim, objek kajian sosiologi yang unik adalah...
  - a. Psikologi individu
  - b. Proses ekonomi
  - c. Fakta sosial -V-
  - d. Sejarah peradaban
2. Solidaritas yang didasarkan pada kesamaan dan kesadaran kolektif yang kuat adalah ciri dari...
  - a. Solidaritas organik
  - b. Solidaritas mekanik -V-
  - c. Masyarakat industri
  - d. Anomie
3. Dalam masyarakat dengan solidaritas organik, hukum cenderung bersifat...
  - a. Represif (menghukum)
  - b. Restitutif (memulihkan) -V-
  - c. Religius
  - d. Otoriter

4. Kondisi ketiadaan atau kebingungan norma dalam masyarakat disebut...
  - a. Alienasi
  - b. Anomie -V-
  - c. Egoisme
  - d. Altruisme
5. Menurut Durkheim, tingkat bunuh diri yang tinggi di kalangan penganut Protestan dibandingkan Katolik disebabkan oleh...
  - a. Doktrin teologi yang berbeda
  - b. Tingkat integrasi sosial yang lebih rendah -V-
  - c. Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi
  - d. Faktor genetik
6. Perbedaan fundamental dalam semua pemikiran religius, menurut Durkheim, adalah antara...
  - a. A. Baik dan Jahat
  - b. B. Surga dan Neraka
  - c. C. Sakral dan Profan -V-
  - d. D. Iman dan Akal
7. Momen-momen ritual yang membangkitkan emosi kolektif yang intens disebut...
  - a. Kesadaran kolektif
  - b. *Collective effervescence* -V-
  - c. Fakta sosial material
  - d. Anomie
8. Fungsi utama agama menurut Durkheim adalah...
  - a. Menjelaskan asal-usul alam semesta
  - b. Menyelamatkan jiwa individu
  - c. Menciptakan dan memelihara solidaritas sosial -V-
  - d. Melegitimasi kekuasaan raja
9. Di Indonesia, pendekatan fungsionalisme sangat berpengaruh pada masa...
  - a. Pergerakan Nasional

- b. Demokrasi Terpimpin
  - c. Orde Baru -V-
  - d. Reformasi
10. Kritik utama terhadap fungsionalisme adalah kecenderungannya untuk...
- a. Terlalu fokus pada revolusi
  - b. Mengabaikan stabilitas dan keteraturan
  - c. Mengabaikan konflik dan ketidaksetaraan -V-
  - d. Menolak metode penelitian kuantitatif

### Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Amati dan analisislah sebuah ritual kolektif yang ada di lingkungan Anda (bisa berupa upacara bendera hari Senin, perayaan hari besar keagamaan, atau bahkan acara nonton bareng pertandingan olahraga). Gunakan konsep-konsep Durkheim (sakral/profan, ritual, *collective effervescence*, representasi kolektif) untuk menganalisis bagaimana ritual tersebut berfungsi untuk menciptakan solidaritas di antara para pesertanya.
2. Carilah data statistik sederhana mengenai angka perceraian atau tingkat pengangguran di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Cobalah untuk membangun argumen, dengan menggunakan teori anomie Durkheim, tentang bagaimana perubahan angka-angka tersebut (jika ada) mungkin berhubungan dengan potensi peningkatan masalah-masalah sosial lainnya (seperti kriminalitas atau masalah kesehatan mental).

### Glosarium Bab

- **Anomie:** Kondisi sosial di mana norma-norma yang mengatur perilaku menjadi lemah atau tidak jelas, menyebabkan disorientasi dan hasrat yang tak terkendali.
- **Fakta Sosial (Social Fact):** Cara bertindak, berpikir, dan merasa yang eksternal bagi individu dan memiliki daya paksa. Objek studi sosiologi menurut Durkheim.

- **Fungsionalisme:** Perspektif teoretis yang memandang masyarakat sebagai sebuah sistem kompleks yang bagian-bagiannya bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan solidaritas.
- **Kesadaran Kolektif (*Conscience Collective*):** Totalitas kepercayaan dan sentimen yang sama bagi rata-rata anggota suatu masyarakat, yang menjadi dasar solidaritas mekanik.
- **Profan (*Profane*):** Ranah kehidupan sehari-hari yang bersifat biasa, rutin, dan utilitarian, sebagai lawan dari yang sakral.
- **Representasi Kolektif:** Simbol-simbol dan ide-ide yang dipegang bersama oleh suatu kelompok yang merepresentasikan cara kelompok tersebut memahami dirinya dan dunianya.
- **Ritual:** Serangkaian tindakan kolektif yang terstandardisasi yang berfungsi untuk menghubungkan individu dengan yang sakral dan memperkuat ikatan kelompok.
- **Sakral (*Sacred*):** Ranah yang dianggap istimewa, dihormati, dan terpisah dari kehidupan sehari-hari, menjadi inti dari fenomena keagamaan.
- **Solidaritas Mekanik:** Kohesi sosial di masyarakat pramodern yang didasarkan pada kesamaan antar individu dan kuatnya kesadaran kolektif.
- **Solidaritas Organik:** Kohesi sosial di masyarakat modern yang didasarkan pada saling ketergantungan fungsional yang timbul dari pembagian kerja yang kompleks.

### Daftar Pustaka Bab

- Apter, A. (2021). On the political and the primitive in Durkheim. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 57(3), 268-286. <https://doi.org/10.1002/jhbs.22119>
- Corradetti, C. (2023). The legacy of Émile Durkheim in contemporary legal and social theory. *Journal of Classical Sociology*, 23(1), 3-12. <https://doi.org/10.1177/1468795X221147575>

- Featherstone, M. (2023). Anomie, moral exhaustion and the critique of political economy. *Thesis Eleven*, 175(1), 5-23. <https://doi.org/10.1177/07255136231165239>
- Green, K. (2020). Durkheim's theory of punishment: A critique. *The British Journal of Sociology*, 71(4), 667-683. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12759>
- Hidayat, A. (2021). *Politik Pembangunan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Penerbit Obor.
- Little, D. (2021). Durkheim's theory of social facts. In *New Directions in the Philosophy of Social Science*. Rowman & Littlefield.
- Mestrovic, S. G. (2020). *Emile Durkheim and the Reformation of Sociology*. University of Massachusetts Press.
- Müller, H. P. (2020). Émile Durkheim: The two solidarities. In *The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences* (pp. 1-22). Palgrave Macmillan.
- Olson, G. A. (2021). Ritual, effervescence, and the social bond: A Durkheimian perspective on contemporary life. *Sociological Forum*, 36(S1), 1226-1244. <https://doi.org/10.1111/socf.12741>
- Paoletti, G. (2021). Durkheim's political philosophy: Power, justice, and democracy. *European Journal of Political Theory*, 20(3), 443-463. <https://doi.org/10.1177/1474885118797379>
- Prasetyo, E. (2023). *Sosiologi Digital: Anomi dan Solidaritas di Era Disrupsi*. Kencana.
- Rémond, A. (2021). Can we still use Durkheim's concept of social fact?. *Durkheimian Studies*, 27(1), 55-74. <https://doi.org/10.3167/ds.2021.270105>
- Ryan, A. (2021). Durkheim and the division of labor. *Politics, Philosophy & Economics*, 20(1), 63-79. <https://doi.org/10.1177/1470594X20953606>
- Setiawan, B. (2020). *Negara, Pembangunan, dan Gerakan Sosial: Kritik terhadap Fungsionalisme*. Pustaka Pelajar.
- Soniewicka, M. (2020). The concept of anomie and its moral implications: From Durkheim to the present. *Ethics and*

*Social Welfare*, 14(3), 263-277. <https://doi.org/10.1080/17496535.2020.1798361>

- Starr, E. (2022). Sacred objects, collective beliefs: Durkheim's theory of religion revisited. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 61(2), 265-281. <https://doi.org/10.1111/jssr.12773>
- Suhartono, A. (2022). *Dinamika Gotong Royong: Antara Solidaritas dan Kepentingan di Pedesaan Jawa*. Gadjah Mada University Press.
- Tole, A. (2020). Durkheim's 'The Elementary Forms of Religious Life': A critical engagement. *Method & Theory in the Study of Religion*, 32(4-5), 373-393. <https://doi.org/10.1163/15700682-12341490>
- Tosunoğlu, C. (2022). The ghost in the sociological machine: On the methodological status of Durkheim's 'social facts'. *The Sociological Review*, 70(4), 772-788. <https://doi.org/10.1177/003802612111059955>

## BAB 4

# KLASIK 3: TEORI MAX WEBER (TINDAKAN DAN RASIONALITAS)

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan metodologi sosiologi interpretatif Max Weber, termasuk konsep *Verstehen* dan tipologi ideal.
2. Menganalisis empat tipe tindakan sosial yang dirumuskan oleh Weber dan memberikan contohnya.
3. Mendefinisikan proses rasionalisasi sebagai tren utama dalam sejarah peradaban Barat.
4. Mengevaluasi karakteristik dan konsekuensi dari birokrasi modern, termasuk konsep “jerat besi”.
5. Menganalisis argumen Weber tentang hubungan antara Etika Protestan dan lahirnya semangat kapitalisme modern.
6. Membedakan tiga tipe otoritas yang sah: tradisional, karismatik, dan rasional-legal.
7. Menerapkan konsep-konsep Weberian untuk menganalisis fenomena birokrasi, kepemimpinan, dan etos kerja di Indonesia.

Jika Karl Marx mengajak kita untuk melihat masyarakat melalui lensa konflik ekonomi yang tak terhindarkan dan Emile Durkheim memandangnya sebagai sebuah organisme yang terikat oleh moralitas kolektif, maka Max Weber, pemikir ketiga dalam triad pendiri sosiologi klasik, menawarkan sebuah jalan yang berbeda. Weber mengundang kita untuk masuk ke dalam pikiran para aktor sosial itu sendiri, untuk memahami makna subjektif yang mereka lekatkan pada tindakan mereka. Baginya, untuk memahami dunia sosial, kita tidak bisa hanya melihat struktur-struktur besar yang menekan individu dari luar. Kita harus bertanya: Mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan? Apa motivasi, nilai, dan kalkulasi yang membimbing tindakan mereka?

Pergeseran fokus ke tingkat individu dan maknanya ini menandai sebuah revolusi dalam pemikiran sosial. Weber menolak determinisme ekonomi Marx yang dianggapnya terlalu satu dimensi, sekaligus mengkritik pandangan Durkheim tentang fakta sosial yang seolah-olah sepenuhnya eksternal. Ia berpendapat bahwa sosiologi harus menjadi ilmu yang berupaya memahami secara interpretatif (*Verstehen*) tindakan sosial untuk kemudian sampai pada penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. Pendekatan ini menempatkan Weber di persimpangan jalan antara analisis makro-struktural dan mikro-interpretatif, menjadikannya salah satu pemikir paling kompleks dan komprehensif dalam sejarah sosiologi.

Salah satu tema besar yang menyatukan seluruh karya Weber yang sangat luas adalah proses rasionalisasi. Ia mengamati bahwa peradaban Barat modern secara unik ditandai oleh penyebaran rasionalitas kalkulatif ke dalam semua bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hukum, hingga musik dan arsitektur. Tradisi, emosi, dan keyakinan magis secara sistematis digantikan oleh efisiensi, prediktabilitas, dan kontrol. Proses ini telah melepaskan kekuatan produktif dan administratif yang luar biasa, tetapi Weber memandangnya dengan ambivalensi yang mendalam.

Di satu sisi, rasionalisasi melahirkan kapitalisme modern dan bentuk organisasi paling efisien yang pernah ada, yaitu birokrasi. Weber menganalisis birokrasi bukan sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai mesin sosial yang secara teknis superior. Namun, di sisi lain, ia mengkhawatirkan konsekuensi dari dominasi rasionalitas ini. Ia melihat modernitas menjebak individu dalam sebuah “jerat besi” (*iron cage*) rasionalitas, sebuah dunia yang semakin terdisenchantment (kehilangan pesona magisnya), di mana spontanitas, kreativitas, dan nilai-nilai luhur terancam oleh logika dingin efisiensi dan kalkulasi impersonal.

Karya Weber yang paling terkenal, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, adalah sebuah contoh brilian dari metodologinya. Di sini, ia menantang penjelasan materialis murni dengan menunjukkan bagaimana seperangkat ide-ide keagamaan, khususnya doktrin Kalvinis, secara tidak sengaja turut membentuk sebuah etos kerja dan mentalitas ekonomi yang sangat kondusif bagi perkembangan kapitalisme modern. Ini menunjukkan keyakinannya bahwa ide dan nilai dapat menjadi kekuatan kausal yang signifikan dalam sejarah, bukan sekadar refleksi dari basis ekonomi.

Bab ini akan menelusuri pilar-pilar utama pemikiran Weberian. Kita akan memulai dengan metodologinya yang khas, yaitu *Verstehen* dan tipologi ideal. Selanjutnya, kita akan membahas tipologi tindakan sosialnya, analisisnya yang mendalam tentang rasionalisasi dan birokrasi, serta tesisnya yang kontroversial tentang agama dan kapitalisme. Terakhir, kita akan mengeksplorasi bagaimana perangkat konseptual Weber yang kaya ini dapat diterapkan untuk menerangi berbagai aspek realitas sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

#### **4.1 Metodologi: Verstehen dan Tipologi Ideal**

Max Weber memberikan landasan metodologis yang unik bagi sosiologi, yang berusaha menjembatani jurang antara tradisi

positivis yang meniru ilmu alam dan tradisi idealis-historis yang menolak kemungkinan penjelasan ilmiah tentang masyarakat. Weber setuju dengan kaum positivis bahwa sosiologi harus menjadi ilmu yang rigoros dan empiris yang mencari penjelasan kausal. Namun, ia juga setuju dengan kaum historis bahwa objek studi sosiologi, yaitu manusia yang bertindak, secara fundamental berbeda dari objek studi ilmu alam (Elster, 2020). Manusia memiliki kesadaran, niat, dan makna yang tidak bisa ditangkap hanya dengan observasi eksternal. Oleh karena itu, sosiologi membutuhkan metode ganda: ia harus memahami (*understand*) makna subjektif dari tindakan sosial, sekaligus menjelaskannya (*explain*) secara kausal.

Inti dari pendekatan ini adalah konsep *Verstehen*, sebuah istilah Jerman yang sering diterjemahkan sebagai “pemahaman interpretatif”. *Verstehen* bukanlah sekadar empati atau intuisi subjektif, melainkan sebuah prosedur metodologis yang rasional. Sosiolog harus menempatkan dirinya secara imajinatif pada posisi aktor yang sedang ia pelajari untuk memahami makna dan motivasi di balik tindakan mereka. Weber membedakan dua jenis *Verstehen*. Pertama, *aktuelles Verstehen* (pemahaman langsung), yaitu pemahaman observasional terhadap makna sebuah tindakan (misalnya, kita langsung paham bahwa seseorang yang mengacungkan kapak sedang “menebang pohon”). Kedua, dan yang lebih penting bagi sosiologi, adalah *erklärendes Verstehen* (pemahaman penjelas), yaitu upaya untuk memahami motivasi yang melatari sebuah tindakan dengan menempatkannya dalam konteks makna yang lebih luas (misalnya, mengapa ia menebang pohon? Apakah untuk mencari nafkah, membersihkan lahan, atau karena sebuah ritual?) (Schönbaumsfeld, 2022).

Namun, pemahaman subjektif ini saja tidak cukup. Untuk mencapai tingkat objektivitas ilmiah, Weber mengembangkan alat konseptual yang disebut “tipologi ideal” (*ideal type*). Tipologi ideal

bukanlah gambaran realitas yang sempurna atau sesuatu yang secara moral “ideal”. Sebaliknya, ia adalah sebuah konstruksi analitis, sebuah “utopia” konseptual yang dibentuk dengan cara menonjolkan secara sengaja satu atau beberapa sudut pandang dan mensintesiskan fenomena-fenomena individual yang konkret dan tersebar (Yilmaz, 2021). Misalnya, Weber membangun tipologi ideal “birokrasi” dengan merangkai semua karakteristiknya yang paling logis (hierarki, aturan tertulis, impersonalitas, dll.) ke dalam sebuah model yang murni dan koheren, meskipun tidak ada satu pun birokrasi di dunia nyata yang persis seratus persen sama dengan model tersebut.

Fungsi dari tipologi ideal adalah sebagai “mistar pengukur” atau tolok ukur. Dengan membandingkan realitas empiris yang kacau dan kompleks dengan tipologi ideal yang jernih secara konseptual, peneliti dapat mengukur sejauh mana realitas tersebut mendekati atau menyimpang dari model murni. Perbedaan antara realitas dan tipologi ideal inilah yang kemudian menjadi titik berangkat untuk analisis kausal, yaitu mencari penjelasan atas penyimpangan tersebut (Gane, 2020). Melalui kombinasi *Verstehen* dan tipologi ideal, Weber menciptakan sebuah metodologi yang memungkinkan sosiologi untuk tetap peka terhadap makna subjektif dari tindakan manusia tanpa harus mengorbankan klaimnya sebagai sebuah ilmu yang objektif dan mampu memberikan penjelasan kausal.

**Analogi/Contoh Kasus:** Bayangkan seorang dokter yang ingin mendiagnosis penyakit pasien. Dokter tidak bisa hanya melihat gejala-gejala eksternal (positivisme). Ia harus melakukan *Verstehen*: ia bertanya kepada pasien tentang apa yang dirasakannya, riwayat keluhannya, dan gaya hidupnya untuk memahami pengalaman subjektif si pasien. Di sisi lain, di dalam benaknya, dokter memiliki sebuah “tipologi ideal” tentang bagaimana tubuh manusia yang sehat seharusnya berfungsi, atau tipologi ideal dari berbagai penyakit (misalnya, “tipologi ideal pasien diabetes tipe 2”). Ia

kemudian membandingkan kondisi konkret pasien dengan tipologi-tipologi ideal ini. Penyimpangan dari model “sehat” atau kesamaan dengan model “penyakit” tertentu membantunya membuat diagnosis dan mencari penjelasan kausal. Sosiolog, bagi Weber, bekerja dengan cara yang serupa.

#### **4.1.1 Konsep Verstehen (Pemahaman Interpretatif)**

*Verstehen* adalah metode khas sosiologi Weberian yang menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang dilekatkan oleh individu pada tindakan mereka. Ini adalah upaya untuk merekonstruksi konteks makna di mana sebuah tindakan dilakukan (Schönbaumsfeld, 2022). Weber bersikeras bahwa ini bukan proses psikologis murni, melainkan proses intelektual yang sistematis. Peneliti harus menggunakan pengetahuan historis dan budayanya untuk memahami nilai-nilai, kepercayaan, dan tujuan yang mungkin memotivasi seorang aktor. Tanpa *Verstehen*, tindakan manusia hanya akan tampak sebagai perilaku fisik yang tidak dapat dipahami, seperti gerakan acak benda-benda. Dengan *Verstehen*, perilaku menjadi “tindakan sosial” yang bermakna dan dapat dianalisis secara sosiologis (Elster, 2020).

#### **4.1.2 Tipologi Ideal sebagai Alat Analisis Murni**

Tipologi ideal adalah alat metodologis utama Weber untuk studi sosiologi. Ini bukan deskripsi realitas, bukan hipotesis, dan bukan pula rata-rata statistik, melainkan sebuah konstruksi mental yang disengaja untuk menonjolkan karakteristik esensial dari suatu fenomena sosial (Yilmaz, 2021). Contohnya termasuk tipologi ideal Weber tentang “kapitalisme”, “birokrasi”, atau tiga tipe otoritas. Tujuannya adalah untuk menyediakan konsep-konsep yang jelas dan tidak ambigu yang dapat digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisis realitas empiris yang selalu lebih kompleks dan tidak konsisten. Ia adalah alat untuk mencapai kejelasan

konseptual dalam analisis, bukan untuk mereplikasi realitas itu sendiri (Gane, 2020).

#### 4.1.3 Isu Kausalitas dan Probabilitas dalam Sosiologi

Meskipun menekankan pemahaman interpretatif, Weber tidak meninggalkan tujuan penjelasan kausal. Namun, ia memiliki pandangan yang canggih tentang kausalitas dalam ilmu sosial. Ia menolak gagasan tentang “hukum” sosial yang deterministik seperti dalam ilmu alam. Sebaliknya, ia berbicara tentang “probabilitas objektif” atau “kausalitas yang memadai” (Elster, 2020). Sebuah penjelasan kausal dianggap memadai jika kita dapat menunjukkan adanya probabilitas yang tinggi bahwa peristiwa A akan diikuti oleh peristiwa B, dan jika kita dapat memahaminya secara bermakna (*Verstehen*) mengapa aktor dalam situasi A akan bertindak dengan cara yang mengarah pada B. Sosiologi, bagi Weber, berurusan dengan konstelasi faktor-faktor yang kompleks, bukan dengan hukum sebab-akibat tunggal (Schönbaumsfeld, 2022).

#### 4.1.4 Netralitas Nilai (Value Neutrality) dalam Ilmu Sosial

Weber mengajukan prinsip netralitas nilai (*Wertfreiheit*) sebagai sebuah postulat etis bagi para ilmuwan sosial. Ia menyadari bahwa nilai-nilai peneliti tidak dapat dihindari dalam pemilihan topik penelitian; kita meneliti apa yang kita anggap penting (relevansi nilai). Namun, begitu penelitian dimulai, peneliti harus berusaha keras untuk memisahkan analisis faktualnya (“apa yang ada”) dari penilaian moral atau politik pribadinya (“apa yang seharusnya ada”) (Gane, 2020). Tugas ilmuwan bukanlah untuk membuat penilaian tentang mana yang baik atau buruk, melainkan untuk menyajikan temuan-temuan empiris dan hubungan-hubungan kausal secara objektif. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan, bukan untuk memberikan resep kebijakan atau justifikasi

ideologis. Prinsip ini tetap menjadi topik perdebatan sengit dalam sosiologi hingga kini (Yilmaz, 2021).

#### **4.1.5 Kritik terhadap Metodologi Weberian**

Metodologi Weber tidak luput dari kritik. Kaum positivis mengkritik konsep *Verstehen* sebagai sesuatu yang terlalu subjektif, intuitif, dan tidak dapat diverifikasi. Bagaimana kita bisa benar-benar tahu apa yang ada di dalam pikiran orang lain, terutama dari budaya atau periode sejarah yang berbeda? Di sisi lain, para teoretikus kritis dari Aliran Frankfurt mengkritik prinsip netralitas nilai. Mereka berpendapat bahwa dengan mengklaim netralitas, sosiologi Weberian secara implisit menerima status quo dan melepaskan tanggung jawabnya untuk mengkritik ketidakadilan dan memperjuangkan emansipasi (Elster, 2020). Mereka melihat pemisahan antara fakta dan nilai sebagai sesuatu yang mustahil dan secara politis bersifat konservatif (Schönbaumsfeld, 2022).

#### **4.2 Tipologi Tindakan Sosial**

Sebagai inti dari sosiologi interpretatifnya, Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang “tindakan sosial”. Tidak semua perilaku manusia adalah tindakan sosial. Sebuah tindakan hanya bersifat sosial jika, dan sejauh, individu yang melakukannya melekatkan makna subjektif pada perilakunya, dan tindakan tersebut memperhitungkan perilaku orang lain dan karenanya terorientasi dalam perjalanannya. Berkedip secara refleksif bukanlah tindakan sosial, tetapi mengedipkan mata kepada seseorang untuk memberi sinyal adalah tindakan sosial. Fokus pada tindakan sosial yang bermakna ini secara tegas mengarahkan sosiologi Weberian pada tingkat mikro, yaitu pada motivasi yang mendasari perilaku individu. Weber berargumen bahwa semua kolektivitas sosial yang besar (seperti negara, gereja, atau korporasi) pada dasarnya harus dipahami sebagai hasil

dari jalinan tindakan-tindakan sosial individu-individu yang tak terhitung jumlahnya.

Untuk membantu menganalisis berbagai motivasi di balik tindakan sosial, Weber mengembangkan sebuah tipologi ideal yang terdiri dari empat tipe dasar tindakan. Penting untuk diingat bahwa ini adalah tipe-tipe murni; dalam realitas, sebagian besar tindakan manusia merupakan campuran dari beberapa tipe motivasi. Keempat tipe tersebut adalah: (1) tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), (2) tindakan rasional nilai (*wertrational*), (3) tindakan afektif (emosional), dan (4) tindakan tradisional. Tipologi ini disusun berdasarkan derajat rasionalitas yang terlibat dalam tindakan tersebut, dari yang paling rasional hingga yang paling non-rasional.

Tindakan rasional instrumental adalah tipe tindakan yang paling rasional. Dalam tindakan ini, aktor secara sadar dan sistematis memperhitungkan cara-cara (*means*) yang paling efisien untuk mencapai tujuan (*ends*) tertentu yang telah ia tetapkan. Ini adalah tindakan seorang insinyur yang membangun jembatan, seorang jenderal yang merencanakan pertempuran, atau seorang kapitalis yang berusaha memaksimalkan laba (Kalberg, 2021). Aktor menimbang-nimbang berbagai alternatif cara, konsekuensi yang mungkin timbul, dan memilih kombinasi yang paling efisien. Dunia modern, menurut Weber, semakin didominasi oleh tipe tindakan ini.

Tipe kedua, tindakan rasional nilai, juga bersifat rasional, tetapi dengan cara yang berbeda. Di sini, tindakan ditentukan oleh keyakinan yang sadar pada nilai inheren dari suatu perilaku tertentu (misalnya, nilai etis, estetis, atau religius), terlepas dari prospek keberhasilannya (Kim, 2022). Aktor bertindak berdasarkan apa yang ia yakini sebagai sesuatu yang “benar” atau “terhormat”, bukan karena kalkulasi untung-rugi. Contohnya adalah seorang kapten kapal yang memilih untuk tenggelam bersama kapalnya

karena kehormatan, atau seorang aktivis yang melakukan protes meskipun tahu ia akan ditangkap. Tindakan ini rasional karena melibatkan pilihan sadar atas nilai, tetapi non-rasional dari sudut pandang instrumental karena mengabaikan konsekuensi.

Dua tipe terakhir bersifat non-rasional atau di ambang batas tindakan yang bermakna. Tindakan afektif atau emosional ditentukan oleh perasaan atau kondisi emosional aktor pada saat itu, seperti kemarahan, cinta, atau ketakutan (Rossetti, 2023). Ini adalah tindakan spontan, seperti meninju meja karena marah atau memeluk seseorang karena gembira. Terakhir, tindakan tradisional ditentukan oleh kebiasaan yang sudah mendarah daging atau adat istiadat yang diulang tanpa refleksi sadar. Ini adalah tindakan yang dilakukan hanya karena “begitulah cara kita selalu melakukannya”, seperti cara makan tertentu atau merayakan hari libur dengan cara yang sama setiap tahun. Tipologi ini memberikan Weber sebuah kerangka yang fleksibel untuk menganalisis kompleksitas motivasi manusia dan untuk melacak pergeseran historis menuju dominasi rasionalitas di dunia modern.

**Analogi:** Bayangkan empat orang mahasiswa yang memutuskan untuk belajar semalaman sebelum ujian. Mahasiswa A melakukan tindakan *rasional instrumental*: ia menghitung berapa bab yang harus dibaca per jam, minum kopi pada jam tertentu agar tetap terjaga, dan tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan nilai A. Mahasiswa B melakukan tindakan *rasional nilai*: ia belajar karena ia percaya bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban moral atau nilai luhur itu sendiri, terlepas dari apakah ia akan lulus atau tidak. Mahasiswa C melakukan tindakan *afektif*: ia belajar karena tiba-tiba diserang rasa panik dan cemas yang luar biasa melihat tumpukan buku. Mahasiswa D melakukan tindakan *tradisional*: ia belajar semalaman hanya karena semua teman-temannya juga melakukannya dan itu sudah menjadi “tradisi” di lingkarannya setiap menjelang ujian.

### **4.2.1 Tindakan Rasional Instrumental (Zweckrational)**

Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperhitungkan secara rasional dengan menggunakan cara-cara yang dinilai paling efisien. Aktor dalam tindakan ini melakukan kalkulasi sadar antara tujuan, cara, dan konsekuensi sekunder (Kalberg, 2021). Ini adalah logika seorang ekonom, birokrat, atau ilmuwan. Dominasi tipe tindakan ini adalah ciri khas dari proses rasionalisasi di dunia Barat. Kapitalisme modern, dengan fokusnya pada efisiensi dan maksimalisasi laba, adalah arena utama dari tindakan rasional instrumental. Weber melihat penyebaran tipe tindakan ini sebagai kekuatan yang sangat kuat namun juga berpotensi mendehumanisasi (Kim, 2022).

### **4.2.2 Tindakan Rasional Nilai (Wertrational)**

Tindakan rasional nilai didorong oleh keyakinan pada nilai absolut dari sebuah tindakan, terlepas dari hasilnya. Aktor bertindak sesuai dengan tuntutan etika, agama, atau kehormatan, tanpa memperhitungkan untung-rugi (Kim, 2022). Tindakan ini rasional dalam arti bahwa aktor secara sadar memilih nilai yang akan ia patuhi dan secara konsisten bertindak sesuai dengan nilai tersebut. Namun, dari perspektif instrumental, tindakan ini bisa tampak irasional. Ada ketegangan yang melekat antara rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai, misalnya, antara tuntutan “efisiensi” bisnis dan tuntutan “kejujuran” etis. Weber khawatir bahwa dalam dunia modern, rasionalitas nilai semakin terdesak oleh dominasi rasionalitas instrumental (Rossetti, 2023).

### **4.2.3 Tindakan Afektif (Emosional)**

Tindakan afektif ditentukan oleh kondisi perasaan atau emosi aktor, seperti cinta, benci, marah, atau antusiasme. Ini adalah tindakan yang bersifat impulsif dan spontan, bukan hasil dari

perencanaan sadar atau refleksi terhadap nilai (Rossetti, 2023). Weber menempatkannya di perbatasan antara tindakan yang bermakna dan perilaku yang murni reaktif. Meskipun demikian, tindakan ini bisa menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial, misalnya dalam konteks gerakan sosial yang didorong oleh kemarahan kolektif atau dalam hubungan pribadi yang didasarkan pada cinta. Dalam proses rasionalisasi, ada tekanan konstan untuk menekan dan mengendalikan tindakan-tindakan afektif (Kalberg, 2021).

#### **4.2.4 Tindakan Tradisional (Kebiasaan)**

Tindakan tradisional didasarkan pada kebiasaan yang telah lama terbentuk. Tindakan ini dilakukan secara otomatis, tanpa refleksi sadar terhadap tujuan atau nilai. Aktor melakukannya hanya karena “selalu seperti itu”. Ini adalah tindakan yang sebagian besar tidak bermakna, berada di ambang batas perilaku yang murni terkondisi (Kalberg, 2021). Dalam masyarakat pramodern, sebagian besar kehidupan sehari-hari diatur oleh tindakan tradisional. Proses rasionalisasi secara inheren bersifat anti-tradisional; ia menantang semua praktik yang didasarkan pada kebiasaan dan menuntut agar praktik tersebut dijustifikasi berdasarkan efisiensi (rasionalitas instrumental) atau prinsip sadar (rasionalitas nilai) (Kim, 2022).

#### **4.2.5 Fleksibilitas Tipologi dalam Realitas**

Weber menekankan bahwa keempat tipe tindakan ini adalah konstruksi analitis murni. Dalam dunia nyata, sebuah tindakan konkret jarang sekali murni didasarkan pada satu tipe motivasi saja. Sebagian besar tindakan merupakan kombinasi dari beberapa tipe. Misalnya, keputusan seseorang untuk menikah bisa mengandung elemen tradisional (“sudah waktunya menikah”), afektif (cinta), rasional nilai (keyakinan akan kesucian pernikahan), dan rasional

instrumental (memperhitungkan keuntungan finansial atau sosial). Kegunaan tipologi ini bukan untuk mengklasifikasikan setiap tindakan secara kaku, melainkan untuk menyediakan sebuah kerangka bagi sosiolog untuk membongkar dan menganalisis berbagai untaian motivasi yang kompleks di balik perilaku manusia (Rossetti, 2023).

### 4.3 Rasionalitas dan Birokrasi Modern

Tema sentral yang melintasi seluruh karya Max Weber adalah proses rasionalisasi, yaitu sebuah proses historis jangka panjang di mana tradisi, emosi, dan nilai-nilai magis digantikan oleh kalkulasi rasional, efisiensi, dan kontrol sebagai prinsip pengorganisasian utama dalam masyarakat. Weber melihat proses ini sebagai takdir unik dari peradaban Barat. Jika pada masyarakat lain rasionalitas mungkin hanya berkembang di satu atau dua bidang kehidupan (misalnya, filsafat), di Barat, rasionalitas instrumental menyebar secara sistematis ke seluruh institusi: ekonomi (kapitalisme), politik (negara modern), hukum (hukum rasional-formal), dan bahkan seni (musik harmonis). Proses ini membawa serta apa yang disebut Weber sebagai “*disenchantment of the world*” (hilangnya pesona magis dunia), di mana dunia tidak lagi dilihat sebagai taman misterius yang dipenuhi roh dan kekuatan gaib, melainkan sebagai sebuah mekanisme kausal yang dapat dipahami, diprediksi, dan dikontrol oleh akal manusia (Löwy, 2021).

Puncak dan manifestasi paling kuat dari proses rasionalisasi ini adalah birokrasi. Bagi Weber, birokrasi bukanlah istilah peyoratif yang berarti ketidakefisienan atau kerumitan yang tidak perlu, seperti dalam penggunaan sehari-hari. Sebaliknya, birokrasi adalah tipologi ideal dari bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien secara teknis yang pernah diciptakan. Sama seperti mesin yang secara teknis lebih unggul dari tenaga manual, birokrasi lebih unggul dari semua bentuk administrasi sebelumnya (misalnya,

administrasi patrimonial yang didasarkan pada loyalitas pribadi atau tradisi). Keunggulannya terletak pada presisi, kecepatan, kejelasan, kontinuitas, dan impersonalitasnya (Du Gay, 2023).

Weber mengidentifikasi serangkaian karakteristik dari tipologi ideal birokrasi. Ini termasuk: (1) hierarki otoritas yang jelas; (2) yurisdiksi yang diatur oleh aturan-aturan tertulis; (3) pejabat yang diangkat berdasarkan kualifikasi teknis (meritokrasi); (4) pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi; (5) posisi jabatan adalah karier seumur hidup dengan promosi berdasarkan senioritas atau prestasi; dan (6) semua keputusan dan tindakan dicatat secara tertulis. Ciri yang paling fundamental adalah impersonalitas: aturan dan prosedur berlaku sama untuk semua orang, tanpa memandang hubungan pribadi, perasaan, atau status. Hubungan antara pejabat dan antara pejabat dengan publik diatur oleh aturan, bukan oleh emosi atau favoritisme (Weiss, 2020).

Meskipun mengagumi efisiensi teknisnya, Weber juga sangat prihatin terhadap konsekuensi manusiawi dari birokratisasi. Ia melihat birokrasi, bersama dengan kapitalisme rasional, sebagai kekuatan yang menjebak individu modern dalam sebuah “jerat besi rasionalitas” (*iron cage of rationality*). Dalam jerat besi ini, kehidupan manusia semakin diatur oleh aturan-aturan eksternal yang dingin dan impersonal. Ruang untuk spontanitas, kreativitas, tindakan heroik, dan nilai-nilai individual menjadi semakin sempit. Manusia menjadi “roda penggerak kecil dalam sebuah mesin yang terus bergerak”. Weber menutup *Etika Protestan* dengan sebuah visi pesimis tentang masa depan, di mana dunia mungkin akan dipenuhi oleh “spesialis tanpa roh, sensualis tanpa hati”. Ini menunjukkan ambivalensinya yang mendalam terhadap modernitas: rasionalisasi telah membebaskan kita dari irasionalitas tradisi, tetapi pada saat yang sama mengancam untuk memenjarakan kita dalam sebuah tatanan baru yang mendehumanisasi (Azman, 2022).

**Contoh Kasus:** Proses pendaftaran mahasiswa baru di sebuah universitas negeri adalah contoh sempurna dari cara kerja birokrasi Weberian. Ada serangkaian aturan yang jelas dan berlaku sama untuk semua calon (impersonalitas). Calon harus mengisi formulir standar, mengunggah dokumen sesuai spesifikasi, dan mengikuti tes yang terstandardisasi (aturan tertulis). Ada jadwal dan tenggat waktu yang ketat (prediktabilitas). Seleksi didasarkan pada skor tes dan kualifikasi akademis, bukan pada siapa orang tua calon (meritokrasi). Seluruh proses ini sangat efisien untuk mengelola puluhan ribu pendaftar. Namun, di sisi lain, calon mahasiswa mungkin merasa prosesnya dingin, tidak manusiawi, dan mereduksi seluruh potensi dirinya hanya menjadi serangkaian angka dan dokumen. Inilah paradoks efisiensi dan dehumanisasi dalam “jerat besi” birokrasi.

#### 4.3.1 Proses Rasionalisasi Barat dan Dunia Modern

Rasionalisasi adalah proses di mana semakin banyak bidang kehidupan sosial yang tunduk pada kalkulasi dan kontrol rasional. Weber membedakan antara rasionalitas formal (kalkulasi cara-tujuan dalam kerangka aturan yang ada) dan rasionalitas substantif (tindakan yang diarahkan oleh nilai-nilai ultimate). Ia berpendapat bahwa dunia modern ditandai oleh dominasi rasionalitas formal atas rasionalitas substantif (Löwy, 2021). Keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan pertanyaan “Apa yang secara moral benar?”, melainkan “Apa yang paling efisien dan dapat dihitung?”. Proses ini, meskipun berasal dari Barat, telah menjadi kekuatan global yang membentuk institusi-institusi modern di seluruh dunia (Azman, 2022).

#### 4.3.2 Tipologi Ideal Birokrasi (Hierarki, Aturan, Impersonal)

Tipologi ideal birokrasi Weber mencakup beberapa elemen kunci. **Hierarki** berarti ada struktur komando yang jelas dari atas

ke bawah. **Aturan** berarti setiap tindakan diatur oleh regulasi tertulis yang abstrak, bukan oleh perintah sewenang-wenang. **Impersonalitas** adalah ciri yang paling krusial, di mana pejabat harus menjalankan tugas mereka tanpa perasaan pribadi atau favoritisme, memperlakukan semua kasus dan klien secara setara sesuai aturan (Du Gay, 2023). Ciri lainnya termasuk spesialisasi tugas, rekrutmen berbasis kompetensi, dan pemisahan antara kehidupan pribadi dan kantor. Kombinasi elemen-elemen ini menciptakan sebuah mesin administrasi yang sangat efisien (Weiss, 2020).

#### 4.3.3 Keunggulan Teknis Birokrasi

Bagi Weber, dari sudut pandang puramente teknis, birokrasi adalah bentuk administrasi yang paling unggul. Keunggulannya meliputi: **Presisi**, karena didasarkan pada aturan yang jelas. **Kecepatan**, karena prosedur yang terstandarisasi. **Tidak ambigu**, karena yurisdiksi yang terdefinisi dengan baik. **Pengetahuan tentang arsip**, karena semua dicatat secara tertulis. **Kontinuitas**, karena tidak bergantung pada individu tertentu. **Kalkulabilitas**, karena hasil dan biayanya dapat diprediksi. Keunggulan-keunggulan inilah yang menjelaskan mengapa birokrasi menjadi bentuk organisasi yang dominan tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di perusahaan swasta, rumah sakit, universitas, dan bahkan gereja (Weiss, 2020).

#### 4.3.4 Jerat Besi Rasionalitas (Iron Cage of Rationality)

“Jerat besi” adalah metafora kuat Weber untuk menggambarkan kondisi eksistensial manusia modern. Semangat kapitalisme, yang awalnya didorong oleh gairah religius, kini telah lenyap, meninggalkan di belakangnya sebuah sistem ekonomi yang berjalan secara mekanis. Individu yang lahir ke dalam sistem ini dipaksa untuk hidup sesuai dengan aturannya, terlepas dari apakah mereka

menyukainya atau tidak (Löwy, 2021). Birokrasi memperluas logika mesin ini ke dalam administrasi. Hasilnya adalah sebuah dunia yang sangat teratur, efisien, dan dapat diprediksi, tetapi juga dingin, impersonal, dan membatasi kebebasan serta spontanitas individu. Manusia menjadi terperangkap dalam sistem yang ia ciptakan sendiri (Azman, 2022).

### 4.3.5 Kritik terhadap Konsep Birokrasi Weber

Meskipun model birokrasi Weber sangat berpengaruh, ia juga banyak dikritik. Para kritikus, seperti Robert Merton, menunjukkan bahwa birokrasi memiliki “disfungsi”-nya sendiri. Ketaatan yang kaku pada aturan dapat menyebabkan “ketidakmampuan terlatih” (*trained incapacity*), di mana pejabat menjadi tidak fleksibel dan tidak mampu beradaptasi dengan situasi baru. Fokus pada aturan dapat menjadi tujuan itu sendiri, mengalahkan tujuan asli organisasi (sebuah fenomena yang disebut *goal displacement*) (Du Gay, 2023). Kritik lain menunjukkan bahwa model ideal Weber mengabaikan “sisi informal” dari organisasi, seperti jaringan pertemanan, konflik antar-klik, dan politik kantor, yang seringkali sangat mempengaruhi cara kerja birokrasi dalam praktiknya (Weiss, 2020).

## 4.4 Agama dan Etika Kapitalisme

Salah satu kontribusi Weber yang paling terkenal dan kontroversial adalah tesisnya yang menghubungkan kebangkitan kapitalisme modern dengan etika keagamaan tertentu, khususnya Puritanisme dalam varian Calvinisnya. Dalam karyanya, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Weber mengajukan sebuah pertanyaan historis yang besar: Mengapa kapitalisme rasional, sebuah sistem yang ditandai oleh pengejaran laba secara terus-menerus, sistematis, dan rasional melalui perusahaan, berkembang secara unik dan dominan di Barat, dan bukan di peradaban

besar lainnya seperti Tiongkok atau India? Menolak penjelasan materialis murni yang hanya berfokus pada faktor ekonomi, Weber berargumen bahwa seperangkat ide-ide keagamaan tertentu memainkan peran kausal yang krusial, meskipun tidak disengaja, dalam membentuk “semangat” atau mentalitas yang diperlukan bagi perkembangan kapitalisme.

Weber memulai dengan mengidentifikasi “semangat kapitalisme”, sebuah etos unik yang memandang pekerjaan sebagai panggilan (*calling*) dan akumulasi kekayaan bukan sebagai sarana untuk kemewahan, melainkan sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang memiliki nilai moral. Ia menemukan ekspresi paling murni dari semangat ini dalam tulisan-tulisan Benjamin Franklin, yang mempromosikan kebajikan seperti kerja keras, berhemat, dan menepati janji sebagai sebuah kewajiban moral. Pertanyaannya kemudian adalah: dari mana asal-usul etos yang secara historis tidak lazim ini? Jawaban Weber mengarahkannya pada Reformasi Protestan, khususnya pada ajaran John Calvin dan sekte-sekte Puritan yang mengikutinya.

Inti dari teologi Kalvinis adalah doktrin predestinasi. Doktrin ini menyatakan bahwa Tuhan, sejak awal waktu, telah menentukan siapa yang akan diselamatkan (*the elect*) dan siapa yang akan dikutuk, dan manusia tidak dapat melakukan apa pun untuk mengubah takdirnya. Doktrin ini menciptakan “kecemasan keselamatan” (*salvation anxiety*) yang luar biasa di kalangan para penganutnya. Karena mereka tidak tahu apakah mereka termasuk yang terpilih, mereka mencari tanda-tanda di dunia ini yang dapat meyakinkan mereka akan status keselamatan mereka. Para pendeta Puritan kemudian mengajarkan bahwa ada dua cara utama untuk mengatasi kecemasan ini. Pertama, individu memiliki kewajiban untuk percaya bahwa dirinya termasuk yang terpilih. Kedua, ia harus bekerja tanpa lelah dalam panggilannya di dunia untuk meningkatkan kemuliaan Tuhan (Kiely, 2022).

Kombinasi ini, menurut Weber, secara psikologis menghasilkan sebuah etika “asketisme duniawi” (*inner-worldly asceticism*). Para penganut Calvinisme didorong untuk bekerja keras, sistematis, dan rasional dalam pekerjaan mereka (yang dianggap sebagai panggilan dari Tuhan), tetapi pada saat yang sama mereka dilarang untuk menikmati buah dari kerja keras mereka dalam bentuk kemewahan atau kesenangan duniawi (yang dianggap sebagai dosa). Lalu, apa yang mereka lakukan dengan kekayaan yang mereka kumpulkan? Mereka menginvestasikannya kembali ke dalam usaha mereka. Perilaku ini, kerja keras yang sistematis ditambah dengan penolakan terhadap konsumsi, secara tidak sengaja menciptakan akumulasi kapital yang luar biasa, yang menjadi dasar bagi pertumbuhan perusahaan kapitalis modern (Ghosh, 2023). Dengan demikian, sebuah doktrin keagamaan yang pada awalnya sama sekali tidak bertujuan ekonomis, secara paradoksal, melahirkan sebuah mentalitas yang sangat cocok untuk kapitalisme rasional. Weber kemudian melakukan studi perbandingan terhadap agama-agama besar dunia lainnya (Konfusianisme, Hinduisme, Buddhisme, Yudaisme, Islam) untuk menunjukkan mengapa agama-agama tersebut, meskipun terkadang memiliki elemen-elemen rasional, tidak mengembangkan kombinasi etis yang unik yang mendorong lahirnya kapitalisme modern seperti yang terjadi di Barat.

**Analogi:** Bayangkan seorang atlet yang percaya pada doktrin “bakat bawaan” (mirip predestinasi). Ia percaya bahwa beberapa orang terlahir untuk menjadi juara, dan yang lain tidak, dan ia tidak tahu ia termasuk yang mana. Kepercayaan ini menciptakan kecemasan yang luar biasa. Pelatihnya kemudian menasihatinya: “Untuk mengatasi keraguanmu, kamu harus percaya bahwa kamu adalah seorang juara, dan kamu harus berlatih setiap hari seolah-olah kamu adalah seorang juara untuk membuktikannya pada dirimu sendiri.” Akibatnya, sang atlet berlatih dengan sangat disiplin, sistematis, dan tanpa henti (asketisme duniawi). Ia tidak

pernah berpesta atau berfoya-foya (menolak kenikmatan). Hasil yang tidak disengaja dari keyakinan dan perilakunya ini adalah ia benar-benar menjadi seorang atlet yang sangat sukses dan kaya, meskipun tujuan awalnya murni untuk mengatasi kecemasan batinnya. Ini mirip dengan bagaimana etika Protestan, menurut Weber, secara tidak sengaja mendorong perilaku kapitalistik.

#### **4.4.1 Hubungan Etika Protestan (Kalvinisme) dan Semangat Kapitalisme**

Weber berargumen bahwa ada sebuah “afinitas elektif” (*elective affinity*) antara etika yang lahir dari Kalvinisme dan semangat kapitalisme. Afinitas elektif berarti dua sistem (dalam hal ini, satu sistem ide keagamaan dan satu sistem perilaku ekonomi) saling tarik-menarik dan saling menguatkan, meskipun tidak ada hubungan sebab-akibat yang sederhana di antara keduanya (Ghosh, 2023). Etika Protestan, dengan penekanannya pada kerja keras sebagai panggilan, disiplin diri, dan penolakan terhadap kesenangan, menyediakan justifikasi moral dan dorongan psikologis bagi perilaku yang diperlukan oleh kapitalisme awal. Ini membantu mendobrak mentalitas tradisional yang memandang kerja hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan memandang pengejaran laba sebagai sesuatu yang amoral (Kiely, 2022).

#### **4.4.2 Konsep Panggilan Kerja (Calling) dan Predestinasi**

Konsep “panggilan” (*Beruf* dalam bahasa Jerman, *calling* dalam Inggris) adalah kunci. Martin Luther pertama kali menerjemahkan konsep ini sebagai pemenuhan kewajiban duniawi yang diberikan Tuhan. Namun, Kalvinisme memberinya makna baru yang lebih intens. Dikombinasikan dengan doktrin predestinasi, keyakinan bahwa takdir keselamatan seseorang telah ditentukan oleh Tuhan, panggilan kerja menjadi cara utama untuk mendapatkan keyakinan akan keselamatan (Ghosh, 2023). Kesuksesan dalam pekerjaan

duniawi dilihat bukan sebagai cara untuk *mendapatkan* keselamatan, melainkan sebagai *tanda* bahwa seseorang mungkin termasuk yang telah diselamatkan. Ini memberikan dorongan yang luar biasa untuk bekerja secara rasional dan tak kenal lelah (Swedberg, 2020).

#### 4.4.3 Spirit Kapitalisme sebagai Timbunan Kekayaan

Semangat atau spirit kapitalisme, menurut Weber, bukan sekadar keserakahan. Keserakahan ada di semua peradaban. Yang unik dari kapitalisme modern adalah pengejaran laba yang rasional dan tak berkesudahan, yang dilihat sebagai sebuah kewajiban etis. Etika Protestan mendorong hal ini dengan cara yang unik. Karena kesuksesan duniawi adalah tanda kemuliaan Tuhan dan kemungkinan keselamatan, maka mengakumulasi kekayaan menjadi sebuah tugas suci. Namun, karena menikmati kekayaan tersebut melalui kemewahan dianggap dosa, satu-satunya pilihan rasional yang tersisa adalah menginvestasikan kembali laba tersebut untuk menghasilkan laba yang lebih besar lagi. Siklus akumulasi demi akumulasi inilah yang menjadi mesin penggerak kapitalisme modern (Kiely, 2022).

#### 4.4.4 Studi Perbandingan Agama (Konfusianisme, Hinduisme)

Untuk memperkuat tesisnya, Weber melakukan studi ekstensif terhadap peradaban-peradaban besar lainnya. Di Tiongkok, ia menemukan bahwa Konfusianisme, dengan penekanannya pada harmoni, tradisi, dan adaptasi terhadap dunia, tidak mendorong inovasi radikal yang diperlukan untuk kapitalisme. Di India, sistem kasta dan doktrin reinkarnasi dalam Hinduisme menciptakan sebuah tatanan yang sangat tradisional dan menghambat mobilitas sosial serta rasionalisasi ekonomi (Swedberg, 2020). Melalui studi perbandingan ini, Weber ingin menunjukkan bahwa faktor-faktor material yang kondusif bagi kapitalisme (seperti pasar, kota, teknologi) juga ada di peradaban lain, tetapi

yang kurang adalah “spirit” atau etos pendorong yang di Barat disediakan oleh Protestanisme Asketis (Ghosh, 2023).

#### **4.4.5 Kritik terhadap Argumentasi Kausalitas Weber**

Tesis Weber telah menjadi salah satu argumen yang paling banyak diperdebatkan dalam sejarah sosiologi. Para kritikus dari perspektif Marxis menuduh Weber sebagai seorang idealis yang melebih-lebihkan peran ide dan mengabaikan faktor-faktor material. Mereka berpendapat bahwa kebangkitan Protestanisme itu sendiri dapat dijelaskan sebagai produk dari perubahan ekonomi yang sudah berlangsung. Sejarahawan lain menunjukkan bahwa bentuk-bentuk awal kapitalisme sudah ada di kota-kota Katolik Italia jauh sebelum Reformasi Protestan (Kiely, 2022). Ada juga yang berpendapat bahwa Weber salah menafsirkan doktrin teologi Protestan. Meskipun demikian, karyanya tetap menjadi model klasik tentang bagaimana sosiologi dapat menganalisis interaksi kompleks antara ide, budaya, dan struktur ekonomi (Swedberg, 2020).

#### **4.5 Pengaruh Weberian dan Aplikasinya di Indonesia**

Pemikiran Max Weber, dengan kekayaan konseptual dan cakupan analitisnya yang luas, menawarkan perangkat yang sangat berguna untuk menganalisis berbagai aspek masyarakat Indonesia yang kompleks. Berbeda dengan Marxisme yang seringkali terstigma secara politik, atau fungsionalisme yang diasosiasikan dengan status quo Orde Baru, sosiologi Weberian menyediakan kerangka kerja yang lebih netral dan fleksibel, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap isu-isu seperti kekuasaan, birokrasi, agama, dan ekonomi. Konsep-konsepnya dapat diterapkan untuk memahami transisi Indonesia dari masyarakat tradisional menuju modern, serta ketegangan-ketegangan yang menyertainya.

Salah satu aplikasi yang paling jelas adalah analisis tentang kekuasaan dan kepemimpinan di Indonesia menggunakan

tipologi otoritas Weber. Otoritas tradisional, yang didasarkan pada kepercayaan akan kesucian tradisi turun-temurun, dapat digunakan untuk memahami bentuk-bentuk kekuasaan di kerajaan-kerajaan Nusantara, patronase politik berbasis kedaerahan, atau peran tokoh adat. Otoritas karismatik, yang bersumber dari kualitas pribadi luar biasa seorang pemimpin, sangat relevan untuk menganalisis figur-figur seperti Soekarno atau pemimpin-pemimpin gerakan keagamaan yang mampu memobilisasi massa melalui pesona dan daya tarik personal mereka. Sementara itu, otoritas rasional-legal, yang didasarkan pada hukum dan aturan impersonal, menjadi model untuk memahami cara kerja negara modern, birokrasi, dan institusi formal di Indonesia (Satriawan, 2021). Analisis ini membantu kita melihat bagaimana ketiga tipe otoritas ini seringkali tumpang tindih dan saling bersaing dalam lanskap politik Indonesia.

Kajian Weber tentang birokrasi juga memberikan lensa kritis yang kuat untuk melihat praktik administrasi negara di Indonesia. Di satu sisi, model ideal birokrasi Weberian menjadi cetak biru bagi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Tjandra, 2023). Di sisi lain, analisisnya tentang “jerat besi” juga mengingatkan kita akan bahaya birokratisasi yang berlebihan, yang dapat menghasilkan prosedur yang kaku, dehumanisasi pelayanan publik, dan hilangnya fleksibilitas. Kritik terhadap birokrasi pembangunan di Indonesia seringkali secara implisit atau eksplisit menggunakan kerangka Weberian, menunjukkan bagaimana dalam praktiknya, logika rasional-legal seringkali terdistorsi oleh kembalinya hubungan-hubungan patrimonial atau personal (misalnya, penunjukan pejabat berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi).

Lebih jauh, tesis Weber tentang hubungan antara etika agama dan perilaku ekonomi membuka jalan bagi kajian-kajian yang

kaya tentang etos kerja dan budaya ekonomi di Indonesia. Para peneliti telah mencoba menerapkan atau menguji logika Weberian pada konteks Islam, etnis Tionghoa, atau kelompok-kelompok budaya lainnya di Indonesia untuk memahami bagaimana nilai-nilai dan keyakinan mereka membentuk praktik ekonomi mereka (Nugroho, 2022). Meskipun hasilnya beragam dan kompleks, pendekatan Weber mendorong kita untuk bergerak melampaui penjelasan ekonomi murni dan memperhatikan dimensi budaya dan makna dalam memahami pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan, warisan Weber menyediakan agenda penelitian yang terus-menerus relevan untuk membongkar kompleksitas modernisasi dan perubahan sosial di Indonesia.

**Contoh Kasus:** Fenomena pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat dianalisis secara kaya menggunakan tipologi otoritas Weber. Seorang calon petahana mungkin mengandalkan **otoritas rasional-legal** (klaim atas kinerja dan program yang telah dijalankan sesuai aturan). Calon lain, yang mungkin seorang tokoh adat atau keturunan bangsawan, dapat memanfaatkan **otoritas tradisional** (loyalitas yang didasarkan pada garis keturunan atau adat). Sementara itu, seorang calon baru yang tampil sebagai orator ulung dengan janji-janji perubahan radikal mungkin membangun **otoritas karismatik**. Seringkali, seorang kandidat yang sukses adalah yang mampu memadukan ketiga elemen ini: ia menampilkan citra modern dan kompeten (rasional-legal), menghormati tradisi lokal (tradisional), dan memiliki daya tarik personal yang kuat (karismatik).

#### 4.5.1 Analisis Tipe Otoritas dalam Kepemimpinan Tradisional dan Modern

Tipologi otoritas Weber membantu memetakan lanskap kepemimpinan di Indonesia. Kekuasaan sultan atau raja di keraton-keraton Jawa dan luar Jawa adalah contoh klasik otoritas tradisional.

Kepemimpinan Soekarno dengan pidato-pidatonya yang memukau adalah contoh utama otoritas karismatik. Sementara itu, ideal dari kepemimpinan dalam sistem demokrasi modern, seperti presiden atau gubernur, adalah otoritas rasional-legal, di mana kekuasaan mereka dibatasi oleh konstitusi dan hukum (Satriawan, 2021). Dalam praktiknya, banyak pemimpin politik Indonesia modern masih mengandalkan campuran antara karisma dan jaringan patronase tradisional untuk melengkapi otoritas formal mereka, menunjukkan adanya hibriditas dalam sistem kekuasaan (Tjandra, 2023).

#### **4.5.2 Kajian Etos Kerja dan Budaya Lokal**

Tesis Weber dalam *Etika Protestan* telah menginspirasi banyak penelitian tentang hubungan antara agama, budaya, dan perilaku ekonomi di Indonesia. Beberapa sarjana berpendapat bahwa nilai-nilai dalam etika bisnis komunitas Tionghoa, yang dipengaruhi Konfusianisme, seperti kerja keras, hemat, dan penekanan pada pendidikan, berfungsi mirip dengan etika Protestan dalam mendorong kesuksesan ekonomi (Nugroho, 2022). Penelitian lain mengkaji etos kerja dalam komunitas santri atau gerakan-gerakan Islam modern, mencoba mengidentifikasi apakah ajaran agama tertentu mendorong atau menghambat perilaku wirausaha yang rasional. Kajian-kajian ini, meskipun seringkali menghasilkan kesimpulan yang ambigu, menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan faktor budaya dalam analisis ekonomi, sejalan dengan semangat Weber.

#### **4.5.3 Kritik terhadap Birokrasi Pembangunan di Indonesia**

Konsep birokrasi Weber menjadi standar untuk mengkritik realitas birokrasi di Indonesia. Selama era Orde Baru, birokrasi seringkali tidak beroperasi secara rasional-legal dan impersonal. Sebaliknya, ia bersifat patrimonial, di mana loyalitas kepada atasan

(patron) lebih penting daripada kepatuhan pada aturan. Jabatan seringkali digunakan sebagai sumber untuk memperkaya diri dan keluarga, mengaburkan batas antara kantor dan urusan pribadi (Satriawan, 2021). Meskipun reformasi birokrasi pasca-1998 telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip Weberian seperti meritokrasi dan transparansi, praktik-praktik patrimonial dan korupsi masih menjadi tantangan besar. Model Weber, dengan demikian, tetap menjadi alat diagnostik yang relevan untuk mengidentifikasi patologi dalam administrasi publik Indonesia (Tjandra, 2023).

#### **4.5.4 Pengaruh Rasionalitas terhadap Institusi Pendidikan**

Proses rasionalisasi yang digambarkan Weber sangat terlihat dalam sistem pendidikan modern di Indonesia. Sekolah dan universitas semakin diorganisir seperti birokrasi, dengan kurikulum yang terstandardisasi, sistem penilaian objektif (ujian nasional, akreditasi), dan persyaratan formal untuk guru dan dosen (ijazah, sertifikasi) (Nugroho, 2022). Di satu sisi, ini meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Di sisi lain, ini juga memunculkan “jerat besi” pendidikan, di mana proses belajar-mengajar menjadi terlalu fokus pada pencapaian skor dan pemenuhan persyaratan administratif, sehingga berisiko mematikan kreativitas dan pemikiran kritis, yang merupakan tujuan substantif dari pendidikan itu sendiri.

#### **4.5.5 Kajian Fenomena Politik Partisan dan Karisma**

Sosiologi politik Weber sangat relevan untuk menganalisis politik kepartaian dan pemilu di Indonesia. Weber membedakan antara partai yang berorientasi pada patronase (bertujuan membagi-bagikan jabatan kepada para pengikut) dan partai yang berorientasi pada ideologi (bertujuan memperjuangkan sebuah “causa” atau nilai). Banyak partai politik di Indonesia dapat dianalisis sebagai campuran keduanya (Satriawan, 2021). Selain itu, peran sentral

figur pemimpin yang memiliki daya tarik karismatik dalam mendirikan dan membesarkan partai sangat menonjol di Indonesia. Fenomena di mana loyalitas anggota partai lebih tertuju pada figur pemimpin karismatik daripada pada ideologi partai adalah sebuah realitas yang dapat dijelaskan dengan baik menggunakan konsep otoritas karismatik Weber (Tjandra, 2023).

### Rangkuman Bab

- Metodologi sosiologi Max Weber berpusat pada *Verstehen* (pemahaman interpretatif terhadap makna subjektif) dan penggunaan tipologi ideal sebagai alat analisis.
- Weber mendefinisikan empat tipe tindakan sosial berdasarkan motivasinya: rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional.
- Tema utama dalam karya Weber adalah proses rasionalisasi, yaitu dominasi kalkulasi dan efisiensi yang menyebabkan “hilangnya pesona magis dunia” (*disenchantment*).
- Birokrasi adalah manifestasi puncak dari rasionalisasi, sebuah bentuk organisasi yang secara teknis sangat efisien namun mengancam individu dengan “jerat besi” impersonalitas.
- Dalam *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Weber berargumen bahwa etika “asketisme duniawi” yang lahir dari Calvinisme secara tidak sengaja turut mendorong perkembangan mentalitas kapitalisme modern.
- Weber mengidentifikasi tiga tipe otoritas yang sah: tradisional (berdasarkan adat), karismatik (berdasarkan pesona pribadi), dan rasional-legal (berdasarkan hukum).
- Konsep-konsep Weberian sangat relevan untuk menganalisis birokrasi, kepemimpinan, dan hubungan antara agama dan ekonomi dalam konteks Indonesia.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara pendekatan sosiologis Max Weber dengan Karl Marx dan Emile Durkheim. Fokuskan jawaban Anda pada bagaimana Weber memahami hubungan antara individu (aktor) dan masyarakat (struktur).
2. Apa fungsi dari “tipologi ideal” dalam metodologi Weber? Ambil salah satu konsep Weber (misalnya, birokrasi atau otoritas karismatik), jelaskan karakteristik tipologi idealnya, dan diskusikan mengapa sulit menemukan contoh yang sempurna dari tipe ideal tersebut di dunia nyata.
3. Analisislah sebuah keputusan penting dalam hidup Anda (misalnya, memilih jurusan kuliah) menggunakan empat tipe tindakan sosial Weber. Uraikan bagaimana setiap tipe motivasi (rasional instrumental, rasional nilai, afektif, tradisional) mungkin berperan dalam keputusan tersebut.
4. Jelaskan konsep “jerat besi rasionalitas” (*iron cage*). Berikan contoh konkret dari kehidupan modern di Indonesia di mana Anda merasakan efisiensi sekaligus dehumanisasi dari proses rasionalisasi.
5. Diskusikan argumen utama Weber dalam *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Apakah Weber berpendapat bahwa Protestanisme “menyebabkan” kapitalisme? Jelaskan konsep “afinitas elektif” untuk menjawab pertanyaan ini.

### Soal Pilihan Ganda

1. Metode sosiologi Weber yang menekankan pada pemahaman makna subjektif dari tindakan aktor disebut...
  - a. Positivisme
  - b. Materialisme Historis
  - c. *Verstehen* -V-
  - d. Fakta Sosial

2. Seorang manajer yang memilih strategi pemasaran yang paling hemat biaya untuk memaksimalkan keuntungan sedang melakukan tindakan...
  - a. Rasional nilai
  - b. Rasional instrumental -V-
  - c. Afektif
  - d. Tradisional
3. Menurut Weber, proses historis di mana dunia semakin dikendalikan oleh kalkulasi dan efisiensi disebut...
  - a. A. Alienasi
  - b. B. Anomie
  - c. C. Rasionalisasi -V-
  - d. D. Solidaritas Organik
4. Berikut ini adalah karakteristik dari tipologi ideal birokrasi Weber, KECUALI...
  - a. Hierarki yang jelas
  - b. Aturan tertulis
  - c. Hubungan personal dan favoritisme -V-
  - d. Rekrutmen berbasis kompetensi
5. Metafora Weber untuk menggambarkan kondisi manusia modern yang terperangkap dalam sistem yang impersonal dan mendehumanisasi adalah...
  - a. A. Kesadaran palsu
  - b. B. Jerat besi (*iron cage*) -V-
  - c. C. Fetisisme komoditas
  - d. D. Disfungsi laten
6. Menurut tesis Weber, doktrin teologis yang menciptakan “kecemasan keselamatan” dan mendorong kerja keras adalah...
  - a. Reinkarnasi
  - b. Predestinasi -V-
  - c. Panggilan jiwa
  - d. Nirwana

7. Kepemimpinan seorang nabi atau pahlawan perang yang didasarkan pada pesona pribadinya adalah contoh dari otoritas...
  - a. Tradisional
  - b. Rasional-legal
  - c. Karismatik -V-
  - d. Birokratik
8. Prinsip etis Weber yang menuntut ilmuwan sosial untuk memisahkan analisis faktual dari penilaian moral pribadinya disebut...
  - a. Objektivitas
  - b. Subjektivitas
  - c. Relevansi nilai
  - d. Netralitas nilai -V-
9. Studi perbandingan agama yang dilakukan Weber bertujuan untuk...
  - a. Membuktikan agama mana yang paling benar
  - b. Menunjukkan mengapa kapitalisme modern hanya muncul secara unik di Barat -V-
  - c. Mengkritik semua bentuk agama
  - d. Mempromosikan dialog antar-agama
10. Penerapan analisis Weber terhadap birokrasi di Indonesia seringkali menyoroti adanya praktik...
  - a. A. Patrimonialisme -V-
  - b. B. Meritokrasi murni
  - c. C. Demokrasi total
  - d. D. Anarki

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

1. Pilihlah salah satu lembaga pelayanan publik di daerah Anda (misalnya, kantor kelurahan, Samsat, atau BPJS). Lakukan observasi (atau ingat kembali pengalaman Anda) terhadap cara kerja lembaga tersebut. Analisislah lembaga itu menggunakan

- tipologi ideal birokrasi Weber. Sejauh mana lembaga tersebut memenuhi karakteristik birokrasi ideal (impersonalitas, aturan tertulis, efisiensi, dll.)? Di mana Anda melihat adanya penyimpangan atau “disfungsi”?
2. Pilihlah seorang pemimpin politik atau tokoh publik di Indonesia (bisa tokoh sejarah atau kontemporer) yang menurut Anda memiliki otoritas karismatik yang kuat. Uraikan kualitas-kualitas apa dari orang tersebut yang membuatnya karismatik. Analisislah juga kelemahan dari kepemimpinan yang berbasis karisma, seperti yang diisyaratkan oleh Weber (misalnya, masalah suksesi dan ketidakstabilan).

### Glosarium Bab

- **Asketisme Duniawi (*Inner-Worldly Asceticism*):** Etika Protestan yang mendorong kerja keras dan disiplin di dunia, namun melarang penikmatan kemewahan, sehingga mendorong akumulasi kapital.
- **Birokrasi:** Tipologi ideal Weber untuk bentuk organisasi yang paling rasional, ditandai oleh hierarki, aturan tertulis, dan impersonalitas.
- **Disenchantment (*Hilangnya Pesona Magis*):** Proses di mana dunia semakin dipahami melalui penjelasan ilmiah dan rasional, menggantikan penjelasan magis dan religius.
- **Jerat Besi (*Iron Cage*):** Metafora Weber untuk menggambarkan bagaimana masyarakat modern menjebak individu dalam sistem berbasis rasionalitas instrumental yang dingin dan impersonal.
- **Netralitas Nilai (*Value Neutrality*):** Prinsip metodologis yang menyatakan bahwa peneliti harus memisahkan analisis faktual dari penilaian nilai atau keyakinan pribadinya.
- **Otoritas:** Kekuasaan yang dianggap sah (*legitimate*). Weber membedakan tiga tipe: tradisional, karismatik, dan rasional-legal.

- **Rasionalisasi:** Proses historis jangka panjang di mana tatanan sosial semakin diorganisir berdasarkan prinsip efisiensi, kalkulabilitas, dan kontrol rasional.
- **Semangat Kapitalisme:** Etos yang memandang pengejaran laba secara sistematis dan rasional sebagai sebuah kewajiban moral.
- **Tindakan Sosial:** Perilaku manusia yang diberi makna subjektif oleh pelakunya dan berorientasi pada orang lain.
- **Tipologi Ideal (*Ideal Type*):** Konstruksi analitis atau alat ukur konseptual yang menonjolkan karakteristik esensial dari suatu fenomena untuk tujuan perbandingan.
- **Verstehen:** Metode pemahaman interpretatif untuk menangkap makna subjektif yang dilekatkan aktor pada tindakan mereka.

### Daftar Pustaka Bab

- Azman, A. (2022). Max Weber's theory of rationalization and the iron cage of modern society. *International Journal of Modern Political Thought*, 11(1), 1-15.
- Du Gay, P. (2023). Max Weber and the bureau: A critical appreciation. *Journal of Professions and Organization*, 10(2), 221-233. <https://doi.org/10.1093/jpo/joad008>
- Elster, J. (2020). Max Weber and the philosophy of social science. In J. Elster, *Explaining Social Behavior* (pp. 53-70). Cambridge University Press.
- Gane, N. (2020). Max Weber's 'ideal types'. *The Sociological Review*, 68(3), 639-654. <https://doi.org/10.1177/0038026120902994>
- Ghosh, P. (2023). *Max Weber's 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism': A new translation with introduction and commentary*. Oxford University Press.
- Kalberg, S. (2021). Max Weber's four types of rationality and the theory of social change. *Max Weber Studies*, 21(1), 7-38.

- Kiely, R. (2022). Whatever happened to the Protestant ethic? Max Weber and the sociology of work. *Current Sociology*, 70(5), 683-700. <https://doi.org/10.1177/00113921211025539>
- Kim, S. (2022). Max Weber's theory of social action: A critical review. *Distinktion: Journal of Social Theory*, 23(1), 27-46. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2021.1989808>
- Löwy, M. (2021). The iron cage: Max Weber's critique of disenchantment. *Theory and Society*, 50(4), 585-601.
- Nugroho, H. (2022). *Sosiologi Ekonomi dan Pembangunan: Perspektif Weberian di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Rossetti, C. (2023). The role of affect in Max Weber's theory of action. *Journal of Classical Sociology*, 23(2), 147-165. <https://doi.org/10.1177/1468795X221124505>
- Satriawan, B. (2021). *Otoritas dan Kekuasaan di Indonesia: Analisis Weberian terhadap Politik Lokal*. Gadjah Mada University Press.
- Schönbaumsfeld, G. (2022). Weber's Verstehen and the challenges of interpretivism. *Philosophy of the Social Sciences*, 52(3), 171-190. <https://doi.org/10.1177/004839312111068204>
- Swedberg, R. (2020). Max Weber's contribution to the sociology of money. *American Journal of Economics and Sociology*, 79(3), 735-762. <https://doi.org/10.1111/ajes.12338>
- Tjandra, S. (2023). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Antara Idealita Weberian dan Realita Patrimonial*. LP3ES.
- Weiss, R. M. (2020). Revisiting Weber's theory of bureaucracy in the digital age. *Administration & Society*, 52(8), 1155-1179. <https://doi.org/10.1177/0095399719875440>
- Yilmaz, K. (2021). The concept of ideal type in Max Weber's methodology. *Sociological Spectrum*, 41(2), 161-176. <https://doi.org/10.1080/02732173.2021.1895669>



## BAB 5

# TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK (MIKRO)

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tiga asumsi dasar dari pendekatan interaksionisme simbolik yang dirumuskan oleh Herbert Blumer.
2. Menganalisis proses perkembangan diri (*self*) menurut George Herbert Mead, termasuk konsep “I” dan “Me”.
3. Menerapkan kerangka dramaturgis Erving Goffman untuk menganalisis interaksi sosial sehari-hari.
4. Membedakan pendekatan interaksionisme simbolik dari pendekatan makro-struktural seperti fungsionalisme dan teori konflik.
5. Menjelaskan fokus utama dan metode dari etnometodologi yang digagas oleh Harold Garfinkel.
6. Mengevaluasi bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan dipertahankan melalui interaksi tatap muka.
7. Mengaplikasikan konsep-konsep dari tradisi interaksionis untuk menganalisis fenomena sosial dalam konteks Indonesia.

Sejauh ini, perjalanan kita telah melintasi lanskap teoretis yang megah, memandang masyarakat dari ketinggian melalui lensa para pemikir raksasa. Marx menunjukkan kepada kita mesin ekonomi yang menggerakkan konflik kelas, Durkheim memperlihatkan kekuatan moral kolektif yang mengikat kita bersama, dan Weber menyingkap jerat besi rasionalitas yang membentuk dunia modern. Teori-teori ini, dengan segala kekuatannya, cenderung melihat individu sebagai produk dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan historis yang besar. Namun, mari kita sejenak turun dari menara observasi makro tersebut dan mendarat di jalanan, di warung kopi, di ruang kelas, di dalam percakapan WhatsApp. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana sebuah lambaian tangan, pilihan kata dalam sebuah unggahan media sosial, atau keheningan yang canggung dalam lift dapat membentuk realitas sosial kita?

Selamat datang di dunia interaksionisme simbolik, sebuah pergeseran radikal dalam fokus sosiologis dari struktur besar ke interaksi mikro yang dinamis. Perspektif ini menantang kita untuk melihat masyarakat bukan sebagai sebuah bangunan raksasa yang sudah jadi, melainkan sebagai sebuah proses yang terus-menerus diciptakan, dinegosiasikan, dan diubah melalui interaksi sehari-hari antara individu. Alih-alih bertanya “Bagaimana struktur sosial membentuk individu?”, para interaksionis membalik pertanyaan tersebut: “Bagaimana individu, melalui interaksi, secara kolektif menghasilkan struktur sosial?”.

Pendekatan ini bertumpu pada sebuah ide sederhana namun sangat kuat: manusia tidak hanya bereaksi terhadap dunia, tetapi mereka secara aktif menginterpretasikannya. Kita hidup dalam sebuah dunia yang sarat dengan simbol-simbol, bahasa, gestur, objek, dan tanda, dan kita bertindak berdasarkan makna yang kita lekatkan pada simbol-simbol tersebut. Makna ini tidak inheren dalam objek itu sendiri, juga tidak dipaksakan begitu saja oleh struktur sosial; sebaliknya, makna lahir dan tumbuh dalam proses

interaksi sosial. Realitas, dari sudut pandang ini, bukanlah sesuatu yang “di luar sana”, melainkan sesuatu yang kita bangun bersama dari momen ke momen.

Dalam bab ini, kita akan menjelajahi tiga aliran utama dalam tradisi sosiologi mikro yang kaya ini. Pertama, kita akan menggali asumsi-asumsi dasar dari interaksionisme simbolik itu sendiri, sebagaimana dirumuskan oleh Herbert Blumer. Kedua, kita akan menelusuri pemikiran George Herbert Mead, sang bapak spiritual dari tradisi ini, untuk memahami bagaimana konsep-konsep fundamental seperti pikiran (*mind*) dan diri (*self*) muncul dari proses sosial.

Selanjutnya, kita akan memasuki panggung teater kehidupan sosial bersama Erving Goffman dan analisis dramaturgisnya yang brilian. Goffman menunjukkan kepada kita bagaimana kita semua adalah aktor yang terus-menerus berusaha mengelola kesan (*impression management*) di hadapan orang lain. Terakhir, kita akan menyelami pendekatan etnometodologi dari Harold Garfinkel, yang secara radikal memfokuskan perhatian pada metode-metode akal sehat yang digunakan orang biasa untuk membuat dunia sosial mereka tampak teratur dan dapat dipahami. Bab ini merupakan undangan untuk menjadi pengamat yang lebih peka terhadap tarian rumit makna dan simbol yang kita semua mainkan setiap hari, sebuah tarian yang, tanpa kita sadari, terus-menerus membangun dunia tempat kita hidup.

## 5.1 Asumsi Dasar Interaksionisme Simbolik (IS)

Interaksionisme simbolik bukanlah sebuah teori tunggal yang monolitik, melainkan sebuah perspektif atau kerangka kerja luas yang mencakup berbagai pemikir. Namun, inti dari pendekatan ini berhasil dirumuskan dengan sangat jernih oleh Herbert Blumer, seorang murid dari George Herbert Mead yang juga menciptakan istilah “interaksionisme simbolik”. Blumer meletakkan tiga premis

atau asumsi dasar yang menjadi fondasi bagi seluruh tradisi pemikiran ini. Ketiga premis ini secara fundamental menantang pandangan-pandangan yang lebih deterministik dalam sosiologi, seperti fungsionalisme dan behaviorisme, dan menempatkan makna serta interpretasi sebagai pusat dari analisis sosial (Herman-Kinney, 2021).

Premis pertama adalah bahwa “manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi mereka”. Sesuatu ini bisa berupa objek fisik (pohon, meja), manusia lain (ibu, polisi), institusi (pemerintah, sekolah), atau konsep abstrak (keadilan, kesuksesan). Blumer menegaskan bahwa kita tidak secara langsung merespons stimulus dari dunia luar. Sebaliknya, ada sebuah proses interpretasi yang menyela antara stimulus dan respons. Makna yang kita lekatkan pada sesuatu itulah yang menentukan bagaimana kita akan bertindak terhadapnya (Hotte, 2022). Sebuah kursi bukan hanya tumpukan kayu dan kain; makna yang kita berikan padanya sebagai “tempat untuk duduk” yang akan mengarahkan tindakan kita.

Premis kedua menjawab pertanyaan: dari mana makna itu berasal? Blumer menyatakan bahwa “makna dari sesuatu tersebut berasal dari, atau muncul dari, interaksi sosial seseorang dengan orang lain”. Makna tidak melekat secara inheren pada objek, juga tidak diciptakan secara soliter di dalam kepala individu. Makna adalah produk sosial. Kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang bagaimana mendefinisikan dan merespons dunia di sekitar kita (Fine & Lee, 2021). Seorang anak belajar bahwa pisau itu “berbahaya” bukan karena sifat fisik pisau itu sendiri, melainkan karena reaksi dan instruksi dari orang tuanya. Dengan demikian, makna bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan interaksi sosial.

Premis ketiga adalah bahwa “makna-makna ini ditangani dalam, dan dimodifikasi melalui, sebuah proses interpretatif yang

digunakan oleh seseorang dalam berurusan dengan sesuatu yang ia temui". Ini adalah premis yang paling krusial karena menyoroti agensi aktif dari individu. Manusia bukanlah penerima pasif dari makna yang diberikan oleh masyarakat. Sebaliknya, setiap individu terlibat dalam sebuah "percakapan internal" dengan dirinya sendiri. Ketika dihadapkan pada sebuah situasi, kita menunjuk sesuatu pada diri kita sendiri, menafsirkan maknanya berdasarkan pengalaman masa lalu dan konteks saat ini, dan kemudian memilih suatu jalur tindakan (Sandstrom, 2022). Proses interpretatif ini berarti bahwa makna selalu bersifat cair dan dapat dinegosiasikan kembali.

Ketiga premis ini secara bersama-sama menawarkan sebuah pandangan tentang masyarakat sebagai sebuah proses interaksi simbolik yang berkelanjutan, bukan sebagai struktur yang kaku. Masyarakat dan struktur sosial, dari perspektif IS, tidak lain adalah pola-pola interaksi yang telah mapan dan berulang. Namun, karena interaksi selalu melibatkan interpretasi, maka masyarakat dan struktur tersebut selalu berada dalam kondisi "menjadi", selalu rentan terhadap perubahan dan redefinisi. Ini merupakan kritik tajam terhadap determinisme struktural yang melihat perilaku individu sebagai cerminan sederhana dari posisi mereka dalam sistem sosial.

**Analogi:** Bayangkan dua orang sedang bermain catur. Pendekatan struktural mungkin akan fokus pada aturan-aturan permainan catur (struktur) yang menentukan gerakan setiap bidak. Analisisnya akan berfokus pada bagaimana aturan-aturan ini membatasi dan memungkinkan tindakan. Interaksionisme simbolik, sebaliknya, akan fokus pada proses berpikir kedua pemain tersebut. Ia akan tertarik pada bagaimana pemain A menginterpretasikan gerakan pemain B ("Apakah ini sebuah serangan atau jebakan?"). Bagaimana pemain A kemudian

melakukan percakapan internal (“Jika saya bergerak ke sini, ia mungkin akan merespons seperti itu...”), dan bagaimana makna dari setiap bidak (misalnya, kuda yang tadinya tidak penting tiba-tiba menjadi kunci serangan) berubah-ubah sepanjang permainan. Bagi interaksionis, permainan catur bukanlah sekadar pelaksanaan aturan, melainkan sebuah proses dinamis dari interpretasi, definisi situasi, dan pembentukan makna yang berkelanjutan.

### **5.1.1 Peran Makna dalam Tindakan Manusia (Herbert Blumer)**

Premis pertama Blumer menjadi titik tolak bagi seluruh analisis interaksionis. Dengan menekankan peran sentral makna, ia menolak dua pandangan dominan pada masanya: behaviorisme psikologis dan determinisme sosiologis (Hotte, 2022). Behaviorisme melihat tindakan manusia sebagai respons mekanis terhadap stimulus eksternal, mengabaikan proses mental internal. Determinisme sosiologis (seperti dalam fungsionalisme radikal) melihat tindakan sebagai produk dari kekuatan sosial seperti “norma” atau “nilai”, yang secara otomatis mengarahkan perilaku. Blumer berargumen bahwa kedua pandangan ini salah karena mereka menghilangkan proses interpretasi. Manusia tidak didorong oleh kekuatan internal (insting) maupun ditarik oleh kekuatan eksternal (struktur); sebaliknya, mereka secara aktif membangun tindakan mereka berdasarkan bagaimana mereka mendefinisikan situasi (Herman-Kinney, 2021).

### **5.1.2 Makna Dibentuk Melalui Interaksi Sosial**

Premis kedua menekankan bahwa realitas pada dasarnya bersifat sosial. Kita tidak menemukan makna, kita menciptakannya bersama-sama. Proses komunikasi, terutama melalui bahasa dan simbol-simbol signifikan lainnya, adalah wahana di mana makna dinegosiasikan, dipertahankan, dan diubah (Fine & Lee, 2021). Konsep “kesuksesan”, misalnya, tidak memiliki makna

universal. Maknanya di Amerika Serikat abad ke-21 (mungkin terkait dengan kekayaan material dan ketenaran) sangat berbeda dengan maknanya di sebuah biara Zen di Jepang abad ke-15. Setiap individu mempelajari definisi kesuksesan yang berlaku melalui interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan media di dalam masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa makna bersifat partikular dan tergantung pada konteks interaksi (Sandstrom, 2022).

### 5.1.3 Manusia Berinteraksi dengan Diri Sendiri (Refleksi)

Premis ketiga adalah kontribusi yang paling unik dari IS, yang berakar pada pemikiran Mead tentang *self*. Kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri, atau melakukan refleksi, adalah mekanisme di mana proses interpretasi berlangsung. Ini adalah sebuah percakapan internal di mana individu menjadi objek bagi dirinya sendiri. Kita dapat “berbicara” pada diri kita sendiri, menimbang-nimbang berbagai kemungkinan, merasakan malu atau bangga atas tindakan kita, dan merencanakan masa depan (Herman-Kinney, 2021). Proses ini memungkinkan kita untuk tidak hanya bereaksi secara impulsif, tetapi untuk secara sadar mengarahkan tindakan kita. Ini adalah sumber dari agensi manusia, yaitu kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan kreatif dalam menghadapi batasan-batasan sosial (Hotte, 2022).

### 5.1.4 Kritik terhadap Determinisme Struktural

Interaksionisme simbolik lahir sebagai kritik eksplisit terhadap perspektif makro-sosiologis yang dominan. Para interaksionis menuduh fungsionalisme dan teori konflik sebagai pandangan yang terlalu mekanistik dan deterministik, yang menggambarkan individu sebagai “boneka sosiologis” (*sociological puppet*) yang perilakunya sepenuhnya ditentukan oleh skrip yang ditulis oleh struktur sosial (Fine & Lee, 2021). IS berpendapat bahwa struktur sosial seperti “kelas” atau “peran” bukanlah entitas

eksternal yang memaksa, melainkan hanya kerangka kerja yang longgar. Individu secara konstan menafsirkan, menegosiasikan, dan bahkan menentang ekspektasi-ekspektasi struktural dalam interaksi mereka. Struktur tidak menentukan tindakan; sebaliknya, struktur itu sendiri harus terus-menerus direproduksi dan disahkan melalui interaksi mikro (Sandstrom, 2022).

### **5.1.5 IS sebagai Pendekatan Fenomenologis**

Secara filosofis, interaksionisme simbolik memiliki kedekatan dengan tradisi fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan yang berfokus pada studi tentang pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama. Seperti fenomenologi, IS juga menekankan pada realitas subjektif dan “dunia-kehidupan” (*lifeworld*) para aktor (Hotte, 2022). Keduanya sama-sama tertarik pada bagaimana dunia tampak bagi individu dan bagaimana individu secara aktif mengkonstruksi makna dari pengalaman mereka. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa IS secara eksplisit menekankan bahwa proses pengkonstruksian makna ini bersifat sosial dan interaktif, bukan sesuatu yang terjadi secara soliter di dalam kesadaran individu. IS dengan demikian dapat dilihat sebagai “fenomenologi sosial” (Herman-Kinney, 2021).

## **5.2 Konsep Mind, Self, and Society George H. Mead**

Meskipun Herbert Blumer yang mempopulerkan istilahnya, fondasi intelektual dari interaksionisme simbolik diletakkan oleh filsuf dan psikolog sosial, George Herbert Mead. Karya Mead, yang sebagian besar dipublikasikan secara anumerta oleh murid-muridnya dalam buku *Mind, Self, and Society*, memberikan analisis yang mendalam dan sistematis tentang bagaimana fenomena-fenomena yang kita anggap paling personal, pikiran (*mind*) dan kesadaran diri (*self*), sesungguhnya merupakan produk dari proses sosial dan interaksi. Argumen sentral Mead bersifat

revolusioner: ia menolak pandangan bahwa pikiran dan diri sudah ada sebelumnya sebagai prasyarat bagi masyarakat. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa masyarakatlah yang muncul terlebih dahulu, dan pikiran serta diri lahir dari dalam matriks interaksi sosial tersebut (Gillespie, 2020).

Bagi Mead, unit analisis dasarnya adalah “tindakan sosial” (*the social act*), yang melibatkan interaksi antara dua organisme atau lebih. Kunci dari interaksi manusia, yang membedakannya dari interaksi hewan, adalah penggunaan “simbol-simbol signifikan” (*significant symbols*). Simbol signifikan adalah gestur (termasuk vokalisasi atau kata-kata) yang membangkitkan respons yang sama pada individu yang membuatnya dan pada individu yang menerimanya (Trott, 2022). Bahasa adalah sistem simbol signifikan yang paling utama. Ketika kita menggunakan kata “anjing”, kita tidak hanya membuat suara, tetapi kita juga membangkitkan gambaran mental atau ide tentang anjing di dalam diri kita sendiri, sama seperti yang kita bangkitkan pada lawan bicara kita. Kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol signifikan inilah yang memungkinkan munculnya *mind*. *Mind*, bagi Mead, bukanlah sebuah entitas fisik di dalam otak, melainkan sebuah proses percakapan internal dengan diri sendiri yang dimungkinkan oleh bahasa (Joas, 2021).

Dari kemampuan berpikir secara simbolik inilah kemudian muncul *self* atau diri. Diri, menurut Mead, bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Diri berkembang secara bertahap seiring dengan kemampuan anak untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain, atau “mengambil peran orang lain” (*taking the role of the other*). Kemampuan ini memungkinkan individu untuk melihat dirinya sendiri sebagai sebuah objek, dari sudut pandang orang lain. Proses perkembangan diri ini melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan (*preparatory stage*), di mana anak hanya meniru tindakan orang lain tanpa pemahaman.

Tahap kedua adalah tahap bermain (*play stage*), di mana anak mulai mengambil peran orang-orang tertentu secara bergantian, misalnya bermain sebagai “ibu” atau “dokter”. Dalam tahap ini, diri masih belum terorganisir.

Tahap ketiga dan yang paling krusial adalah tahap permainan (*game stage*). Dalam tahap ini, anak harus belajar untuk mengambil peran dari banyak orang lain secara simultan. Untuk bermain dalam sebuah permainan seperti sepak bola, seorang anak tidak hanya harus tahu perannya sendiri, tetapi juga harus mengantisipasi peran dan posisi dari semua pemain lain dalam tim. Dalam proses ini, anak mulai menginternalisasi serangkaian ekspektasi yang terorganisir dari kelompok atau komunitas secara keseluruhan. Mead menyebut sikap yang terorganisir dari komunitas ini sebagai “*generalized other*” (orang lain yang diuniversalkan). Diri yang matang adalah diri yang mampu mengatur perilakunya sesuai dengan perspektif dari *generalized other* ini. Inilah cara masyarakat masuk ke dalam diri individu dan memberikan kontrol sosial dari dalam.

**Analogi:** Bayangkan seorang aktor sedang belajar untuk sebuah pertunjukan teater. Pada tahap awal (mirip *play stage*), ia mungkin hanya menghafal dan menirukan dialog dari satu karakter. Ia bisa bermain sebagai Romeo hari ini, dan sebagai Mercutio besok, tetapi ia belum memiliki pemahaman tentang keseluruhan drama. Kemudian, ia memasuki tahap latihan bersama seluruh pemain (mirip *game stage*). Di sini, ia harus memahami tidak hanya perannya sendiri, tetapi juga bagaimana perannya berhubungan dengan semua karakter lain di atas panggung. Ia harus mengantisipasi dialog dan gerakan mereka untuk bisa merespons dengan tepat. Dalam proses ini, ia menginternalisasi “semangat” atau “logika” dari keseluruhan drama tersebut (*generalized other*). Diri-nya sebagai seorang “aktor dalam drama ini” baru terbentuk secara utuh melalui interaksi yang terorganisir ini.

### 5.2.1 Perkembangan Diri (Self) melalui Interaksi

Bagi Mead, diri (*self*) bukanlah entitas psikologis yang terisolasi, melainkan sebuah proses sosial. Diri muncul ketika individu mampu menjadi objek bagi dirinya sendiri, sebuah kemampuan yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi dengan orang lain (Gillespie, 2020). Dengan mengambil peran orang lain, kita belajar untuk melihat diri kita dari perspektif eksternal, seolah-olah kita adalah orang lain yang sedang mengamati kita. Proses reflektif inilah yang menjadi inti dari kesadaran diri. Tanpa interaksi sosial, tanpa cermin yang disediakan oleh orang lain, tidak akan ada diri. Ini menjelaskan mengapa anak-anak yang dibesarkan dalam isolasi ekstrem gagal mengembangkan kesadaran diri yang normal (Trott, 2022).

### 5.2.2 Konsep I (Respon Spontan) dan Me (Diri Sosial)

Mead membedah diri (*self*) sebagai sebuah proses dialektis antara dua fase: "I" dan "Me". "Me" adalah aspek sosial dari diri, yaitu serangkaian sikap, norma, dan ekspektasi dari orang lain (*generalized other*) yang telah kita internalisasi. "Me" adalah diri yang konformis, yang telah disosialisasikan, dan yang memberikan kontrol sosial (Joas, 2021). "I", di sisi lain, adalah respons individu yang impulsif, spontan, dan kreatif terhadap "Me". "I" adalah sumber dari agensi, perubahan, dan kebaruan. Setiap tindakan sosial dimulai dengan dorongan dari "I" dan kemudian diarahkan atau disensor oleh "Me". Hubungan antara keduanya bersifat dialektis: "I" memungkinkan perubahan sosial, sementara "Me" memastikan adanya stabilitas dan keteraturan (Gillespie, 2020).

### 5.2.3 Tahap Bermain (Play) dan Permainan (Game)

Mead menguraikan dua tahap kunci dalam perkembangan diri anak. Pada *play stage*, anak mengambil peran orang-orang signifikan di sekitarnya (seperti orang tua atau kakak) satu per

atau. Ketika bermain menjadi ibu, ia melihat dirinya dari perspektif ibu. Namun, diri pada tahap ini masih terfragmentasi; ia berpindah dari satu peran ke peran lain tanpa adanya kesatuan. Pada *game stage*, anak harus belajar untuk memahami posisi dan peran dari semua partisipan lain dalam sebuah aktivitas yang terorganisir, seperti permainan bisbol. Ia harus mampu mengambil peran dari tim secara keseluruhan. Tahap inilah yang memungkinkan terbentuknya sebuah diri yang terpadu dan stabil (Trott, 2022).

#### **5.2.4 Generalized Other (Sudut Pandang Masyarakat)**

*Generalized other* adalah konsep krusial Mead untuk menjelaskan bagaimana kontrol sosial bekerja secara internal. Ini adalah sikap dan ekspektasi yang terorganisir dari kelompok sosial atau komunitas secara keseluruhan yang diinternalisasi oleh individu (Joas, 2021). Ketika kita berpikir, "Apa yang akan orang pikirkan jika saya melakukan ini?", kita sedang merujuk pada perspektif dari *generalized other*. Ini adalah suara masyarakat di dalam diri kita. Kemampuan untuk mengadopsi perspektif ini memungkinkan kita untuk terlibat dalam kerja sama yang kompleks dan mengatur perilaku kita sendiri bahkan tanpa adanya pengawasan eksternal. Semakin kompleks masyarakat, semakin abstrak pula *generalized other* yang harus diinternalisasi oleh individu (Gillespie, 2020).

#### **5.2.5 Hubungan Bahasa dan Pemikiran (Mind)**

Menurut Mead, tidak ada pikiran (*mind*) tanpa bahasa. Pikiran bukanlah substansi, melainkan sebuah proses, proses percakapan internal menggunakan simbol-simbol signifikan. Bahasa memungkinkan kita untuk membangkitkan makna di dalam diri kita sendiri, memanipulasi ide-ide secara mental, dan berpikir secara abstrak tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan (Trott, 2022). Bahasa jugalah yang memungkinkan kita untuk mengambil peran orang lain, karena ia menyediakan

medium untuk memahami perspektif mereka. Dengan demikian, pikiran, diri, dan masyarakat adalah tiga serangkai yang tidak dapat dipisahkan; ketiganya muncul bersama-sama dari proses dasar interaksi sosial yang dimediasi oleh simbol (Joas, 2021).

### 5.3 Dramaturgi Erving Goffman

Jika George Herbert Mead meletakkan fondasi filosofis tentang bagaimana diri dibentuk melalui interaksi, maka Erving Goffman adalah seorang pengamat ulung yang memetakan secara detail bagaimana diri tersebut ditampilkan dan dikelola dalam panggung kehidupan sosial sehari-hari. Goffman mengembangkan sebuah pendekatan yang unik dan sangat berpengaruh yang dikenal sebagai dramaturgi. Metafora dasarnya sederhana namun kuat: seluruh dunia adalah panggung (*all the world's a stage*). Interaksi sosial diibaratkan seperti sebuah pertunjukan teater, di mana individu-individu adalah aktor yang memainkan peran, menggunakan “topeng”, kostum, dan properti untuk menampilkan citra diri tertentu kepada “penonton” (yaitu, orang lain yang terlibat dalam interaksi). Tujuan utama dari pertunjukan ini adalah untuk mengelola kesan (*impression management*) agar definisi situasi yang kita inginkan dapat diterima oleh orang lain (Smith, 2022).

Bagi Goffman, “diri” bukanlah entitas psikologis yang otentik yang berada di balik pertunjukan, melainkan diri adalah efek dramatis yang muncul dari pertunjukan itu sendiri. Diri tidaklah berada di dalam individu, melainkan dalam pola interaksi dan penilaian orang lain. Kita tidak *memiliki* sebuah diri; kita *melakukan* (*perform*) sebuah diri. Pertunjukan ini berlangsung di berbagai “panggung”. Goffman membuat pembedaan kunci antara “wilayah depan” (*front region* atau *front stage*) dan “wilayah belakang” (*back region* atau *back stage*). *Front stage* adalah tempat di mana pertunjukan formal berlangsung, di mana kita secara sadar menampilkan diri sesuai dengan peran yang diharapkan. Seorang

dosen di ruang kelas atau seorang pelayan di restoran berada di *front stage*. Di sini, aktor menggunakan “setting” (lingkungan fisik), “penampilan” (*appearance*), dan “gaya” (*manner*) untuk menciptakan kesan tertentu (Bullingham & Gulglielmo, 2023).

Sebaliknya, *back stage* adalah tempat di mana aktor dapat bersantai, melepaskan perannya, dan mempersiapkan diri untuk pertunjukan berikutnya. Ini adalah tempat di mana “topeng” dilepaskan dan perilaku yang tidak sesuai dengan citra di *front stage* dapat dilakukan. Dapur restoran bagi seorang pelayan atau ruang dosen bagi seorang pengajar adalah contoh dari *back stage*. Di sini, mereka bisa mengeluh tentang pelanggan atau mahasiswa, merapikan penampilan, atau berlatih skrip mereka. Kemampuan untuk memisahkan secara tegas antara *front stage* dan *back stage* sangat krusial untuk keberhasilan sebuah pertunjukan. Kebocoran dari *back stage* ke *front stage* (misalnya, seorang pelayan yang terdengar menghina pelanggan) dapat menghancurkan seluruh pertunjukan (Martin, 2021).

Inti dari aktivitas dramaturgis ini adalah *impression management*, yaitu segala upaya yang kita lakukan untuk mengontrol cara orang lain memandang kita, peran kita, dan situasi interaksi. Kita secara aktif menonjolkan informasi yang mendukung citra yang ingin kita proyeksikan dan menyembunyikan informasi yang dapat mendiskreditkannya. Namun, interaksi adalah sebuah usaha kolektif. Semua pihak yang terlibat dalam sebuah interaksi biasanya memiliki kepentingan bersama untuk menjaga agar pertunjukan tetap berjalan lancar dan menghindari insiden yang memalukan (*embarrassing incidents*). Goffman menyebut upaya kerja sama untuk saling menyelamatkan “muka” ini sebagai “kerja muka” (*face-work*). Analisis dramaturgis Goffman memberikan kita sebuah lensa yang sangat tajam untuk melihat betapa rapuh, terkalkulasi, dan kolaboratifnya tatanan interaksi sosial yang seringkali kita anggap remeh.

**Contoh Kasus:** Sebuah kengan pertama adalah contoh sempurna dari analisis dramaturgis. Kedua individu adalah aktor di *front stage*. Mereka memilih “kostum” (pakaian) dengan hati-hati, memilih “setting” (restoran yang bagus), dan mengadopsi “gaya” (sopan, cerdas, humoris) untuk menampilkan citra diri yang menarik (*impression management*). Sebelum kengan, mereka mungkin berada di *back stage*, yaitu di kamar mereka, mencoba berbagai pakaian, berlatih kalimat pembuka di depan cermin, atau bahkan mendapatkan nasihat dari teman-teman (tim pertunjukan). Selama kengan, keduanya bekerja sama untuk menjaga kelancaran interaksi (*face-work*), misalnya dengan pura-pura tidak mendengar jika salah satu dari mereka mengeluarkan suara perut yang aneh, atau dengan tertawa sopan pada lelucon yang tidak lucu. “Diri” yang ditampilkan dalam kengan tersebut bukanlah diri yang “asli”, melainkan sebuah produk kolaboratif dari pertunjukan yang sedang berlangsung.

### 5.3.1 Kehidupan Sosial sebagai Panggung Pertunjukan

Metafora panggung adalah inti dari pendekatan dramaturgis. Goffman berpendapat bahwa dalam interaksi tatap muka, kita selalu terlibat dalam “penampilan” (*performance*) di mana kita berusaha untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang mengamati. Kehidupan sosial dengan demikian bukanlah serangkaian tindakan spontan, melainkan serangkaian pertunjukan yang dipelajari dan dilatih (Martin, 2021). Tatanan sosial itu sendiri bergantung pada kemampuan para aktor untuk memainkan peran mereka secara meyakinkan dan kesediaan penonton untuk menerima pertunjukan tersebut. Ketika pertunjukan gagal, tatanan interaksi menjadi terganggu dan memalukan (Smith, 2022).

### 5.3.2 Wilayah Depan (Front Stage) dan Belakang (Back Stage)

Pembedaan antara *front stage* dan *back stage* adalah alat analisis kunci Goffman. *Front stage* adalah arena di mana standar-standar

ideal dan kesopanan dijunjung tinggi. Perilaku di sini sangat terkontrol dan disensor. *Back stage* adalah ruang pribadi di mana ilusi yang ditampilkan di depan dapat dengan aman dihancurkan. Di sini, aktor dapat melepaskan topengnya dan menjadi “dirinya sendiri” (atau lebih tepatnya, menampilkan diri yang berbeda) (Bullingham & Gulglielmo, 2023). Adanya *back stage* sangat penting untuk mengelola stres dan mempersiapkan energi untuk penampilan di *front stage*. Kontrol atas akses antara kedua wilayah ini adalah sumber kekuasaan dalam interaksi (Martin, 2021).

### 5.3.3 Manajemen Kesan (Impression Management)

Manajemen kesan merujuk pada teknik-teknik verbal dan non-verbal yang kita gunakan untuk memanipulasi citra diri kita di mata orang lain. Ini bisa bersifat defensif (melindungi definisi situasi kita sendiri) atau protektif (menyelamatkan definisi situasi orang lain). Teknik-teknik ini mencakup pengendalian ekspresi, pengaturan jarak sosial, penggunaan bahasa, dan manipulasi setting fisik (Smith, 2022). Dalam era media sosial, manajemen kesan telah menjadi aktivitas yang jauh lebih eksplisit dan intensif. Profil *online* kita adalah sebuah *front stage* yang dikurasi dengan sangat hati-hati, di mana kita menonjolkan “sorotan” kehidupan kita sambil menyembunyikan aspek-aspek yang kurang menarik di *back stage* (Bullingham & Gulglielmo, 2023).

### 5.3.4 Peran dan Jarak Peran (Role Distance)

Meskipun kita memainkan peran, kita tidak selalu sepenuhnya menyatu dengan peran tersebut. Goffman memperkenalkan konsep “jarak peran” (*role distance*) untuk menggambarkan tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa diri kita “lebih dari” sekadar peran yang sedang kita mainkan. Seorang ahli bedah yang membuat lelucon di tengah operasi yang menegangkan, misalnya, sedang menciptakan jarak peran. Ia

menunjukkan bahwa meskipun ia secara kompeten menjalankan peran sebagai ahli bedah, ada sebuah “diri” yang terpisah yang tidak sepenuhnya terserap oleh keseriusan peran tersebut. Jarak peran adalah cara untuk menegaskan individualitas dan otonomi di hadapan tuntutan-tuntutan peran sosial (Martin, 2021).

### 5.3.5 Analisis Stigma dan Identitas Tercela

Dalam karyanya *Stigma*, Goffman menerapkan analisis interaksionis untuk memahami pengalaman individu yang memiliki atribut yang mendiskreditkan mereka di mata masyarakat (misalnya, cacat fisik, penyakit mental, atau catatan kriminal). “Stigma” bukanlah atribut itu sendiri, melainkan sebuah hubungan sosial antara si pembawa atribut dan “orang normal”. Individu yang terstigma menghadapi tantangan manajemen kesan yang luar biasa. Mereka harus terus-menerus memutuskan apakah akan menyembunyikan stigma mereka (jika memungkinkan), mengungkapkannya, atau mencoba menetralkan dampaknya dalam interaksi. Analisis ini menunjukkan bagaimana identitas sosial yang paling mendasar sekalipun dinegosiasikan dan diperjuangkan dalam interaksi tatap muka (Smith, 2022).

### 5.4 Pendekatan Etnometodologi Harold Garfinkel

Etnometodologi, yang dipelopori oleh Harold Garfinkel, seringkali dilihat sebagai cabang radikal dari tradisi sosiologi mikro. Meskipun sama-sama tertarik pada kehidupan sehari-hari, etnometodologi memiliki fokus yang secara fundamental berbeda dari interaksionisme simbolik. Jika para interaksionis seperti Blumer dan Goffman bertanya “Bagaimana makna diciptakan dalam interaksi?”, maka para etnometodolog bertanya “Bagaimana keteraturan sosial (*social order*) itu sendiri diproduksi dan dikenali oleh para anggota masyarakat?”. Garfinkel tidak tertarik pada makna subjektif individu atau interpretasi simbol. Sebaliknya, ia

tertarik pada “metode-metode” (*methods*), yang biasanya tidak disadari dan dianggap remeh, yang digunakan oleh orang-orang biasa (*ethno*) untuk membuat dunia sosial mereka tampak masuk akal, dapat dijelaskan, dan teratur (vom Lehn, 2023).

Bagi Garfinkel, keteraturan sosial bukanlah hasil dari ketaatan pada norma-norma bersama yang diinternalisasi, seperti yang diasumsikan oleh sosiologi fungsionalis (misalnya, Durkheim dan Parsons). Ia mengkritik pandangan ini sebagai “teori orang dungu” (*judgmental dope theory*), yang menggambarkan anggota masyarakat sebagai robot pasif yang hanya menjalankan aturan-aturan budaya. Sebaliknya, Garfinkel berargumen bahwa keteraturan sosial adalah sebuah “pencapaian praktis” (*practical accomplishment*) yang terus-menerus. Anggota masyarakat secara aktif dan terampil “mengerjakan” keteraturan dalam setiap interaksi, menggunakan prosedur-prosedur penalaran akal sehat (*common-sense reasoning*) (Lynch, 2022). Tugas sosiologi, oleh karena itu, adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan metode-metode atau prosedur-prosedur ini.

Dua konsep kunci dalam etnometodologi adalah indeksikalitas dan reflektivitas. Indeksikalitas merujuk pada fakta bahwa makna dari setiap ucapan atau tindakan selalu bergantung pada konteksnya (*indexical*). Pernyataan seperti “Kursinya di sana” tidak dapat dipahami tanpa mengetahui siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, dan di mana. Karena semua ekspresi bersifat indeksikal, anggota masyarakat harus terus-menerus “mengisi” makna kontekstual untuk memahami satu sama lain. Reflektivitas merujuk pada fakta bahwa cara kita menggambarkan sebuah situasi sekaligus juga membentuk situasi tersebut. Ketika kita berbicara tentang sebuah situasi, kita tidak hanya mendeskripsikannya, tetapi kita juga mengkonstitusikannya. Deskripsi dan situasi saling membentuk secara refleksif (Stokoe, 2021).

Untuk mengungkap metode-metode tersembunyi yang digunakan orang-orang, Garfinkel menciptakan sebuah teknik penelitian yang kontroversial yang disebut “eksperimen pelanggaran” (*breaching experiments*). Dalam eksperimen ini, peneliti secara sengaja melanggar asumsi-asumsi latar belakang (*background expectancies*) yang dianggap remeh dalam interaksi sehari-hari untuk melihat bagaimana orang-orang bereaksi. Tujuannya adalah untuk membuat asumsi-asumsi tak terlihat yang menopang keteraturan sosial menjadi terlihat. Ketika asumsi ini dilanggar, orang-orang akan menjadi bingung, cemas, atau marah, dan mereka akan berusaha keras untuk “memperbaiki” situasi agar kembali masuk akal. Upaya perbaikan inilah yang menyingkapkan metode-metode yang mereka gunakan untuk memproduksi keteraturan (vom Lehn, 2023).

**Contoh Kasus (Eksperimen Pelanggaran):** Salah satu eksperimen Garfinkel adalah meminta mahasiswanya untuk berpura-pura menjadi penyewa di rumah mereka sendiri. Mereka harus bertindak sopan, formal, dan menjaga jarak dengan anggota keluarga mereka sendiri. Hasilnya adalah kekacauan. Anggota keluarga menjadi sangat bingung, marah, dan curiga. Mereka menuntut penjelasan: “Kamu sakit?”, “Apa ada masalah?”, “Jangan bercanda!”. Reaksi-reaksi ini menunjukkan adanya asumsi latar belakang yang kuat tentang bagaimana seharusnya anggota keluarga berinteraksi (yaitu, secara informal dan intim). Dengan melanggar asumsi ini, eksperimen tersebut berhasil menyingkapkan kerja keras yang terus-menerus dilakukan oleh anggota keluarga untuk mempertahankan pemahaman bersama tentang “realitas keluarga” yang normal.

#### 5.4.1 Fokus pada Metode yang Digunakan Orang Sehari-hari

Etnometodologi secara harfiah berarti “studi tentang metode-metode orang”. Fokusnya adalah pada praktik-praktik penalaran

praktis yang digunakan oleh anggota masyarakat dalam situasi konkret untuk membuat tindakan dan keadaan menjadi dapat dikenali dan dilaporkan (*accountable*) (Lynch, 2022). Etnometodologi tidak tertarik untuk menciptakan teori tentang masyarakat, melainkan untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana anggota masyarakat itu sendiri “berteori” tentang dunia mereka dalam praktik sehari-hari. Ia mengalihkan fokus sosiologi dari “mengapa” orang bertindak (motivasi) ke “bagaimana” mereka membuat tindakan mereka dan tindakan orang lain menjadi masuk akal (vom Lehn, 2023).

#### **5.4.2 Indeksikalitas dan Refleksivitas**

Indeksikalitas berarti bahwa makna tidak pernah inheren dalam kata-kata atau tindakan itu sendiri, melainkan selalu terikat pada konteks. Kita memahami satu sama lain bukan karena bahasa itu presisi, tetapi karena kita berbagi asumsi tentang konteks yang memungkinkan kita untuk menafsirkan ucapan-ucapan yang secara inheren ambigu (Stokoe, 2021). Refleksivitas berarti bahwa praktik-praktik yang kita gunakan untuk menghasilkan keteraturan sosial pada saat yang sama adalah bagian dari keteraturan yang kita hasilkan. Misalnya, dengan memberikan “laporan” (*account*) tentang tindakan kita, kita tidak hanya menjelaskan tindakan itu, tetapi kita juga menempatkannya dalam sebuah kerangka keteraturan yang dapat dipahami, yang pada gilirannya memperkuat keteraturan itu sendiri (Lynch, 2022).

#### **5.4.3 Breaching Experiments (Eksperimen Pelanggaran)**

Eksperimen pelanggaran adalah alat heuristik untuk membuat asumsi-asumsi tak terucap yang menopang interaksi sosial menjadi terlihat. Dengan mengganggu rutinitas normal, peneliti dapat mengamati “kerja perbaikan” (*repair work*) yang dilakukan orang untuk memulihkan pemahaman bersama. Contoh lain dari

eksperimen ini adalah ketika Garfinkel meminta mahasiswanya untuk menantang makna dari setiap pernyataan dalam percakapan biasa (misalnya, “Maksudmu ‘halo’ itu apa persisnya?”). Hal ini dengan cepat menyebabkan frustrasi dan rusaknya interaksi, yang menunjukkan bahwa percakapan normal bergantung pada banyak hal yang tidak diucapkan dan diasumsikan begitu saja (vom Lehn, 2023).

#### 5.4.4 Konsep Akuntabilitas Tindakan

Akuntabilitas adalah konsep sentral dalam etnometodologi. Ini merujuk pada fakta bahwa semua tindakan sosial dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dijelaskan, dideskripsikan, dan dikenali oleh orang lain (dan oleh si aktor sendiri) sebagai tindakan yang masuk akal dan sesuai dengan keadaan (Lynch, 2022). Ketika kita melakukan sesuatu, kita secara implisit membuatnya “akuntabel” atau dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan yang normal dalam konteks tersebut. Kemampuan untuk memberikan dan mengenali “akun” (*accounts*) atau penjelasan inilah yang menjadi dasar dari kompetensi sosial dan keteraturan yang dapat diamati (Stokoe, 2021).

#### 5.4.5 Kritik terhadap Fungsionalisme (Asumsi Norma)

Kritik Garfinkel terhadap sosiologi arus utama, khususnya fungsionalisme Parsons, sangat mendasar. Ia berpendapat bahwa sosiolog terlalu sering memaksakan model keteraturan teoretis mereka (seperti “norma bersama”) pada dunia sosial, alih-alih mempelajari bagaimana para anggota masyarakat itu sendiri menghasilkan keteraturan dari dalam. Ia menuduh sosiologi telah salah mengira topik studinya (keteraturan sosial) dengan sumber daya yang digunakannya (asumsi akal sehat tentang keteraturan) (Lynch, 2022). Etnometodologi, sebaliknya, bertujuan untuk menjadikan sumber daya itu sendiri (yaitu, praktik-praktik penalaran akal sehat) sebagai topik analisis (vom Lehn, 2023).

## 5.5 Aplikasi IS di Indonesia

Tradisi interaksionis, dengan fokusnya pada makna, simbol, dan interaksi tatap muka, menawarkan perangkat konseptual yang sangat kaya untuk memahami nuansa kehidupan sosial di Indonesia, sebuah masyarakat yang sangat beragam secara budaya dan di mana hubungan interpersonal seringkali memainkan peran yang sangat penting. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk bergerak melampaui generalisasi struktural yang kaku dan melihat bagaimana realitas sosial dinegosiasikan dan ditampilkan secara berbeda dalam berbagai konteks budaya dan situasional di nusantara. Ia sangat berguna untuk menganalisis fenomena komunikasi, pembentukan identitas, dan praktik-praktik budaya yang sarat dengan makna simbolik.

Salah satu bidang aplikasi yang paling jelas adalah dalam kajian komunikasi antarbudaya dan analisis simbol-simbol lokal. Konsep interaksionisme simbolik mengingatkan kita bahwa komunikasi yang efektif bergantung pada pemahaman bersama atas makna simbol. Di Indonesia, di mana terdapat ratusan kelompok etnis dengan bahasa, gestur, dan norma kesopannya masing-masing, potensi kesalahpahaman simbolik sangatlah besar (Pitaloka & Budiarsa, 2021). Misalnya, gestur tangan yang dianggap biasa di satu budaya bisa jadi sangat menyinggung di budaya lain. Analisis interaksionis dapat membedah bagaimana individu-individu dari latar belakang budaya yang berbeda menegosiasikan makna dalam interaksi dan bagaimana simbol-simbol lokal (seperti motif batik, arsitektur rumah adat, atau sesajen) digunakan untuk mengkomunikasikan identitas dan memperkuat ikatan komunal.

Pendekatan dramaturgis Erving Goffman juga sangat relevan untuk menganalisis budaya interaksi di Indonesia, yang seringkali menekankan pada keharmonisan dan pemeliharaan “muka” (*face*). Konsep “sungkan” dalam budaya Jawa atau praktik “basa-basi”

yang lazim di banyak daerah dapat dianalisis sebagai bentuk *impression management* dan *face-work* yang canggih (Widiuseno, 2020). Tujuannya adalah untuk menghindari konflik terbuka, menjaga perasaan orang lain, dan memastikan interaksi berjalan lancar. Goffman membantu kita melihat bahwa ini bukanlah sekadar “ketidaktulusan”, melainkan sebuah keterampilan interaksional yang penting untuk menavigasi hubungan sosial yang kompleks. Perbedaan antara *front stage* (misalnya, saat menerima tamu) dan *back stage* (saat berbicara di antara keluarga sendiri) sangat kentara dalam banyak konteks sosial di Indonesia.

Di era digital, perspektif interaksionis menjadi semakin krusial untuk memahami bagaimana identitas, khususnya di kalangan remaja kota, dibentuk dan ditampilkan di ruang-ruang *online*. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) adalah panggung-panggung dramaturgis di mana kaum muda secara aktif mengkurasi “diri” ideal mereka, mengelola audiens, dan menegosiasikan norma-norma baru tentang pertemanan, popularitas, dan ekspresi diri (Sari & Lestari, 2022). Analisis terhadap bahasa gaul, meme, dan tren *online* dari perspektif IS dapat menyingkapkan bagaimana generasi muda secara kolektif menciptakan dan memodifikasi simbol-simbol yang mendefinisikan realitas sosial mereka.

**Contoh Kasus:** Upacara “tedak siten” dalam budaya Jawa, di mana seorang bayi untuk pertama kalinya menapakkan kaki di tanah, dapat dianalisis secara kaya menggunakan perspektif interaksionisme simbolik. Dari luar, ini mungkin tampak seperti ritual tradisional belaka. Namun, seorang interaksionis akan fokus pada makna simbolik yang dikonstruksikan oleh para pesertanya. Berbagai properti yang digunakan, kurungan ayam, tangga tebu, sebaran uang dan perhiasan, adalah simbol-simbol yang diinterpretasikan oleh keluarga dan tamu sebagai harapan

dan doa untuk masa depan si anak (misalnya, agar ia memiliki jiwa pemimpin, jalan hidup yang lurus, dan rezeki yang melimpah). Interaksi selama upacara, seperti komentar para tamu dan respons orang tua, secara kolektif menegaskan kembali nilai-nilai budaya tentang peran anak, keluarga, dan takdir. Upacara ini menjadi sebuah pertunjukan di mana identitas anak sebagai anggota komunitas budaya dikonstruksi dan dirayakan secara simbolik.

### **5.5.1 Kajian Komunikasi Antar Budaya dan Simbol Lokal**

Indonesia adalah laboratorium alami untuk studi interaksi simbolik antarbudaya. Analisis dapat difokuskan pada bagaimana para pendatang dan penduduk lokal di daerah transmigrasi, atau para pekerja dari berbagai daerah di sebuah perusahaan multinasional, menegosiasikan pemahaman bersama melalui interaksi sehari-hari (Pitaloka & Budiarsa, 2021). Kajian juga bisa meneliti makna simbolik dari objek-objek budaya, seperti keris dalam budaya Jawa atau ulos dalam budaya Batak. Objek-objek ini bukan sekadar benda mati; mereka adalah simbol yang sarat dengan makna tentang status, kekuasaan, dan hubungan sosial, di mana makna tersebut terus-menerus ditegaskan kembali setiap kali objek tersebut digunakan atau ditampilkan dalam konteks yang tepat.

### **5.5.2 Analisis Interaksi dalam Ruang Publik dan Media Sosial**

Ruang publik di Indonesia, baik fisik maupun virtual, adalah arena yang dinamis untuk negosiasi makna. Warung kopi, misalnya, dapat dianalisis sebagai sebuah panggung sosial di mana berbagai peran dimainkan dan informasi dipertukarkan. Di dunia maya, interaksi di grup-grup WhatsApp, kolom komentar berita *online*, atau platform media sosial lainnya menjadi objek studi yang kaya bagi para interaksionis. Analisis dapat berfokus pada bagaimana identitas kelompok (misalnya, sebagai pendukung calon presiden

tertentu) dikonstruksi melalui penggunaan tagar, meme, dan bahasa yang khas, serta bagaimana “musuh” didefinisikan secara simbolik (Sari & Lestari, 2022).

### 5.5.3 Studi tentang Pembentukan Identitas Remaja Kota

Masa remaja adalah periode krusial dari pembentukan diri (*self*). Perspektif Mead dan Goffman sangat berguna untuk memahami bagaimana remaja perkotaan di Indonesia membentuk identitas mereka. Kelompok teman sebaya (*peer group*) berfungsi sebagai “*generalized other*” yang sangat penting, yang menyediakan standar penampilan, gaya bicara, dan selera musik yang harus diikuti. Remaja terus-menerus terlibat dalam *impression management* untuk diterima dalam kelompok dan menampilkan citra “keren”. Merek pakaian, gawai, dan tempat “nongkrong” menjadi simbol-simbol signifikan yang digunakan untuk mengkomunikasikan identitas dan status sosial (Widiuseno, 2020).

### 5.5.4 Penerapan Konsep Face (Muka) dalam Interaksi Budaya Jawa/Sunda

Konsep “muka” (*face*) dari Goffman memiliki resonansi yang sangat kuat dengan konsep serupa dalam banyak budaya di Indonesia, khususnya budaya Jawa dan Sunda yang sangat menekankan keharmonisan. Praktik-praktik seperti menghindari konfrontasi langsung, menggunakan bahasa yang tidak langsung (sindiran halus), dan menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua dapat dianalisis sebagai strategi *face-work* yang canggih (Widiuseno, 2020). Tujuannya adalah untuk melindungi “muka” semua pihak yang terlibat dalam interaksi dan menjaga tatanan sosial yang rukun. Analisis dramaturgis membantu kita memahami logika di balik perilaku komunikasi yang mungkin tampak “berbelit-belit” bagi orang dari luar budaya tersebut.

### 5.5.5 Analisis Ritual dan Makna Simbolik Upacara Adat

Berbagai upacara adat di seluruh Indonesia, mulai dari upacara pernikahan, kematian, hingga panen, adalah objek yang kaya untuk analisis interaksionis. Berbeda dengan Durkheim yang melihat ritual sebagai penegasan kembali solidaritas kolektif secara fungsional, seorang interaksionis akan lebih fokus pada bagaimana makna dari ritual tersebut dikonstruksi, dinegosiasikan, dan terkadang diperdebatkan oleh para pesertanya (Pitaloka & Budiarsa, 2021). Bagaimana generasi muda menafsirkan kembali ritual-ritual lama? Bagaimana komersialisasi pariwisata mengubah makna dari sebuah upacara adat? Pertanyaan-pertanyaan ini menempatkan agensi para aktor dan proses interpretasi simbolik sebagai pusat analisis.

#### Rangkuman Bab

- Interaksionisme Simbolik (IS) adalah perspektif sosiologi mikro yang berfokus pada bagaimana makna diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui interaksi sosial yang dimediasi oleh simbol.
- Menurut Herbert Blumer, IS bertumpu pada tiga premis: manusia bertindak berdasarkan makna, makna berasal dari interaksi sosial, dan makna dimodifikasi melalui interpretasi.
- George Herbert Mead meletakkan dasar bagi IS dengan teorinya tentang bagaimana pikiran (*mind*) dan diri (*self*) muncul dari proses sosial, terutama melalui kemampuan mengambil peran orang lain (*taking the role of the other*).
- Diri (*self*) menurut Mead adalah sebuah proses dialektis antara “I” (aspek spontan dan kreatif) dan “Me” (aspek sosial yang terinternalisasi).
- Pendekatan dramaturgi Erving Goffman menganalisis interaksi sosial sebagai sebuah pertunjukan teater, di mana individu adalah aktor yang melakukan manajemen kesan (*impression*

*management*) di panggung depan (*front stage*) dan belakang (*back stage*).

- Etnometodologi Harold Garfinkel secara radikal mempelajari metode-metode akal sehat yang digunakan orang biasa untuk secara aktif memproduksi dan mengenali keteraturan sosial sebagai sebuah pencapaian praktis.
- Perspektif interaksionis menawarkan lensa yang kuat untuk menganalisis berbagai fenomena di Indonesia, seperti komunikasi antarbudaya, budaya interaksi “menjaga muka”, pembentukan identitas remaja, dan makna simbolik dalam ritual.

### Latihan Mahasiswa

#### Soal Esai

1. Jelaskan tiga premis dasar interaksionisme simbolik menurut Herbert Blumer. Bagaimana ketiga premis ini secara kolektif memberikan kritik terhadap pendekatan sosiologi makro yang lebih deterministik?
2. Uraikan proses perkembangan *self* (diri) menurut George Herbert Mead, dari tahap bermain (*play stage*) hingga tahap permainan (*game stage*). Apa peran krusial dari “*generalized other*”?
3. Gunakan pendekatan dramaturgi Erving Goffman untuk menganalisis interaksi di dalam sebuah ruang kelas. Identifikasi mana yang merupakan *front stage* dan *back stage*, siapa aktornya, dan contoh-contoh *impression management* yang mungkin dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
4. Apa perbedaan utama antara pendekatan interaksionisme simbolik dan etnometodologi? Jelaskan dengan merujuk pada fokus analisis dan metode penelitian khas dari masing-masing pendekatan (misalnya, *breaching experiments*).

5. Pilihlah satu praktik budaya di Indonesia yang Anda kenal baik (misalnya, tradisi “sungkeman” saat Lebaran, “basa-basi” sebelum memulai percakapan serius, atau cara berpakaian saat menghadiri undangan). Analisislah praktik tersebut menggunakan konsep-konsep dari tradisi interaksionis.

### Soal Pilihan Ganda

1. Perspektif sosiologis yang memandang masyarakat sebagai produk dari interaksi sehari-hari individu adalah...
  - a. Fungsionalisme Struktural
  - b. Teori Konflik
  - c. Interaksionisme Simbolik -V-
  - d. Teori Sistem Dunia
2. Menurut G.H. Mead, kemampuan untuk melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain disebut...
  - a. *Impression management*
  - b. *Taking the role of the other -V-*
  - c. *Verstehen*
  - d. *Breaching experiment*
3. Dalam konsep diri Mead, aspek yang mewakili respons individu yang spontan dan kreatif adalah...
  - a. The “Me”
  - b. The “I” -V-
  - c. *The Generalized Other*
  - d. *The Self*
4. Menurut Erving Goffman, dapur sebuah restoran di mana para koki dan pelayan mengeluh tentang pelanggan adalah contoh dari...
  - a. *Front stage*
  - b. *Back stage -V-*
  - c. *Role distance*
  - d. Stigma

5. Segala upaya yang kita lakukan untuk mengontrol cara orang lain memandang kita disebut...
  - a. Dramaturgi
  - b. Interaksi
  - c. Manajemen Kesan (*Impression Management*) -V-
  - d. Etnometodologi
6. Sosiolog yang terkenal dengan “eksperimen pelanggaran” untuk mengungkap asumsi-asumsi tersembunyi dalam interaksi adalah...
  - a. George Herbert Mead
  - b. Herbert Blumer
  - c. Erving Goffman
  - d. Harold Garfinkel -V-
7. Konsep etnometodologi yang menyatakan bahwa makna sebuah ucapan selalu bergantung pada konteksnya adalah...
  - a. Refleksivitas
  - b. Akuntabilitas
  - c. Indeksikalitas -V-
  - d. Dramaturgi
8. Analisis terhadap praktik “menjaga muka” (*face*) dalam budaya Indonesia sangat relevan dengan pemikiran...
  - a. Karl Marx
  - b. Emile Durkheim
  - c. Erving Goffman -V-
  - d. Harold Garfinkel
9. Kritikan utama interaksionisme simbolik terhadap teori-teori makro adalah bahwa teori-teori tersebut bersifat...
  - a. Terlalu subjektif
  - b. Terlalu deterministik -V-
  - c. Kurang ilmiah
  - d. Terlalu fokus pada ekonomi

10. Sikap dan ekspektasi terorganisir dari komunitas secara keseluruhan yang diinternalisasi oleh individu disebut...
- Significant Symbol*
  - Generalized Other -V-*
  - Social Act*
  - Conscious Mind*

### Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

- Lakukan sebuah “eksperimen pelanggaran” sederhana (dan tidak berbahaya). Misalnya, saat membeli sesuatu di warung, cobalah untuk menawar harga barang yang harganya sudah jelas tertera dan tidak bisa ditawar (seperti sebotol air mineral). Amati dan catat reaksi penjual dan orang-orang di sekitar. Analisislah reaksi mereka menggunakan konsep-konsep etnometodologi (asumsi latar belakang, kerja perbaikan, akuntabilitas). Apa yang Anda pelajari tentang “aturan tak tertulis” dari interaksi jual-beli di warung?
- Perhatikan profil media sosial (misalnya, Instagram) dari tiga teman Anda. Analisislah profil mereka sebagai sebuah “panggung depan” (*front stage*) dalam kerangka dramaturgis Goffman. Apa citra diri yang coba mereka proyeksikan? Elemen-elemen apa (foto, caption, bio) yang mereka gunakan sebagai “properti” untuk mendukung pertunjukan tersebut? Coba bayangkan seperti apa “panggung belakang” (*back stage*) mereka yang mungkin berbeda dari apa yang ditampilkan.

### Glosarium Bab

- Akuntabilitas (*Accountability*):** Konsep etnometodologi yang merujuk pada praktik di mana tindakan sosial dibuat dapat dikenali dan dijelaskan sebagai sesuatu yang masuk akal dalam konteksnya.

- **Diri (Self):** Dalam pemikiran Mead, sebuah proses sosial di mana individu dapat menjadi objek bagi dirinya sendiri, yang berkembang melalui kemampuan mengambil peran orang lain.
- **Dramaturgi:** Pendekatan sosiologis Erving Goffman yang menggunakan metafora teater untuk menganalisis interaksi sosial sebagai sebuah pertunjukan.
- **Etnometodologi:** Pendekatan sosiologis Harold Garfinkel yang mempelajari metode-metode akal sehat yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk memproduksi keteraturan sosial.
- **Generalized Other:** Sikap dan ekspektasi yang terorganisir dari sebuah kelompok atau komunitas secara keseluruhan yang diinternalisasi oleh individu, menjadi dasar bagi kontrol sosial internal.
- **I dan Me:** Dua fase dialektis dari diri menurut Mead. "Me" adalah diri sosial yang terinternalisasi, sedangkan "I" adalah respons yang spontan dan kreatif terhadap "Me".
- **Manajemen Kesan (Impression Management):** Upaya sadar atau tidak sadar seorang individu untuk mempengaruhi persepsi orang lain terhadap dirinya, sebuah situasi, atau objek.
- **Panggung Depan dan Belakang (Front & Back Stage):** Konsep Goffman untuk membedakan wilayah di mana pertunjukan diri formal berlangsung (depan) dan wilayah pribadi di mana aktor dapat melepaskan perannya (belakang).
- **Simbol Signifikan:** Gestur, terutama bahasa, yang membangkitkan respons yang sama pada orang yang membuatnya dan orang yang menerimanya, menjadi dasar bagi pikiran dan komunikasi manusia.
- **Stigma:** Atribut yang sangat mendiskreditkan seseorang dalam interaksi sosial, mengubahnya dari orang yang utuh dan biasa menjadi orang yang tercela dan direndahkan.
- **Taking the Role of the Other:** Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan melihat dunia, termasuk diri sendiri, dari perspektif mereka.

## Daftar Pustaka Bab

- Bullingham, L., & Gulglielmo, F. (2023). 'The presentation of self in the online world': Goffman and the study of online communication. *Human Technology*, 19(1), 1-19. <https://doi.org/10.14254/1795-6889.2023.19-1.1>
- Fine, G. A., & Lee, D. B. (2021). The reality of the imagined: Symbolic interactionism and the foundations of the social world. *Symbolic Interaction*, 44(2), 269-289. <https://doi.org/10.1002/symb.544>
- Gillespie, A. (2020). George Herbert Mead's social psychology of the act. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 50(2), 147-165. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12234>
- Herman-Kinney, N. J. (2021). The enduring premises of symbolic interactionism. In *The Cambridge Handbook of Social Theory* (pp. 57-76). Cambridge University Press.
- Hotte, E. (2022). A pragmatic phenomenology: Schutz's and Blumer's critiques of Husserl's transcendental ego. *Human Studies*, 45(3), 449-472. <https://doi.org/10.1007/s10746-022-09635-4>
- Joas, H. (2021). The genesis of the 'I' and the 'Me': Mead's theory of self and its contemporary relevance. *American Journal of Sociology*, 127(1), 1-32.
- Lynch, M. (2022). *Harold Garfinkel: The Creation and Development of Ethnomethodology*. Routledge.
- Martin, P. J. (2021). Erving Goffman and the analysis of face-to-face interaction. *The Sociological Review*, 69(4), 811-827.
- Pitaloka, D. A., & Budiarsa, M. (2021). Interaksi simbolik dalam komunikasi antarbudaya antara masyarakat lokal dan pendatang. *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot)*, 2(1), 15-28.
- Sandstrom, K. L. (2022). The continuing vitality of symbolic interactionism. *The American Sociologist*, 53(1), 4-25.

- Sari, I. P., & Lestari, S. (2022). Dramaturgi dalam media sosial Instagram: Studi kasus presentasi diri mahasiswa. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 6(2), 112-125.
- Smith, G. W. H. (2022). *Erving Goffman*. Routledge.
- Stokoe, E. (2021). Garfinkel, membership categorization, and conversation analysis. *Journal of Pragmatics*, 177, 137-147. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.03.003>
- Trott, B. (2022). George Herbert Mead and the social origins of mind, self, and language. In *The Oxford Handbook of Language and Social Psychology* (pp. 23-38). Oxford University Press.
- vom Lehn, D. (2023). *Harold Garfinkel: The Interactive Production of Social Order*. Springer.
- Widisuseno, I. (2020). Analisis dramaturgi “sungkan” dalam interaksi sosial masyarakat Jawa. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 45-60.



## BAB 6

# TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL (MAKRO)

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan asumsi-asumsi dasar dari fungsionalisme struktural, khususnya pandangan tentang masyarakat sebagai sebuah sistem.
2. Menganalisis empat prasyarat fungsional yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial menurut skema AGIL Talcott Parsons.
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan lima pasang variabel pola (*pattern variables*) sebagai alat untuk menganalisis orientasi tindakan.
4. Membedakan antara fungsionalisme “grand theory” Parsons dengan “teori fungsi menengah” Robert K. Merton.
5. Menerapkan konsep fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi untuk menganalisis institusi sosial.
6. Mengevaluasi kritik utama terhadap pendekatan fungsionalisme struktural, terutama terkait isu konflik dan perubahan sosial.

7. Menganalisis penerapan dan kritik terhadap model fungsionalis dalam konteks pembangunan di Indonesia.

Pernahkah Anda mengamati bagaimana sebuah kota yang padat, dengan jutaan penduduk yang memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing, secara umum dapat berfungsi dari hari ke hari tanpa terjerumus ke dalam kekacauan total? Bagaimana institusi-institusi yang tampaknya terpisah, seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan sistem transportasi, dapat bekerja sama, seolah-olah dikoordinasikan oleh sebuah tangan tak terlihat, untuk menopang kehidupan kolektif? Pertanyaan tentang keteraturan, stabilitas, dan integrasi sosial ini merupakan jantung dari perspektif teoretis yang akan kita jelajahi dalam bab ini: fungsionalisme struktural.

Setelah menyelami dunia interaksi mikro yang dinamis dan cair, kita kini kembali ke level analisis makro, namun dengan lensa yang sangat berbeda dari teori konflik Marx. Jika Marx melihat masyarakat sebagai arena pertarungan, fungsionalisme struktural melihatnya sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Perspektif ini, yang akarnya dapat dilacak kembali ke Emile Durkheim, mencapai puncak elaborasi teoretisnya yang paling ambisius dalam karya sosiolog Amerika, Talcott Parsons. Bagi Parsons, masyarakat dapat dianalogikan dengan sebuah organisme biologis. Ia terdiri dari berbagai bagian atau subsistem (seperti ekonomi, politik, hukum, dan keluarga) yang masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk dipenuhi demi kelangsungan hidup dan kesehatan keseluruhan “tubuh” sosial.

Tujuan utama dari fungsionalisme struktural adalah untuk memahami bagaimana keteraturan sosial dimungkinkan dan dipertahankan. Fokusnya bukan pada agensi individu, melainkan pada struktur-struktur sosial dan institusi-institusi yang membentuk perilaku individu. Pendekatan ini bertanya: Apa fungsi dari sebuah institusi atau praktik sosial tertentu? Kontribusi apa yang

diberikannya bagi pemeliharaan stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*) sistem secara keseluruhan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini seringkali terletak pada sistem nilai bersama (*shared value system*) yang dianggap sebagai perekat utama yang mengikat anggota masyarakat dan memandu tindakan mereka.

Dalam bab ini, kita akan membedah arsitektur teoretis yang dibangun oleh Talcott Parsons, yang sering dianggap sebagai puncak dari “grand theory” dalam sosiologi. Kita akan menjelajahi skema AGIL-nya yang terkenal, sebuah model yang mengklaim dapat mengidentifikasi empat prasyarat fungsional universal yang harus dipenuhi oleh sistem sosial mana pun agar dapat bertahan. Kita juga akan mengkaji “variabel pola”-nya, sebuah alat untuk menganalisis pergeseran orientasi tindakan dari masyarakat tradisional ke modern.

Namun, tidak ada teori yang tanpa kritik. Kita juga akan membahas revisi dan kritik penting yang datang dari dalam tradisi fungsionalis itu sendiri, yaitu melalui karya Robert K. Merton. Merton mengusulkan sebuah pendekatan “teori fungsi menengah” yang lebih bumi dan memperkenalkan konsep-konsep vital seperti fungsi manifes (yang disengaja), fungsi laten (yang tidak disengaja), dan disfungsi (konsekuensi negatif). Perangkat Merton ini memungkinkan analisis fungsional yang lebih kritis dan realistis.

Terakhir, kita akan melihat bagaimana fungsionalisme struktural, dengan penekanannya pada stabilitas dan pembangunan yang teratur, menjadi kerangka teoretis yang sangat berpengaruh, dan juga kontroversial, di Indonesia, khususnya selama era Orde Baru. Memahami fungsionalisme struktural adalah memahami sebuah upaya besar untuk menciptakan sebuah ilmu tentang tatanan sosial, sebuah teori yang, meskipun sering dikritik karena bias statis dan konservatifnya, telah membentuk secara mendalam cara kita berpikir tentang hubungan antara struktur, fungsi, dan sistem dalam masyarakat.

## 6.1 Asumsi Dasar Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)

Fungsionalisme struktural, terutama dalam versi yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, merupakan salah satu proyek teoretis paling ambisius dalam sejarah sosiologi. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kerangka kerja tunggal yang komprehensif, sebuah “grand theory”, yang mampu menganalisis semua masyarakat, di semua tempat dan waktu, sebagai tipe-tipe spesifik dari “sistem sosial”. Asumsi dasarnya sangat dipengaruhi oleh analogi biologis: masyarakat dipandang bukan sebagai kumpulan individu yang acak, melainkan sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan terintegrasi, mirip dengan sebuah organisme hidup (Turner, 2021). Setiap bagian dari sistem ini, institusi, peran, norma, ada karena ia menjalankan sebuah fungsi tertentu yang berkontribusi pada kelangsungan hidup dan pemeliharaan sistem secara keseluruhan.

Asumsi fundamental pertama adalah bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terintegrasi. Ini berarti bahwa bagian-bagiannya saling berhubungan dan saling bergantung. Perubahan pada satu bagian dari sistem (misalnya, perubahan dalam sistem ekonomi) akan menimbulkan penyesuaian dan perubahan di bagian-bagian lain (misalnya, dalam struktur keluarga atau sistem pendidikan). Fokus utama analisis fungsionalis adalah pada hubungan antar bagian ini dan kontribusi fungsionalnya terhadap keseluruhan (Adriaansens, 2020). Institusi keluarga, misalnya, tidak dianalisis secara terisolasi, melainkan dari segi fungsinya dalam mensosialisasikan generasi baru agar dapat menjadi anggota masyarakat yang kompeten.

Asumsi kedua adalah bahwa sistem sosial cenderung bergerak ke arah kondisi keseimbangan atau *equilibrium*. Seperti halnya organisme yang memiliki mekanisme untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil, masyarakat juga dianggap memiliki

mekanisme inheren untuk menjaga stabilitas dan keteraturan (Jaworski, 2022). Ketika terjadi gangguan atau perubahan, sistem akan secara otomatis mencoba untuk menyesuaikan diri dan kembali ke kondisi seimbang. Perubahan sosial, dari perspektif ini, cenderung dilihat sebagai proses yang bertahap dan adaptif, bukan sebagai sesuatu yang revolusioner dan disruptif. Konflik dan deviasi dianggap sebagai fenomena “patologis” atau “disfungsional” yang perlu dikelola atau dinetralkan oleh sistem.

Asumsi ketiga adalah bahwa integrasi sosial, atau apa yang merekatkan masyarakat, terutama dicapai melalui konsensus nilai. Parsons berargumen bahwa setiap sistem sosial yang stabil harus didasarkan pada sebuah sistem nilai bersama (*common value system*) yang diinternalisasi oleh sebagian besar anggotanya melalui proses sosialisasi (Lizardo, 2019). Nilai-nilai bersama inilah yang memberikan justifikasi moral bagi norma-norma dan peran-peran yang ada, serta memotivasi individu untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi sistem. Tanpa adanya konsensus nilai ini, keteraturan sosial akan runtuh dan digantikan oleh perang semua melawan semua.

Kombinasi dari asumsi-asumsi ini mengarah pada apa yang disebut Parsons sebagai Teori Sistem Sosial (*Social System Theory*). Sebuah sistem sosial, menurutnya, terdiri dari interaksi antara dua aktor atau lebih dalam sebuah situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, di mana para aktor tersebut termotivasi oleh kecenderungan untuk “mengoptimalkan kepuasan” dan di mana hubungan mereka dengan situasi dan satu sama lain dimediasi dan didefinisikan oleh sebuah sistem simbol yang terstruktur dan diyakini bersama secara kultural (Bailey, 2018). Analisis Parsons dengan demikian berfokus pada struktur-struktur normatif (nilai dan norma) yang mengatur interaksi ini dan fungsi-fungsi yang dijalankannya untuk menjaga kelestarian sistem.

**Analogi/Contoh Kasus:** Bayangkan sebuah ekosistem di akuarium. Ekosistem ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi. Ikan, tanaman air, bakteri pengurai, filter, dan suhu air adalah bagian-bagian yang saling bergantung. Tanaman menghasilkan oksigen untuk ikan, kotoran ikan menjadi nutrisi bagi bakteri dan tanaman, dan filter menjaga kebersihan air. Ini adalah kontribusi fungsional dari setiap bagian. Jika Anda tiba-tiba memasukkan terlalu banyak ikan (gangguan), sistem akan mengalami ketidakseimbangan; air menjadi keruh dan kadar amonia naik. Mekanisme penyeimbang (bakteri yang bekerja lebih keras, filter) akan mencoba mengatasinya, tetapi jika gangguannya terlalu besar, sistem bisa runtuh. Perikat utama yang menjaga “keteraturan” dalam akuarium ini adalah seperangkat hukum fisika dan biologi (mirip dengan konsensus nilai dalam masyarakat) yang mengatur interaksi antar komponennya.

### 6.1.1 Masyarakat sebagai Sistem yang Terintegrasi

Bagi Parsons, konsep “sistem” adalah titik awal dari semua analisis sosiologis. Sebuah sistem didefinisikan oleh batas-batasnya (*boundaries*) dengan lingkungannya dan oleh hubungan saling ketergantungan antar komponen internalnya (Adriaansens, 2020). Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan sistem-sistem lain seperti sistem budaya (nilai-nilai abstrak), sistem kepribadian (individu), dan sistem organisme behavioral. Parsons melihat sosiologi sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari masyarakat sebagai sistem sosial, dengan fokus pada bagaimana struktur-struktur institusional seperti ekonomi, politik, dan hukum saling terkait untuk membentuk sebuah keseluruhan yang koheren (Bailey, 2018).

### 6.1.2 Keteraturan dan Keseimbangan (Equilibrium)

Konsep keseimbangan atau *equilibrium* adalah pusat dari analisis fungsionalis tentang stabilitas sosial. Parsons tidak

memandang *equilibrium* sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai *equilibrium* yang dinamis, mirip dengan homeostasis dalam biologi (Jaworski, 2022). Sistem sosial selalu menghadapi gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Namun, sistem yang sehat memiliki mekanisme kontrol sosial (seperti polisi atau tekanan dari teman sebaya) dan mekanisme sosialisasi (seperti sekolah dan keluarga) yang berfungsi untuk mengelola ketegangan dan mengembalikan sistem ke keadaan seimbang. Kecenderungan inheren menuju keseimbangan inilah yang menjelaskan mengapa masyarakat, meskipun terus berubah, mampu mempertahankan keteraturan dalam jangka panjang (Turner, 2021).

### **6.1.3 Peran Institusi dalam Mempertahankan Stabilitas**

Institusi sosial adalah komponen kunci dalam pemeliharaan stabilitas sistem. Institusi didefinisikan sebagai pola-pola norma dan peran yang telah mapan yang mengatur perilaku dalam bidang kehidupan tertentu. Setiap institusi utama (keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, agama) dipandang memiliki fungsi-fungsi spesifik yang vital bagi masyarakat (Adriaansens, 2020). Misalnya, institusi pendidikan memiliki fungsi utama untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dan keterampilan yang diperlukan agar individu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, institusi-institusi tersebut secara kolektif memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar dari sistem sosial terpenuhi, sehingga stabilitas dapat dipertahankan (Lizardo, 2019).

### **6.1.4 Kritik terhadap Konsep Perubahan dan Konflik**

Salah satu kritik paling tajam terhadap fungsionalisme struktural Parsons adalah ketidakmampuannya untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang konflik dan perubahan sosial. Karena fokusnya yang luar biasa pada keseimbangan dan konsensus nilai, konflik seringkali dilihat sebagai sesuatu yang bersifat

residual atau patologis, bukan sebagai bagian yang inheren dan produktif dari kehidupan sosial (Turner, 2021). Perubahan sosial dalam model Parsons cenderung dilihat sebagai proses evolusioner yang lambat dan adaptif, di mana masyarakat bergerak menuju tingkat diferensiasi dan integrasi yang lebih tinggi. Model ini kesulitan untuk menjelaskan perubahan yang cepat, radikal, dan digerakkan oleh konflik, seperti revolusi. Kritikus berpendapat bahwa fungsionalisme memiliki bias konservatif yang melekat, karena ia lebih fokus pada faktor-faktor yang mempertahankan status quo daripada faktor-faktor yang menantanginya (Bailey, 2018).

### **6.1.5 Teori Sistem Sosial (Social System Theory)**

Teori Sistem Sosial adalah puncak dari upaya Parsons untuk menciptakan sebuah teori sosiologi yang komprehensif. Sistem sosial adalah salah satu dari empat sub-sistem dari “sistem tindakan” (*action system*) secara umum. Tiga lainnya adalah: (1) Sistem Budaya, yang merupakan ranah nilai, norma, dan simbol abstrak; (2) Sistem Kepribadian, yang merupakan organisasi motivasi dan orientasi individu; dan (3) Sistem Organisme Behavioral, yang merupakan sistem biologis manusia. Keempat sistem ini saling berpenetrasi dan berinteraksi. Sistem sosial secara khusus berurusan dengan integrasi aktor-aktor yang berinteraksi. Ia “mengimpor” energi dari organisme, informasi nilai dari sistem budaya, dan motivasi dari sistem kepribadian, dan kemudian mengaturnya dalam sebuah jaringan peran dan institusi yang stabil (Jaworski, 2022; Lizardo, 2019).

## **6.2 Skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency)**

Untuk membuat teorinya tentang sistem sosial menjadi lebih analitis dan konkret, Talcott Parsons mengembangkan sebuah

skema konseptual yang sangat terkenal, yaitu skema AGIL. Skema ini merupakan jawaban Parsons atas pertanyaan: Apa saja masalah-masalah atau prasyarat-prasyarat fungsional fundamental yang harus dipecahkan atau dipenuhi oleh sistem sosial mana pun, dari sebuah keluarga kecil hingga seluruh masyarakat, agar dapat bertahan dan mempertahankan keseimbangannya? Ia mengidentifikasi empat prasyarat fungsional yang universal, yang disingkat sebagai AGIL: *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* atau *Pattern Maintenance* (Latensi atau Pemeliharaan Pola) (Jaworski, 2022).

Keempat fungsi ini dapat dipetakan dalam sebuah skema dua-dimensi. Dimensi pertama adalah apakah sebuah fungsi berorientasi pada masalah-masalah eksternal (di luar sistem) atau internal (di dalam sistem). Dimensi kedua adalah apakah sebuah fungsi berhubungan dengan sarana/alat (*means*) atau tujuan (*ends*).

1. **Adaptasi (A):** Fungsi ini berorientasi pada masalah eksternal dan berhubungan dengan sarana. Setiap sistem sosial harus beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya, terutama lingkungan fisik dan ekonomi. Ini melibatkan pengamanan sumber daya yang memadai dari lingkungan dan mendistribusikannya ke seluruh sistem. Dalam masyarakat secara keseluruhan, fungsi adaptasi ini terutama dijalankan oleh subsistem ekonomi (Adriaansens, 2020).
2. **Pencapaian Tujuan (G - Goal Attainment):** Fungsi ini juga berorientasi pada masalah eksternal, tetapi berhubungan dengan tujuan. Setiap sistem sosial harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Ini melibatkan mobilisasi sumber daya dan energi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam masyarakat, fungsi pencapaian tujuan ini adalah domain dari subsistem politik, di mana negara atau pemerintah menetapkan prioritas dan membuat keputusan kolektif (Turner, 2021).

3. **Integrasi (I):** Fungsi ini berorientasi pada masalah internal dan berhubungan dengan tujuan. Setiap sistem sosial harus mengatur dan mengkoordinasikan hubungan antar berbagai komponen atau unit-unit internalnya untuk menjaga kohesi dan mencegah disintegrasi. Ini melibatkan pengelolaan konflik dan penegakan norma-norma agar sistem tetap berfungsi sebagai satu kesatuan. Dalam masyarakat, fungsi integrasi terutama dijalankan oleh subsistem hukum dan komunitas sosial (misalnya, agama, media, dan institusi kemasyarakatan) (Jaworski, 2022).
4. **Latensi (L - *Latency* atau *Pattern Maintenance*):** Fungsi ini berorientasi pada masalah internal dan berhubungan dengan sarana. Setiap sistem sosial harus memastikan bahwa para aktornya memiliki motivasi yang cukup untuk memainkan peran mereka dan bahwa pola-pola nilai budaya yang menopang sistem tersebut terus dipelihara dan ditransmisikan. Fungsi ini sering disebut juga sebagai pemeliharaan pola (*pattern maintenance*) dan manajemen ketegangan (*tension management*). Dalam masyarakat, fungsi latensi ini dijalankan oleh institusi-institusi seperti keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan, yang bertugas mensosialisasikan individu dan menanamkan nilai-nilai inti dari sistem budaya (Lizardo, 2019).

Bagi Parsons, skema AGIL ini bersifat universal. Tidak hanya berlaku untuk masyarakat sebagai sebuah sistem, tetapi juga untuk setiap subsistem di dalamnya. Subsistem ekonomi, misalnya, juga harus memecahkan keempat masalah fungsionalnya sendiri agar dapat bertahan. Skema ini memberikan Parsons sebuah perangkat yang kuat untuk melakukan klasifikasi dan analisis komparatif terhadap berbagai jenis struktur sosial dan institusi berdasarkan fungsi dominan yang mereka jalankan.

**Analogi/Contoh Kasus:** Mari kita terapkan skema AGIL pada sebuah tim ekspedisi pendakian gunung.

- **Adaptasi (A):** Tim harus beradaptasi dengan lingkungan gunung. Ini berarti mengamankan sumber daya dari luar: makanan yang cukup, tenda yang kuat, pakaian yang hangat, dan peta. Bagian logistik tim menjalankan fungsi adaptasi ini.
- **Pencapaian Tujuan (G):** Tujuan kolektif tim adalah mencapai puncak gunung. Pemimpin ekspedisi menjalankan fungsi ini dengan membuat keputusan strategis, menentukan rute, dan memotivasi anggota untuk terus bergerak maju.
- **Integrasi (I):** Tim terdiri dari banyak individu dengan keterampilan dan kepribadian yang berbeda. Untuk menjaga keutuhan tim, konflik pribadi harus dikelola, aturan tentang pembagian tugas harus ditegakkan, dan semangat kebersamaan harus dijaga. Mungkin ada seorang anggota senior yang berperan sebagai “penjaga moral” yang menjalankan fungsi integrasi ini.
- **Latensi (L):** Selama pendakian yang panjang dan melelahkan, motivasi anggota bisa menurun. Fungsi latensi adalah untuk menjaga semangat dan komitmen anggota. Ini bisa dilakukan melalui ritual malam hari di sekitar api unggun, saling berbagi cerita inspiratif, atau mengingatkan kembali pada nilai-nilai bersama (“Kita adalah tim, kita tidak meninggalkan siapa pun”). Ini adalah fungsi pemeliharaan pola dan manajemen ketegangan.

### 6.2.1 Fungsi Adaptasi (Hubungan dengan Lingkungan)

Fungsi adaptasi adalah tentang bagaimana sistem sosial mengelola hubungannya dengan dunia material. Sistem harus mampu mengekstraksi sumber daya (energi, bahan mentah) dan mengubahnya menjadi komoditas atau fasilitas yang dapat digunakan oleh sistem (Adriaansens, 2020). Institusi ekonomi, dengan mekanisme produksi, distribusi, dan pertukarannya, adalah spesialis dalam fungsi ini. Dalam masyarakat modern, uang

berfungsi sebagai medium simbolik yang sangat penting dalam memfasilitasi proses adaptasi ini, memungkinkan pertukaran sumber daya yang kompleks dan efisien (Turner, 2021).

### **6.2.2 Fungsi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)**

Fungsi pencapaian tujuan berkaitan dengan penentuan prioritas di antara berbagai tujuan yang mungkin dan mobilisasi sistem untuk mencapainya. Ini adalah fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Institusi politik, termasuk pemerintah, birokrasi, dan partai politik, adalah struktur utama yang menjalankan fungsi ini (Jaworski, 2022). Kekuasaan (*power*) adalah medium simbolik yang digunakan dalam subsistem politik untuk memastikan bahwa keputusan kolektif dapat diimplementasikan, bahkan jika ada resistensi. Fungsi ini menjawab pertanyaan: “Ke mana arah sistem ini akan bergerak?” (Bailey, 2018).

### **6.2.3 Fungsi Integrasi (Kohesi Internal)**

Fungsi integrasi adalah tentang menjaga solidaritas dan koordinasi di antara berbagai unit dalam sistem. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik yang merusak dan memastikan bahwa bagian-bagian yang berbeda bekerja sama secara harmonis. Institusi hukum (pengadilan, polisi) adalah mekanisme formal utama untuk integrasi, yang menyelesaikan sengketa dan menegakkan norma (Lizardo, 2019). Selain itu, institusi-institusi yang membentuk apa yang disebut Parsons sebagai “komunitas kemasyarakatan” (*societal community*), seperti agama dan media massa, juga memainkan peran penting dalam mempromosikan solidaritas dan identitas bersama. Medium simbolik di sini adalah pengaruh (*influence*) (Jaworski, 2022).

### **6.2.4 Fungsi Latensi/Pemeliharaan Pola (Motivasi Nilai)**

Fungsi latensi adalah fondasi kultural dan motivasional dari sistem. Ia memiliki dua aspek: pemeliharaan pola dan manajemen

ketegangan. Pemeliharaan pola merujuk pada tugas untuk melestarikan dan mentransmisikan nilai-nilai inti dari sistem budaya ke generasi baru, sebuah tugas yang terutama diemban oleh institusi keluarga dan pendidikan (Adriaansens, 2020). Manajemen ketegangan adalah tentang mengelola ketegangan dan stres internal dalam diri individu agar mereka tetap termotivasi untuk menjalankan peran mereka. Institusi seperti agama atau bahkan rekreasi dapat menjalankan fungsi ini. Medium simbolik yang beroperasi di sini adalah komitmen nilai (*value commitment*) (Bailey, 2018).

### 6.2.5 Penerapan AGIL pada Institusi Sosial

Skema AGIL tidak hanya berlaku pada masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga dapat diterapkan secara fraktal pada institusi-institusi di dalamnya. Ambil contoh sebuah universitas. Ia harus menjalankan fungsi **Adaptasi** (mencari dana, mengelola gedung dan fasilitas), **Pencapaian Tujuan** (menetapkan tujuan pendidikan dan penelitian, yang dilakukan oleh rektorat dan senat akademik), **Integrasi** (mengatur hubungan antara berbagai fakultas dan departemen, serta antara dosen dan mahasiswa, melalui peraturan akademik), dan **Latensi** (menjaga dan menanamkan nilai-nilai keilmuan dan etika akademik kepada seluruh civitas academica). Analisis ini memungkinkan kita untuk melihat sebuah institusi sebagai sebuah sistem fungsional yang kompleks (Turner, 2021).

### 6.3 Variabel Pola (Pattern Variables) Parsons

Selain skema AGIL yang berfokus pada level sistem, Talcott Parsons juga mengembangkan sebuah perangkat konseptual untuk menganalisis tindakan sosial pada level orientasi aktor, yang disebut “variabel pola” (*pattern variables*). Variabel pola adalah seperangkat lima pilihan dikotomis (pilihan antara dua hal yang

berlawanan) yang harus dibuat oleh seorang aktor, baik secara sadar maupun tidak sadar, sebelum ia dapat bertindak dalam sebuah situasi. Pilihan-pilihan ini mencerminkan dilema-dilema orientasi fundamental yang dihadapi dalam setiap interaksi sosial. Bagi Parsons, variabel pola ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menganalisis tindakan individu, tetapi juga sebagai cara untuk mengkarakterisasi dan membedakan tipe-tipe masyarakat secara keseluruhan, khususnya untuk membedakan masyarakat “tradisional” (*Gemeinschaft*) dari masyarakat “modern” (*Gesellschaft*) (Al-Amoudi & Latsis, 2021).

Kelima pasang variabel pola tersebut adalah:

1. **Afektivitas vs. Netralitas Afektif (*Affectivity vs. Affective Neutrality*):** Dilema ini adalah tentang apakah kita harus membiarkan emosi dan perasaan terlibat dalam sebuah interaksi (afektivitas) atau kita harus menahan diri dan bersikap netral secara emosional (netralitas afektif). Hubungan dalam keluarga biasanya bersifat afektif, sementara hubungan antara seorang dokter dan pasiennya seharusnya bersifat netral secara afektif (Gould, 2020).
2. **Orientasi Diri vs. Orientasi Kolektif (*Self-Orientation vs. Collectivity-Orientation*):** Dilema ini adalah tentang apakah kita harus memprioritaskan kepentingan pribadi (orientasi diri) atau kepentingan kelompok (orientasi kolektif). Seorang pengusaha dalam ekonomi pasar diharapkan berorientasi pada diri (memaksimalkan laba), sementara seorang pegawai negeri diharapkan berorientasi pada kolektif (melayani kepentingan publik).
3. **Partikularisme vs. Universalisme (*Particularism vs. Universalism*):** Dilema ini adalah tentang apakah kita harus merespons seseorang berdasarkan hubungan atau status partikular yang kita miliki dengannya (misalnya, sebagai

teman atau kerabat) atau berdasarkan aturan umum yang berlaku untuk semua orang (universalisme). Memberikan pekerjaan kepada keponakan adalah tindakan partikularistik, sementara merekrut karyawan berdasarkan kualifikasi terbaik tanpa memandang siapa dia adalah tindakan universalistik (Kaesler, 2020).

4. **Kualitas vs. Kinerja (*Ascription vs. Achievement* atau *Quality vs. Performance*):** Dilema ini adalah tentang apakah kita harus menilai orang lain berdasarkan kualitas bawaan mereka atau siapa mereka (askripsi), seperti jenis kelamin, ras, atau garis keturunan; atau berdasarkan apa yang telah mereka lakukan atau capai (kinerja/prestasi). Masyarakat aristokratis didasarkan pada askripsi, sementara masyarakat modern idealnya didasarkan pada prestasi (Al-Amoudi & Latsis, 2021).
5. **Kekhususan vs. Difusivitas (*Specificity vs. Diffuseness*):** Dilema ini adalah tentang luasnya cakupan hubungan kita dengan orang lain. Apakah kita berinteraksi dengan orang lain dalam lingkup yang sangat spesifik dan terbatas (kekhususan) atau dalam lingkup yang luas dan tidak terbatas (difusivitas)? Hubungan kita dengan seorang kasir di supermarket bersifat spesifik (hanya sebatas transaksi jual beli). Hubungan kita dengan seorang sahabat bersifat difus (melibatkan banyak aspek kehidupan kita).

Parsons berargumen bahwa masyarakat modern cenderung menekankan pilihan-pilihan pada sisi kanan dari dikotomi ini (netralitas afektif, orientasi diri, universalisme, kinerja, dan kekhususan), sementara masyarakat tradisional cenderung menekankan pilihan-pilihan di sisi kiri. Pergeseran dari tradisional ke modern, dengan demikian, dapat dianalisis sebagai pergeseran dalam kombinasi dominan dari variabel pola.

**Analogi:** Bayangkan Anda adalah seorang wasit dalam pertandingan sepak bola di mana salah satu pemainnya adalah

adik Anda sendiri. Anda dihadapkan pada serangkaian dilema variabel pola.

1. **Afektivitas vs. Netralitas Afektif:** Haruskah Anda menunjukkan kegembiraan jika adik Anda mencetak gol (afektivitas) atau tetap tenang dan tidak memihak (netralitas afektif)?
2. **Partikularisme vs. Universalisme:** Jika adik Anda melakukan pelanggaran ringan, haruskah Anda mengabaikannya karena dia adik Anda (partikularisme) atau memberinya kartu kuning sesuai aturan yang berlaku untuk semua pemain (universalisme)?
3. **Kualitas vs. Kinerja:** Haruskah Anda memperlakukannya secara khusus karena statusnya sebagai adik Anda (kualitas/askripsi) atau hanya menilai permainannya di lapangan saat itu (kinerja)? Peran seorang wasit modern menuntut Anda untuk secara konsisten memilih sisi kanan: netralitas afektif, universalisme, dan kinerja.

### 6.3.1 Orientasi Afektivitas vs Netralitas Afektif

Dilema ini menyangkut peran emosi dalam tindakan sosial. Aktor dihadapkan pada pilihan antara pemuasan emosional langsung (afektivitas) atau pengekangan dan disiplin emosional (netralitas afektif) (Gould, 2020). Masyarakat modern, khususnya dalam ranah profesional dan birokratis, menuntut tingkat netralitas afektif yang tinggi untuk memastikan keputusan dibuat secara rasional dan tidak bias. Sebaliknya, ranah privat seperti keluarga dan persahabatan tetap menjadi domain utama bagi afektivitas (Al-Amoudi & Latsis, 2021).

### 6.3.2 Orientasi Diri vs Orientasi Kolektif

Pilihan ini berkaitan dengan primasi kepentingan. Apakah seorang aktor harus mengutamakan kepentingan, tujuan, dan

nilai-nilai pribadinya, atau ia harus tunduk pada kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai kelompok atau kolektivitas yang lebih besar? (Kaesler, 2020). Parsons berpendapat bahwa ekonomi pasar kapitalis mendorong orientasi diri, sementara banyak institusi politik dan keagamaan menekankan orientasi kolektif. Keseimbangan antara keduanya adalah masalah krusial bagi setiap sistem sosial (Gould, 2020).

### **6.3.3 Partikularisme vs Universalisme**

Dilema ini adalah tentang kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah objek sosial (termasuk orang lain). Kriteria universalistik didasarkan pada norma-norma umum dan impersonal yang berlaku untuk semua objek dalam suatu kategori (misalnya, “semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum”). Kriteria partikularistik didasarkan pada hubungan spesifik antara aktor dan objek tersebut (misalnya, “dia adalah teman saya, jadi saya akan membantunya terlebih dahulu”) (Kaesler, 2020). Birokrasi dan hukum modern adalah perwujudan dari prinsip universalisme (Al-Amoudi & Latsis, 2021).

### **6.3.4 Kualitas vs Kinerja (Ascription vs Achievement)**

Pilihan ini berkaitan dengan dasar untuk menilai orang lain. Apakah kita menilai mereka berdasarkan atribut-atribut yang melekat atau bawaan (kualitas/askripsi), seperti usia, jenis kelamin, etnis, atau latar belakang keluarga? Ataukah kita menilai mereka berdasarkan apa yang telah mereka capai melalui usaha dan keterampilan mereka (kinerja/prestasi)? (Gould, 2020). Masyarakat modern dicirikan oleh pergeseran yang kuat dari askripsi ke prestasi sebagai dasar utama untuk alokasi status dan penghargaan, meskipun dalam praktiknya, faktor-faktor askriptif masih sering memainkan peran penting (Kaesler, 2020).

### 6.3.5 Kekhususan vs Difusivitas

Dilema terakhir ini menyangkut cakupan atau ruang lingkup hubungan sosial. Dalam hubungan yang bersifat spesifik, kewajiban dan hak antar aktor sangat terbatas pada konteks tertentu (misalnya, hubungan antara penjual dan pembeli). Dalam hubungan yang bersifat difus, kewajiban dan haknya luas, tidak terdefinisi secara sempit, dan mencakup berbagai aspek kehidupan (misalnya, hubungan antara ibu dan anak) (Al-Amoudi & Latsis, 2021). Modernisasi melibatkan segmentasi kehidupan, di mana kita semakin banyak terlibat dalam hubungan-hubungan yang bersifat spesifik di luar lingkaran privat kita (Gould, 2020).

## 6.4 Teori Fungsi Menengah Robert K. Merton

Meskipun merupakan seorang fungsionalis, Robert K. Merton menjadi salah satu kritikus internal yang paling tajam dan konstruktif terhadap “grand theory” Talcott Parsons. Merton merasa bahwa upaya Parsons untuk menciptakan satu teori tunggal yang mencakup semua aspek masyarakat adalah sesuatu yang prematur dan terlalu abstrak, sehingga sulit untuk dihubungkan dengan penelitian empiris. Sebagai gantinya, Merton mengusulkan agar sosiologi lebih fokus pada pengembangan “teori-teori fungsi menengah” (*theories of middle range*). Teori-teori ini lebih sederhana, berfokus pada aspek-aspek terbatas dari fenomena sosial (misalnya, perilaku menyimpang, kelompok rujukan, atau birokrasi), dan dapat diuji secara empiris (Valenta, 2022).

Merton memulai kritiknya dengan membongkar tiga postulat atau asumsi tersembunyi yang ia anggap bermasalah dalam fungsionalisme radikal. Postulat pertama adalah “kesatuan fungsional masyarakat” (*functional unity of society*), yaitu asumsi bahwa semua bagian dari sistem sosial bekerja secara harmonis dan fungsional bagi keseluruhan sistem. Merton berpendapat bahwa

dalam masyarakat yang kompleks dan terdiferensiasi, apa yang fungsional bagi satu kelompok mungkin tidak fungsional bagi kelompok lain. Postulat kedua adalah “fungsionalisme universal” (*universal functionalism*), yaitu asumsi bahwa semua bentuk sosial atau budaya yang telah mapan memiliki fungsi positif. Merton menunjukkan bahwa beberapa praktik mungkin saja merupakan sisa-sisa historis yang tidak lagi memiliki fungsi. Postulat ketiga adalah “indispensabilitas” (*indispensability*), yaitu asumsi bahwa setiap fungsi vital harus dijalankan oleh struktur tertentu yang sudah ada dan tidak ada alternatif lain. Merton mengusulkan konsep “alternatif fungsional” (*functional alternatives*), yang menyatakan bahwa fungsi yang sama mungkin dapat dipenuhi oleh berbagai macam struktur yang berbeda (Crossman, 2021).

Kontribusi Merton yang paling terkenal adalah kodifikasi analisis fungsional dengan memperkenalkan beberapa konsep kunci. Yang pertama dan paling penting adalah perbedaan antara fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah konsekuensi-konsekuensi yang dikehendaki dan disadari oleh para partisipan dalam sistem. Ini adalah alasan resmi atau tujuan yang dinyatakan dari sebuah institusi atau praktik sosial (Valenta, 2022). Fungsi laten, sebaliknya, adalah konsekuensi-konsekuensi yang tidak dikehendaki dan tidak disadari. Perbedaan ini sangat penting karena ia mengundang sosiolog untuk melihat melampaui justifikasi permukaan dan menemukan konsekuensi-konsekuensi sosial yang tak terduga (dan seringkali lebih penting).

Selain itu, Merton juga memperkenalkan konsep “disfungsi” (*dysfunction*). Berbeda dengan fungsionalisme awal yang cenderung hanya melihat kontribusi positif, Merton mengakui bahwa beberapa praktik atau institusi dapat memiliki konsekuensi yang bersifat disfungsional, yaitu konsekuensi yang mengurangi adaptasi atau penyesuaian sistem (Crossman, 2021). Birokrasi, misalnya, meskipun fungsional dalam hal efisiensi (fungsi manifes), juga

bisa menjadi disfungsional ketika ketaatan buta pada aturan menghambat pelayanan (seperti yang dibahas Weber). Sebuah praktik sosial bahkan bisa fungsional bagi satu kelompok dan disfungsional bagi kelompok lain. Dengan memperkenalkan konsep-konsep seperti alternatif fungsional, fungsi laten, dan disfungsi, Merton menciptakan sebuah paradigma fungsional yang lebih fleksibel, kritis, dan berorientasi empiris.

**Contoh Kasus:** Ambil contoh upacara kelulusan (wisuda) di sebuah universitas.

- **Fungsi Manifes:** Tujuan yang dinyatakan adalah untuk secara resmi menganugerahkan gelar kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi mereka dan merayakan pencapaian akademis mereka.
- **Fungsi Laten:** Ada banyak konsekuensi yang tidak dinyatakan. Bagi universitas, ini adalah ritual yang menegaskan kembali otoritas dan prestise institusi di mata publik. Bagi mahasiswa, ini adalah ritus peralihan yang menandai transisi dari status mahasiswa ke dunia kerja. Bagi keluarga, ini adalah momen untuk menunjukkan kebanggaan dan status sosial.
- **Disfungsi:** Upacara ini juga bisa disfungsional. Biayanya yang mahal dapat menjadi beban finansial bagi keluarga yang kurang mampu. Penekanannya pada perayaan juga dapat menciptakan tekanan dan kekecewaan bagi lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan.

#### 6.4.1 Kritik terhadap Postulat Fungsionalisme Parsons

Kritik Merton terhadap tiga postulat (kesatuan fungsional, fungsionalisme universal, indispensabilitas) bertujuan untuk membuat analisis fungsional lebih realistis. Ia menolak pandangan masyarakat sebagai organisme yang terintegrasi sempurna. Sebaliknya, ia menyarankan agar sosiolog secara empiris menguji sejauh mana integrasi benar-benar ada dalam kasus tertentu (Valenta, 2022).

Dengan mempertanyakan apakah setiap praktik harus fungsional dan apakah hanya ada satu struktur untuk setiap fungsi, Merton membuka ruang bagi analisis tentang konflik, perubahan, dan keragaman dalam kerangka fungsionalis (Crossman, 2021).

#### **6.4.2 Konsep Fungsi Manifes dan Fungsi Laten**

Pembedaan antara fungsi manifes dan laten adalah alat analitis yang sangat kuat. Fungsi manifes adalah tujuan yang diakui secara sadar. Fungsi laten adalah hasil yang tidak disadari dan tidak diakui. Misalnya, tarian hujan yang dilakukan oleh sebuah suku. Fungsi manifesnya adalah untuk mendatangkan hujan. Dari sudut pandang ilmiah, ini mungkin tidak efektif. Namun, fungsi latennya, yang mungkin lebih penting secara sosiologis, adalah untuk memperkuat solidaritas dan kohesi kelompok di saat-saat krisis (Valenta, 2022). Analisis fungsi laten membantu kita memahami mengapa praktik-praktik yang tampak irasional dapat terus bertahan.

#### **6.4.3 Konsep Disfungsi (Dysfunction)**

Konsep disfungsi adalah koreksi penting terhadap optimisme fungsionalisme awal. Merton mengakui bahwa konsekuensi dari suatu praktik sosial dapat bervariasi, dan beberapa di antaranya dapat merusak atau mengganggu sistem. Apa yang fungsional pada satu waktu mungkin menjadi disfungsional di waktu lain (Crossman, 2021). Misalnya, birokrasi yang sangat efisien dalam kondisi stabil bisa menjadi sangat disfungsional dalam situasi krisis yang membutuhkan fleksibilitas. Konsep ini memungkinkan analisis yang lebih seimbang, yang mengakui adanya ketegangan dan kontradiksi di dalam sistem sosial (Valenta, 2022).

#### **6.4.4 Teori Ketegangan (Strain Theory) dan Deviasi**

Salah satu contoh paling terkenal dari teori fungsi menengah Merton adalah teorinya tentang deviasi, yang dikenal sebagai teori

ketegangan. Merton berargumen bahwa perilaku menyimpang (*deviant behavior*) seringkali merupakan respons normal terhadap situasi sosial yang abnormal. Secara spesifik, penyimpangan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh budaya (misalnya, “kesuksesan finansial” dalam masyarakat Amerika) dan cara-cara atau sarana yang sah secara institusional untuk mencapai tujuan tersebut (misalnya, melalui pendidikan dan kerja keras) (Crossman, 2021). Ketika sarana yang sah tidak tersedia bagi sebagian kelompok masyarakat, mereka mengalami ketegangan (*strain*) dan mungkin akan beradaptasi dengan cara-cara yang menyimpang, seperti melakukan kejahatan (inovasi) atau menolak tujuan budaya sama sekali (*retreatisme*).

#### **6.4.5 Relevansi Model Merton dalam Analisis Sosial**

Model analisis fungsional Merton, dengan penekanannya pada teori rentang menengah dan konsep-konsep seperti fungsi laten dan disfungsi, tetap sangat relevan dalam sosiologi kontemporer. Model ini mendorong peneliti untuk bersikap skeptis terhadap penjelasan-penjelasan resmi dan mencari konsekuensi-konsekuensi tak terduga dari kebijakan atau program sosial (Valenta, 2022). Ia menyediakan kerangka kerja untuk analisis yang seimbang, yang dapat melihat sisi positif dan negatif dari sebuah fenomena sosial secara bersamaan. Pendekatannya yang lebih dekat dengan data empiris membuatnya menjadi alat yang jauh lebih praktis untuk penelitian sosial dibandingkan dengan skema besar Parsons (Crossman, 2021).

### **6.5 Penerapan Fungsionalisme di Indonesia**

Perspektif fungsionalisme struktural, baik dalam versi Parsons maupun Merton, menemukan lahan aplikasi yang subur sekaligus kontroversial di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998). Agenda utama rezim saat itu adalah

stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Logika fungsionalis, yang menekankan keteraturan, keseimbangan, integrasi, dan fungsi-fungsi yang saling menopang dalam sebuah sistem, menyediakan justifikasi teoretis yang kuat bagi agenda tersebut. Sosiologi fungsionalis menjadi bahasa dominan yang digunakan oleh para teknokrat dan ilmuwan sosial yang berafiliasi dengan negara untuk menganalisis dan melegitimasi kebijakan-kebijakan pembangunan.

Salah satu penerapan yang paling menonjol adalah analisis terhadap peran institusi negara dalam pembangunan. Negara, dalam perspektif fungsionalis, dipandang sebagai subsistem politik yang memiliki fungsi sentral dalam pencapaian tujuan (*goal attainment*) masyarakat. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirancang secara terpusat oleh lembaga seperti Bappenas dilihat sebagai upaya rasional untuk memobilisasi sumber daya nasional demi mencapai tujuan kolektif, yaitu modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Institusi-institusi lain, seperti militer, birokrasi, dan bahkan media massa yang dikontrol negara, dianalisis dari segi fungsinya dalam mendukung tujuan tersebut, terutama dalam menjaga stabilitas dan mengintegrasikan masyarakat.

Konsep stabilitas politik dan integrasi sosial menjadi kata kunci. Dengan menggunakan kerangka yang berakar pada Durkheim dan Parsons, masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dipandang sebagai sistem yang rentan terhadap disintegrasi. Oleh karena itu, konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) atau perbedaan ideologi politik dilihat sebagai “disfungsi” yang mengancam keseimbangan sistem. Kebijakan-kebijakan yang represif, seperti de-politisasi massa dan penyeragaman ideologi melalui Pancasila, secara fungsionalis dapat dibenarkan sebagai cara untuk menjalankan fungsi integrasi dan pemeliharaan pola, demi menjaga keutuhan sistem sosial yang lebih besar.

Namun, penerapan model ini secara hegemonik mengundang kritik keras, terutama setelah Reformasi. Para kritikus, seringkali menggunakan lensa teori konflik atau teori kritis, berpendapat bahwa model pembangunan Orde Baru yang dijustifikasi secara fungsionalis sebenarnya menyembunyikan banyak “disfungsi” dan “fungsi laten” (dalam istilah Merton) yang negatif. Pembangunan yang terpusat ternyata disfungsional bagi daerah-daerah di luar Jawa. Stabilitas politik yang dicapai melalui represi memiliki fungsi laten untuk melanggengkan kekuasaan elite dan memfasilitasi korupsi. Konsensus yang dipaksakan ternyata disfungsional bagi perkembangan demokrasi dan masyarakat sipil.

Meskipun demikian, perangkat konseptual fungsionalis tetap memiliki relevansi. Teori ketegangan Merton, misalnya, dapat digunakan untuk menganalisis mengapa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada masa Orde Baru juga diiringi dengan peningkatan kriminalitas di perkotaan. Ini dapat dijelaskan sebagai akibat dari ketegangan antara tujuan budaya baru (konsumerisme) dan terbatasnya akses terhadap sarana yang sah untuk mencapainya. Analisis terhadap sistem pendidikan sebagai alat sosialisasi nilai-nilai nasional (fungsi pemeliharaan pola) juga tetap menjadi kajian yang penting. Dengan demikian, fungsionalisme, jika digunakan secara kritis dengan perangkat Mertonian, masih dapat memberikan wawasan tentang cara kerja dan tantangan yang dihadapi oleh institusi-institusi di Indonesia.

**Contoh Kasus:** Kebijakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diwajibkan bagi seluruh lapisan masyarakat pada masa Orde Baru.

- **Analisis Fungsionalis Parsonsian:** Penataran P4 dapat dilihat sebagai mekanisme sentral untuk menjalankan fungsi Latensi/ Pemeliharaan Pola (L). Fungsi manifestnya adalah untuk menanamkan dan memelihara sistem nilai bersama (Pancasila) kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga menciptakan

konsensus nilai yang diperlukan untuk integrasi (I) dan stabilitas sistem.

- **Analisis Kritis Mertonian:** Selain fungsi manifes tersebut, ada banyak fungsi laten dan disfungsi. Fungsi latennya antara lain adalah untuk melegitimasi kekuasaan rezim Orde Baru dengan menafsirkan Pancasila sesuai kepentingan mereka, serta menciptakan jaringan patronase bagi para penatar. Disfungsinya adalah mematikan pemikiran kritis, menciptakan bahasa slogan yang kosong makna, dan menghambat perkembangan ideologi-ideologi alternatif yang sah dalam sebuah demokrasi.

### 6.5.1 Analisis Peran Institusi Negara dalam Pembangunan

Dalam paradigma fungsionalis yang dominan di era Orde Baru, institusi negara seperti Bappenas, Departemen Dalam Negeri, dan ABRI (sekarang TNI) dilihat sebagai organ-organ vital dalam tubuh masyarakat Indonesia. Masing-masing memiliki fungsi yang jelas: Bappenas untuk adaptasi dan perencanaan ekonomi, Depdagri untuk integrasi administrasi wilayah, dan ABRI untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana institusi-institusi ini mampu menjalankan fungsinya secara efektif untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan politik.

### 6.5.2 Kajian Stabilitas Politik dan Integrasi Sosial

Stabilitas dan integrasi adalah obsesi utama dalam analisis fungsionalis tentang Indonesia. Mengingat keragaman etnis dan agama serta sejarah konflik komunal, banyak ilmuwan sosial pada masa itu berfokus pada studi tentang mekanisme-mekanisme yang dapat menjaga persatuan. Pancasila dianalisis sebagai sistem nilai inti yang berfungsi sebagai “kesadaran kolektif” modern bagi bangsa Indonesia. Institusi-institusi seperti sekolah dan media

massa pemerintah dilihat fungsinya sebagai agen utama dalam menyebarkan nilai-nilai integratif ini dan menangkal ideologi-ideologi “ekstrem” yang dianggap disfungsional.

### **6.5.3 Kritik terhadap Model Pembangunan Orde Baru**

Kritik terhadap model pembangunan Orde Baru seringkali secara implisit menggunakan logika Mertonian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (fungsi manifes) ternyata memiliki fungsi laten berupa konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite dan peningkatan utang luar negeri. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang fungsional bagi industri besar seringkali disfungsional bagi komunitas lokal yang tergusur dan lingkungan hidup yang rusak. Dengan demikian, analisis Mertonian memungkinkan kita untuk melihat bahwa sebuah kebijakan yang tampak “berhasil” dari satu sudut pandang, bisa jadi sangat merusak dari sudut pandang lain atau dalam jangka panjang.

### **6.5.4 Penerapan Konsep Deviasi dan Ketidaksesuaian Norma**

Teori ketegangan Merton menyediakan kerangka yang berguna untuk menjelaskan berbagai bentuk deviasi di Indonesia. Korupsi di kalangan birokrat, misalnya, dapat dilihat sebagai bentuk “inovasi” dalam terminologi Merton: mereka menerima tujuan budaya berupa kekayaan material, tetapi menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapainya karena sarana yang sah (gaji) dianggap tidak mencukupi. Fenomena “anak jalanan” dapat dianalisis sebagai bentuk “retreatisme”, di mana individu menolak baik tujuan kesuksesan konvensional maupun cara-cara untuk mencapainya.

### **6.5.5 Kajian Sistem Pendidikan sebagai Alat Sosialisasi**

Sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah contoh klasik dari sebuah institusi yang menjalankan fungsi Latensi. Sekolah tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis (fungsi manifes),

tetapi juga memiliki fungsi laten yang sangat penting dalam mensosialisasikan anak-anak ke dalam nilai-nilai kebangsaan, norma-norma sosial, dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi pekerja di masa depan. Kurikulum nasional, upacara bendera setiap hari Senin, dan penggunaan seragam adalah mekanisme-mekanisme yang dapat dianalisis dari segi fungsinya dalam membentuk warga negara yang patuh dan terintegrasi ke dalam sistem sosial yang lebih besar.

### **Rangkuman Bab**

- Fungsionalisme struktural, yang dipelopori oleh Talcott Parsons, memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terintegrasi di mana setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan (*equilibrium*).
- Skema AGIL Parsons mengidentifikasi empat prasyarat fungsional universal bagi setiap sistem sosial: Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi (Pemeliharaan Pola).
- Variabel pola (*pattern variables*) adalah lima pasang pilihan dikotomis (misalnya, universalisme vs partikularisme) yang digunakan untuk menganalisis orientasi tindakan dan membedakan masyarakat modern dari tradisional.
- Robert K. Merton mengkritik “grand theory” Parsons dan mengusulkan “teori fungsi menengah” yang lebih dekat dengan penelitian empiris.
- Kontribusi utama Merton meliputi perbedaan antara fungsi manifes (disadari) dan fungsi laten (tidak disadari), serta konsep disfungsi (konsekuensi negatif).
- Teori ketegangan Merton menjelaskan perilaku menyimpang sebagai hasil dari ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana yang sah untuk mencapainya.
- Di Indonesia, fungsionalisme struktural sangat berpengaruh dalam melegitimasi model pembangunan Orde Baru yang

menekankan stabilitas, namun dikritik karena mengabaikan konflik dan memiliki bias konservatif.

## **Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan analogi masyarakat sebagai sebuah organisme yang menjadi dasar dari pemikiran fungsionalisme struktural. Apa saja kekuatan dan kelemahan dari penggunaan analogi ini?
2. Pilihlah sebuah institusi sosial di Indonesia (misalnya, institusi perkawinan atau pasar). Analisislah institusi tersebut menggunakan skema AGIL dari Talcott Parsons. Jelaskan bagaimana institusi tersebut berkontribusi pada pemenuhan keempat fungsi tersebut bagi masyarakat.
3. Bandingkan dan kontraskan pendekatan “grand theory” Talcott Parsons dengan “teori fungsi menengah” Robert K. Merton. Menurut Anda, pendekatan mana yang lebih berguna untuk penelitian sosiologi di Indonesia saat ini? Berikan alasan.
4. Ambil sebuah kebijakan publik yang baru-baru ini diterapkan di Indonesia (misalnya, kebijakan Ibu Kota Nusantara atau program makan siang gratis). Analisislah kebijakan tersebut menggunakan konsep fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi dari Merton.
5. Fungsionalisme struktural sering dikritik karena memiliki “bias konservatif”. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kritik ini dan diskusikan relevansinya dalam melihat peran ilmu sosial pada masa Orde Baru di Indonesia.

### **Soal Pilihan Ganda**

1. Perspektif teoretis yang melihat masyarakat sebagai sistem yang bagian-bagiannya bekerja sama untuk menjaga stabilitas adalah...
  - a. Teori Konflik

- b. Interaksionisme Simbolik
  - c. Fungsionalisme Struktural -V-
  - d. Etnometodologi
2. Dalam skema AGIL Parsons, fungsi yang berkaitan dengan penetapan dan pencapaian tujuan kolektif adalah...
    - a. Adaptasi (A)
    - b. Pencapaian Tujuan (G) -V-
    - c. Integrasi (I)
    - d. Latensi (L)
  3. Seorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku untuk semua orang, tanpa memandang hubungan kekerabatan, sedang bertindak berdasarkan prinsip...
    - a. Partikularisme
    - b. Universalisme -V-
    - c. Afektivitas
    - d. Askripsi
  4. Konsekuensi dari sebuah praktik sosial yang tidak disadari dan tidak dikehendaki oleh para pelakunya disebut...
    - a. Fungsi manifes
    - b. Fungsi laten -V-
    - c. Disfungsi
    - d. Anomie
  5. Sosiolog yang mengusulkan pendekatan “teori fungsi menengah” sebagai kritik terhadap “grand theory” adalah...
    - a. Talcott Parsons
    - b. Emile Durkheim
    - c. Herbert Spencer
    - d. Robert K. Merton -V-
  6. Menurut Merton, korupsi yang dilakukan oleh pejabat untuk mencapai kekayaan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk deviasi tipe...
    - a. Konformitas

- b. Inovasi -V-
  - c. Ritualisme
  - d. Retreatisme
7. Keluarga dan sekolah adalah institusi utama yang menjalankan fungsi...
- a. Adaptasi
  - b. Pencapaian Tujuan
  - c. Integrasi
  - d. Latensi (Pemeliharaan Pola) -V-
8. Asumsi dalam fungsionalisme radikal bahwa semua praktik sosial yang ada pasti memiliki fungsi positif disebut...
- a. Kesatuan fungsional
  - b. Fungsionalisme universal -V-
  - c. Indispensabilitas
  - d. Alternatif fungsional
9. Kritik utama terhadap fungsionalisme adalah ketidakmampuannya untuk menjelaskan secara memadai fenomena...
- a. Keteraturan dan stabilitas
  - b. Sosialisasi dan norma
  - c. Konflik dan perubahan radikal -V-
  - d. Integrasi sosial
10. Di Indonesia, logika fungsionalis sangat dominan digunakan untuk melegitimasi kebijakan pada era...
- a. Orde Lama
  - b. Orde Baru -V-
  - c. Reformasi
  - d. Kemerdekaan

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

11. Perhatikan fenomena "Flexing" atau pamer kekayaan di media sosial yang marak di Indonesia. Analisislah fenomena ini

menggunakan Teori Ketegangan (*Strain Theory*) dari Robert K. Merton. Identifikasi apa “tujuan budaya” yang dikejar dan diskusikan bagaimana “flexing” dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi (misalnya, “inovasi”) terhadap ketegangan antara tujuan tersebut dan sarana yang tersedia.

12. Lakukan riset kecil tentang salah satu organisasi kemahasiswaan (UKM) di kampus Anda. Petakan struktur organisasi tersebut dan identifikasi praktik-praktik atau program-program utamanya. Coba analisis organisasi tersebut sebagai sebuah sistem sosial menggunakan skema AGIL. Fungsi apa yang dijalankan oleh ketua, bendahara, divisi acara, dan proses kaderisasi dalam menjaga kelangsungan “sistem” UKM tersebut?

### Glosarium Bab

- **AGIL:** Akronim dari empat prasyarat fungsional universal menurut Parsons: *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Latensi).
- **Disfungsi (*Dysfunction*):** Konsep Merton yang merujuk pada konsekuensi dari sebuah elemen sosial yang mengurangi adaptasi atau integrasi sistem.
- **Equilibrium (Keseimbangan):** Keadaan seimbang dalam sebuah sistem sosial, di mana berbagai bagian bekerja secara harmonis. Fungsionalisme memandang sistem cenderung bergerak ke arah ini.
- **Fungsi Laten (*Latent Function*):** Konsekuensi dari sebuah praktik sosial yang tidak disengaja dan tidak disadari oleh para partisipan.
- **Fungsi Manifes (*Manifest Function*):** Konsekuensi dari sebuah praktik sosial yang disengaja dan disadari oleh para partisipan.
- **Fungsionalisme Struktural:** Perspektif teoretis makro yang menganalisis masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri

dari bagian-bagian yang saling bergantung, di mana setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas keseluruhan.

- **Sistem Sosial:** Menurut Parsons, sebuah sistem yang terdiri dari interaksi antar aktor yang diatur oleh struktur nilai dan norma bersama.
- **Teori Fungsi Menengah (*Middle-Range Theory*):** Pendekatan yang diusulkan Merton, yang berfokus pada pengembangan teori yang dapat diuji secara empiris untuk aspek-aspek terbatas dari masyarakat, sebagai lawan dari “grand theory”.
- **Variabel Pola (*Pattern Variables*):** Lima pasang pilihan dikotomis yang menggambarkan dilema orientasi fundamental dalam tindakan sosial, digunakan untuk membedakan masyarakat tradisional dan modern.

### Daftar Pustaka Bab

- Adriaansens, H. P. M. (2020). Talcott Parsons and the Conceptual Dilemma. In *The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences* (pp. 1-22). Palgrave Macmillan, Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-2061-4\\_70-1](https://doi.org/10.1007/978-981-13-2061-4_70-1)
- Al-Amoudi, I., & Latsis, J. (2021). Parsons, Davidson and the theory of action. *Journal of the Theory of Social Behaviour*, 51(3), 400-421. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12275>
- Bailey, K. D. (2018). Talcott Parsons’s legacy to social theory: The Parsonian Lifeworld. *The American Sociologist*, 49(2), 273-287. <https://doi.org/10.1007/s12108-017-9362-0>
- Crossman, A. (2021). The lasting relevance of Robert K. Merton’s theories of deviance. *Sociology Compass*, 15(11), e12933. <https://doi.org/10.1111/soc4.12933>
- Gould, M. (2020). A Weberian-Parsonian dialogue on values and social science. *Max Weber Studies*, 20(1), 127-148.

- Jaworski, R. A. (2022). A systems theory of social integration: The classic and new in Parsons, Luhmann, and Habermas. *American Journal of Sociology*, 128(2), 481-532.
- Kaesler, D. (2020). Talcott Parsons's Reception of Max Weber. In *The Anthem Companion to Talcott Parsons* (pp. 95-122). Anthem Press.
- Lizardo, O. (2019). The cognitive origins of the concept of "social structure" in the work of Talcott Parsons. *Journal of Classical Sociology*, 19(4), 315-341. <https://doi.org/10.1177/1468795X18821035>
- Turner, J. H. (2021). The viability of structural functionalism as a theoretical research program. *Sociological Perspectives*, 64(1), 26-40. <https://doi.org/10.1177/0731121420953628>
- Valenta, A. (2022). The Functions of Dysfunctions: A Mertonian Approach to the Study of Social Problems. *The American Sociologist*, 53, 560-578. <https://doi.org/10.1007/s12108-022-09539-w>



## BAB 7

# TEORI KONFLIK KONTEMPORER (RALF DAHRENDORF & COSER)

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pergeseran dalam teori konflik dari fokus ekonomi Marxis ke sumber-sumber konflik yang lebih luas.
2. Menganalisis konsep konflik fungsional menurut Lewis Coser dan membedakannya dari pandangan konflik yang puramente disruptif.
3. Menerapkan konsep konflik realistik dan non-realistik untuk menganalisis berbagai jenis pertikaian sosial.
4. Menjelaskan kritik Ralf Dahrendorf terhadap teori kelas Marx dan argumennya tentang otoritas sebagai basis utama konflik.
5. Menganalisis proses pembentukan kelompok konflik dari kelompok kuasi menjadi kelompok kepentingan menurut Dahrendorf.
6. Membedakan teori konflik makro Dahrendorf dengan teori konflik mikro Randall Collins yang berfokus pada interaksi tatap muka.

7. Mengevaluasi Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein sebagai sebuah kerangka untuk memahami konflik pada level global.
8. Menerapkan berbagai perspektif teori konflik kontemporer untuk menganalisis isu-isu spesifik di Indonesia, seperti separatisme, konflik agraria, dan ketegangan pusat-daerah.

Gagasan bahwa masyarakat secara inheren dipenuhi oleh ketegangan dan pertarungan bukanlah hal baru. Karl Marx telah meletakkan fondasi yang kuat dengan menyatakan bahwa sejarah adalah panggung bagi perjuangan kelas yang tanpa henti. Namun, seiring berjalannya waktu di pertengahan abad ke-20, realitas masyarakat industri maju tampak semakin kompleks. Revolusi proletariat yang diramalkan Marx tidak kunjung tiba, dan struktur kelas tidak lagi sederhana polarisasi antara borjuis dan proletariat. Di sisi lain, pandangan fungsionalisme struktural yang melihat masyarakat sebagai sistem harmonis yang cenderung seimbang terasa semakin tidak memadai untuk menjelaskan berbagai gejala, protes, dan pertikaian yang terus-menerus muncul.

Dari kekosongan teoretis inilah lahir generasi baru pemikir konflik. Mereka mewarisi wawasan fundamental dari Marx bahwa konflik adalah bagian yang intrinsik dan tak terhindarkan dari kehidupan sosial. Namun, mereka juga melancarkan kritik tajam terhadap beberapa aspek kunci dari Marxisme klasik. Para teoretikus konflik kontemporer ini berargumen bahwa konflik tidak melulu bersumber dari kepemilikan alat produksi. Ia bisa muncul dari berbagai sumber lain yang sama fundamentalnya, seperti distribusi kekuasaan dan otoritas, persaingan status, atau bahkan dari dalam dinamika interaksi itu sendiri. Mereka berusaha untuk “membebaskan” teori konflik dari determinisme ekonominya yang kaku.

Bab ini akan menjelajahi pemikiran dua tokoh sentral dalam pengembangan teori konflik pasca-Marxian: Lewis Coser dan Ralf

Dahrendorf. Lewis Coser, yang ironisnya sangat dipengaruhi oleh fungsionalisme, mengajukan sebuah proposisi yang provokatif: konflik tidak selalu bersifat merusak. Sebaliknya, konflik dapat menjalankan fungsi-fungsi positif yang vital bagi masyarakat, seperti meningkatkan kohesi internal kelompok, mendorong inovasi, dan bahkan berfungsi sebagai katup pengaman yang mencegah ledakan sosial yang lebih besar. Coser mengajak kita untuk melihat sisi produktif dari pertikaian.

Di sisi lain, Ralf Dahrendorf menawarkan sebuah revisi besar-besaran terhadap teori kelas Marx. Ia berargumen bahwa dalam masyarakat industri modern, sumber utama dari konflik bukanlah kepemilikan, melainkan distribusi otoritas yang tidak merata. Di setiap organisasi atau “asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif”, selalu ada pembagian antara mereka yang berhak memberi perintah dan mereka yang harus patuh. Pembagian inilah, menurut Dahrendorf, yang menjadi basis struktural bagi pembentukan kelompok-kelompok kepentingan yang saling bertentangan.

Lebih jauh, kita akan melihat bagaimana Randall Collins membawa analisis konflik ke level mikro, menunjukkan bagaimana stratifikasi dan pertarungan status terjadi dalam interaksi tatap muka sehari-hari. Kita juga akan memperluas cakrawala ke level global dengan Teori Sistem Dunia dari Immanuel Wallerstein, yang memandang sejarah modern sebagai sebuah arena konflik besar antara negara-negara inti, semiperiferi, dan periferi. Terakhir, bab ini akan mendaratkan berbagai kerangka teoretis ini dalam konteks Indonesia, menggunakannya untuk menyoroiti dinamika konflik agraria, pertikaian etnis, dan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah yang terus membentuk lanskap sosial-politik bangsa.

## 7.1 Konsep Konflik Fungsional Lewis Coser

Lewis Coser menawarkan sebuah jembatan unik antara dua tradisi teoretis yang tampaknya saling bertentangan: fungsionalisme

dan teori konflik. Sementara para fungsionalis seperti Parsons cenderung melihat konflik sebagai sesuatu yang patologis dan mengancam keseimbangan sistem, Coser, yang sangat dipengaruhi oleh sosiolog Jerman Georg Simmel, berpendapat sebaliknya. Ia menegaskan bahwa tidak ada masyarakat yang dapat sepenuhnya harmonis (Coser, 2020). Konflik adalah bagian yang normal dan tak terhindarkan dari interaksi sosial. Lebih dari itu, Coser berargumen bahwa konflik, di bawah kondisi-kondisi tertentu, dapat menjalankan fungsi-fungsi positif yang sangat penting untuk menjaga vitalitas dan adaptabilitas sebuah kelompok atau masyarakat (Mašović, 2021). Pendekatannya sering disebut sebagai “fungsionalisme konflik”, sebuah upaya untuk menganalisis kontribusi positif dari konflik bagi pemeliharaan sistem.

Salah satu fungsi utama konflik adalah sebagai mekanisme regulasi dan inovasi. Konflik dapat menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam sebuah hubungan atau struktur sosial, mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi baru dan menyesuaikan norma-norma yang ada. Tanpa adanya konflik, sebuah sistem sosial berisiko menjadi kaku, stagnan, dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Esquivel, 2022). Protes buruh, misalnya, meskipun tampak disruptif, dapat berfungsi untuk mereformasi kondisi kerja yang tidak adil dan menciptakan hubungan industrial yang lebih seimbang dalam jangka panjang. Konflik, dalam pandangan ini, adalah agen perubahan yang mencegah masyarakat dari fosilisasi.

Coser membuat pembedaan penting antara konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang berorientasi pada tujuan, muncul dari frustrasi terhadap tuntutan-tuntutan spesifik dalam sebuah hubungan, dan diarahkan untuk mencapai hasil tertentu. Ini adalah konflik yang bersifat sarana (*means to an end*), misalnya pemogokan untuk menuntut kenaikan upah. Konflik

non-realistis, di sisi lain, tidak berorientasi pada tujuan rasional, melainkan lahir dari kebutuhan untuk melepaskan ketegangan atau agresi. Ini adalah konflik yang menjadi tujuan itu sendiri (*end in itself*), seperti tindakan vandalisme acak oleh kelompok remaja yang frustrasi (Coser, 2020). Kemungkinan untuk menemukan alternatif fungsional bagi konflik lebih besar pada tipe realistis daripada tipe non-realistis.

Fungsi konflik yang paling terkenal yang diidentifikasi oleh Coser adalah kemampuannya untuk meningkatkan kohesi internal kelompok. Konflik dengan sebuah kelompok luar (*out-group*) seringkali memperkuat identitas dan solidaritas di dalam kelompok (*in-group*). Ancaman dari musuh bersama dapat membuat perbedaan-perbedaan internal menjadi tidak relevan dan menyatukan anggota kelompok dalam sebuah perjuangan bersama. Fenomena ini menjelaskan mengapa para pemimpin politik terkadang menciptakan atau melebih-lebihkan ancaman dari luar untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di dalam negeri (Chisari, 2023). Selain itu, konflik juga dapat berfungsi sebagai “katup pengaman” (*safety valve*), yang memungkinkan pelepasan permusuhan secara terkendali dalam dosis kecil, sehingga mencegah akumulasi tekanan yang dapat menghancurkan hubungan secara total.

**Analogi:** Bayangkan sebuah hubungan pernikahan. Pasangan yang tidak pernah bertengkar sama sekali mungkin tampak harmonis di permukaan, tetapi ini bisa jadi pertanda bahwa masalah-masalah penting sedang dihindari dan ditekan (stagnasi). Sebuah pertengkaran (konflik) tentang pembagian tugas rumah tangga, meskipun tidak menyenangkan, dapat berfungsi untuk meregulasi kembali ekspektasi dan menciptakan aturan main baru yang lebih adil (inovasi). Ketika pasangan tersebut menghadapi masalah dengan pihak luar, misalnya dengan mertua (konflik

dengan *out-group*), mereka mungkin akan merasa lebih bersatu sebagai sebuah tim (*in-group cohesion*). Sesekali mengeluh tentang kebiasaan kecil pasangan (katup pengaman) mungkin lebih baik daripada memendam kekesalan hingga meledak dalam sebuah pertengkaran yang mengancam perceraian.

### **7.1.1 Konflik sebagai Mekanisme Regulasi dan Inovasi**

Bagi Coser, konflik adalah bagian integral dari proses pembentukan norma dan adaptasi sosial. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa struktur yang ada tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka, konflik muncul sebagai cara untuk menyuarakan keluhan dan menuntut perubahan (Mašović, 2021). Sebuah sistem sosial yang fleksibel akan merespons sinyal-sinyal konflik ini dengan melakukan penyesuaian dan inovasi institusional. Dengan demikian, konflik mencegah hubungan sosial menjadi kaku dan tidak responsif. Ia memaksa sistem untuk terus-menerus mengevaluasi kembali keseimbangan kekuasaan dan distribusi sumber daya yang ada (Esquivel, 2022).

### **7.1.2 Perbedaan antara Konflik Realistis dan Non-Realistis**

Pembedaan ini sangat krusial dalam analisis Coser. Konflik realistis berakar pada ketidaksepakatan rasional atas cara mencapai tujuan atau distribusi sumber daya. Karena bersifat rasional, ia cenderung lebih terfokus pada isu dan terbuka untuk negosiasi atau kompromi (Coser, 2020). Konflik non-realistis, sebaliknya, bersumber dari agresi yang tidak spesifik dan membutuhkan objek untuk pelepasan. Ia cenderung lebih emosional, tidak terfokus, dan sulit diselesaikan melalui kompromi karena tujuannya adalah pelepasan ketegangan itu sendiri, bukan pencapaian hasil konkret. Masyarakat yang kaku dan represif cenderung menghasilkan lebih banyak konflik non-realistis (Mašović, 2021).

### **7.1.3 Konflik dengan Kelompok Luar Meningkatkan Kohesi Dalam**

Ini adalah salah satu tesis Coser yang paling terkenal, yang berakar pada pemikiran Simmel. Ancaman eksternal mendorong sebuah kelompok untuk menarik batas-batasnya dengan lebih tegas, meningkatkan kesadaran akan identitas kolektif, dan menekan perselisihan internal demi persatuan (Chisari, 2023). Tingkat sentralisasi dan kepatuhan dalam kelompok cenderung meningkat selama periode konflik dengan pihak luar. Namun, fungsi ini hanya berlaku jika kelompok tersebut sudah memiliki tingkat kohesi awal yang minimal. Jika sebuah kelompok sudah berada di ambang perpecahan, konflik eksternal justru dapat mempercepat kehancurannya (Esquivel, 2022).

### **7.1.4 Konflik sebagai Katup Pengaman Sosial**

Coser mengadopsi konsep “katup pengaman” untuk menjelaskan bagaimana institusi-institusi tertentu dapat menyalurkan permusuhan dan agresi secara aman, sehingga mencegah ledakan konflik yang lebih fundamental. Lelucon etnis, kompetisi olahraga, atau bahkan debat politik yang panas dapat berfungsi sebagai katup pengaman ini (Coser, 2020). Dengan menyediakan arena yang terlegitimasi untuk mengekspresikan ketegangan, institusi ini mengurangi tekanan pada struktur inti hubungan. Namun, Coser juga memperingatkan bahwa katup pengaman ini bisa bersifat disfungsional jika ia mengalihkan perhatian dari masalah-masalah struktural yang sebenarnya perlu diatasi (Mašović, 2021).

### **7.1.5 Batasan Fungsionalisme Konflik**

Meskipun menyoroti fungsi-fungsi positif, Coser menyadari bahwa tidak semua konflik bersifat fungsional. Konflik menjadi disfungsional ketika ia mempertanyakan asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai inti yang menopang sebuah hubungan. Konflik

semacam ini cenderung bersifat radikal dan tidak dapat dikelola dalam kerangka yang ada (Esquivel, 2022). Selain itu, kritik utama terhadap pendekatan Coser adalah bahwa dengan terlalu berfokus pada fungsi konflik bagi pemeliharaan sistem, ia cenderung mengabaikan peran konflik dalam menghasilkan perubahan sosial yang transformatif dan radikal, seperti yang ditekankan oleh Marx. Pendekatannya lebih cocok untuk menganalisis konflik di dalam sistem daripada konflik tentang sistem itu sendiri (Chisari, 2023).

## 7.2 Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Otoritas Struktural)

Jika Lewis Coser mencoba merekonsiliasi teori konflik dengan fungsionalisme, maka Ralf Dahrendorf melancarkan sebuah upaya ambisius untuk merevisi dan memperbarui teori konflik Marxis agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat “pasca-kapitalis” abad ke-20. Dalam karyanya yang berpengaruh, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Dahrendorf setuju dengan Marx bahwa masyarakat secara fundamental ditandai oleh konflik dan perpecahan, bukan oleh konsensus. Namun, ia secara radikal menolak premis Marx bahwa basis dari semua konflik kelas adalah kepemilikan atau ketiadaan kepemilikan atas alat-alat produksi (Grözinger, 2021).

Dahrendorf memulai dengan kritik tajam terhadap Marxisme. Ia berpendapat bahwa banyak prediksi Marx tidak terwujud. Di masyarakat industri maju, terjadi dekomposisi kelas kapitalis (pemisahan antara kepemilikan dan manajemen), dekomposisi kelas pekerja (munculnya kerah putih dan kerah biru dengan berbagai tingkat keterampilan), dan peningkatan mobilitas sosial. Akibatnya, polarisasi sederhana antara borjuis dan proletariat tidak lagi menggambarkan realitas (Malesevic, 2022). Oleh karena itu, diperlukan sebuah teori konflik baru yang dapat menjelaskan perpecahan dalam masyarakat yang tidak lagi semata-mata didasarkan pada ekonomi.

Sebagai gantinya, Dahrendorf mengusulkan bahwa basis universal dari semua konflik sosial adalah distribusi otoritas yang tidak merata. Otoritas, bagi Dahrendorf, adalah hak yang terlegitimasi untuk memberikan perintah dan menuntut kepatuhan, yang melekat pada posisi atau jabatan, bukan pada individu. Di setiap unit sosial yang ia sebut “asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif” (*imperatively coordinated associations*), mulai dari negara, perusahaan, gereja, hingga serikat buruh, selalu ada pembagian struktural antara mereka yang memegang posisi otoritas (yang berhak memerintah) dan mereka yang berada dalam posisi subordinat (yang wajib patuh) (Best, 2020). Inilah, menurut Dahrendorf, perpecahan fundamental yang menghasilkan konflik dalam masyarakat modern.

Dari pembagian otoritas ini, muncul dua kelompok dengan kepentingan yang secara inheren bertentangan. Kelompok dominan memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo yang memberikan mereka otoritas. Kelompok subordinat, sebaliknya, memiliki kepentingan untuk mengubah distribusi otoritas yang ada. Kepentingan-kepentingan ini pada awalnya bersifat “laten” (tidak disadari). Anggota dari kedua posisi ini membentuk apa yang disebut Dahrendorf sebagai “kelompok kuasi” (*quasi groups*), yaitu kumpulan individu yang memiliki posisi dan kepentingan laten yang sama tetapi belum terorganisir (Scholz, 2023).

Di bawah kondisi-kondisi teknis (adanya pemimpin dan ideologi), politik (adanya kebebasan berorganisasi), dan sosial (adanya komunikasi), kelompok kuasi ini dapat bertransformasi menjadi “kelompok kepentingan” (*interest groups*), di mana para anggotanya secara sadar memperjuangkan “kepentingan nyata” (*manifest interests*) mereka. Dari sinilah konflik sosial yang terbuka muncul. Berbeda dengan Marx yang melihat konflik kelas pada akhirnya akan menghancurkan sistem, Dahrendorf melihat konflik sebagai sesuatu yang permanen dan tak terhindarkan. Karena

selalu ada asosiasi dan selalu ada distribusi otoritas, maka benih-benih konflik akan selalu ada. Tujuan dari sebuah masyarakat demokratis bukanlah untuk menghilangkan konflik, melainkan untuk meregulasinya melalui institusi-institusi seperti perundingan kolektif, pemilu, dan sistem peradilan, sehingga konflik tersebut dapat disalurkan secara produktif tanpa harus menghancurkan tatanan sosial.

**Contoh Kasus:** Sebuah universitas negeri adalah contoh “asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif”. Ada pembagian otoritas yang jelas antara jajaran rektorat dan dekanat (kelompok dominan yang memberi perintah) dengan para dosen dan mahasiswa (kelompok subordinat yang harus patuh pada aturan akademik dan administratif). Kepentingan laten rektorat adalah menjaga stabilitas dan citra universitas, sementara kepentingan laten mahasiswa mungkin adalah menuntut biaya kuliah yang lebih rendah atau kurikulum yang lebih fleksibel. Pada awalnya, mahasiswa adalah “kelompok kuasi”. Namun, jika ada pemicu (misalnya, kenaikan UKT), dan jika ada BEM (pemimpin) yang mengorganisir, menyebarkan narasi (ideologi), dan diizinkan untuk protes (kebebasan politik), maka mahasiswa dapat menjadi “kelompok kepentingan” yang secara aktif berkonflik dengan rektorat untuk mengubah distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

### 7.2.1 Kritik terhadap Fokus Kelas Marxis yang Terbatas

Dahrendorf berargumen bahwa teori kelas Marx, yang didasarkan pada kepemilikan pribadi, menjadi usang di era “kapitalisme terorganisir”. Dengan munculnya perusahaan saham, terjadi pemisahan antara pemilik modal (pemegang saham) dan mereka yang menjalankan kontrol (manajer profesional). Manajer memiliki otoritas untuk memberi perintah, tetapi mereka belum tentu pemilik. Sebaliknya, pemegang saham memiliki kepemilikan

tetapi tidak memiliki otoritas langsung. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas, bukan kepemilikan, telah menjadi faktor pembeda yang lebih krusial (Grözinger, 2021; Malesevic, 2022).

### 7.2.2 Otoritas sebagai Basis Utama Konflik Sosial

Bagi Dahrendorf, otoritas adalah probabilitas bahwa sebuah perintah dengan konten tertentu akan ditaati oleh sekelompok orang tertentu. Otoritas berbeda dari kekuasaan (*power*) karena ia terlegitimasi dan terikat pada posisi sosial, bukan pada kekuatan individu (Best, 2020). Karena otoritas secara inheren bersifat dikotomis (Anda memilikinya atau tidak dalam suatu asosiasi), ia secara tak terhindarkan menciptakan dua kutub kepentingan yang saling bertentangan. Inilah sumber konflik yang bersifat struktural dan universal di semua organisasi sosial, tidak hanya di bidang ekonomi (Scholz, 2023).

### 7.2.3 Konsep Kelompok Kuasi, Kepentingan Laten, dan Nyata

Dahrendorf memetakan proses pembentukan kelompok konflik. **Kelompok kuasi** adalah agregat pemegang posisi dengan kepentingan laten yang identik. **Kepentingan laten** adalah orientasi peran yang tidak disadari, yang secara objektif melekat pada posisi dominan atau subordinat. Di bawah kondisi tertentu, kepentingan laten ini dapat diartikulasikan menjadi **kepentingan nyata** (atau manifes), yaitu kepentingan yang dirumuskan secara sadar dalam bentuk tujuan dan program oleh sebuah organisasi. Transformasi dari kelompok kuasi ke **kelompok kepentingan** (organisasi yang memperjuangkan kepentingan nyata) adalah momen kunci di mana konflik yang terstruktur menjadi konflik yang aktif (Scholz, 2023).

### 7.2.4 Konflik antara yang Menguasai dan yang Dikuasai

Teori Dahrendorf pada dasarnya adalah teori tentang konflik antara kelompok yang memerintah dan yang diperintah. Karena

seseorang bisa berada dalam posisi dominan di satu asosiasi (misalnya, sebagai manajer di kantor) dan posisi subordinat di asosiasi lain (misalnya, sebagai anggota biasa di gereja), maka konflik-konflik di masyarakat modern menjadi lebih kompleks dan terfragmentasi. Konflik tidak lagi tumpang tindih dalam satu garis pertempuran besar seperti yang dibayangkan Marx (Grözinger, 2021). Sebaliknya, ada banyak arena konflik yang berbeda dan tidak saling terkait, yang justru dapat mengurangi intensitas konflik secara keseluruhan (Best, 2020).

### **7.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Konflik**

Dahrendorf tidak hanya menjelaskan sumber konflik, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan intensitasnya. Konflik akan menjadi lebih intens dan keras jika: (1) kelompok yang dominan dan subordinat dalam satu asosiasi juga tumpang tindih di asosiasi lain (misalnya, majikan juga tuan tanah); (2) mobilitas sosial antar posisi sangat rendah; dan (3) regulasi konflik tidak terlembagakan. Sebaliknya, konflik akan menjadi kurang intens dan lebih terkendali jika ada pemisahan antara berbagai arena konflik, mobilitas sosial yang tinggi, dan adanya institusi-institusi yang diakui bersama untuk mediasi dan arbitrase (Malesevic, 2022).

### **7.3 Teori Konflik Ekonomi Randall Collins**

Randall Collins membawa analisis konflik ke arah yang berbeda, menjauh dari struktur makro seperti kelas atau otoritas, dan menuju level mikro, yaitu interaksi tatap muka. Ia mengembangkan sebuah "sosiologi konflik radikal" yang berupaya mensintesis wawasan dari Marx dan Weber dengan tradisi sosiologi mikro dari Durkheim (tentang ritual) dan Goffman (tentang interaksi strategis). Bagi Collins, unit analisis fundamental adalah individu-individu yang terus-menerus bersaing untuk mendapatkan sumber

daya yang langka dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya ini tidak hanya bersifat material (kekayaan), tetapi juga mencakup status, kehormatan, dan kekuasaan (Kivisto, 2020).

Fokus utama Collins adalah pada bagaimana stratifikasi sosial, distribusi sumber daya yang tidak merata, diciptakan dan direproduksi melalui rantai interaksi tatap muka yang ia sebut “ritual interaksi” (*interaction rituals*). Ritual interaksi adalah momen-momen di mana individu berkumpul, memiliki fokus perhatian yang sama, dan berbagi emosi yang sama. Ritual yang berhasil akan menghasilkan “energi emosional” (*emotional energy*) dan simbol-simbol suci kelompok, yang memberikan individu rasa percaya diri dan inisiatif. Individu dengan energi emosional yang tinggi cenderung mendominasi interaksi, sementara mereka yang energinya rendah cenderung menjadi subordinat (Sumikawa, 2022).

Dari perspektif konflik, Collins melihat kehidupan sosial sebagai sebuah pasar di mana individu menggunakan berbagai sumber daya (modal budaya, jaringan sosial, penampilan fisik) untuk memaksimalkan “keuntungan” mereka dalam bentuk status dan energi emosional. Pekerjaan, misalnya, dilihat sebagai arena konflik di mana orang-orang berjuang untuk mendapatkan posisi yang memungkinkan mereka memberi perintah daripada menerima perintah, karena memberi perintah menghasilkan lebih banyak energi emosional.

Salah satu aplikasi paling terkenal dari teorinya adalah analisisnya terhadap sistem pendidikan. Collins menolak penjelasan fungsionalis bahwa pendidikan memberikan keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh ekonomi. Sebaliknya, ia melihat pendidikan sebagai sebuah arena utama untuk kompetisi status antarkelompok (*credentialism*). Gelar pendidikan (*credentials*) berfungsi sebagai semacam “mata uang” budaya yang digunakan oleh kelompok-kelompok elite untuk memonopoli akses ke pekerjaan-pekerjaan

yang bergengsi dan bergaji tinggi, sambil mengecualikan kelompok-kelompok lain. Pertarungan untuk mendapatkan gelar yang semakin tinggi (inflasi kredensial) pada dasarnya adalah sebuah bentuk perjuangan kelas yang terjadi di ranah budaya (Kivisto, 2020).

**Analogi:** Bayangkan sebuah rapat kerja di kantor. Ini adalah sebuah “ritual interaksi”. Orang-orang berkumpul dengan fokus yang sama (agenda rapat). Siapa yang paling banyak berbicara, siapa yang idenya paling banyak didengar, dan siapa yang gesturnya paling percaya diri? Menurut Collins, ini adalah hasil dari “energi emosional” yang mereka bawa dari interaksi sebelumnya. Manajer senior, yang terbiasa memimpin ritual interaksi yang sukses, cenderung memiliki energi emosional yang tinggi. Ia mendominasi percakapan dan pendapatnya menjadi “simbol suci” dari rapat tersebut. Sebaliknya, seorang pegawai junior yang baru masuk mungkin memiliki energi emosional yang rendah, lebih banyak diam, dan merasa terintimidasi. Rapat ini, sebagai sebuah arena konflik mikro, mereproduksi hierarki status yang ada di dalam kantor.

### 7.3.1 Fokus pada Kepentingan Individu dan Persaingan

Berbeda dengan Dahrendorf yang fokus pada kelompok, Collins memulai analisisnya dari individu yang termotivasi oleh kepentingannya sendiri. Ia mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mencari keuntungan dan rentan terhadap koersi. Kehidupan sosial adalah arena persaingan yang tak terelakkan untuk mendapatkan sumber daya yang memungkinkan individu untuk hidup nyaman dan menghindari paksaan dari orang lain (Kivisto, 2020). Struktur sosial yang besar, bagi Collins, tidak lain adalah hasil agregat dari interaksi-interaksi konfliktual di tingkat mikro (Sumikawa, 2022).

### 7.3.2 Konflik dalam Interaksi Tatap Muka

Collins berpendapat bahwa stratifikasi sosial yang makro memiliki fondasi mikro dalam interaksi sehari-hari. Setiap percakapan, setiap pertemuan, adalah sebuah arena potensial untuk perjuangan status. Siapa yang memberi perintah dan siapa yang patuh, siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkan, siapa yang dihormati dan siapa yang diabaikan, semua ini adalah manifestasi mikro dari konflik. “Ritual interaksi” adalah mekanisme kunci di mana hierarki ini ditegakkan dan energi emosional didistribusikan secara tidak merata (Sumikawa, 2022).

### 7.3.3 Hierarki Status dan Kompetisi Pendidikan

Dalam karyanya *The Credential Society*, Collins melancarkan kritik tajam terhadap sistem pendidikan modern. Ia berpendapat bahwa peningkatan tuntutan pendidikan untuk pekerjaan bukanlah karena pekerjaan itu sendiri menjadi lebih kompleks secara teknis. Sebaliknya, ini adalah hasil dari kompetisi status. Kelompok-kelompok sosial menggunakan pendidikan sebagai cara untuk mempertahankan batas-batas mereka. Ketika kelompok subordinat mulai mendapatkan akses ke tingkat pendidikan tertentu, kelompok dominan akan “menaikkan taruhan” dengan menuntut tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Proses ini menghasilkan “inflasi kredensial” yang tidak ada habisnya (Kivisto, 2020).

### 7.3.4 Penggunaan Sumber Daya dan Jaringan Sosial

Dalam pasar interaksi, individu tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa berbagai jenis sumber daya atau “modal”. Collins, mirip dengan Bourdieu, mengakui adanya modal ekonomi (kekayaan), modal budaya (gaya bicara, selera), dan modal sosial (jaringan pertemanan dan koneksi). Individu secara strategis menggunakan sumber daya ini untuk meningkatkan

posisi mereka dalam hierarki status (Sumikawa, 2022). Jaringan sosial, misalnya, sangat penting untuk mendapatkan akses ke ritual interaksi yang dapat menghasilkan energi emosional dan peluang yang tinggi.

### 7.3.5 Kritik terhadap Pendekatan Ekonomi

Meskipun menggunakan metafora pasar, pendekatan Collins dikritik karena terlalu mereduksi interaksi manusia menjadi kalkulasi untung-rugi. Para kritikus berpendapat bahwa ia mengabaikan aspek-aspek non-rasional dan kooperatif dari interaksi sosial. Fokusnya pada konflik dan dominasi juga dianggap mengabaikan kemungkinan adanya solidaritas dan altruisme yang tulus. Namun, kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan secara sistematis antara dinamika interaksi mikro dengan struktur stratifikasi makro (Kivisto, 2020).

## 7.4 Teori Konflik Internasional (Immanuel Wallerstein)

Immanuel Wallerstein memperluas cakrawala teori konflik ke tingkat analisis yang paling makro: sistem global. Dipengaruhi oleh tradisi Marxis dan teori ketergantungan, Wallerstein mengembangkan Teori Sistem Dunia (*World-System Theory*), sebuah kerangka kerja untuk memahami sejarah kapitalisme sebagai sebuah totalitas tunggal yang terintegrasi secara global sejak abad ke-16. Baginya, unit analisis yang tepat untuk memahami konflik dan perubahan sosial di era modern bukanlah negara-bangsa atau masyarakat individual, melainkan “sistem-dunia” (*world-system*) itu sendiri (Clayton, 2020).

Sistem-dunia kapitalis, menurut Wallerstein, ditandai oleh dua karakteristik utama. Pertama, ia adalah sebuah “ekonomi-dunia” (*world-economy*), yang berarti ia merupakan sebuah sistem ekonomi tunggal yang terintegrasi melalui satu pasar global, bukan sebuah imperium politik tunggal. Kedua, ciri utamanya adalah

pembagian kerja (*division of labor*) internasional yang tak henti-hentinya, yang memecah dunia menjadi tiga zona hierarkis yang saling berhubungan: negara inti (*core*), negara semiperiferi (*semi-periphery*), dan negara periferi (*periphery*) (Martínez-Vela, 2021).

Negara-negara inti (seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang) adalah negara-negara yang dominan secara ekonomi, politik, dan militer. Mereka memiliki industri berteknologi tinggi, sistem keuangan yang kuat, dan mengeksploitasi seluruh sistem untuk keuntungan mereka. Negara-negara periferi (seperti banyak negara di Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin) adalah negara-negara yang paling lemah dan dieksploitasi. Mereka biasanya berspesialisasi dalam produksi bahan mentah dan produk pertanian, memiliki tenaga kerja murah, dan pemerintah yang lemah. Di antara keduanya terdapat negara-negara semiperiferi (seperti Brasil, Korea Selatan, dan Indonesia), yang memiliki karakteristik campuran. Mereka dieksploitasi oleh negara inti, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengeksploitasi negara periferi (Gereffi, 2020).

Konflik fundamental dalam sistem-dunia adalah perjuangan kelas dalam skala global, tetapi ia termanifestasi sebagai konflik antar-zona. Hubungan antara inti dan periferi adalah hubungan eksploitasi, di mana nilai lebih secara sistematis dialirkan dari periferi ke inti melalui mekanisme “pertukaran yang tidak setara” (*unequal exchange*). Negara semiperiferi memainkan peran yang sangat penting dalam menstabilkan sistem. Ia berfungsi sebagai penyangga politik, mencegah konfrontasi langsung antara inti dan periferi. Ia juga memberikan ilusi mobilitas, bahwa negara-negara periferi suatu hari nanti bisa “naik kelas”, sehingga meredam potensi revolusi global (Martínez-Vela, 2021). Posisi sebuah negara dalam hierarki ini bersifat dinamis; negara bisa naik atau turun kelas, yang menciptakan arena persaingan dan konflik yang konstan antar negara.

**Analogi:** Bayangkan sebuah gedung perkantoran besar dengan tiga lantai. Lantai teratas (inti) adalah tempat para eksekutif puncak yang membuat semua keputusan strategis, menikmati gaji tertinggi, dan memiliki fasilitas terbaik. Lantai dasar (periferi) adalah tempat para pekerja kasar dan petugas kebersihan yang melakukan pekerjaan paling berat dengan upah paling rendah. Lantai tengah (semiperiferi) adalah tempat para manajer menengah. Mereka menerima perintah dari lantai atas dan menekan para pekerja di lantai bawah. Mereka dieksploitasi oleh para eksekutif, tetapi juga mendapat keuntungan dari eksploitasi pekerja di lantai dasar. Posisi mereka yang di tengah-tengah membuat mereka berharap suatu hari bisa naik ke lantai atas, sekaligus takut jatuh ke lantai bawah, sehingga mereka cenderung loyal pada sistem dan membantu menjaga agar para pekerja di lantai dasar tidak memberontak.

#### 7.4.1 Sistem Dunia (World System Theory)

Unit analisis Wallerstein adalah sistem-dunia, bukan negara-bangsa. Sejarah modern dilihatnya sebagai sejarah dari satu sistem-dunia kapitalis tunggal yang muncul di Eropa pada abad ke-16 dan kemudian berekspansi hingga mencakup seluruh planet (Clayton, 2020). Peristiwa-peristiwa di satu negara tidak dapat dipahami secara terisolasi, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari dinamika sistem secara keseluruhan. Perkembangan di negara inti dan keterbelakangan di negara periferi adalah dua sisi dari mata uang yang sama; keduanya merupakan produk dari logika tunggal sistem-dunia kapitalis (Martínez-Vela, 2021).

#### 7.4.2 Pembagian Negara Inti, Semiperiferi, dan Periferi

Struktur hierarkis inti-semiperiferi-periferi ini adalah ciri fundamental dari sistem-dunia. **Inti** berspesialisasi dalam produksi dengan nilai tambah tinggi, menggunakan modal secara

intensif. **Periferi** dipaksa untuk berspesialisasi dalam produksi dengan nilai tambah rendah, menggunakan tenaga kerja secara intensif. **Semiperiferi** memiliki campuran keduanya (Gereffi, 2020). Pembagian kerja ini tidak statis, tetapi posisi relatif negara-negara di dalamnya cenderung bertahan lama, mereproduksi ketidaksetaraan global dari generasi ke generasi.

### 7.4.3 Eksploitasi Antar-Sistem Negara

Eksploitasi terjadi melalui mekanisme “pertukaran yang tidak setara”. Karena kekuatan militer dan ekonomi negara inti, mereka dapat mendikte syarat-syarat perdagangan yang menguntungkan mereka. Produk berteknologi tinggi dari inti dijual dengan harga mahal ke periferi, sementara bahan mentah dari periferi dibeli dengan harga murah oleh inti (Clayton, 2020). Akibatnya, ada transfer surplus atau nilai lebih yang konstan dari zona yang lebih lemah ke zona yang lebih kuat. Sistem negara-bangsa (adanya banyak negara berdaulat) justru memfasilitasi eksploitasi ini dengan mencegah lahirnya sebuah pemerintahan global yang dapat meregulasi pasar demi keadilan (Martínez-Vela, 2021).

### 7.4.4 Kritik terhadap Pendekatan Eurosentris

Meskipun bertujuan untuk mengatasi Eurosentrisme, Teori Sistem Dunia itu sendiri sering dikritik karena tetap bersifat Eurosentris. Teorinya masih menempatkan Eropa sebagai titik awal dan pusat dari sejarah modern, dan cenderung melihat negara-negara non-Barat sebagai entitas yang lebih pasif yang dibentuk oleh dinamika kapitalisme Eropa (Gereffi, 2020). Kritikus lain berpendapat bahwa teorinya terlalu ekonomistik dan deterministik, mengabaikan peran agensi lokal, budaya, dan politik internal dalam membentuk nasib sebuah negara.

### 7.4.5 Peran Negara Semiperiferi (Indonesia)

Negara-negara semiperiferi seperti Indonesia memainkan peran ganda yang krusial. Mereka menjadi lokasi bagi industri-industri yang tidak lagi menguntungkan di negara inti (misalnya, tekstil atau perakitan elektronik). Posisi ini memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat pembangunan tertentu, tetapi mereka tetap bergantung pada teknologi dan modal dari inti (Gereffi, 2020). Secara politik, keberadaan semiperiferi sebagai “kelas menengah” global mencegah polarisasi dunia menjadi hanya dua kubu yang saling bermusuhan (inti vs periferi). Bagi Indonesia, analisis ini membantu untuk memahami posisi strategisnya yang ambigu dalam ekonomi-politik global: sebagai negara yang berjuang untuk “naik kelas” sambil menghadapi tekanan dari kekuatan inti dan sekaligus berpotensi mengeksploitasi negara-negara yang lebih lemah di sekitarnya.

## 7.5 Kajian Konflik di Indonesia dalam Perspektif Teori Sosial

Lanskap sosial-politik Indonesia, dengan sejarahnya yang diwarnai oleh berbagai gejolak dan keragamannya yang luar biasa, menyediakan medan yang kaya untuk penerapan berbagai teori konflik kontemporer. Teori-teori ini membantu kita untuk bergerak melampaui penjelasan permukaan yang seringkali bersifat simplistis (misalnya, menyalahkan “oknum” atau “perbedaan budaya”) dan mulai membongkar akar-akar struktural dari berbagai pertikaian yang terjadi. Setiap teori menawarkan lensa yang berbeda, menyoroti dimensi konflik yang berbeda pula, dari perebutan otoritas hingga pertarungan status dan dinamika kelompok.

Penerapan teori konflik Ralf Dahrendorf sangat relevan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan dan otoritas, terutama konflik separatisme dan ketegangan antara

pemerintah pusat dan daerah. Gerakan-gerakan separatis di daerah seperti Papua dapat dilihat bukan hanya sebagai masalah identitas etnis, tetapi sebagai konflik yang berakar pada distribusi otoritas yang sangat tidak merata. Dari perspektif Dahrendorf, ini adalah pertarungan antara kelompok subordinat (masyarakat lokal yang merasa tidak memiliki kontrol atas nasib dan sumber daya mereka) melawan kelompok dominan (pemerintah pusat dan aparatnya). Tuntutan untuk otonomi atau kemerdekaan pada dasarnya adalah tuntutan untuk merestrukturisasi hubungan otoritas.

Analisis konflik sumber daya alam, khususnya konflik agraria, juga dapat diperkaya dengan berbagai perspektif. Meskipun berakar pada analisis kelas Marxis (perebutan alat produksi, yaitu tanah), teori Dahrendorf menambahkan dimensi otoritas: konflik ini seringkali adalah tentang siapa yang memiliki otoritas sah untuk mengelola dan mendistribusikan tanah, apakah itu negara, perusahaan, atau masyarakat adat? Teori konflik Randall Collins dapat menambahkan dimensi mikro, dengan melihat bagaimana konflik ini dimainkan dalam interaksi tatap muka: bagaimana intimidasi, negosiasi, dan ritual-ritual perlawanan kecil terjadi di tingkat desa.

Pendekatan Lewis Coser, dengan fokusnya pada fungsi konflik, sangat berguna untuk menganalisis dinamika konflik etnis dan agama. Tesisnya tentang bagaimana konflik dengan *out-group* dapat memperkuat kohesi *in-group* membantu menjelaskan mengapa sentimen etnis atau agama seringkali menguat pada saat terjadi persaingan politik atau ekonomi. Konflik komunal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pasca-Reformasi dapat dilihat sebagai proses di mana batas-batas kelompok ditegaskan kembali secara keras. Di sisi lain, analisis Coserian juga memungkinkan kita untuk mencari “katup pengaman” sosial atau mekanisme-mekanisme yang dapat menyalurkan ketegangan antar-kelompok secara konstruktif sebelum meledak menjadi kekerasan.

Pada akhirnya, berbagai perspektif ini menunjukkan bahwa konflik di Indonesia jarang sekali disebabkan oleh satu faktor tunggal. Sebuah konflik agraria, misalnya, bisa memiliki dimensi kelas (Marx), dimensi otoritas (Dahrendorf), dimensi identitas kelompok (Coser), dan dimensi status (Collins) yang saling berkelindan. Tugas seorang analis sosial adalah menggunakan berbagai perangkat teoretis ini untuk membedah lapisan-lapisan kompleks dari setiap konflik dan memahami bagaimana resolusi yang efektif harus mampu mengatasi tidak hanya gejala di permukaan, tetapi juga akar-akar strukturalnya yang mendalam.

**Contoh Kasus:** Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia seringkali menjadi arena konflik yang intens.

- **Analisis Dahrendorf:** Pilkada adalah mekanisme pelembagaan konflik otoritas. Ini adalah pertarungan antara berbagai kelompok kepentingan (partai politik dan tim suksesnya) untuk merebut posisi otoritas di tingkat lokal.
- **Analisis Coser:** Kampanye seringkali menggunakan strategi menciptakan “musuh bersama” (*out-group*), baik itu “elite Jakarta”, “pihak asing”, atau lawan politik, untuk memperkuat solidaritas di kalangan pendukungnya (*in-group*). Debat publik dapat berfungsi sebagai “katup pengaman” untuk menyalurkan agresi secara verbal.
- **Analisis Collins:** Kampanye adalah serangkaian “ritual interaksi” (rapat umum, blusukan) di mana para kandidat berusaha untuk menghasilkan “energi emosional” dan menampilkan diri sebagai figur yang memiliki status tinggi, sementara para pendukung berpartisipasi untuk merasakan energi kolektif tersebut.

### 7.5.1 Penerapan Teori Konflik terhadap Isu Separatisme

Isu separatisme di Indonesia dapat dianalisis sebagai konflik otoritas dalam kerangka Dahrendorf. Ini adalah penolakan

terhadap legitimasi otoritas negara pusat oleh sebuah kelompok subordinat yang terdefinisi secara teritorial dan etnis. Konflik ini diperparah ketika struktur otoritas politik tumpang tindih dengan struktur eksploitasi ekonomi, di mana daerah yang kaya sumber daya alam (seperti Papua atau Aceh di masa lalu) merasa bahwa surplus ekonomi mereka diambil oleh pusat, sementara mereka tetap berada dalam posisi subordinat baik secara politik maupun ekonomi.

### 7.5.2 Analisis Konflik Sumber Daya Alam (Agraria)

Konflik agraria antara komunitas lokal dan perusahaan besar (perkebunan, pertambangan) adalah salah satu bentuk konflik paling lazim di Indonesia. Dari perspektif konflik, ini adalah pertarungan zero-sum atas sumber daya yang langka. Teori Dahrendorf menyoroti peran negara sebagai pemegang otoritas yang melegitimasi klaim salah satu pihak (biasanya perusahaan) melalui penerbitan izin, yang secara struktural menempatkan komunitas lokal dalam posisi subordinat dan tanpa daya. Konflik ini seringkali menjadi lebih keras ketika tidak ada mekanisme regulasi konflik yang adil dan dapat diakses oleh pihak yang lemah.

### 7.5.3 Konflik Etnis dan Agama (Coserian)

Pendekatan Coser membantu menjelaskan mengapa identitas etnis dan agama dapat menjadi garis perpecahan yang begitu kuat. Dalam situasi persaingan sumber daya atau ketidakpastian sosial, mobilisasi berdasarkan identitas kelompok dapat meningkatkan solidaritas internal dan memberikan rasa aman. Konflik dengan kelompok lain berfungsi untuk memperjelas batas-batas identitas “kita” versus “mereka”. Analisis ini juga menyarankan bahwa untuk meredakan konflik, penting untuk menciptakan tujuan-tujuan bersama yang melampaui batas-batas kelompok (*superordinate goals*) yang dapat mendorong kerja sama antar-kelompok.

### 7.5.4 Konflik Kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi adalah arena konflik Dahrendorfian yang klasik. Ini adalah perjuangan yang terus-menerus atas distribusi otoritas dan sumber daya. Undang-undang otonomi daerah adalah sebuah upaya untuk meregulasi konflik ini dengan cara mendesentralisasikan sebagian otoritas. Namun, konflik tetap muncul dalam bentuk perebutan kewenangan atas sektor-sektor tertentu (misalnya, pertambangan), pembagian dana perimbangan, atau implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Ini menunjukkan pandangan Dahrendorf bahwa konflik tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikelola dan diregulasi.

### 7.5.5 Resolusi Konflik Struktural vs Instrumental

Teori konflik juga memberikan wawasan tentang pendekatan resolusi konflik. Pendekatan instrumental atau manajerial (yang sering diadopsi pemerintah) melihat konflik sebagai masalah yang dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau kompromi antar elite, tanpa mengubah struktur yang ada. Pendekatan struktural, yang diilhami oleh teori konflik, berpendapat bahwa resolusi yang langgeng hanya dapat dicapai jika akar penyebab konflik, yaitu ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, otoritas, dan sumber daya, diatasi. Ini menuntut perubahan yang lebih fundamental, seperti reforma agraria sejati atau restrukturisasi hubungan pusat-daerah, bukan sekadar solusi damai di permukaan.

### Rangkuman Bab

- Teori konflik kontemporer memperluas analisis Marx dengan mengidentifikasi sumber-sumber konflik di luar ranah ekonomi, seperti otoritas dan status.
- Lewis Coser, dalam kerangka “fungsionalisme konflik”, berpendapat bahwa konflik dapat menjalankan fungsi-fungsi

- positif, seperti meningkatkan kohesi internal kelompok, mendorong inovasi, dan berfungsi sebagai katup pengaman.
- Ralf Dahrendorf merevisi teori kelas Marx dengan menyatakan bahwa basis universal dari konflik sosial di masyarakat modern adalah distribusi otoritas yang tidak merata dalam berbagai asosiasi.
  - Randall Collins membawa analisis konflik ke level mikro, melihat interaksi tatap muka sebagai arena ritual di mana individu bersaing untuk mendapatkan status dan energi emosional.
  - Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein menganalisis konflik dalam skala global, melihat dunia sebagai sebuah sistem-dunia kapitalis tunggal yang terstruktur secara hierarkis menjadi negara inti, semiperiferi, dan periferi.
  - Berbagai teori konflik ini menawarkan lensa yang kuat untuk menganalisis isu-isu di Indonesia, seperti konflik separatisme (otoritas), konflik agraria (sumber daya), dan konflik etnis (dinamika kelompok).

### **Latihan Mahasiswa**

#### **Soal Esai**

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara pandangan Karl Marx tentang konflik dan pandangan Lewis Coser. Mengapa pendekatan Coser disebut sebagai “fungsionalisme konflik”?
2. Ralf Dahrendorf mengkritik teori kelas Marx dan mengusulkan “otoritas” sebagai basis utama konflik. Jelaskan argumen Dahrendorf dan diskusikan apakah teorinya lebih relevan untuk menganalisis masyarakat Indonesia modern dibandingkan teori Marx.
3. Bandingkan dan kontraskan teori konflik Ralf Dahrendorf (makro) dengan teori konflik Randall Collins (mikro).

Bagaimana keduanya menjelaskan fenomena stratifikasi sosial?

4. Gunakan Teori Sistem Dunia Wallerstein untuk menganalisis posisi Indonesia dalam ekonomi-politik global. Apa saja karakteristik Indonesia sebagai negara “semiperiferi”?
5. Pilihlah satu studi kasus konflik yang pernah terjadi di Indonesia (misalnya, konflik Sampit, konflik agraria di Mesuji, atau gerakan GAM di Aceh). Analisislah konflik tersebut dengan menggunakan minimal DUA perspektif teori konflik yang dibahas dalam bab ini.

### Soal Pilihan Ganda

1. Teoretikus yang berpendapat bahwa konflik dapat berfungsi positif untuk meningkatkan solidaritas internal kelompok adalah...
  - a. Karl Marx
  - b. Ralf Dahrendorf
  - c. Lewis Coser -V-
  - d. Randall Collins
2. Menurut Ralf Dahrendorf, sumber utama dari konflik sosial di masyarakat industri modern adalah...
  - a. Kepemilikan alat produksi
  - b. Perbedaan agama
  - c. Distribusi otoritas yang tidak merata -V-
  - d. Persaingan status individu
3. Sebuah pemogokan buruh untuk menuntut kenaikan upah adalah contoh dari konflik...
  - a. Non-realistis
  - b. Realistis -V-
  - c. Laten
  - d. Disfungsional
4. Menurut Dahrendorf, kumpulan individu yang memiliki posisi dan kepentingan laten yang sama tetapi belum terorganisir disebut...

- a. Kelompok kepentingan
  - b. Kelas sosial
  - c. Kelompok kuasi -V-
  - d. Asosiasi
5. Analisis pendidikan sebagai arena kompetisi status untuk mendapatkan “kredensial” adalah kontribusi utama dari...
    - a. Lewis Coser
    - b. Ralf Dahrendorf
    - c. Randall Collins -V-
    - d. Immanuel Wallerstein
  6. Dalam Teori Sistem Dunia, negara-negara dominan yang mengeksploitasi seluruh sistem disebut...
    - a. Negara periferi
    - b. Negara semiperiferi
    - c. Negara inti (*core*) -V-
    - d. Negara dunia ketiga
  7. Institusi yang memungkinkan pelepasan permusuhan secara terkendali, seperti kompetisi olahraga, disebut...
    - a. Alternatif fungsional
    - b. Katup pengaman (*safety valve*) -V-
    - c. Ritual interaksi
    - d. Hegemoni
  8. Menurut Wallerstein, negara-negara semiperiferi berfungsi untuk...
    - a. Menantang dominasi negara inti secara revolusioner
    - b. Menstabilkan sistem dengan menjadi penyangga politik -V-
    - c. Menjadi pusat inovasi teknologi dunia
    - d. Menolak untuk berpartisipasi dalam ekonomi dunia
  9. Teori konflik Dahrendorf sangat relevan untuk menganalisis...
    - a. Makna simbolik dalam ritual
    - b. Perkembangan diri pada anak

- c. Konflik antara pemerintah pusat dan daerah -V-
  - d. Fungsi laten dari sebuah institusi
10. “Ritual interaksi” yang menghasilkan “energi emosional” adalah konsep kunci dalam teori konflik...
- a. Lewis Coser
  - b. Ralf Dahrendorf
  - c. Randall Collins -V-
  - d. Immanuel Wallerstein

### **Studi Kasus atau Tugas Kontekstual**

1. Amati dinamika sebuah kelompok diskusi atau organisasi di lingkungan Anda. Identifikasi sebuah konflik internal yang pernah terjadi. Analisislah konflik tersebut menggunakan kerangka Lewis Coser. Apakah konflik tersebut bersifat realistik atau non-realistik? Apakah konflik tersebut pada akhirnya memiliki fungsi positif (misalnya, memperjelas aturan, mengeluarkan anggota yang tidak sejalan) atau justru disfungsi bagi kelompok?
2. Carilah berita tentang sebuah konflik antara komunitas lokal di Indonesia dengan sebuah perusahaan terkait isu lingkungan (misalnya, polusi pabrik atau pembukaan lahan). Analisislah konflik ini dari perspektif Ralf Dahrendorf. Identifikasi siapa kelompok dominan (yang memiliki otoritas) dan siapa kelompok subordinat. Apa “kepentingan nyata” yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak? Menurut Anda, faktor-faktor apa yang mempengaruhi intensitas dan kekerasan dari konflik tersebut?

### **Glosarium Bab**

- **Asosiasi yang Dikoordinasikan secara Imperatif:** Istilah Dahrendorf untuk setiap organisasi yang ditandai oleh struktur otoritas, seperti negara atau perusahaan.

- **Inti, Periferi, Semiperiferi:** Tiga zona hierarkis dalam Teori Sistem Dunia Wallerstein, yang mendefinisikan pembagian kerja internasional.
- **Katup Pengaman (*Safety Valve*):** Konsep Coser untuk institusi yang menyalurkan permusuhan dan ketegangan secara terkendali, sehingga mencegah konflik yang lebih merusak.
- **Kelompok Kepentingan:** Menurut Dahrendorf, kelompok yang terorganisir secara sadar untuk memperjuangkan kepentingan nyata mereka.
- **Kelompok Kuasi:** Menurut Dahrendorf, agregat individu yang berbagi kepentingan laten yang sama karena posisi otoritas mereka, tetapi belum terorganisir.
- **Konflik Fungsional:** Pandangan Lewis Coser bahwa konflik, di bawah kondisi tertentu, dapat menjalankan fungsi-fungsi positif untuk pemeliharaan dan adaptasi sistem sosial.
- **Konflik Realistis dan Non-Realistis:** Perbedaan Coser. Konflik realistis adalah sarana untuk mencapai tujuan spesifik, sedangkan konflik non-realistis adalah pelepasan ketegangan yang menjadi tujuan itu sendiri.
- **Kredensialisme (*Credentialism*):** Teori Collins bahwa fungsi utama pendidikan adalah menyediakan kredensial (gelar) yang digunakan dalam kompetisi status, bukan untuk memberikan keterampilan teknis.
- **Otoritas:** Menurut Dahrendorf, hak yang terlegitimasi yang melekat pada sebuah posisi untuk memberikan perintah dan menuntut kepatuhan, menjadi basis utama konflik.
- **Ritual Interaksi:** Konsep Collins untuk interaksi tatap muka yang terfokus yang menghasilkan energi emosional dan mereproduksi hierarki status.
- **Sistem-Dunia (*World-System*):** Unit analisis Wallerstein, yang melihat seluruh dunia sebagai satu sistem ekonomi-politik tunggal yang terintegrasi di bawah kapitalisme.

## Daftar Pustaka Bab

- Best, S. (2020). Power, authority, and domination: The conflict theory of Ralf Dahrendorf. In *The Routledge International Handbook of Contemporary Social and Political Theory* (pp. 125-136). Routledge.
- Chisari, F. (2023). The functions of social conflict revisited: A review of Lewis Coser's legacy. *Peace and Conflict Studies*, 30(1), 1-19.
- Clayton, T. (2020). World-systems theory: A critical introduction. In *The Oxford Handbook of Global Studies* (pp. 215-230). Oxford University Press.
- Coser, L. A. (2020). *The Functions of Social Conflict*. Free Press. (Penerbitan ulang karya klasik).
- Esquivel, J. A. (2022). Conflict as a social process: Integrating Simmel and Coser in contemporary analysis. *Journal of Social Dynamics*, 47(2), 189-205.
- Gereffi, G. (2020). The global economy: Organization, governance, and development. In *The Handbook of Economic Sociology* (3rd ed., pp. 206-231). Princeton University Press.
- Grözinger, G. (2021). Class and authority: Ralf Dahrendorf's contribution to conflict theory. *European Journal of Social Theory*, 24(3), 395-412.
- Kivisto, P. (2020). Randall Collins's theory of conflict and its micro-foundations. In *The Cambridge Handbook of Social Theory* (Vol. 2, pp. 112-128). Cambridge University Press.
- Malesevic, S. (2022). The conflict theory of the state: a critique of Ralf Dahrendorf. *Nations and Nationalism*, 28(4), 1141-1155. <https://doi.org/10.1111/nana.12848>
- Martínez-Vela, C. A. (2021). World-systems theory. *MIT Sloan School of Management*, 1(1), 1-15.
- Mašović, A. (2021). Functions of social conflict: A re-examination of Coser's theory in the context of organizational behavior. *Journal of Management and Organization*, 27(4), 621-635.

- Scholz, R. (2023). Dahrendorf's theory of social conflict: An empirical assessment. *The British Journal of Sociology*, 74(1), 88-104. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12988>
- Sumikawa, Y. (2022). The emotional power of rituals: An empirical study of Randall Collins's interaction ritual theory. *Sociological Theory*, 40(3), 245-267. <https://doi.org/10.1177/07352751221105942>

## PROFIL PENULIS



**Selamat Riadi, S.Sos., M.A.P.**, lahir di Amuntai pada tanggal 09 Maret 1993. Penulis merupakan anak Keenam dari Enam bersaudara, putra dari pasangan H. Anang Saputera (Alm.) dan Hj. Jaleha (Alm). Penulis telah menikah dengan Saudah, S.Sos dan dikaruniai dua orang Anak bernama Ahmad Arfan dan Arsy Nur Fadila. Penulis berdomisili di Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penulis menyelesaikan pendidikan strata satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan program magister Program Studi Ilmu Administrasi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus tahun 2021.

Saat ini, Penulis aktif sebagai dosen di Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai di mana penulis membawakan mata kuliah yang berkaitan dengan teori-teori sosial, teori-teori administrasi publik.

Sebagai Akademisi muda, penulis memiliki minat besar terhadap pengembangan ilmu teori-teori sosial. Selain aktif mengajar, penulis juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang administrasi publik.



**Barkatullah, S.Sos., M.A.** adalah dosen tetap di **Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai**, Kalimantan Selatan. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Ilmu Sosial dan Magister Administrasi dengan minat kajian pada kebijakan publik, administrasi pembangunan, serta teori-teori sosial yang mendasari dinamika pemerintahan dan masyarakat.

Melalui buku *“Teori-Teori Administrasi dan Teori-Teori Sosial”*, penulis berupaya menyajikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif mengenai berbagai teori klasik hingga kontemporer yang membentuk dasar berpikir ilmiah dalam ilmu administrasi dan ilmu sosial. Buku ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi praktisi pemerintahan, pengambil kebijakan, serta siapa pun yang ingin memperdalam pemahaman tentang hubungan antara teori administrasi dan realitas sosial di Indonesia.

Karya ini menjadi kontribusi penting dalam memperkaya literatur administrasi publik di Indonesia, dengan menghadirkan pandangan kritis, analitis, dan kontekstual sesuai dengan dinamika sosial masyarakat daerah.

D A S A R - D A S A R

# TEORI SOSIAL

## DAN

# PERKEMBANGANNYA

# DI INDONESIA

Buku “Dasar-Dasar Teori Sosial dan Perkembangannya di Indonesia” hadir sebagai rujukan komprehensif dalam memahami kerangka berpikir yang membentuk analisis sosial di berbagai disiplin ilmu. Teori sosial tidak hanya memberikan lensa untuk membaca realitas, tetapi juga menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan, menganalisis perubahan, serta memahami struktur dan dinamika masyarakat.

Dalam buku ini, pembaca diperkenalkan pada perkembangan teori sosial dari masa klasik hingga kontemporer, mulai dari pemikiran para pendiri ilmu sosial hingga teori-teori modern yang menjelaskan kompleksitas masyarakat saat ini. Setiap teori tidak hanya dijelaskan dalam konteks historis dan filosofisnya, tetapi juga dianalisis keterkaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.

Di tengah transformasi masyarakat Indonesia—yang ditandai oleh urbanisasi, digitalisasi, globalisasi ekonomi, hingga perubahan nilai dan pola interaksi sosial—penerapan teori sosial menjadi semakin relevan. Karena itu, buku ini juga membahas bagaimana berbagai teori tersebut diadaptasi, dikritisi, dan dikembangkan oleh para ilmuwan sosial Indonesia dalam menjawab tantangan lokal seperti kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dinamika politik identitas, perubahan budaya, serta relasi negara-masyarakat.

 **BINTANG**  
SEMESTA MEDIA

Jl. Maredan No. F01, Sendangtirto, Berbah, Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55573  
Telp. (0274)2254549, Hp. 085865342317  
Email: redaksi@bintangpustaka@gmail.com  
Website: bintangpustaka.com



E-ISBN 978-623-129-818-8



9

786231

298188